



## BUPATI SERANG

### **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Nomor : 900.1.15.1/ *439* /BPKAD/2026

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari :

- 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- 3). Neraca per 31 Desember 2025;
- 4). Laporan Operasional (LO);
- 5). Laporan Arus Kas (LAK);
- 6). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7). Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Serang, Mei 2026

BUPATI SERANG,

Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 900.1.15.1/440/BPKAD/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Representasi Manajemen**

Serang, Mei 2026

Kepada :  
Yth. Kepala Perwakilan BPK  
Provinsi Banten  
di -  
S e r a n g

Surat Representasi Manajemen ini kami sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami disajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Serang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Serang telah memenuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

**BUPATI SERANG**  
  
**Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO</b> .....	<b>5</b>
2.1. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Serang .....	5
2.2. Kebijakan Keuangan Daerah .....	16
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Pokok Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Serang .....	21
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b> .....	<b>24</b>
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	24
3.2. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja .....	31
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	<b>32</b>
4.1. Entitas Akuntansi .....	33
4.2. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	34
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b> .....	<b>67</b>
5.1. Pendapatan .....	67
5.2. Belanja .....	79
5.3. Transfer .....	93
5.4. Pembiayaan .....	94
5.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	95
5.6. Saldo Anggaran Lebih.....	95
5.7. Aset .....	96
5.8. Kewajiban .....	191
5.9. Ekuitas.....	214
5.10. Pendapatan .....	215
5.11. Beban .....	223
5.12. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	228
5.13. Pos Luar Biasa.....	228
5.14. Surplus/Defisit LO .....	228
5.15. Laporan Arus Kas.....	228
5.16. Laporan Perubahan Ekuitas .....	231
<b>BAB VI PENGUNGKAPAN LAIN</b> .....	<b>239</b>



6.1.	Gambaran Umum Kabupaten Serang .....	239
6.2.	Aset Dalam Sengketa .....	239
6.3.	Peningkatan Jalan Desa .....	242
6.4.	Penggunaan Aplikasi Pada Tahun 2024 .....	242
6.5.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) .....	243
6.6.	Tanah hasil sita tindak pidana korupsi.....	245
6.7.	Pengungkapan aset LKM Ciomas .....	245
6.8.	Pengungkapan PT Serang Berkah Mandiri.....	246

<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>247</b>
-----------------------------	------------

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang, 2020-2024 .....	5
Tabel 2	Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kelamin Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang 2024 .....	5
Tabel 3	Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan Dasar dan Jumlah Murid SD dan SMP di Kabupaten Serang .....	6
Tabel 4	Perkembangan Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Serang .....	8
Tabel 5	Gini Ratio Kabupaten Serang .....	8
Tabel 6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Serang .....	10
Tabel 7	Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang .....	12
Tabel 8	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 .....	14
Tabel 9	Laju Pertumbuhan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Tahun 2020-2024 .....	15
Tabel 10	APBD setelah Perubahan Kabupaten Serang 2025 .....	21
Tabel 11	Indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2025 .....	22
Tabel 12	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Serang TA 2025 .....	25
Tabel 13	Perkembangan PAD dari TA 2021 s.d. 2025 .....	26
Tabel 14	Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2021 s.d. 2025 .....	26
Tabel 15	Rincian SiLPA TA 2025 .....	28
Tabel 16	Utang Belanja Per 31 Desember Tahun 2025 .....	28
Tabel 17	Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan Utang Belanja ..	29
Tabel 18	Alokasi Belanja Per SKPD TA 2025 .....	29
Tabel 19	Rincian SKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 .....	33
Tabel 20	Masa Manfaat Barang Milik Daerah Berupa Aset Tidak Berwujud ....	55
Tabel 21	Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2025 dan 2024 .....	67
Tabel 22	Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 .....	68
Tabel 23	Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 .....	70
Tabel 24	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 .....	71
Tabel 25	Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2025 Dan 2024 .....	72
Tabel 26	Pendapatan Transfer TA 2025 Dan 2024 .....	73
Tabel 27	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 Dan 2024 .....	74
Tabel 28	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 Dan 2024 .....	75
Tabel 29	Dana Alokasi Umum TA 2025 .....	75
Tabel 30	Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024 .....	76
Tabel 31	Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2025 .....	76
Tabel 32	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 Dan 2024 .....	77
Tabel 33	Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024 .....	78
Tabel 34	Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun 2025 .....	78
Tabel 35	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 .....	79
Tabel 36	Rincian Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri .....	79
Tabel 37	Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan SAP TA 2025 .....	80
Tabel 38	Realisasi Mandatory Spending Berdasarkan Tahun 2025 .....	80
Tabel 39	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2025 Dan 2024 .....	81
Tabel 40	Rincian Anggaran Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025 Dan 2024 .....	81



Tabel 41	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024.....	83
Tabel 42	Rincian Anggaran Belanja Barang Dan Jasa TA 2025 .....	84
Tabel 43	Belanja Hibah.....	85
Tabel 44	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 .....	87
Tabel 45	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025.....	87
Tabel 46	Belanja Modal Per Jenis Per SKPD TA 2025.....	87
Tabel 47	Rincian Belanja Modal Tanah Berdasarkan Jenis TA 2025.....	90
Tabel 48	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis TA 2025 .....	90
Tabel 49	Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan Jenis TA 2025 .....	91
Tabel 50	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenis TA 2025 .....	92
Tabel 51	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025.....	92
Tabel 52	Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025.....	93
Tabel 53	Rincian Transfer Tahun 2025.....	93
Tabel 54	Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.....	94
Tabel 55	Pembiayaan TA 2025 Dan 2024.....	94
Tabel 56	SiLPA TA 2025.....	95
Tabel 57	Saldo Akhir Kas 2025 .....	96
Tabel 58	Rincian Dana Kegiatan yang dianggarkan kembali per SKPD ditahun 2025.....	96
Tabel 59	Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 .....	97
Tabel 60	Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 .....	97
Tabel 61	Rincian Sisa DAK .....	98
Tabel 62	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labrikes per 31 Desember 2025.....	99
Tabel 63	Kas Dana BOSP .....	100
Tabel 64	Kas Dana BOK.....	100
Tabel 65	Daftar Piutang Pendapatan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 ...	101
Tabel 66	Piutang RSUD.....	102
Tabel 67	Piutang DPUPR.....	104
Tabel 68	Daftar Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	105
Tabel 69	Piutang Dinas Kesehatan .....	106
Tabel 70	Piutang RSUD.....	107
Tabel 71	Rincian Piutang Denda Pajak .....	108
Tabel 72	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2025 .....	109
Tabel 73	Rincian Mutasi Bagian Lancar TGR .....	110
Tabel 74	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 ....	110
Tabel 75	Aging Schedule Piutang RSUD.....	111
Tabel 76	Aging Schedule Piutang DPUPR .....	111
Tabel 77	Aging Schedule Piutang SETDA .....	111
Tabel 78	Aging Schedule Piutang Pajak .....	112
Tabel 79	Aging Schedule Piutang Denda Pajak .....	112
Tabel 80	Aging Schedule Piutang TP TGR.....	113
Tabel 81	Rincian Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024.....	113
Tabel 82	Ringkasan Kontrak Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 ....	114
Tabel 83	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	115
Tabel 84	Rincian Persediaan Per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024.....	116
Tabel 85	Daftar Persediaan Kadaluarasa ( <i>Expired</i> ) pada RSUD.....	118
Tabel 86	Daftar Persediaan Obat Kadaluarasa ( <i>Expired</i> ) pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.....	118



Tabel 87 Daftar Persediaan Rusak pada DPUPR .....	118
Tabel 88 Penerimaan Hibah Obat Ke RSUD.....	119
Tabel 89 Rincian Persediaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat .....	123
Tabel 90 Nilai Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024.....	125
Tabel 91 Saldo Aset Tetap tiap KIB per 31 Desember 2025 dan 2024 .....	128
Tabel 92 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025 .....	128
Tabel 93 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah 2025 .....	129
Tabel 94 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2025 .....	132
Tabel 95 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 2025 .....	139
Tabel 96 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025 .....	142
Tabel 97 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2025 .....	144
Tabel 98 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 2025 .....	145
Tabel 99 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan 2025 .....	146
Tabel 100 Daftar Akumulasi Penyusutan Per SKPD 2025 .....	147
Tabel 101 Objek Tanah yang Tersertifikasi pada Tahun 2025 .....	149
Tabel 102 Rincian Kendaraan Bermotor Pinjam Pakai Aktif.....	174
Tabel 103 Kendaraan Pinjam Pakai Masa Habis/Dalam Proses Perpanjangan...	174
Tabel 104 Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 .....	175
Tabel 105 Mutasi Aset Lainnya .....	175
Tabel 106 Kemitraan dengan Pihak Ketiga per SKPD 2025 .....	176
Tabel 107 Aset Tak Berwujud per SKPD 2025 dan 2024 .....	178
Tabel 108 Amortisasi Aset Tak Berwujud Per SKPD 2025 dan 2024.....	181
Tabel 109 Aset Lain-Lain Per SKPD 2025 dan 2024.....	183
Tabel 110 Daftar Konsinyasi Tanah Tahun 2025 .....	185
Tabel 111 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD .....	188
Tabel 112 Rincian Properti Investasi.....	191
Tabel 113 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024.....	192
Tabel 114 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka .....	192
Tabel 115 Rincian Utang Belanja Tahun 2025 per SKPD.....	193
Tabel 116 Rincian Utang dan Dasar Pengakuan/Nomor Kontrak .....	194
Tabel 117 Pendapatan LO Tahun 2025 dan 2024.....	215
Tabel 118 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 .....	216
Tabel 119 Rincian Perbandingan Pendapatan Pajak LO dengan Pendapatan Pajak LRA.....	217
Tabel 120 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025.....	217
Tabel 121 Rincian Perbandingan Pendapatan Retribusi LO dengan Pendapatan Retribusi LRA .....	218
Tabel 122 Rincian Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2025.....	218
Tabel 123 Rincian Lain-lain PAD yang SAH 2025.....	219
Tabel 124 Rincian Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LO dengan Lain-lain PAD yang Sah LRA .....	219
Tabel 125 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024 .....	220
Tabel 126 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan 2024 .....	221
Tabel 127 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan 2024.....	221
Tabel 128 Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA .....	221
Tabel 129 Rincian Pendapatan Hibah LO Tahun 2025 .....	222
Tabel 130 Rincian Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA.....	222
Tabel 131 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 .....	223



Tabel 132 Rincian Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai.....	224
Tabel 133 Rincian Barang dan Jasa Tahun 2025.....	224
Tabel 134 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa .....	225
Tabel 135 Rincian Beban Hibah Tahun 2025.....	226
Tabel 136 Rincian Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah .....	226
Tabel 137 Rincian Perbandingan Beban Bantuan Sosial.....	226
Tabel 138 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025 .....	227
Tabel 139 Beban Penyisihan Piutang Per SKPD.....	227
Tabel 140 Rincian Beban Transfer.....	227
Tabel 141 Rincian BTT Tahun 2025.....	228
Tabel 142 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	229
Tabel 143 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi .....	230
Tabel 144 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris .....	231
Tabel 145 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD.....	231
Tabel 146 Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 dan 2024.....	232
Tabel 147 Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain .....	232
Tabel 148 Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain berdasarkan rekening yang dikoreksi .....	235



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Dimensi Angka Harapan Hidup Kabupaten Serang, 2020-2024 .....	10
Grafik 2 Dimensi Pendidikan Kabupaten Serang tahun 2020-2024 .....	11
Grafik 3 Dimensi Standard Hidup Layak Kabupaten Serang tahun 2020-2024 ..	11
Grafik 4 Jumlah Presentasi Penduduk Miskin, Tahun 2020-2024.....	13
Grafik 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Serang, Tahun 2020-2024.....	13
Grafik 6 Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Serang TA 2024 .....	14
Grafik 7 Perkembangan PAD TA 2021 s.d. 2025 .....	26
Grafik 8 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 – 2025.....	27

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2025 disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

1. Penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
6. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2025 ini diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Serang secara keseluruhan.

Dalam membaca Laporan Keuangan tersebut diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat di antara komponen-komponen laporan keuangan. Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang tergambar pada Neraca 2025 dan 2024. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2025 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang;
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 251 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang;
27. Peraturan Bupati Serang Nomor 299 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
28. Peraturan Bupati Serang Nomor 309 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
29. Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Serang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

32. Peraturan Bupati Serang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

### **1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** PENDAHULUAN, memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, landasan hukum dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II** EKONOMI MAKRO memuat perkembangan perekonomian Kabupaten Serang, Kebijakan Keuangan Daerah, Indikator Pencapaian Kinerja APBD.
- BAB III** IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SERANG, penjelasan atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hambatan dan kendala dalam mencapai target kinerja.
- BAB IV** KEBIJAKAN AKUNTANSI, memuat entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- BAB V** PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, memuat penjelasan dan penyajian masing-masing pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- BAB VI** PENGUNGKAPAN LAIN, memuat informasi-informasi non keuangan Pemerintah Daerah.
- BA B VII** PENUTUP

## BAB II EKONOMI MAKRO

### 2.1. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Serang

#### 2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, selama tahun 2024 tercatat pencari kerja yang resmi terdaftar sebanyak 27.354 orang, sementara yang berhasil ditempatkan sebanyak 13.825 orang, atau mencakup 50,54 persen dari keseluruhan pencari kerja yang mendaftar.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang, 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>699.858</b>	<b>709.936</b>	<b>719.645</b>	<b>796.819</b>	<b>865.899</b>
Bekerja	614.320	634.825	643.277	717.583	786.378
Pengangguran Terbuka	85.538	75.111	76.368	79.236	79.521
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>402.992</b>	<b>401.717</b>	<b>400.341</b>	<b>463.550</b>	<b>411.835</b>
<b>Jumlah PUK</b>	<b>1.102.850</b>	<b>1.111.653</b>	<b>1.119.986</b>	<b>1.260.369</b>	<b>1.277.734</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

Berdasarkan data BPS di atas pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja sebanyak 865.899 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 411.835 orang, atau dengan kata lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,77 persen. Dari total angkatan kerja tersebut, yang bekerja sebesar 786.378 orang dan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 79.521 orang atau tingkat penganggurannya mencapai 9,18 persen. Bila dipilah berdasarkan gender, TPAK laki-laki (83,05 persen), lebih tinggi dari pada TPAK perempuan (51,86 persen) pada tahun 2024. Jika dilihat dari perkembangan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, orang yang bekerja dan jumlah pengangguran masih fluktuatif.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kelamin Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang 2024**

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>541.266</b>	<b>324.633</b>	<b>865.899</b>
Bekerja	495.943	290.435	786.378
Pengangguran Terbuka	45.323	34.198	79.521
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>110.453</b>	<b>301.382</b>	<b>411.835</b>
<b>TPAK (%)</b>	<b>83,05</b>	<b>51,86</b>	<b>67,77</b>
<b>Tingkat Pengangguran (%)</b>	<b>8,37</b>	<b>10,53</b>	<b>9,18</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

### 2.1.2. Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan suatu bangsa adalah dengan melihat perkembangan pendidikan. Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kesejahteraan keluarga, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, tidak kalah pentingnya, pada dunia pendidikan penting untuk menjaga rasio guru dan murid. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat.

Secara umum, untuk keadaan tahun ajaran 2024/2025, jumlah sekolah nampak mengalami peningkatan dibanding tahun ajaran sebelumnya kecuali TK Negeri. Begitu pula untuk jumlah murid, pada umumnya terlihat peningkatan kecuali di level Pendidikan PAUD, SLTP Negeri dan SMA Swasta. Berikut dapat dilihat peningkatan yang terjadi pada tahun ajaran 2024/2025:

**Tabel 3**  
**Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan Dasar dan Jumlah Murid SD dan SMP di Kabupaten Serang**

Uraian	Negeri	Swasta
Fasilitas TK	2	171
Fasilitas Raudatul Athfal	205	
Fasilitas Madrasah Ibtidaiyah	4	142
Fasilitas SD	707	34
Fasilitas Madrasah Tsanawiyah	5	205
Fasilitas SMP	90	113
Fasilitas Madrasah Aliyah	2	88
Fasilitas SMU	27	54
Fasilitas SMK	12	82
Murid TK	167	7426
Murid Raudatul Athfal	10039	
Murid Madrasah Ibtidaiyah	2097	24456
Murid SD	164957	8459
Murid Madrasah Tsanawiyah	3902	26864
Murid SMP	1933	868
Murid Madrasah Aliyah	1066	10956
Murid SMU	25728	6158
Murid SMK	11719	15401
Guru TK	13	773
Guru Raudatul Athfal	982	
Guru Madrasah Ibtidaiyah	151	1471
Guru SD	6.404	449
Guru Madrasah Tsanawiyah	260	2971
Guru SMP	37906	16501

Uraian	Negeri	Swasta
Guru Madrasah Aliyah	121	1.273
Guru SMU	1139	637
Guru SMK	588	1124
<b>Rasio Murid &amp; Guru TK</b>	<b>1284,62</b>	<b>960,67</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru Raudatul Athfal</b>	<b>1022,30</b>	
<b>Rasio Murid &amp; Guru Madrasah Ibtidaiyah</b>	<b>1388,74</b>	<b>1662,54</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru SD</b>	<b>2575,84</b>	<b>1883,96</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru Madrasah Tsanawiyah</b>	<b>1500,77</b>	<b>904,21</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru SMP</b>	<b>5,10</b>	<b>5,26</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru Madrasah Aliyah</b>	<b>880,99</b>	<b>860,64</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru SMU</b>	<b>2258,82</b>	<b>966,72</b>
<b>Rasio Murid &amp; Guru SMK</b>	<b>1993,03</b>	<b>1370,20</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

Dilihat berdasarkan tabel, ketersediaan fasilitas untuk jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Serang pada tahun 2024 sebanyak 146 bangunan dan rasio guru murid untuk negeri dan swasta masing-masing sebesar 1388,74 dan 1662,54. Untuk Madrasah Tsanawiyah, rasio guru murid untuk negeri dan swasta masing-masing sebesar 1500,77 dan 904,21 dengan ketersediaan fasilitas sebanyak 210 bangunan. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah, ketersediaan fasilitas sebanyak 90 bangunan dengan rasio guru dan muridnya untuk negeri dan swasta masing-masing adalah 880,99 dan 860,64.

Dilihat berdasarkan ketersediaan fasilitas, jumlah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Serang pada tahun 2024 sebanyak 173 bangunan dengan rasio murid per guru untuk negeri dan swasta masing-masing adalah 1284,62 dan 960,67 murid. Untuk Sekolah Dasar, fasilitas bangunan sebanyak 741 bangunan dengan rasio guru dan murid untuk negeri dan swasta masing-masing sebesar 2575,84 dan 1883,96. Sementara untuk SMP memiliki rasio guru dan muridnya sebesar 5,10 negeri dan 5,26 swasta dengan jumlah SMP yang tersedia sebanyak 203 bangunan. Sedangkan untuk ketersediaan fasilitas SMU dan SMK pada tahun 2024 masing-masing sebanyak 81 bangunan dan 94 bangunan.

### 2.1.3. Kesehatan

Urusan kesehatan di Kabupaten Serang menjadi hal yang wajib ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerah memasukkan urusan kesehatan ke dalam urusan wajib dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang serius. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Serang pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dilihat dari beberapa indikator, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Perkembangan Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan**  
**di Kabupaten Serang**

No	Fasilitas/Tenaga Kesehatan	2025	2024
1	Rumah Sakit	9	8
2	Poliklinik	110	103
3	Puskesmas	31	31
4	Pustu	44	54
5	Puskesmas Keliling	31	31
6	Apotek	128	85
7	Praktek Dokter	53	112
8	Balai Obat	0	0
9	Posyandu	1.538	1.538
10	Poskesdes	55	25
11	Dokter Umum	400	375
12	Dokter Gigi	107	85
13	Paramedis	3735	523
14	Perawat	1.367	824
15	Bidan	1069	1070

Sumber: Dinas Kesehatan, Kabupaten Serang

Secara umum fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan meningkat. Praktek dokter, balai obat dan apotek makin mudah ditemui. Dengan semakin banyaknya sebaran tenaga kesehatan, apalagi di puskesmas, diharapkan biaya kesehatan lebih mudah terjangkau oleh masyarakat umum.

#### 2.1.4. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila rasio gini sama dengan 1, maka ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

**Tabel 5**  
**Gini Ratio Kabupaten Serang**

Tahun	Gini Ratio
2021	0,264
2022	0,284
2023	0,274
2024	0,53

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

### 2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah:

- 1) Dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity);
- 2) Dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan
- 3) Dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan:

- (1) Pendidikan usia dini; dan
- (2) Pendidikan dasar dan menengah, peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang.

Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan:

- (1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- (4) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan
- (5) Penguatan data dan sistem informasi kesehatan.

Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada:

- (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan
- (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut.

IPM merupakan Indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan untuk mengakselerasi indikator IPM harus dilakukan terhadap indikator-indikator tunggalnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang tahun

2024 mencapai 73,28, meningkat 0,65 poin atau 0,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 72,63.

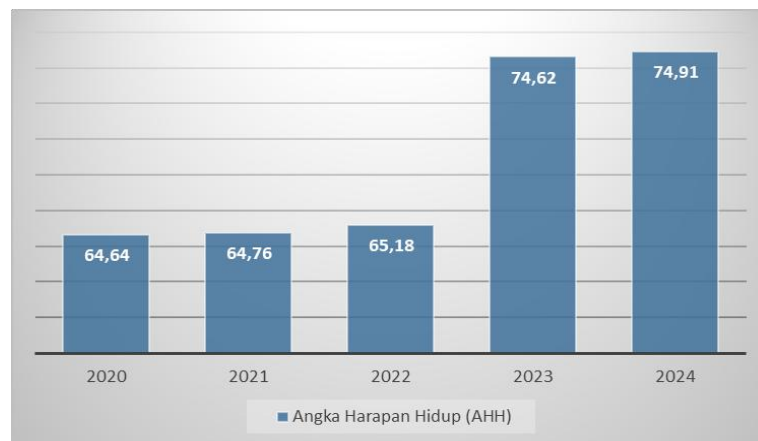
Berdasarkan kondisi indikator pembentukan IPM sebagaimana telah disampaikan di atas, maka nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Serang dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**di Kabupaten Serang**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (AHH)	64,64	64,76	65,18	74,62	74,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,5	7,51	7,78	7,79	7,88
Pengeluaran (Juta Rp)	10,67	10,71	10,92	11	11,767
IPM	66,7	66,82	67,75	72,63	73,28
Rank IPM di Prov. Banten	6	6	6	6	7

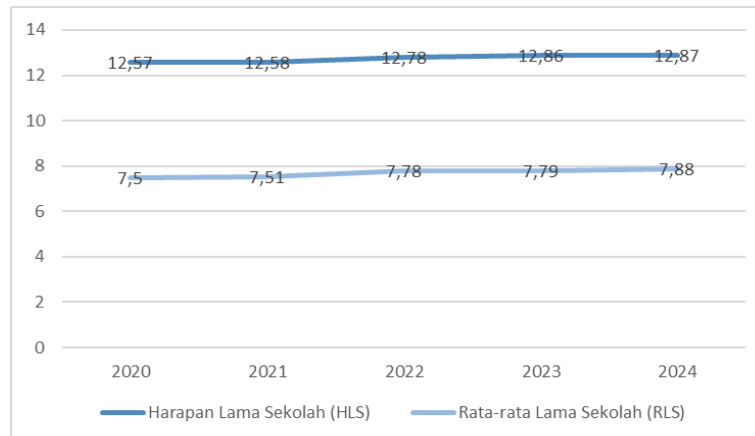
Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

**Grafik 1**  
**Dimensi Angka Harapan Hidup Kabupaten Serang, 2020-2024**



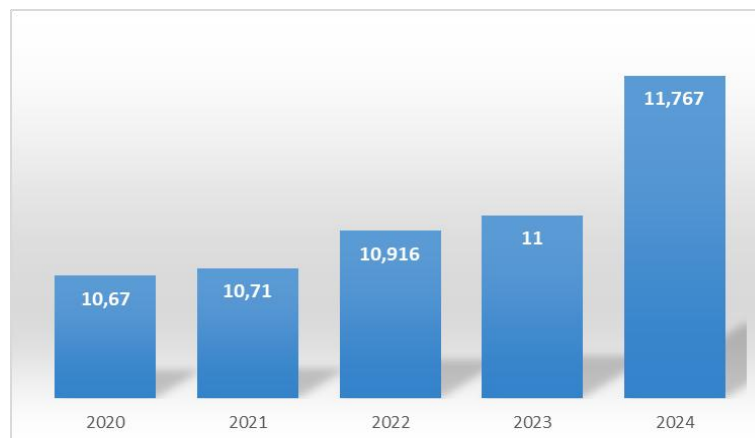
Dimensi Angka Harapan Hidup (AHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, Angka Harapan Hidup telah meningkat sebesar 0,29 tahun.

**Grafik 2**  
**Dimensi Pendidikan Kabupaten Serang tahun 2020-2024**



Dimensi Pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Serang telah meningkat sebesar 0,08 persen, sementara Rata-rata Lama Sekolah bertambah 1,16 persen.

**Grafik 3**  
**Dimensi Standard Hidup Layak Kabupaten Serang tahun 2020-2024**



Sementara, untuk rata-rata pengeluaran riil masyarakat Kabupaten Serang tahun 2024 sebesar Rp11.767.000,00 per tahun. Rata-rata pengeluaran ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023 yang sebesar Rp11.320.000,00 per tahun. Peningkatan ini tentunya tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam memberikan subsidi dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini harus diikuti dengan pembinaan dan perluasan wawasan serta mengasah kemampuan masyarakat untuk menghasilkan produk barang dan jasa.

### 2.1.6. Angka Kemiskinan

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks dan akan terus berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut muncul disebabkan oleh perubahan-perubahan masyarakat yang selalu menunjukkan perkembangan di segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya dan khususnya teknologi.

Seiring dengan kemajuan yang dicapai maka dampaknya semakin dirasakan, yaitu terjadinya kesenjangan sosial pada beberapa aspek kehidupan. Satu sisi menunjukkan kemajuan dan meningkatkan mutu kehidupan, sedangkan di sisi lain menunjukkan makin tertinggalnya kelompok-kelompok tertentu oleh kemajuan-kemajuan tersebut. Kelompok-kelompok ini dikatakan sebagai bermasalah karena keberadaannya menyebabkan dampak negatif terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berkembangnya kelompok ini merupakan masalah sosial dan lebih lanjut merupakan penghambat pembangunan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan. Keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Deskripsi mengenai perkembangan jumlah penyandang kesejahteraan sosial di Kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah pada beberapa kriteria PMKS.

Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin Kabupaten Serang pada tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

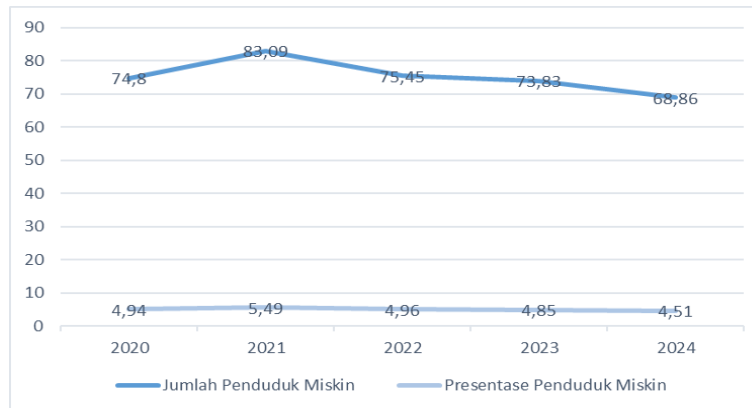
**Tabel 7**  
**Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2020	341.074	74,8	4,94
2021	362.102	83,09	5,49
2022	385.864	75,45	4,96
2023	425.751	73,83	4,85
2024	449.291	68,86	4,51

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

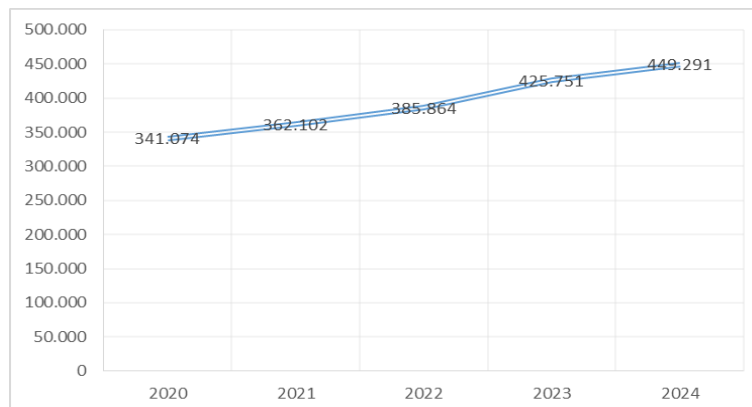
Grafik Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Serang pada tahun 2020-2024.

**Grafik 4**  
**Jumlah Presentasi Penduduk Miskin, Tahun 2020-2024**



Presentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Serang terjadi pada tahun 2024 dan masih pada tahun 2021 yang menjadi puncak tertinggi yaitu 5,49%.

**Grafik 5**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Serang, Tahun 2020-2024**



Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index-Po*), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-PI*), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index-P2*). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan sebesar Rp449.291,00 dari tahun sebelumnya.

### 2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang

PDRB Kabupaten Serang pada tahun 2024 sebesar 102.120,37 triliun rupiah. Terdapat 4 sektor penyumbang terbesar diantaranya sektor insutri

pengolahan sebesar 46,69 persen, sektor konstruksi sebesar 11,75 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,37 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,94 persen.

**Tabel 8**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kabupaten Serang Tahun 2020-2024**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000/ADHK (dalam Milyar Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB (dalam Milyar Rupiah)
2020	52.866,43	75.880,72
2021	54.844,65	80.231,26
2022	57.607,11	87.983,13
2023	60.370,56	95.080,43
2024	63.255,33	102.120,37

Sumber: BPS Kabupaten Serang 2025

**Grafik 6**  
**Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Serang TA 2024**



Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktivitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa.

Hampir seluruh sektor mengalami penurunan di tahun 2024. Sektor yang mengalami kenaikan yakni sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,29 persen. Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Laju Pertumbuhan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kabupaten Serang Tahun 2020-2024**

Sektor PDRB	Distribusi PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,08	9,8	9,72	9,47	9,37
2. Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,11	0,1	0,1	0,1
3. Industri Pengolahan	45,49	45,76	45,75	46,18	46,69
4. Pengadaan Listrik, Gas	0,32	0,33	0,33	0,3	0,29
5. Pengadaan Air	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6. Konstruksi	11,43	12,01	12,28	11,97	11,75
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,24	9,02	9,08	9,12	8,94
8. Transportasi dan Pergudangan	3,93	4,00	4,17	4,36	4,31
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,28	2,25	2,26	2,29	2,37
10. Informasi dan Komunikasi	0,86	0,85	0,83	0,83	0,81
11. Jasa Keuangan	2,77	2,88	3,05	2,85	2,65
12. Real Estate	5,06	4,96	4,91	4,92	4,84
13. Jasa Perusahaan	0,24	0,23	0,22	0,23	0,24
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	2,34	2,22	2,18	2,31
15. Jasa Pendidikan	4,00	3,7	3,39	3,41	3,51
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,64	0,62	0,64	0,66
17. Jasa lainnya	1,11	1,08	1,05	1,12	1,12
PDRB	100,00	99,99	100,01	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Serang dalam Angka 2025

Struktur Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral atas dasar harga berlaku, dapat berubah dari waktu ke waktu. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perkembangan teknologi, adanya perbedaan investasi yang dilakukan serta perkembangan dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi suatu sektor usaha.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi dapat juga disebabkan oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi akan memiliki kontribusi yang semakin besar, sebaliknya sektor dengan pertumbuhan yang kecil akan mengalami penurunan kontribusi terhadap total nilai tambah wilayah. Akibatnya sektor dengan kontribusi yang semakin menurun pada beberapa tahun terakhir akan menjadi kurang menarik bagi investor dibandingkan sektor ekonomi lain yang pertumbuhan dan kontribusinya semakin besar. Sehingga akan terjadi pergeseran faktor produksi ke sektor-sektor yang semakin berkembang dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi.

Selama ini struktur perekonomian Kabupaten Serang belum mengalami perubahan yang cukup berarti. Terdapat lima sektor yang masih mendominasi perekonomian dan memberikan kontribusi jauh di atas sektor-sektor lainnya dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang di tahun 2024. Kategori pengadaan listrik dan gas, kategori industri pengolahan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori transportasi dan pergudangan dan kategori konstruksi.

## 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan keuangan daerah sangatlah penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Untuk itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan terukur, terarah dan cermat agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian yang mengatur tentang kebijakan anggaran Pemerintah Daerah, dan yang akan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang nantinya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya dalam mendukung arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditentukan tersebut, dibuat kebijakan turunannya yaitu arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025, arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 serta arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025.

Atas dasar hal tersebut disusun Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut:

### A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

#### 1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun 2024 perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya.

Pendapatan terbesar dari Pemerintah Daerah berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, namun dana perimbangan tersebut berada diluar kendali Pemerintah Daerah, karena pengalokasiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dana transfer sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Maka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Serang harus berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2025 ini meliputi:

- a. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
  - 1) Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis *Online*;
  - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
- c. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- d. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- g. Menyesuaikan Alokasi Target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- h. Menyesuaikan Alokasi Target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang akan di capai sampai dengan Akhir Tahun 2025.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah;

i. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD semester 1 tahun 2025, realisasi penerimaan PAD Tahun 2024, serta potensi penerimaan yang dapat dicapai pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

ii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan target pendapatan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### iii. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Perubahan target penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah dengan memperhatikan capaian penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada semester 1 Tahun 2025 atas hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, serta pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non - pelayanan kesehatan.;

## 2. Pendapatan Transfer

### Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

#### a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berkaitan dengan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat, dalam Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 telah disesuaikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Pemerintah Daerah telah mengalokasikan *Treasury Deposite Facility* (TDF) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serang atas Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Pusat.

#### b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Perubahan target pendapatan transfer antar daerah telah disesuaikan berkaitan dengan Pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 serta adanya pelampauan dan kurang bayar atas Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Tahun 2024. Namun selain daripada itu akan dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;

Pada Perubahan target penerimaan Tahun 2025, Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian target berkaitan dengan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah atas Partispasi Air Bersih yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang dari Perusahaan Swasta yang ada di lingkup Kabupaten Serang.

Anggaran Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp3.588.090.358.285,00 sedangkan anggaran pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp3.745.528.044.029,00 turun sebesar Rp157.437.685.744,00.

#### B. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Arah kebijakan ini terdiri dari arah kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Arah kebijakan belanja merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti: kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp3.615.967.850.057,00 sedangkan anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp3.770.394.851.697,00 turun sebesar Rp154.427.001.640,00 dari anggaran tahun sebelumnya.

### C. Kebijakan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

#### 1. Penerimaan pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Serang pada APBD Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp168.366.839.421,00. Jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025, Penerimaan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp65.898.406.078,00, yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – Bank BJB sebesar Rp35.000.000.000,00 yang di pergunakan untuk menjaga Cashflow Kas Daerah dalam membiayai Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas (Gaji dan Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan PNS), serta untuk membiayai penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang. Selain itu Pemerintah Daerah telah menyesuaikan dengan hasil audit BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD tahun 2024, dengan rincian SiLPA sebesar Rp30.898.406.078,00 yang bersifat earmarking.

#### 2. Pengeluaran pembiayaan;

Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp38.000.000.000,00. Yang terdiri atas penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 serta untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek Bank BJB sebesar Rp35.000.000.000,00.

Kemudian karena dalam pos pendapatan dan belanja masih terdapat defisit sebesar (Rp27.877.491.772,00), kemudian pembiayaan netto sebesar Rp27.877.491.772,00, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan pada Kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2025 sebesar Rp0,00. (nihil).

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun 2025 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.877.491.772,00 yang merupakan SiLPA 2024 sebesar Rp30.877.491.772,00 yang telah diaudit dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp38.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal kepada

BUMD sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp35.000.000.000,00, sehingga pembiayaan neto sebesar Rp27.877.491.772,00.

### 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Pokok Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Serang

Berdasarkan Arah Kebijakan Umum APBD TA 2025, ditetapkan APBD setelah Perubahan Kabupaten Serang sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**APBD setelah Perubahan Kabupaten Serang 2025**

Uraian	P.APD TA 2025 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.588.090.358.285,00</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.097.550.142.214,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.476.501.530.950,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.038.685.121,00
<b>BELANJA</b>	<b>3.615.967.850.057,00</b>
BELANJA OPERASI	2.787.040.489.327,00
BELANJA MODAL	262.549.906.930,00
BELANJA TAK TERDUGA	11.695.194.400,00
BELANJA TRANSFER	554.682.259.400,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(27.877.491.772,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>27.877.491.772,00</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.877.491.772,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Serang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2025. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk TA 2025 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2025 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2025.

Terjadinya perubahan APBD TA 2025 ini lebih disebabkan oleh adanya perubahan asumsi yang mendasari penghitungan target penerimaan Pendapatan Daerah dan alokasi Belanja Daerah. Tabel berikut ini menyajikan indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2025.

Seluruh Pergeseran anggaran APBD di atas pada akhirnya disesuaikan pada APBD Perubahan sehingga anggaran pendapatan sebesar Rp3.598.152.636.993,00 berubah menjadi Rp3.588.090.358.285,00 dan anggaran belanja sebesar Rp3.763.519.476.414,00 menjadi Rp3.615.967.850.057,00.

**Tabel 11**  
**Indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2025**

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.136.857.430.038,00</b>	<b>1.097.550.142.214,00</b>	<b>(39.307.287.824,00)</b>	<b>(3,46)</b>
Pajak Daerah	776.707.501.032,00	725.174.381.504,00	(51.533.119.528,00)	(6,63)
Retribusi Daerah	259.335.309.589,00	252.142.584.022,00	(7.192.725.567,00)	(2,77)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000,00	18.932.083.377,00	(1.144.443.623,00)	(5,70)
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.738.092.417,00	101.301.093.311,00	20.563.000.894,00	25,47
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.451.125.206.955,00</b>	<b>2.476.501.530.950,00</b>	<b>25.376.323.995,00</b>	<b>1,04</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.285.713.520.000,00	2.272.975.539.889,00	(12.737.980.111,00)	(0,56)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.411.686.955,00	203.525.991.061,00	38.114.304.106,00	23,04
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>10.170.000.000,00</b>	<b>14.038.685.121,00</b>	<b>3.868.685.121,00</b>	<b>38,04</b>
Pendapatan Hibah	10.170.000.000,00	11.425.000.000,00	1.255.000.000,00	12,34
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.613.685.121,00	2.613.685.121,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.598.152.636.993,00</b>	<b>3.588.090.358.285,00</b>	<b>(10.062.278.708,00)</b>	<b>(0,28)</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.784.147.327.617,00</b>	<b>2.787.040.489.327,00</b>	<b>2.893.161.710,00</b>	<b>0,10</b>
Belanja Pegawai	1.584.964.633.882,98	1.550.446.482.475,42	(34.518.151.407,56)	(2,18)
Belanja Barang dan Jasa	1.108.073.790.734,02	1.087.345.292.460,58	(20.728.498.273,44)	(1,87)
Belanja Bunga	0,00	306.250.000,00	306.250.000,00	0,00
Belanja Hibah	86.908.903.000,00	138.849.469.791,00	51.940.566.791,00	59,76
Belanja Bantuan Sosial	4.200.000.000,00	10.092.994.600,00	5.892.994.600,00	140,31
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>406.263.364.997,00</b>	<b>262.549.906.930,00</b>	<b>(143.713.458.067,00)</b>	<b>(35,37)</b>
Belanja Modal Tanah	32.600.000.000,00	12.497.880.760,00	(20.102.119.240,00)	(61,66)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.942.483.943,00	160.179.695.669,00	1.237.211.726,00	0,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.473.972.726,00	42.453.296.361,00	(42.020.676.365,00)	(49,74)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.927.599.098,00	25.508.585.933,00	(90.419.013.165,00)	(78,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.867.709.230,00	21.237.848.207,00	7.370.138.977,00	53,15
Belanja Modal Aset Lainnya	451.600.000,00	672.600.000,00	221.000.000,00	0,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>11.695.194.400,00</b>	<b>(804.805.600,00)</b>	<b>(6,44)</b>
Belanja Tidak Terduga	12.500.000.000,00	11.695.194.400,00	(804.805.600,00)	(6,44)
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>560.608.783.800,00</b>	<b>554.682.259.400,00</b>	<b>(5.926.524.400,00)</b>	<b>(1,06)</b>
Belanja Bagi Hasil	82.213.168.800,00	77.164.700.400,00	(5.048.468.400,00)	(6,14)
Belanja Bantuan Keuangan	478.395.615.000,00	477.517.559.000,00	(878.056.000,00)	(0,18)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.763.519.476.414,00</b>	<b>3.615.967.850.057,00</b>	<b>(147.551.626.357,00)</b>	<b>(3,92)</b>



Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(165.366.839.421,00)</b>	<b>(27.877.491.772,00)</b>	<b>137.489.347.649,00</b>	<b>(83,14)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>168.366.839.421,00</b>	<b>65.877.491.772,00</b>	<b>(102.489.347.649,00)</b>	<b>(60,87)</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	168.366.839.421,00	30.877.491.772,00	(137.489.347.649,00)	(81,66)
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>1166,67</b>
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>165.366.839.421,00</b>	<b>27.877.491.772,00</b>	<b>(137.489.347.649,00)</b>	<b>(83,14)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **BAB III**

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

### **KABUPATEN SERANG**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan**

##### **3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Kabupaten Serang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada TA 2025 pos Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang ditetapkan sebesar Rp3.615.967.850.057,00 yang terbagi kedalam Belanja Operasi sebesar Rp2.787.040.489.327,00, Belanja Modal sebesar Rp262.549.906.930,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp11.695.194.400,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp554.682.259.400,00. Direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan sebesar Rp3.588.090.358.285,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.097.550.142.214,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.476.501.530.950,00 serta dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp14.038.685.121,00.

Sehingga perbandingan antara jumlah anggaran pendapatan dengan jumlah anggaran belanja menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp27.877.491.772,00. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp27.877.491.772,00.

Pembiayaan Netto tersebut merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2025 berasal dari SILPA TA 2024 sebesar Rp30.877.491.772,00 dan Pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp35.000.000.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal dari penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp35.000.000.000,00. Sehingga total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp38.000.000.000,00.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Serang selama TA 2025 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

**Tabel 12**  
**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah**  
**Kabupaten Serang TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Bertambah/ (Berkurang)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.097.550.142.214,00	1.107.264.900.400,00	100,89	9.714.758.186,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.476.501.530.950,00	2.414.003.256.862,00	97,48	(62.498.274.088,00)
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.038.685.121,00	14.416.141.793,00	102,69	377.456.672,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.588.090.358.285,00</b>	<b>3.535.684.299.055,00</b>	<b>98,54</b>	<b>(52.406.059.230,00)</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>				
BELANJA OPERASI	2.787.040.489.327,00	2.674.018.719.727,00	95,94	(113.021.769.600,00)
BELANJA MODAL	262.549.906.930,00	239.311.625.543,00	91,15	(23.238.281.387,00)
BELANJA TAK TERDUGA	11.695.194.400,00	2.498.559.326,00	21,36	(9.196.635.074,00)
BELANJA TRANSFER	554.682.259.400,00	522.627.840.228,00	94,22	(32.054.419.172,00)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.615.967.850.057,00</b>	<b>3.438.456.744.824,00</b>	<b>95,09</b>	<b>(177.511.105.233,00)</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(27.877.491.772,00)</b>	<b>97.227.554.231,00</b>	<b>(348,77)</b>	<b>125.105.046.003,00</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.877.491.772,00	65.849.910.544,00	99,96	(27.581.228,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	100,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>27.877.491.772,00</b>	<b>27.849.910.544,00</b>	<b>99,90</b>	<b>(27.581.228,00)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.077.464.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.077.464.775,00</b>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.535.684.299.055,00 atau 98,54% di bawah target anggaran sebesar Rp3.588.090.358.285,00. Tidak tercapainya realisasi pendapatan sebesar Rp52.406.059.230,00 atau 1,46%. Hal tersebut terjadi karena:

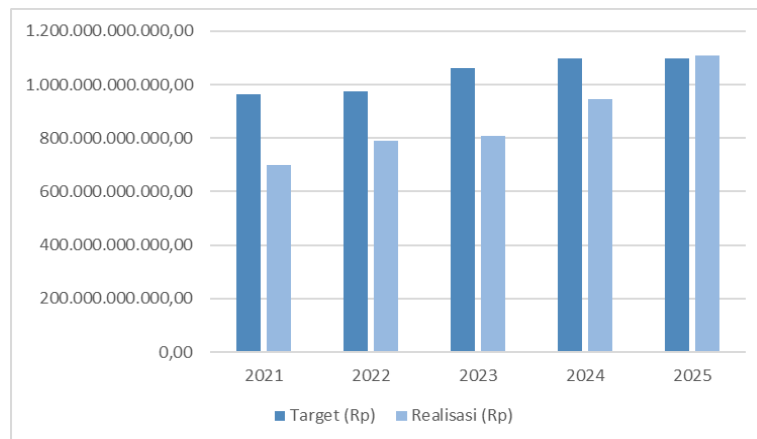
- Pada realisasi pos PAD per 31 Desember 2025 mencapai target sebesar Rp1.107.264.900.400,00 atau 100,89%.
- Pada realisasi pos Pendapatan Transfer per 31 Desember 2025 mencapai target sebesar Rp2.414.003.256.862,00 atau 97,48%.
- Dan pada realisasi pos pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah pada per 31 Desember 2025 mencapai target sebesar Rp14.416.141.793,00 atau 102,69%.

Apabila dijelaskan lebih lanjut perkembangan target dan realisasi pos penerimaan PAD dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

**Tabel 13**  
**Perkembangan PAD dari TA 2021 s.d. 2025**

No	TA	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2021	964.246.077.181,00	701.215.210.764,00
2	2022	976.125.245.938,00	791.086.613.633,00
3	2023	1.061.558.897.765,00	808.234.793.841,00
4	2024	1.097.550.142.214,00	944.314.942.625,00
5	2025	1.097.550.142.214,00	1.107.264.900.400,00

**Grafik 7**  
**Perkembangan PAD TA 2021 s.d. 2025**



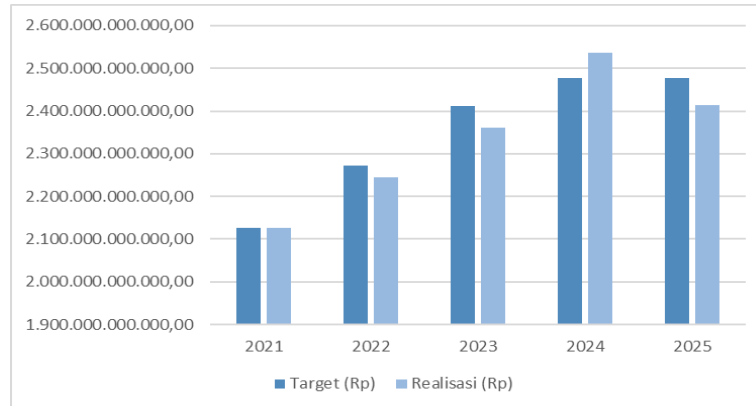
Berdasarkan data PAD sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 diatas, dapat dilihat realisasi PAD memenuhi target yang ditetapkan begitupun bila dibandingkan tahun sebelumnya realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 terus meningkat, peningkatan realisasi PAD tahun 2024 ke 2025 sebesar 17,07% lebih besar dibandingkan peningkatan realisasi PAD tahun 2023 ke 2024 sebesar 16,84%.

Untuk Pendapatan Transfer realisasi penerimaan sebesar Rp2.414.003.256.862,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.476.501.530.950,00 tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp62.498.274.088,00 atau 2,52%. Berikut ini data perkembangan pendapatan transfer dari tahun 2021 sampai dengan 2025 :

**Tabel 14**  
**Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2021 s.d. 2025**

No	TA	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2021	2.125.508.693.218,00	2.126.698.078.829,00
2	2022	2.271.922.777.570,00	2.243.660.752.897,00
3	2023	2.411.653.094.773,00	2.360.342.962.129,00
4	2024	2.476.501.530.950,00	2.535.392.002.194,00
5	2025	2.476.501.530.950,00	2.414.003.256.862,00

**Grafik 8**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Tahun 2021 – 2025**



Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 turun sebesar Rp121.576.611.587,00 atau 4,79%. ini terjadi akibat berkurangnya transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Salah satu penyebab penurunan transfer karena adanya perubahan atas anggaran pendapatan Bagi Hasil Provinsi berupa PKB dan BBNKB yang tahun ini dianggarkan dalam PAD jenis pajak berupa OPSEN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Opsen PKB Dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2025 dari target penerimaan sebesar Rp14.038.685.121,00 dapat direalisasikan sebesar Rp14.416.141.793,00 atau 102,69%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, terjadi peningkatan sebesar Rp3.522.590.205,00 atau 32,34%.

Per 31 Desember 2025 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3.615.967.850.057,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.438.456.744.824,00 atau 95,09%.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta pembagian jenis belanja menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020 yang terbagi menjadi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Per 31 Desember 2025 Anggaran belanja operasi sebesar Rp2.787.040.489.327,00 atau 77,08%, Anggaran belanja modal sebesar Rp262.549.906.930,00 atau 7,26%, Anggaran belanja tak terduga sebesar Rp11.695.194.400,00 atau 0,32% dan Anggaran belanja transfer sebesar Rp554.682.259.400,00 atau 15,34% dari total belanja dan transfer.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, pagu Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp65.877.491.772,00 dapat direalisasikan sebesar Rp65.849.910.544,00 atau 99,96%, realisasi penerimaan ini berasal dari SiLPA TA 2024 sebesar Rp30.849.910.544,00. Realisasi

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp38.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

Capaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2025 dengan nilai Saldo Anggaran Lebih pada Awal Tahun 2025 sebesar Rp30.877.491.772,00, Sedangkan pada akhir tahun 2025 Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp125.077.464.775,00. Bila dibandingkan dengan saldo kas pada Neraca sebesar Rp125.077.464.775,00 maka tidak terdapat selisih.

**Tabel 15**  
**Rincian SiLPA TA 2025**

Uraian	Saldo
Kas di Kas Daerah	91.566.450.186,00
Kas di BLUD	31.369.511.553,00
Kas Dana BOS	1.748.335.792,00
Kas Dana BOK	393.167.244,00
<b>Jumlah</b>	<b>125.077.464.775,00</b>

Dalam pencapaian Saldo Anggaran Lebih TA 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang juga memiliki kewajiban daerah berupa utang belanja yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp107.524.384.971,88 terdiri dari:

**Tabel 16**  
**Utang Belanja Per 31 Desember Tahun 2025**

Uraian	Perangkat Daerah	BLUD	Total Utang
Utang Beban Pegawai	0,00	142.468.144,00	142.468.144,00
Utang Beban Barang dan Jasa	28.367.642.179,14	29.644.597,00	28.397.286.776,14
Utang Belanja Hibah	53.742.543,34	0,00	53.742.543,34
Utang Belanja Modal	4.459.300.243,40	0,00	4.459.300.243,40
Utang Transfer, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	74.471.587.265,00	0,00	74.471.587.265,00
<b>Jumlah</b>	<b>107.352.272.230,88</b>	<b>172.112.741,00</b>	<b>107.524.384.971,88</b>

Sehingga jika jumlah Saldo Anggaran Lebih pada Akhir tahun 2025 diperbandingkan dengan jumlah kewajiban daerah yang berupa utang belanja per 31 Desember 2025 menimbulkan defisit keuangan yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang. Berikut ini perbandingan jumlah Saldo Anggaran Lebih pada Akhir tahun 2025 dengan kewajiban daerah yang berupa utang belanja per 31 Desember 2025:

**Tabel 17**  
**Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan Utang Belanja**  
**Per 31 Desember TA 2025**

Uraian	Saldo	Utang Belanja	Selisih
Kas di Kas Daerah	91.566.450.186,00	107.352.272.230,88	(15.785.822.044,88)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00		0,00
Kas di BLUD	31.369.201.553,00	172.112.741,00	31.197.088.812,00
Kas Dana BOS	1.748.335.792,00		1.748.335.792,00
Kas Dana BOK	393.167.244,00		393.167.244,00
<b>Jumlah</b>	<b>125.077.154.775,00</b>	<b>107.524.384.971,88</b>	<b>17.552.769.803,12</b>

### 3.1.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program pada SKPD

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan maupun sub kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan/sub kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada TA 2025. Alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.173.406.449.460,00 atau 32,45% dari total anggaran belanja sebesar Rp3.615.967.850.057,00, dan dapat terealisasi sebesar Rp1.167.157.196.535,00. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja untuk setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Tabel 18**  
**Alokasi Belanja Per SKPD TA 2025**

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
DISDIK	8	19	92	1.173.406.449.460,00	1.167.157.196.535,00
DINKES	37	53	110	371.858.019.210,00	356.314.438.524,00
RSUD	2	4	4	381.993.912.965,00	353.690.137.791,00
DPUPR	26	36	88	169.398.961.667,00	151.327.677.270,00
DPRKP	5	16	39	34.605.958.351,00	33.271.169.656,00
SATPOL PP	2	9	30	13.863.354.077,00	12.886.450.461,00
BPBD	3	14	34	17.124.467.337,00	16.375.717.034,00
DINSOS	7	14	49	15.100.143.511,00	14.125.482.442,00
DISNAKERTRANS	6	16	35	10.061.612.077,00	9.890.506.123,00
DKPP	10	24	47	34.755.984.413,00	33.505.680.658,00
DLH	10	20	56	38.816.695.249,00	36.029.237.201,00
DISDUKCAPIL	5	11	22	20.284.523.800,00	18.803.140.222,00



Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
DPMD	5	9	39	28.038.100.994,00	26.656.279.950,00
DKBP3A	10	25	61	32.597.176.629,00	31.099.352.086,00
DISHUB	5	22	40	45.476.563.866,00	43.095.289.079,00
DISKOMINFO	5	13	43	23.974.532.108,00	21.067.472.632,00
DISKOPERINDAG	17	27	47	18.472.070.721,00	17.590.077.254,00
DPMPSTSP	6	12	36	14.918.476.033,00	13.744.759.573,00
DISPORAPAR	8	21	50	15.619.983.423,00	15.054.272.904,00
DPKD	5	13	39	20.904.578.679,00	19.034.119.005,00
DISKAN	5	16	36	14.022.880.689,00	13.226.936.015,00
SETDA	11	21	55	82.223.856.617,00	78.696.995.012,00
SETWAN	2	15	57	113.332.140.326,00	104.935.960.768,00
BAPPERIDA	4	16	63	18.369.468.213,00	17.195.797.501,00
BAPENDA	2	7	36	63.496.162.195,00	57.213.484.449,00
BPKAD	3	13	53	619.128.124.643,00	563.536.267.689,00
BKPSDM	3	13	43	24.896.015.829,00	23.656.206.991,00
Inspektorat	3	10	32	26.199.552.326,00	25.186.496.552,00
Kec. Anyar	6	11	23	5.202.575.020,00	4.780.140.036,00
Kec. Bandung	5	11	18	3.303.121.912,00	3.242.368.524,00
Kec. Baros	6	11	22	4.565.583.756,00	4.365.118.522,00
Kec. Binuang	6	12	22	3.126.868.592,00	2.784.175.907,00
Kec. Bojonegara	6	11	20	3.291.673.666,00	3.005.120.762,00
Kec. Carenang	5	10	16	2.983.825.864,00	2.784.075.555,00
Kec. Cikande	6	10	17	5.236.464.028,00	5.118.752.498,00
Kec. Cikeusal	6	10	15	3.198.167.808,00	3.031.004.675,00
Kec. Cinangka	5	10	19	4.896.448.531,00	4.590.329.304,00
Kec. Ciomas	6	10	20	4.380.762.632,00	3.964.460.226,00
Kec. Ciruas	6	11	18	5.815.268.128,00	5.454.314.939,00
Kec. Gunungsari	6	11	19	3.165.391.238,00	2.794.972.112,00
Kec. Jawilan	5	9	18	3.054.066.559,00	2.386.002.465,00
Kec. Kibin	6	11	19	5.788.591.741,00	5.443.800.112,00
Kec. Kopo	5	10	17	3.617.085.083,00	3.563.120.680,00
Kec. Kragilan	6	13	22	6.076.404.296,00	5.756.806.178,00
Kec. Kramatwatu	6	12	22	6.539.127.385,00	6.371.229.421,00
Kec. Lebak Wangi	6	10	19	3.186.042.352,00	3.047.603.697,00
Kec. Mancak	5	11	22	3.433.198.292,00	3.129.086.813,00
Kec. Pabuaran	6	11	22	4.133.960.301,00	3.704.953.759,00
Kec. Padarincang	6	10	18	3.711.282.359,00	3.383.365.266,00
Kec. Pamarayan	6	10	18	3.200.369.155,00	2.939.580.284,00
Kec. Petir	6	12	17	3.382.931.160,00	3.309.226.920,00

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Kec. Pontang	6	11	21	4.715.905.724,00	4.235.202.042,00
Kec. Pulo Ampel	6	11	21	3.125.875.634,00	2.990.992.615,00
Kec. Tanara	6	11	21	4.119.636.718,00	3.389.046.804,00
Kec. Tirtayasa	6	12	24	4.220.042.500,00	3.865.311.406,00
Kec. Tunjung Teja	6	10	15	2.986.933.133,00	2.870.078.428,00
Kec. Waringinkurung	6	12	21	4.420.751.882,00	3.995.562.614,00
Badan KESBANGPOL	6	11	29	54.149.729.200,00	53.794.340.883,00
<b>Jumlah</b>	<b>389</b>	<b>814</b>	<b>1931</b>	<b>3.615.967.850.057,00</b>	<b>3.438.456.744.824,00</b>

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pelayanan masyarakat, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat laboratorium baik untuk kebutuhan puskesmas maupun sekolah.

### 3.2. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
2. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten; dan
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dalam hal ini menggunakan aplikasi SIMOLEK yang dikelola oleh Bagian Bina Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Selain faktor pendukung juga tentunya terdapat faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga proses pelaksanaan APBD tahun 2025 mengalami kendala;
2. Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah;
3. Belum optimalnya ketatalaksanaan dan kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
4. Sistem Pengelola Keuangan Daerah belum terintegrasi dengan SIRUP, ATISISBADA, Pelaporan Pertanggungjawaban dan Kinerja Pemerintah Daerah
5. Masih terdapat fungsi akuntansi pada beberapa perangkat daerah yang tidak memiliki pengetahuan dasar dan keahlian dibidang akuntansi.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang yang disusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2025, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan TA 2025 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama TA 2025. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Operasional digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Serang tahun berjalan. Neraca digunakan untuk melihat dan membandingkan antara Total Aset dengan Kewajiban (Utang) dan Ekuitas.

Laporan Keuangan TA 2025 diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Sisa lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan, Beban, Surplus Defisit LO, Posisi Kas dan setara Kas, Piutang, Investasi, Aset Tetap dan kewajiban (Utang) serta Ekuitas secara bersamaan. Dengan informasi yang komprehensif tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan oleh pembaca/pengguna Laporan Keuangan, yaitu:

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

#### 4.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi di Kabupaten Serang TA 2025 seluruhnya sebanyak 58 unit SKPD, bila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi perubahan nama SKPD yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan . Untuk lebih jelasnya berikut adalah rincian SKPD Pemerintah Kabupaten Serang tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Rincian SKPD Kabupaten Serang Tahun 2025**

No	Nama SKPD 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Dr.Dradjat Prawiranegara
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
17	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
21	Dinas Perikanan
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRD
24	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
25	Badan Pendapatan Daerah
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Inspektorat Daerah
29	Kecamatan Anyar
30	Kecamatan Bandung
31	Kecamatan Baros
32	Kecamatan Binuang

No	Nama SKPD 2025
33	Kecamatan Bojonegara
34	Kecamatan Carenang
35	Kecamatan Cikande
36	Kecamatan Cikeusal
37	Kecamatan Cinangka
38	Kecamatan Ciomas
39	Kecamatan Ciruas
40	Kecamatan Gunungsari
41	Kecamatan Jawilan
42	Kecamatan Kibin
43	Kecamatan Kopo
44	Kecamatan Kragilan
45	Kecamatan Kramatwatu
46	Kecamatan Lebak Wangi
47	Kecamatan Mancak
48	Kecamatan Pabuaran
49	Kecamatan Padarincang
50	Kecamatan Pamarayan
51	Kecamatan Petir
52	Kecamatan Pontang
53	Kecamatan Pulo Ampel
54	Kecamatan Tanara
55	Kecamatan Tirtayasa
56	Kecamatan Tunjung Teja
57	Kecamatan Waringinkurung
58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 4.2. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas masih digunakan untuk mencatat pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Serang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran yang dipergunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang.

#### 4.2.1. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

1. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
2. Penjelasan dari sisa saldo kas yang didalamnya terdapat utang PFK;
3. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

#### 4.2.2. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Deposito Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Surat Berharga, misalnya Obligasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai Penerimaan Kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan maupun penerimaan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi di dalam Laporan Operasional.

#### 4.2.3. Pengukuran Piutang

Piutang Pemerintah Kabupaten Serang secara umum dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

##### 1. Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat berdasarkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Dalam penyusunan Neraca, penerbitan Surat Ketetapan Pajak dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Jika sampai tanggal Laporan Keuangan terdapat ketetapan pajak yang belum dilunasi, pencatatan

piutang dapat didasarkan pada surat/daftar rekapitulasi tagihan piutang pajak.

Informasi mengenai surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dan belum dilunasi dan surat/daftar rekapitulasi tagihan piutang pajak dapat diperoleh dari Satuan Kerja Pemungut Pajak Daerah.

## 2. Piutang Retribusi

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

## 3. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

## 4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

## 5. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

## 6. Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar bagian lancar tagihan

penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

#### 7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak semua piutang dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar (debitur) dapat melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO.

#### Jenis-jenis piutang

Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

- a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, antara lain:
  - 1) Piutang Pajak Daerah;
  - 2) Piutang Retribusi; dan
  - 3) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.
- b. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:
  - 1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
  - 2) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya; dan
  - 3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- c. Piutang dari Perikatan antar Lain:
  - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
  - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

### Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
  - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - 1) Kualitas Lancar;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar;
  - 3) Kualitas Diragukan; dan
  - 4) Kualitas Macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
  - 1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas diragukan Dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
  - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

## 2) Piutang Retribusi

Penggolongan piutang retribusi sebagai berikut:

### a) Kualitas Lancar

- (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

### b) Kualitas Kurang Lancar

- (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

### c) Kualitas Diragukan

- (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau

- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Piutang yang berdasarkan pendapatan transfer tidak dilakukan penyisihan piutang karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan pengakuan serta kebijakan pembayaran sangat bergantung kepada kebijakan pemberi dana transfer.

Pengaturan kualitas piutang yang berasal dari dana BLUD diatur pada kebijakan akuntansi BLUD.

d. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Penghapusan Piutang Daerah

Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Serang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.

b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang

- 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  - a) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
  - b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
    - (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan Bupati; dan/atau
  - i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
  - 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang
- 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
    - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
    - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
    - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
    - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
    - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri

keuangan dunia dan industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;

- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- 2) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan:

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.2.4. Pengukuran Beban Bayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan hasil perhitungan beban yang belum dimanfaatkan/dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### 4.2.5. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO. Penilaian persediaan pada BLUD diatur dalam kebijakan akuntansi BLUD.

#### 4.2.6. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga metode itu adalah:

##### 1. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a. Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Serang kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
- b. Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang, seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

##### 2. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Serang 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). Perhitungan metode ekuitas dapat dilakukan dalam dua cara yaitu:

*Pertama*, dibuat perhitungan *restated* setiap tahun berdasarkan nilai total modal BUMD yang terdapat pada laporan neraca dan laporan perubahan modal yang dikalikan dengan persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah atas BUMD yang bersangkutan.

*Kedua*, dihitung berdasarkan perhitungan *restated* tahun N-1 (seperti cara pertama) sehingga menghasilkan nilai *restated* tahun N-1, nilai

tersebut digunakan sebagai saldo awal untuk perhitungan. Kemudian saldo awal tersebut ditambahkan dengan nilai penyertaan modal tahun N kemudian ditambahkan lagi dengan jumlah perkalian antara persentase saham dan total laba BUMD tahun N yang terdapat pada laporan laba rugi kemudian hasil penjumlahan tersebut dikurangi dengan nilai dividen yang diperoleh pada tahun N. Hasil pengurangan tersebut adalah nilai investasi Pemerintah Daerah pada BUMD yang bersangkutan berdasarkan metode ekuitas.

- a. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Kabupaten Serang mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya.
  - b. Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
  - c. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Serang, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Serang bersifat non permanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

#### 4.2.7. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset Tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya dapat juga menggunakan Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dan gedung/bangunan, serta standar satuan harga/analisa standar belanja dan harga pasar untuk peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Aset tetap yang perolehannya menggunakan dana yang tidak melalui RKUD (Dana BOS, Dana BLUD dan yang sejenisnya) dinilai berdasarkan nilai nominal dari dokumen pengesahan belanja dari BUD.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut.

##### a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Perencanaan;
- 2) Biaya Jasa Penilaian;
- 3) Biaya Persiapan Tempat;
- 4) Biaya Pengiriman Awal (*Initial Delivery*) dan Biaya Simpan dan Bongkar Muat (*Handling Cost*);
- 5) Biaya Pemasangan (*Installation Cost*);
- 6) Biaya Profesional Seperti Arsitek Dan Insinyur;
- 7) Biaya Konstruksi;

- 8) Biaya Pengawasan;
- 9) Biaya Pengujian Aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost); dan
- 10) Biaya Kepanitiaan.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Untuk Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Jika nilai perolehan aset di bawah batasan minimal kapitalisasi maka atas aset tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan Laporan Barang Milik Daerah.

b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan/Pemeliharaan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran tersebut menambah masa manfaat;
- 3) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;
- 4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi.

Terkait dengan penambahan masa manfaat Aset Tetap akibat pengeluaran setelah tanggal perolehan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VIII Peraturan Bupati Serang tentang Kebijakan Akuntansi.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban

pengeluaran (*expenses*) pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

c. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan di mana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa

- 1) Peralatan dan mesin;
- 2) Gedung dan bangunan;
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan; dan

- 4) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi Dan Alat Musik Modern.

Oleh karena itu, Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Tanaman, Buku Perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Perhitungan dan pembebanan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan, dimana penyusutan dihitung satu tahun penuh pada tanggal pelaporan (baik interim maupun tahunan) meskipun baru diperoleh di bulan januari tahun pelaporan atau pun diperoleh pada Bulan Desember tahun pelaporan. Contoh perolehan aset kendaraan pada bulan Maret 2023 maka pada akhir Bulan Desember 2023, aset ini telah dihitung penyusutannya tetap setahun penuh.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai perolehan aset tetap.

Metode penyusutan diterapkan Pemerintah Daerah adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Metode Garis Lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan Metode Garis Lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini berlaku untuk seluruh aset yang disusutkan. Secara lebih lengkap mengenai masa manfaat untuk berbagai aset tetap dapat dilihat pada tabel manfaat di Lampiran VII Peraturan Bupati Serang tentang Kebijakan Akuntansi.

- e. Penghentian dan Pelepasan

Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pemindehan aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang sedangkan penghentian dan pelepasan aset tetap berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- 1) Rusak berat terkena bencana alam/*force majeure*;
- 2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- 3) Terkena planologi kota;
- 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis;
- 7) Hankam;
- 8) Pertimbangan teknis; dan
- 9) Pertimbangan ekonomis.

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus defisit non operasional dari pertukaran aset pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

f. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

#### 4.2.8. Pengukuran Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai SP2D (LS) atas pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank) sesuai dengan proses penganatausahaan.

Penerimaan hasil jasa giro atau bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio diukur sebesar nilai nominal.

#### 4.2.9. Pengukuran Aset Lainnya

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan SKP2K atau Dokumen yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara/pegawai yang bersangkutan yang bersangkutan ke kas umum daerah.

### **1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengukuran pada saat perolehan**

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

- a. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

##### **1) Pembelian**

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang

diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

## 2) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

## 3) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

## 4) Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

### b. Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana telah dijelaskan pada pengakuan ATB mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

### c. Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

## 2. Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB sebesar biaya yang dikeluarkan sesuai dalam kriteria pengakuan ATB.

## 3. Amortisasi

Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset tidak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

### Metode Amortisasi

Metode amortisasi yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus. Pendekatan amortisasi yang dipakai dalam metode ini adalah tahunan. Dengan pendekatan tahun penggunaan ini maka waktu amortisasi ditentukan berdasarkan tahun saat aset tersebut digunakan. Misalkan ada perolehan aset tetap pada bulan oktober, maka beban amortisasi tersebut dihitung satu tahun penuh. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

Beban amortisasi  $\frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat}}$

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Masa Manfaat Barang Milik Daerah**  
**Berupa Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Tahun
Software Komputer	4
Kajian Akademis (Non DED)	5
Lisensi	10
Franchise	5

Uraian	Tahun
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

#### Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

#### 4. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Penghentian, Pelepasan, dan Penghapusan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB berupa pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- Dijual;
- Dipertukarkan;
- D hibahkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam hal penghapusan DED dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

DED yang menjadi aset dalam jangka waktu kurang dari lima tahun diatribusikan pada aset yang dihasilkan;

DED yang menjadi aset dalam jangka waktu lebih dari lima tahun diatribusikan pada aset yang dihasilkan; dan

DED yang tidak menjadi aset dalam waktu lima tahun dihapus dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian, pelepasan dan penghapusan ATB diungkapkan dalam CaLK.

#### Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

#### Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

TDF diakui sebesar nilai yang disalurkan dari RKUN ke rekening TDF.

#### 4.2.10. Investasi

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Apabila properti investasi diperoleh dari reklasifikasi aset tetap, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai buku aset tetap tersebut.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya

perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. Konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- b. Nilai khusus pemerintah daerah dari bagian operasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus pemerintah daerah dari porsi (bagian) operasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa pemerintah daerah menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan. Maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti investasi, kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam Laporan Keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber termasuk:

- a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda) disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

- b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
- c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

#### Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap

menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Karena pemerintah daerah menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

#### Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

#### 4.2.11. Kewajiban

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Serang berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

##### 1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Kabupaten Serang menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

##### 2. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Serang dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

##### 3. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

##### 4. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

##### 5. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Serang juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

###### a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### 4.2.12. Ekuitas

Pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

#### 4.2.13. Pendapatan LRA

Akuntansi Pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Sebagai contoh, pendapatan non kapitasi yang ditransfer oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diterima sebesar tagihan dikurangi biaya transfer.

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### 4.2.14. Pengukuran Belanja dan Transfer

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### 4.2.15. Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.2.16. Pengukuran Pendapatan LO

Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, Perpres SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.

Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

#### **4.2.17. Pengukuran Beban**

Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran dan/atau dokumen pengakuan yang sah.

Nilai nominal bruto yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS dan bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban penyesihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan beban non-kas, seperti beban penyusutan, beban penyesihan piutang tak tertagih antara lain berupa bukti memorial.

#### **4.2.18. Pengukuran Surplus/Defisit Non Operasional**

Surplus/defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO diukur sebesar selisih lebih/kurang antara nilai buku aset non lancar dengan kompensasi yang diterima dari penjualan/ pertukaran/ pelepasan aset non lancar.

Surplus/defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar selisih lebih/kurang antara nilai buku kewajiban jangka panjang dengan nilai yang harus dibayarkan dari penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya atas penurunan nilai investasi yang menggunakan metode ekuitas diukur sebesar selisih kurang dari nilai awal dengan nilai akhir buku investasi non permanen.

#### **4.2.19. Pengukuran Transitoris**

Transaksi transitoris diukur sebesar nilai nominal atas transaksi transitoris tersebut.

## BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 5.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 mencapai Rp3.535.684.299.055,00 atau 98,54% dari target anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp3.588.090.358.285,00 jika dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.490.788.052.662,00 terjadi peningkatan sebesar Rp44.896.246.393,00 atau 1,29%.

Apabila diuraikan berdasarkan kelompok pendapatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, realisasi pendapatan tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 21  
Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.588.090.358.285,00</b>	<b>3.535.532.411.242,00</b>	<b>98,54</b>	<b>3.490.788.052.662,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.097.550.142.214,00</b>	<b>1.107.264.900.400,00</b>	<b>100,89</b>	<b>944.314.942.625,00</b>
Pendapatan Pajak Daerah	725.174.381.504,00	736.179.846.949,00	101,52	573.381.060.252,00
Pendapatan Retribusi Daerah	252.142.584.022,00	270.387.639.630,00	107,24	336.443.197.168,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377,00	18.905.083.376,00	99,86	19.600.932.217,00
Lain-lain PAD Yang Sah	101.301.093.311,00	81.792.330.445,00	80,74	14.889.752.988,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.476.501.530.950,00</b>	<b>2.414.003.256.862,00</b>	<b>97,48</b>	<b>2.535.579.868.449,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat	1.911.841.573.889,00	1.889.706.722.706,00	98,84	1.865.236.733.008,00
Dana Perimbangan	1.911.841.573.889,00	1.889.706.722.706,00	98,84	1.865.236.733.008,00
Bagi Hasil Pajak	139.532.181.000,00	115.750.753.300,00	82,96	129.122.606.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.735.358.000,00	2.639.209.600,00	96,48	5.669.171.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.160.343.768.000,00	1.160.146.105.100,00	99,98	1.125.696.401.999,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	56.211.015.000,00	54.258.654.188,00	96,53	117.577.815.239,00
Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	553.019.251.889,00	556.912.000.518,00	100,70	487.170.738.770,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	361.133.966.000,00	336.491.131.612,00	93,18	360.851.091.000,00
Dana Penyesuaian	361.133.966.000,00	336.491.131.612,00	93,18	360.851.091.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	203.525.991.061,00	187.805.402.544,00	92,28	309.492.044.441,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	178.268.371.061,00	162.547.782.544,00	91,18	284.569.527.143,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	25.257.620.000,00	25.257.620.000,00	100,00	24.922.517.298,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.038.685.121,00</b>	<b>14.416.141.793,00</b>	<b>102,69</b>	<b>10.893.241.588,00</b>
Pendapatan Hibah	11.425.000.000,00	11.802.146.672,00	103,30	10.893.241.588,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.613.685.121,00	2.613.995.121,00	100,01	0,00

Dari uraian realisasi pendapatan tahun 2025, dapat dijelaskan atas masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut:

### 5.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.107.264.900.400,00 atau 100,89% dari anggaran sebesar Rp1.097.550.142.214,00 mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp944.314.942.625,00 terjadi peningkatan sebesar Rp162.949.957.775,00 atau 17,26%. Peningkatan PAD tersebut diakibatkan adanya pemungutan opsen PKB dan BBNKB pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Opsi PKB Dan Opsi BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB.

Adapun rincian per jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pajak yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dikelola serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>725.174.381.504,00</b>	<b>736.179.846.949,00</b>	<b>101,52</b>	<b>573.381.060.252,00</b>
Pajak Reklame	5.310.955.000,00	5.860.352.661,00	110,34	3.875.689.678,00
Pajak Air Tanah	6.519.061.000,00	7.090.503.738,00	108,77	2.646.963.521,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.386.829.000,00	19.799.881.804,00	120,83	46.367.527.613,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	132.567.788.000,00	139.210.083.868,00	105,01	127.896.663.315,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	141.361.686.504,00	134.097.543.915,00	94,86	119.730.327.218,00
PBJT-Makanan dan / atau Minuman	15.483.088.000,00	15.641.076.488,00	101,02	17.260.610.361,00
PBJT-Tenaga Listrik	238.802.632.000,00	247.780.406.576,00	103,76	228.893.945.978,00
PBJT-Jasa Perhotelan	22.705.342.000,00	22.136.686.188,00	97,50	24.053.552.385,00
PBJT-Jasa Parkir	629.070.000,00	657.183.408,00	104,47	611.463.351,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.968.107.000,00	2.009.792.303,00	102,12	2.044.316.832,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	85.690.467.000,00	81.248.169.000,00	94,82	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	57.749.356.000,00	60.648.167.000,00	105,02	0,00

Dapat dijelaskan pada tabel diatas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp736.179.846.949,00 atau 101,52% dari anggaran sebesar Rp725.174.381.504,00. Selisih antara realisasi dengan anggaran sebesar Rp11.005.465.445,00 atau 1,52%.

Realisasi Penerimaan Pajak sebagian besar mencapai target, pendapatan pajak yang mencapai target yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar 120,83%, Pajak Reklame sebesar 110,34%, Pajak Air Tanah sebesar 108,77%, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 105,02, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 105,01, PBJT-Jasa Parkir sebesar 104,47%, PBJT-Tenaga Listrik sebesar 103,76%, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 102,12% dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar 101,02%.

Pendapatan Pajak yang tidak mencapai target adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 94,86% dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 94,82%

Walaupun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2025 mencapai target, namun bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp573.381.060.252,00 meningkat sebesar Rp162.798.786.697,00 atau 28,39%. Peningkatan terjadi pada sebagian besar pajak. Secara nominal peningkatan terbesar terjadi pada PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp8.977.774.576,00, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp6.642.295.868,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.413.052.804,00 dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2.898.811.000,00.

## 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 mencapai Rp270.387.639.630,00 atau 107,24% dari anggaran sebesar Rp252.142.584.022,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2024 sebesar Rp336.443.197.168,00 turun sebesar Rp66.055.557.538,00 atau 19,63%. Penurunan retribusi ini yang cukup signifikan diakibatkan perubahan klasifikasi anggaran pelayanan kesehatan yang dikelola PKM dimana sebelumnya dianggarkan pada BLUD menjadi retribusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7

tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan retribusi daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

**Tabel 23**  
**Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>252.142.584.022,00</b>	<b>270.387.639.630,00</b>	<b>107,24</b>	<b>336.443.197.168,00</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>209.279.644.022,00</b>	<b>228.498.607.113,00</b>	<b>109,18</b>	<b>293.492.071.233,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	205.670.181.632,00	226.242.502.913,00	110,00	291.867.066.633,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.397.241.834,00	1.323.769.200,00	94,74	637.164.600,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	115.500.000,00	116.080.000,00	100,50	115.565.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.096.720.556,00	816.255.000,00	38,93	872.275.000,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>862.940.000,00</b>	<b>787.618.170,00</b>	<b>91,27</b>	<b>1.057.893.045,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	85.500.000,00	51.150.000,00	59,82	298.229.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	98.389.665,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	571.200.000,00	574.604.000,00	100,60	570.106.920,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.000.000,00	3.226.690,00	53,78	5.752.960,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	62.040.000,00	47.940.000,00	77,27	51.414.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	11.500.000,00	28,75	34.000.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	98.200.000,00	99.197.480,00	101,02	0,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>42.000.000.000,00</b>	<b>41.101.414.347,00</b>	<b>97,86</b>	<b>41.893.232.890,00</b>
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	28.000.000.000,00	24.965.882.847,00	89,16	27.696.534.390,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	14.000.000.000,00	16.135.531.500,00	115,25	14.196.698.500,00

Dilihat dari tabel diatas sebagian besar retribusi tidak mencapai target, terdapat 4 pendapatan retribusi yang mencapai target yaitu Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 115,25%, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 110,00%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 100,60% dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 100,50%.

Terdapat 4 pendapatan retribusi terbesar pada tahun 2025 yaitu Retribusi Kesehatan sebesar Rp226.242.502.913,00, Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp24.965.882.847,00, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp16.135.531.500,00 dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp1.323.769.200,00.

Retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan dibawah 50% adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 28,75% dan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 38,93%.

### 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi daerah. Anggaran ditetapkan sebesar Rp18.932.083.377,00 dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2025 sebesar Rp18.905.083.376,00 atau 99,86%. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp19.600.932.217,00 turun sebesar Rp695.848.841,00 atau 3,55%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 24**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024**

BUMD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PT. BPR Serang	3.796.606.023,00	3.769.606.023,00	99,29	3.157.542.332,00
PDAM	1.374.046.657,00	1.374.046.656,00	100,00	1.100.000.000,00
Bank BJB	13.761.430.697,00	13.761.430.697,00	100,00	15.343.389.885,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.932.083.377,00</b>	<b>18.905.083.376,00</b>	<b>99,86</b>	<b>19.600.932.217,00</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 merupakan penerimaan Dividen yang diterima atas penyertaan modal/investasi pada PT. BPR Serang sebesar Rp3.769.606.023,00 berdasarkan hasil RUPS tanggal 18 Maret 2024, Dividen yang diterima atas penyertaan modal/investasi pada PDAM sebesar Rp1.374.046.656,00 berdasarkan hasil RUPS tanggal 26 Agustus 2024 dan Dividen yang diterima atas penyertaan modal/investasi pada Bank BJB sebesar Rp13.761.430.697,00 berdasarkan hasil RUPS bulan April 2023.

### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 mencapai Rp81.792.330.445,00 atau 80,74% dari anggaran sebesar Rp101.301.093.311,00, jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.889.752.988,00 terjadi peningkatan sebesar Rp66.902.577.457,00 atau 449,32%. Peningkatan ini diakibatkan oleh perubahan klasifikasi anggaran pendapatan BLUD sebagaimana telah dijelaskan pada bagian retribusi.

Adapun rincian penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>101.301.093.311,00</b>	<b>81.792.330.445,00</b>	<b>80,74</b>	<b>14.889.752.988,00</b>
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	230.000.000,00	8.068.800,00	3,51	1.183.840.300,00
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Di Pisahkan	742.000.000,00	535.409.825,00	232,79	416.789.825,00
Penerimaan Jasa Giro	4.230.000.000,00	3.568.139.223,00	84,35	3.562.733.922,00
Pendapatan Bunga	0,00	307.739.727,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.100.000.000,00	2.843.815.749,00	91,74	3.878.609.478,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	462.410.600,00	562.984.208,00	121,75	28.380.310,00
Pendapatan Denda Pajak	5.000.000.000,00	3.474.535.302,00	69,49	1.706.884.034,00
Pendapatan Denda Retribusi	200.000.000,00	20.109.262,00	10,05	52.059.016,00
Pendapatan dari Pengembalian	374.716.616,00	2.062.005.508,00	550,28	309.667.840,00
Pendapatan BLUD	86.961.966.095,00	68.409.522.841,00	78,67	3.750.788.263,00

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 terdiri dari:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp8.068.800,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin.
- Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp535.409.825,00 merupakan hasil sewa BMD oleh BPKAD berupa setoran sewa lahan tanah fasum dari Yayasan Pandu Pertiwi sebesar Rp71.009.825,00, serta setoran atas sewa tanah Batu Kuwung dari PT. Pemandian Air Panas Batu Kuwung periode tahun 2018 s/d 2022 sebesar Rp464.400.000 dan tahun 2024 sebesar Rp416.789.825,00.
- Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.568.139.223,00 merupakan jasa giro atas seluruh rekening SKPD dan rekening Kas Daerah.
- Pendapatan Bunga sebesar Rp307.739.727,00 merupakan Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.843.815.749,00 merupakan pendapatan atas temuan kerugian uang maupun kerugian barang karena hasil pemeriksaan oleh aparat APIP maupun Auditor BPK.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp562.984.208,00 merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2025

- g. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp3.474.535.302,00 merupakan pendapatan atas Denda Pajak Daerah.
- h. Pendapatan Denda Retribusi merupakan pendapatan atas Denda Retribusi Daerah sebesar Rp20.109.262,00 antara lain:
  - 1) Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup dari pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp172.500,00
  - 2) Penerimaan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dari pelayanan Pasar Kios sebesar Rp1.410.000,00 dan dari penyediaan fasilitas pasar sebesar Rp8.836.986,00
  - 3) Penerimaan pada Dinas PUPR dari persetujuan bangunan gedung sebesar Rp3.079.716,00.
  - 4) Penerimaan pada DPMPTSP dari penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp6.610.060,00.
- e. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.062.005.508,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta pengembalian lain-lain atas transaksi belanja sebelum Tahun 2025.
- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp68.409.522.841,00. merupakan pendapatan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp64.615.873.012,00 dan RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebesar Rp3.793.649.829,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan BLUD hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga sehingga tidak masuk kategori pelayanan kesehatan yang diklasifikasikan menjadi pendapatan retribusi.

### 5.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp2.414.003.256.862,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp2.476.501.530.950,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.535.579.868.449,00, turun sebesar Rp121.576.611.587,00 atau 4,79%. Pendapatan Transfer dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Pendapatan Transfer TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.476.501.530.950,00</b>	<b>2.414.003.256.862,00</b>	<b>97,48</b>	<b>2.535.579.868.449,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.272.975.539.889,00	2.226.197.854.318,00	97,94	2.226.087.824.008,00
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.911.841.573.889,00</b>	<b>1.889.706.722.706,00</b>	<b>98,84</b>	<b>1.865.236.733.008,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	139.532.181.000,00	115.750.753.300,00	82,96	129.122.606.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.735.358.000,00	2.639.209.600,00	96,48	5.669.171.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.160.343.768.000,00	1.160.146.105.100,00	99,98	1.125.696.401.999,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	56.211.015.000,00	54.258.654.188,00	96,53	117.577.815.239,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	553.019.251.889,00	556.912.000.518,00	100,70	487.170.738.770,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	361.133.966.000,00	336.491.131.612,00	93,18	360.851.091.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	203.525.991.061,00	187.805.402.544,00	92,28	309.492.044.441,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	178.268.371.061,00	162.547.782.544,00	91,18	284.569.527.143,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	25.257.620.000,00	25.257.620.000,00	100,00	24.922.517.298,00

### 1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tahun 2025 mencapai Rp1.889.706.722.706,00 atau 98,84% dari anggaran Rp1.911.841.573.889,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.865.236.733.008,00 terjadi peningkatan sebesar Rp24.469.989.698,00 atau 1,31%. masing-masing dengan rincian obyek sebagai berikut:

#### a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2025 mencapai Rp115.750.753.300,00 atau 82,96% dari anggaran Rp139.532.181.000,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2024 sebesar Rp129.122.606.000,00 turun sebesar Rp13.371.852.700,00 atau 10,36%. Penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak terdiri dari:

**Tabel 27**  
**Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>139.532.181.000,00</b>	<b>115.750.753.300,00</b>	<b>82,96</b>	<b>129.122.606.000,00</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.795.088.000,00	4.438.488.900,00	92,56	4.747.925.000,00
DBH PPh Pasal 21	130.302.582.492,00	107.906.277.300,00	82,81	121.907.061.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN	4.285.241.508,00	3.405.987.100,00	79,48	2.465.223.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	149.269.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00

#### b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tahun 2025 mencapai Rp2.639.209.600,00 atau 96,48% dari anggaran Rp2.735.358.000,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.669.171.000,00 turun sebesar Rp3.029.961.400,00 atau 53,45%. Untuk TA 2025 penerimaan pendapatan ini terdiri dari:

**Tabel 28**  
**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>2.735.358.000,00</b>	<b>2.639.209.600,00</b>	<b>96,48</b>	<b>5.669.171.000,00</b>
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	583.084.000,00	486.935.600,00	83,51	1.428.708.000,00
Bagi Hasil dari Mineral - Batubara (Royalti)	94.479.000,00	94.479.000,00	100,00	1.215.676.000,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	96.361.000,00	96.361.000,00	100,00	142.695.000,00
Bagi Hasil Kehutanan-Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.461.434.000,00	1.461.434.000,00	100,00	1.882.092.000,00
Bagi Hasil Sawit	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00

**c. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA 2025 mencapai Rp.1.160.146.105.100,00 atau 99,98% dari anggaran Rp1.160.343.768.000,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.125.696.401.999,00 terjadi peningkatan sebesar Rp34.449.703.101,00 atau 3,06%. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 29**  
**Dana Alokasi Umum TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>1.160.343.768.000,00</b>	<b>1.160.146.105.100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1.125.696.401.999,00</b>
<b>DAU yang tidak ditentukan penggunaannya</b>	<b>901.347.105.000,00</b>	<b>901.149.442.100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>818.766.262.000,00</b>
DAU	901.347.105.000,00	901.149.442.100,00	99,98	818.766.262.000,00
<b>DAU yang ditentukan penggunaannya</b>	<b>258.996.663.000,00</b>	<b>258.996.663.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>306.930.139.999,00</b>
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.523.813.000,00	10.523.813.000,00	100,00	19.226.631.999,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	141.646.930.000,00	141.646.930.000,00	100,00	187.286.515.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	106.825.920.000,00	106.825.920.000,00	100,00	95.513.917.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	4.903.076.000,00

DAU dengan anggaran sebesar Rp901.347.105.000,00 merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, sedangkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya dengan anggaran sebesar Rp258.996.663.000,00 adalah akumulasi dari DAU, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang

Kesehatan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.

#### d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA 2025 mencapai Rp611.170.654.706,00 atau 100,32% dari anggaran Rp609.230.266.889,00. Apabila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp604.748.554.009,00 terjadi peningkatan sebesar Rp6.422.100.697,00 atau 1,06%. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 30**  
**Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>609.230.266.889,00</b>	<b>611.170.654.706,00</b>	<b>100,32</b>	<b>604.748.554.009,00</b>
Dana Alokasi Khusus Fisik	56.211.015.000,00	54.258.654.188,00	96,53	117.577.815.239,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	553.019.251.889,00	556.912.000.518,00	100,70	487.170.738.770,00

**Tabel 31**  
**Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>56.211.015.000,00</b>	<b>54.258.654.188,00</b>	<b>96,53</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	988.172.000,00	964.888.386,00	97,64
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	299.692.000,00	297.399.470,00	99,24
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	350.441.000,00	348.632.832,00	99,48
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.050.000.000,00	9.141.587.157,00	90,96
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.725.315.000,00	2.622.106.892,00	96,21
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.865.699.000,00	12.354.921.063,00	96,03
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	28.931.696.000,00	28.529.118.388,00	98,61
<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>553.019.251.889,00</b>	<b>556.912.000.518,00</b>	<b>100,70</b>
DAK Non Fisik-TPG PNSD	239.801.928.000,00	241.340.090.800,00	100,64
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	895.000.000,00	3.970.500.000,00	443,63
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.356.747.000,00	11.647.646.124,00	94,26
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	491.675.000,00	491.675.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15.034.915.000,00	14.892.720.200,00	99,05
DAK Non Fisik-PK2UKM	1.684.020.000,00	1.684.020.000,00	100,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	281.227.953,00	70,19
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	728.688.000,00	728.688.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	211.598.829.346,00	211.854.613.637,00	100,12
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.200.500.000,00	4.200.500.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler	24.525.000.000,00	24.521.526.694,00	99,99
DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler	16.563.587.420,00	16.561.089.987,00	99,98
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24.137.702.123,00	24.137.702.123,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>609.230.266.889,00</b>	<b>611.170.654.706,00</b>	<b>100,32</b>

## 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2025 mencapai Rp336.491.131.612,00 atau 93,18% dari anggaran Rp361.133.966.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp360.851.091.000,00 turun sebesar Rp24.359.959.388,00 atau 6,75%. Secara rinci tergambar sebagai berikut:

**Tabel 32**  
**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>361.133.966.000,00</b>	<b>336.491.131.612,00</b>	<b>93,18</b>	<b>360.851.091.000,00</b>
Dana Desa (DD)	347.159.261.000,00	322.559.644.612,00	92,91	334.511.418.000,00
Insentif Fiskal	13.974.705.000,00	13.931.487.000,00	99,69	26.339.673.000,00

Dana Desa (DD) merupakan dana dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Serang yang ditransfer langsung ke Rekening desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Serang yang dialokasikan untuk desa guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp322.559.644.612,00 atau 92,91% dari anggaran sebesar Rp347.159.261.000,00.

Insentif fiskal merupakan dana dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Serang sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Insentif fiskal tahun 2025 sebesar Rp13.931.487.000,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp13.974.705.000,00.

## 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 mencapai Rp162.547.782.544,00 atau 91,18% dari anggaran sebesar Rp178.268.371.061,00. Apabila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp284.569.527.143,00, turun sebesar Rp122.021.744.599,00 atau 42,88%. Secara rinci tergambar sebagai berikut :

**Tabel 33**  
**Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	<b>178.268.371.061,00</b>	<b>162.547.782.544,00</b>	<b>91,18</b>	<b>284.569.527.143,00</b>
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.489.208.790,00	4.489.208.790,00	100,00	63.301.221.093,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	229.739.400,00	3.962.650.200,00	1724,85	54.641.307.300,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.342.373.770,00	67.990.398.640,00	95,30	69.411.927.097,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.254.394.796,00	6.521.515.750,00	104,27	6.894.550.850,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	95.952.654.305,00	79.584.009.164,00	82,94	90.320.520.803,00

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diganti sudah menjadi OPSEN namun tahun ini masih terdapat penerimaan bagi hasil PKB dan BBNKB.

#### 4. Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi – Lainnya merupakan akun untuk menampung Dana transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi. Realisasi anggaran Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp25.257.620.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.257.620.000,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp24.922.517.298,00 terjadi peningkatan sebesar Rp335.102.702,00 atau 1,34%. Secara rinci tergambar sebagai berikut :

**Tabel 34**  
**Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun 2025**

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi Pendapatan	Realisasi Penyerapan	Sisa Dana	Realisasi 2024
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	25.257.620.000,00	25.257.620.000,00	25.257.620.000,00	0,00	24.922.517.298,00
1	KPU Kab Serang		20.044.350.000,00	20.044.350.000,00	0,00	0,00
2	BAWASLU Kab Serang		5.086.645.319,00	5.213.270.000,00	(126.624.681,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.257.620.000,00</b>	<b>25.130.995.319,00</b>	<b>25.257.620.000,00</b>	<b>(126.624.681,00)</b>	<b>0,00</b>
	Pengembalian Sisa Dana		(126.624.681,00)		(126.624.681,00)	0,00
	<b>Total</b>	<b>25.257.620.000,00</b>	<b>25.257.620.000,00</b>	<b>25.257.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.517.298,00</b>

#### 5.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi atas Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2025 sebesar Rp14.416.141.793,00 atau 102,69% dari anggaran sebesar Rp14.038.685.121,00, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.893.241.588,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.522.900.205,00 atau 32,34%. Adapun rincian sebagai berikut:

**Tabel 35**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.038.685.121,00</b>	<b>14.416.141.793,00</b>	<b>102,69</b>	<b>10.893.241.588,00</b>
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	11.425.000.000,00	11.802.146.672,00	103,30	10.893.241.588,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.613.685.121,00	2.613.995.121,00	100,01	0,00

Pendapatan hibah TA 2025 terdapat pada Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri merupakan Dana Partisipasi Air Bersih dan Program Asuransi Kecelakaan Diri Diluar Jam Kerja dan Hubungan Kerja yang diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air bersih dan Asuransi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 36**  
**Rincian Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri**

No	Nama Perusahaan	Realisasi 2025	No. MOU
1	PT. Krakatau Tirta Industri	5.375.000.004,00	No. 970/MOU.12-Huk/2025
2	PT. Sauh Bahtera Samudra	1.371.485.063,00	No. 690/Perj.05-Huk/2011
3	PT. Sarana Catur Tirta Kelola	1.929.693.627,00	No. 690/Perj.30-Huk/2023
4	PT. Modern Industrial Estate	573.792.677,00	No. 690/Perj.993-Huk/2018
5	PT Bumiputra	2.552.175.301,00	No.180/Perj.45-Huk/2023
	<b>Jumlah</b>	<b>11.802.146.672,00</b>	

Selain terdapat pada Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri, Pendapatan Hibah tersebut juga terdapat pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di BPKAD sebesar Rp2.613.995.121,00 merupakan Pengembalian Sisa Dana Hibah PILKADA Tahun 2024.

## 5.2. Belanja

Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.438.456.744.824,00 atau 95,09% dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp3.615.967.850.057,00 turun sebesar Rp46.838.498.097,00 atau 1,34% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.485.295.242.921,00.

Apabila diuraikan berdasarkan kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, realisasi anggarannya sebagai berikut:

**Tabel 37**  
**Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan SAP TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>BELANJA</b>	<b>3.615.967.850.057,00</b>	<b>3.438.456.744.824,00</b>	<b>95,09</b>	<b>3.485.295.242.921,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.787.040.489.327,00</b>	<b>2.674.018.508.144,00</b>	<b>95,94</b>	<b>2.561.521.309.939,00</b>
Belanja Pegawai	1.550.446.482.475,42	1.510.133.055.349,00	97,40	1.325.832.224.608,00
Belanja Barang dan Jasa	1.087.345.292.460,58	1.015.231.541.811,00	93,37	1.050.074.683.873,00
Belanja Bunga	306.250.000,00	306.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	138.849.469.791,00	138.265.199.207,00	99,58	179.022.715.458,00
Belanja Bantuan Sosial	10.092.994.600,00	10.082.673.360,00	99,90	6.591.686.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>262.549.906.930,00</b>	<b>239.311.625.543,00</b>	<b>91,15</b>	<b>428.320.239.751,00</b>
Belanja Modal Tanah	12.497.880.760,00	2.438.830.876,00	19,51	1.161.432.715,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.179.695.669,00	154.131.047.995,00	96,22	132.027.958.530,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.453.296.361,00	39.666.670.093,00	93,44	93.613.564.317,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.508.585.933,00	21.956.401.229,00	86,07	188.198.027.641,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.237.848.207,00	20.622.500.950,00	97,10	12.970.147.048,00
Belanja Modal Aset Lainnya	672.600.000,00	496.174.400,00	73,77	349.109.500,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>11.695.194.400,00</b>	<b>2.498.559.326,00</b>	<b>21,36</b>	<b>397.087.640,00</b>
Belanja Tak Terduga	11.695.194.400,00	2.498.559.326,00	21,36	397.087.640,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>554.682.259.400,00</b>	<b>522.627.840.228,00</b>	<b>94,22</b>	<b>495.056.605.591,00</b>
Belanja Bagi Hasil	77.164.700.400,00	76.871.952.400,00	99,62	37.417.907.591,00
Belanja Bantuan Keuangan	477.517.559.000,00	445.755.887.828,00	93,35	457.638.698.000,00

Dari total belanja daerah tersebut berikut adalah informasi mengenai mandatory spending berdasarkan realisasi belanja tahun 2025 :

**Tabel 38**  
**Realisasi Mandatory Spending Berdasarkan Tahun 2025**

No	Uraian	Realisasi
1	a. Realisasi Anggaran Pendidikan	921.846.394.152,00
	b. Total Realisasi Belanja Daerah	3.438.456.744.824,00
	c. Persentase Belanja Pendidikan (a : b)*100%	26,81
2	a. Belanja Daerah dikurangi Belanja Transfer	2.915.828.692.953,00
	b. Total belanja Infrastruktur Daerah	1.146.453.855.638,00
	c. Persentase Belanja Infrastruktur Daerah (a : b)*100%	254,33
3	a. Belanja Pegawai diluar BP TKD	1.264.822.464.549,00
	b. Total Belanja Dalam APBD	3.438.456.533.241,00
	c. Persentase Belanja Pegawai (a : b)*100%	36,78
4	a. Total Belanja Pengawasan (Inspektorat)	4.142.507.210,00
	b. Total Realisasi Belanja Daerah	3.438.456.533.241,00
	c. Persentase Pengawasan (Inspektorat) (a : b)*100%	0,12

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pendidikan Pemerintah Kabupaten Serang telah memenuhi *mandatory spending* yaitu sebesar 26,81% lebih tinggi 6,81% dari batas minimal yang ditetapkan peraturan yaitu 20,00%. Sedangkan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik mencapai 254,33% masih sudah sesuai dengan target sebesar 40,00%.

Atas realisasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran Kas Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi terdiri dari:

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran gaji PNS dan Tunjangan PNS serta Tambahan Penghasilan PNS (TP-PNS). Secara keseluruhan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.510.133.055.349,00 atau 97,40% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.550.446.482.475,42, terjadi peningkatan sebesar Rp184.300.830.741,00 atau 13,90% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.325.832.224.608,00, Rincian Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	763.914.084.280,90	741.814.371.339,00	97,11	728.160.179.740,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	645.495.228.876,52	635.768.334.366,00	98,49	318.652.775.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	212.159.628.463,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	46.012.786.000,00	45.225.087.861,00	98,29	43.544.745.299,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	978.906.451,00	912.992.902,00	93,27	522.567.550,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.126.100.000,00	1.656.598.638,00	77,92	1.703.157.000,00
Belanja Pegawai BLUD	91.919.376.867,00	84.755.670.243,00	92,21	21.089.170.856,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.550.446.482.475,42</b>	<b>1.510.133.055.349,00</b>	<b>97,40</b>	<b>1.325.832.224.608,00</b>

**Tabel 40**  
**Rincian Anggaran Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025 Dan 2024**

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DISDIK	788.964.239.000,00	785.180.814.468,00	99,52	716.162.122.373,00
DINKES	126.370.535.749,00	122.790.661.538,00	97,17	106.368.718.824,00
RSUD	175.118.503.357,00	163.795.281.983,00	93,53	93.421.590.496,00
DPUPR	30.031.700.000,00	29.331.062.621,00	97,67	28.149.690.409,00
DPRKP	6.711.863.000,00	6.284.149.876,00	93,63	5.851.593.013,00
SATPOL PP	9.196.871.000,00	8.325.613.270,00	90,53	8.176.906.409,00



SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BPBD	8.007.947.000,00	7.723.797.124,00	96,45	7.225.779.143,00
DINSOS	5.840.455.000,00	5.511.821.877,00	94,37	5.730.297.665,00
DISNAKERTRANS	6.886.597.000,00	6.791.593.139,00	98,62	5.988.231.055,00
DKPP	24.359.748.000,00	24.091.849.801,00	98,90	22.373.842.403,00
DLH	11.690.196.000,00	11.198.627.948,00	95,80	10.882.118.485,00
DISDUKCAPIL	13.510.270.000,00	12.751.347.608,00	94,38	11.522.601.296,00
DPMD	6.606.300.000,00	6.046.619.391,00	91,53	6.130.121.254,00
DKBP3A	7.830.219.000,00	7.411.794.354,00	94,66	6.882.535.947,00
DISHUB	10.745.334.000,00	10.637.524.174,00	99,00	9.897.497.531,00
DISKOMINFO	5.409.900.000,00	5.236.687.923,00	96,80	5.045.472.623,00
DISKOPERINDAG	9.031.646.000,00	8.814.591.120,00	97,60	8.512.091.991,00
DPMPTSP	8.758.100.000,00	8.537.030.277,00	97,48	7.813.301.647,00
DISPORAPAR	5.052.518.000,00	4.815.532.878,00	95,31	4.446.972.349,00
DPKD	4.431.057.000,00	4.276.639.403,00	96,52	4.098.267.169,00
DINAS PERIKANAN	7.389.500.000,00	7.000.664.702,00	94,74	6.496.562.102,00
SETDA	32.378.389.325,00	30.747.658.636,00	94,96	27.649.698.688,00
SETWAN	53.012.934.240,00	51.289.177.706,00	96,75	49.306.500.982,00
BAPPERIDA	9.818.600.000,00	9.292.358.354,00	94,64	8.536.813.656,00
BAPENDA	47.913.575.431,42	42.893.455.749,00	89,52	29.210.873.013,00
BPKAD	10.191.754.173,00	9.018.619.398,00	88,49	10.380.966.905,00
BKPSDM	15.486.300.000,00	15.210.400.638,00	98,22	21.579.445.644,00
Inspektorat	21.419.700.000,00	21.043.989.342,00	98,25	17.310.602.725,00
Kec. Anyar	3.096.100.000,00	3.051.487.659,00	98,56	2.827.792.169,00
Kec. Bandung	2.753.335.000,00	2.736.488.540,00	99,39	2.454.090.102,00
Kec. Baros	2.950.477.500,00	2.859.469.376,00	96,92	2.835.518.588,00
Kec. Binuang	2.465.700.000,00	2.291.581.977,00	92,94	2.277.076.425,00
Kec. Bojonegara	2.791.000.000,00	2.601.097.412,00	93,20	2.585.710.535,00
Kec. Carenang	2.479.480.000,00	2.302.717.966,00	92,87	2.332.657.377,00
Kec. Cikande	3.296.600.000,00	3.251.708.999,00	98,64	2.898.429.245,00
Kec. Cikeusal	2.673.200.000,00	2.559.452.051,00	95,74	2.454.383.660,00
Kec. Cinangka	2.995.067.000,00	2.832.408.452,00	94,57	2.670.683.012,00
Kec. Ciomas	2.697.998.000,00	2.697.151.596,00	99,97	2.420.011.176,00
Kec. Ciruas	3.800.316.000,00	3.650.987.208,00	96,07	3.537.971.384,00
Kec. Gunungsari	2.530.400.000,00	2.305.158.433,00	91,10	2.455.516.926,00
Kec. Jawilan	2.497.300.000,00	1.972.027.590,00	78,97	2.359.220.077,00
Kec. Kibin	3.545.750.000,00	3.429.858.133,00	96,73	3.077.060.388,00
Kec. Kopo	2.896.779.000,00	2.882.814.275,00	99,52	2.528.392.882,00
Kec. Kragilan	4.106.370.000,00	3.904.191.521,00	95,08	3.840.286.576,00
Kec. Kramatwatu	4.620.500.000,00	4.528.827.860,00	98,02	4.277.194.923,00
Kec. Lebak Wangi	2.642.800.000,00	2.575.946.426,00	97,47	2.688.197.766,00
Kec. Mancak	2.744.400.000,00	2.606.701.323,00	94,98	2.644.446.403,00

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kec. Pabuaran	2.285.700.000,00	2.082.292.095,00	91,10	2.153.751.524,00
Kec. Padarincang	2.183.200.000,00	2.082.777.656,00	95,40	2.188.708.660,00
Kec. Pamarayan	2.617.645.000,00	2.402.053.345,00	91,76	2.388.242.654,00
Kec. Petir	2.955.400.000,00	2.897.516.542,00	98,04	2.588.069.892,00
Kec. Pontang	2.982.007.000,00	2.712.169.584,00	90,95	2.798.618.446,00
Kec. Pulo Ampel	2.529.434.000,00	2.514.141.592,00	99,40	2.229.332.458,00
Kec. Tanara	2.439.993.700,00	2.395.654.273,00	98,18	2.130.521.076,00
Kec. Tirtayasa	2.653.522.000,00	2.403.712.677,00	90,59	2.488.817.720,00
Kec. Tunjung Teja	2.449.500.000,00	2.352.815.435,00	96,05	2.218.819.104,00
Kec. Waringinkurung	2.748.200.000,00	2.656.917.531,00	96,68	2.343.825.654,00
Kesbangpol	4.853.556.000,00	4.543.562.524,00	93,61	3.987.662.009,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.550.446.482.475,42</b>	<b>1.510.133.055.349,00</b>	<b>97,40</b>	<b>1.325.832.224.608,00</b>

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Realisasi Belanja Barang Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.015.231.541.811,00 atau 93,37% dari anggaran sebesar Rp1.087.345.292.460,58 turun sebesar Rp34.843.142.062,00 atau 3,32% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.050.074.683.873,00.

Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tiap obyek mata anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 41**

**Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Belanja Barang	159.499.013.220,78	141.860.113.435,00	88,94	122.773.943.277,00
Belanja Jasa	433.876.286.453,31	408.422.818.565,00	94,13	335.813.416.289,00
Belanja Pemeliharaan	18.065.880.487,00	16.639.709.165,00	92,11	55.258.236.171,00
Belana Perjalanan Dinas	73.792.780.927,49	66.442.915.000,00	90,04	82.994.555.704,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.550.070.000,00	6.466.071.270,00	98,72	7.429.166.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	155.701.221.160,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	150.171.618.751,00	150.777.285.339,00	100,40	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	23.053.400.761,00	22.662.409.641,00	98,30	22.133.011.824,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	222.336.241.860,00	201.960.219.396,00	90,84	267.971.133.448,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.087.345.292.460,58</b>	<b>1.015.231.541.811,00</b>	<b>93,37</b>	<b>1.050.074.683.873,00</b>

**Tabel 42**  
**Rincian Anggaran Belanja Barang Dan Jasa TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.087.345.292.460,58</b>	<b>1.015.231.541.811,00</b>	<b>93,37</b>
Belanja Barang Pakai Habis	158.364.839.920,78	140.848.859.932,00	88,94
Belanja Barang Tak Habis Pakai	122.008.800,00	120.645.900,00	98,88
Belanja Barang Bekas Dipakai	1.260.000,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.010.904.500,00	890.607.603,00	88,10
Belanja Jasa Kantor	236.943.244.941,19	219.961.336.463,00	92,83
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	95.639.293.921,12	93.926.432.571,00	98,21
Belanja Sewa Tanah	646.800.000,00	646.200.000,00	99,91
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.325.339.000,00	19.376.711.086,00	90,86
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.209.865.000,00	15.666.428.827,00	96,65
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	615.900.000,00	579.166.865,00	94,04
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.875.767.306,00	27.776.584.403,00	92,97
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.488.544.785,00	9.201.831.967,00	87,73
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	549.876.000,00	549.876.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.709.079.500,00	18.884.480.674,00	95,82
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.826.004.000,00	1.826.000.020,00	100,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	46.572.000,00	27.769.689,00	59,63
Belanja Pemeliharaan Tanah	99.619.300,00	87.619.300,00	87,95
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.308.976.344,00	11.287.748.760,00	91,70
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.387.527.847,00	3.090.349.534,00	91,23
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.569.756.996,00	1.513.845.071,00	96,44
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	700.000.000,00	660.146.500,00	94,31
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.792.780.927,49	66.442.915.000,00	90,04
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.747.070.000,00	5.681.739.270,00	98,86
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	803.000.000,00	784.332.000,00	97,68
Belanja Barang dan Jasa BOSP	150.171.618.751,00	150.777.285.339,00	100,40
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	23.053.400.761,00	22.662.409.641,00	98,30
Belanja Barang dan Jasa BLUD	222.336.241.860,00	201.960.219.396,00	90,84

### 3. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga pada per 31 Desember 2025 sebesar Rp306.250.000,00 terdapat pada BPKAD yang merupakan Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta.

### 4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.265.199.207,00 atau 99,58% dari anggaran sebesar Rp138.849.469.791,00 turun sebesar Rp40.757.516.251,00 atau 22,77%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp179.022.715.458,00. Belanja Hibah tersebut dialokasikan untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp154.656.300,00, Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp139.107.750,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp68.528.068.310,00, Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp25.457.334.586,00, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.661.903.000,00 dan Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp41.324.129.261,00.

**Tabel 43**  
**Belanja Hibah**

Uraian/Lembaga Penerima	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>161.500.000,00</b>	<b>154.656.300,00</b>	<b>95,76</b>
<b>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>139.114.550,00</b>	<b>139.107.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>46.478.749.000,00</b>	<b>46.452.124.319,00</b>	<b>99,94</b>
KNPI Kabupaten Serang		250.000.000,00	
KONI Kabupaten Serang		5.400.000.000,00	
PMI Kabupaten Serang		600.000.000,00	
NPCI Kabupaten Serang		200.000.000,00	
PRAMUKA Kabupaten Serang		250.000.000,00	
KORMI Kabupaten Serang		200.000.000,00	
BAWASLU Kabupaten Serang		39.552.124.319,00	
<b>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>17.596.248.429,00</b>	<b>17.006.668.343,00</b>	<b>96,65</b>
Fasos Fasum		19.920.250,00	
DAK Fisik – PAUD		926.716.386,00	
SPAM dan Instalasi Pembangunan Air		15.124.108.696,00	
MCK		212.975.350,00	
Pekerjaan Pembangunan/ Penyediaan		722.947.661,00	

Uraian/Lembaga Penerima	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Karang Taruna		500.000.000,00	
<b>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>199.275.648,00</b>	<b>199.275.648,00</b>	<b>100,00</b>
Pondok Pesantren		179.354.462,00	
Yayasan		9.988.267,00	
Majlis Ta'lim		9.932.919,00	
<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>4.370.000.000,00</b>	<b>4.370.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
FSP		70.000.000,00	
BAZNAS		3.850.000.000,00	
LPTQ Kab.Serang		150.000.000,00	
MUI		300.000.000,00	
<b>Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta</b>	<b>25.413.630.664,00</b>	<b>25.457.334.586,00</b>	<b>100,17</b>
<b>Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>2.661.903.000,00</b>	<b>2.661.903.000,00</b>	<b>100,00</b>
HANURA			
PPP		184.392.000,00	
PDIP		234.015.000,00	
PKB		258.405.000,00	
NASDEM		256.962.000,00	
GOLKAR		552.324.000,00	
DEMOKRAT		242.094.000,00	
GERINDRA		393.120.000,00	
PKS		310.380.000,00	
PAN		230.211.000,00	
<b>Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD</b>	<b>24.418.045.000,00</b>	<b>24.469.926.694,00</b>	<b>100,21</b>
<b>Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan</b>	<b>16.911.003.500,00</b>	<b>16.854.202.567,00</b>	<b>99,66</b>
<b>Total</b>	<b>138.849.469.791,00</b>	<b>138.265.199.207,00</b>	<b>99,58</b>

## 5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.082.673.360,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp10.092.994.600,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.490.987.360,00 atau 52,96%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.591.686.000,00. Berikut ini rincian belanja bantuan sosial:

**Tabel 44**  
**Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.628.000.000,00	9.618.000.000,00	99,90	5.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	958.506.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	464.994.600,00	464.673.360,00	99,93	633.180.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.092.994.600,00</b>	<b>10.082.673.360,00</b>	<b>99,90</b>	<b>6.591.686.000,00</b>

### 5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pos belanja daerah yang ditujukan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp239.311.625.543,00 atau 91,15% dari anggaran sebesar Rp262.549.906.930,00 turun sebesar Rp189.008.614.208,00 atau 44,13%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp428.320.239.751,00. Rincian Belanja Modal TA 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 45**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>262.549.906.930,00</b>	<b>239.311.625.543,00</b>	<b>91,15</b>	<b>428.320.239.751,00</b>
Belanja Modal Tanah	12.497.880.760,00	2.438.830.876,00	19,51	1.161.432.715,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.179.695.669,00	154.131.047.995,00	96,22	132.027.958.530,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.453.296.361,00	39.666.670.093,00	93,44	93.613.564.317,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.508.585.933,00	21.956.401.229,00	86,07	188.198.027.641,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.237.848.207,00	20.622.500.950,00	97,10	12.970.147.048,00
Belanja Modal Aset Lainnya	672.600.000,00	496.174.400,00	73,77	349.109.500,00

**Tabel 46**  
**Belanja Modal Per Jenis Per SKPD TA 2025**

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>262.549.906.930,00</b>	<b>239.311.625.543,00</b>	<b>23.238.281.387,00</b>
<b>5.2.2.1.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>12.497.880.760,00</b>	<b>2.438.830.876,00</b>	<b>10.059.049.884,00</b>
1	DPUPR	497.880.760,00	235.101.292,00	262.779.468,00
2	BPKAD	12.000.000.000,00	2.203.729.584,00	9.796.270.416,00
<b>5.2.2.2.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>160.179.695.669,00</b>	<b>154.131.047.995,00</b>	<b>6.048.647.674,00</b>
1	DISDIK	71.358.781.094,00	70.403.946.752,00	954.834.342,00
2	DINKES	8.700.324.842,00	7.749.289.694,00	951.035.148,00
3	RSUD	46.862.873.751,00	45.049.196.698,00	1.813.677.053,00



No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)
4	DPUPR	9.077.417.000,00	8.673.048.007,00	404.368.993,00
5	DPRKP	399.991.900,00	387.512.100,00	12.479.800,00
6	BPBD	534.479.500,00	496.601.140,00	37.878.360,00
7	DINSOS	127.000.000,00	117.900.000,00	9.100.000,00
8	DISNAKERTRANS	141.049.462,00	132.274.770,00	8.774.692,00
9	DKPP	1.248.167.268,00	1.206.805.128,00	41.362.140,00
10	DLH	3.247.790.625,00	3.193.516.050,00	54.274.575,00
11	DISDUKCAPIL	1.007.301.150,00	974.521.448,00	32.779.702,00
12	DPMD	136.230.000,00	135.857.750,00	372.250,00
13	DKBP3A	120.744.000,00	112.595.070,00	8.148.930,00
14	DISHUB	607.000.000,00	597.389.280,00	9.610.720,00
15	DISKOMINFO	2.062.554.313,00	1.495.816.220,00	566.738.093,00
16	DISKOPERINDAG	1.007.648.931,00	967.777.452,00	39.871.479,00
17	DPMPSTP	394.502.750,00	338.436.780,00	56.065.970,00
18	DISPORAPAR	142.726.350,00	138.128.400,00	4.597.950,00
19	DPKD	3.481.796.450,00	3.338.735.799,00	143.060.651,00
20	DINAS PERIKANAN	214.665.000,00	205.091.065,00	9.573.935,00
21	SETDA	1.943.599.783,00	1.857.541.049,00	86.058.734,00
22	SETWAN	894.551.200,00	769.218.900,00	125.332.300,00
23	BAPPERIDA	393.260.000,00	392.299.999,00	960.001,00
24	BAPENDA	3.229.295.000,00	3.051.951.717,00	177.343.283,00
25	BPKAD	1.659.008.000,00	1.271.423.697,00	387.584.303,00
26	BKPSDM	215.250.000,00	181.427.280,00	33.822.720,00
27	Inspektorat	169.788.000,00	163.647.500,00	6.140.500,00
28	Kec. Anyar	89.950.000,00	87.813.210,00	2.136.790,00
29	Kec. Bandung	20.619.000,00	18.315.000,00	2.304.000,00
30	Kec. Binuang	32.160.000,00	26129400	6.030.600,00
31	Kec. Cinangka	85.680.000,00	68.373.200,00	17.306.800,00
32	Kec. Ciomas	63.730.000,00	52.558.500,00	11.171.500,00
33	Kec. Ciruas	15.708.000,00	15.705.390,00	2.610,00
34	Kec. Gunungsari	54.570.000,00	52170000	2.400.000,00
35	Kec. Kibin	16.556.000,00	16.095.000,00	461.000,00
36	Kec. Kopo	37.260.000,00	36.924.150,00	335.850,00
37	Kec. Kragilan	3.300.000,00	3.196.800,00	103.200,00
38	Kec. Kramatwatu	23.462.000,00	22.557.420,00	904.580,00
39	Kec. Mancak	61.868.000,00	38.119.620,00	23.748.380,00
40	Kec. Pabuaran	36.210.000,00	34594000	1.616.000,00
41	Kec. Pamarayan	14.510.000,00	14.500.000,00	10.000,00
42	Kec. Pulo Ampel	19.180.000,00	19.036.500,00	143.500,00
43	Kec. Tanara	17.730.000,00	16.650.000,00	1.080.000,00
44	Kec. Tirtayasa	32.326.000,00	30.682.000,00	1.644.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)
45	Kec. Waringinkurung	14.262.500,00	13.848.360,00	414.140,00
46	Kesbangpol	162.817.800,00	161.829.700,00	988.100,00
<b>5.2.2.3.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>42.453.296.361,00</b>	<b>39.666.670.093,00</b>	<b>2.786.626.268,00</b>
1	DISDIK	4.090.660.051,00	3.849.176.993,00	241.483.058,00
2	DINKES	8.639.746.582,00	7.610.350.942,00	1.029.395.640,00
3	RSUD	8.927.190.000,00	8.858.022.490,00	69.167.510,00
4	DPUPR	7.119.384.493,00	6.789.043.374,00	330.341.119,00
5	DPRKP	1.659.924.950,00	1.568.260.480,00	91.664.470,00
6	DKBP3A	2.516.390.285,00	2420480035	95.910.250,00
7	DPKD	9.500.000.000,00	8.571.335.779,00	928.664.221,00
<b>5.2.2.4.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>25.508.585.933,00</b>	<b>21.956.401.229,00</b>	<b>3.552.184.704,00</b>
1	DINKES	97.096.845,00	63.737.385,00	33.359.460,00
2	RSUD	3.195.705.949,00	3.184.983.000,00	10.722.949,00
3	DPUPR	12.608.963.139,00	9.569.233.994,00	3.039.729.145,00
4	DISHUB	9.606.820.000,00	9.138.446.850,00	468.373.150,00
<b>5.2.2.5.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>21.237.848.207,00</b>	<b>20.622.500.950,00</b>	<b>615.347.257,00</b>
1	DISDIK	20.878.116.607,00	20.265.200.950,00	612.915.657,00
2	DPKD	359.731.600,00	357.300.000,00	2.431.600,00
<b>5.2.2.6.</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>672.600.000,00</b>	<b>496.174.400,00</b>	<b>176.425.600,00</b>
1	DISKOMINFO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2	SETDA	100.000.000,00	97.724.400,00	2.275.600,00
3	BAPENDA	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
4	BPKAD	350.000.000,00	348.500.000,00	1.500.000,00
5	BKPSDM	200.000.000,00	49.950.000,00	150.050.000,00

Belanja modal tersebut tidak seluruhnya menjadi aset tetap karena menurut Kebijakan Akuntansi Kabupaten Serang, aset tetap yang nilainya di bawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 tidak dicatat sebagai aset tetap pada Neraca Pemerintah Daerah melainkan dicatat sebagai ekstrakomptabel.

#### 5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.438.830.876,00 atau 19,51% dari anggaran sebesar Rp12.497.880.760,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.277.398.161,00 atau 109,98% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.161.432.715,00.

**Tabel 47**  
**Rincian Belanja Modal Tanah Berdasarkan Jenis TA 2025**

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Tanah Persil	12.400.000.000,00	2.407.890.376,00	19,42	726.771.123,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	97.880.760,00	30.940.500,00	31,61	434.661.592,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.497.880.760,00</b>	<b>2.438.830.876,00</b>	<b>19,51</b>	<b>1.161.432.715,00</b>

### 5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.131.047.995,00 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp160.179.695.669,00 terjadi peningkatan sebesar Rp22.103.089.465,00 atau 16,74%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp132.027.958.530,00. Berikut rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

**Tabel 48**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis TA 2025**

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.459.522.000,00	6.416.853.652,00	99,34	3.128.335.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.772.449.000,00	2.734.298.998,00	98,62	46.575.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.136.900.000,00	4.675.858.001,00	91,02	3.963.300.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.190.000,00	4.084.800,00	97,49	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	68.449.000,00	66.705.000,00	97,45	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.022.000,00	4.900.000,00	97,57	14.200.000,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	150.000.000,00	141.525.000,00	94,35	45.720.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	45.654.000,00	38.636.480,00	84,63	97.634.000,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	4.829.165.780,00	4.200.970.773,00	86,99	3.220.963.000,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61.776.376.729,00	59.866.042.854,00	96,91	61.443.011.571,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	244.300.000,00	238.755.450,00	97,73	388.800.000,00
12	Belanja Modal Alat Studio	1.168.806.950,00	1.051.403.645,00	89,96	2.962.881.000,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	59.157.000,00	41.994.960,00	70,99	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	36.037.151.501,00	35.947.497.414,00	99,75	16.663.256.085,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	376.148.052,00	0,00	0,00	30.418.400,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	114.061.125,00	94.801.300,00	83,11	40.933.200,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	258.000.000,00	256.761.601,00	99,52	49.849.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.895.096.000,00	1.895.096.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	339.300.000,00	338.406.000,00	99,74	2.013.960.000,00
20	Belanja Modal Komputer Unit	5.261.902.283,00	4.986.100.223,00	94,76	5.109.818.300,00
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.794.962.360,00	2.612.272.943,00	93,46	2.735.616.600,00
22	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.680.000.000,00	1.580.000.000,00	94,05	1.149.500.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
23	Belanja Modal Alat Pelindung	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75	39.400.000,00
24	Belanja Modal Alat SAR	155.702.000,00	154.350.495,00	99,13	8.785.000,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	74.467.462,00	69.301.770,00	93,06	0,00
26	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	585.260.000,00	575.699.280,00	98,37	636.590.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	42.150.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.730.198.133,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	20.866.793.594,00	20.823.607.501,00	99,79	16.588.983.572,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	11.028.500,00	11.728.500,00	106,35	0,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.969.830.333,00	5.263.895.355,00	75,52	5.877.080.669,00
<b>Jumlah</b>		<b>160.179.695.669,00</b>	<b>154.131.047.995,00</b>	<b>96,22</b>	<b>132.027.958.530,00</b>

### 5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.666.670.093,00 atau 93,44% dari anggaran sebesar Rp42.453.296.361,00 turun sebesar Rp53.946.894.224,00 atau 57,63%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp93.613.564.317,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp39.655.102.513,00 dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp11.567.580,00.

### 5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.956.401.229,00 atau 86,07% dari anggaran sebesar Rp25.508.585.933,00 turun sebesar Rp166.241.626.412,00 atau 88,33%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp188.198.027.641,00. Berikut rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:

**Tabel 49**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**  
**Berdasarkan Jenis TA 2025**

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan	11.962.070.754,00	8.923.771.089,00	74,60	163.835.992.087,00
2	Belanja Modal Jembatan	444.445.349,00	444.176.900,00	99,94	8.927.220.727,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	40.939.159,00	40.923.400,00	99,96	5.701.896.618,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	96.566.665,00
5	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	349.983.000,00	349.983.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.845.522.949,00	2.835.000.000,00	99,63	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	161.507.877,00	160.362.605,00	99,29	3.324.775.144,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
8	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	299.500.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	1.812.800.000,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	9.606.820.000,00	9.138.446.850,00	95,12	4.168.496.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	97.296.845,00	63.737.385,00	65,51	30.780.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.508.585.933,00</b>	<b>21.956.401.229,00</b>	<b>86,07</b>	<b>188.198.027.641,00</b>

#### 5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.622.500.950,00 atau 97,10% dari anggaran sebesar Rp21.237.848.207,00 terjadi peningkatan sebesar Rp7.652.353.902,00 atau 59,00%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12.970.147.048,00. Berikut rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

**Tabel 50**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenis TA 2025**

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	942.750.000,00	930.334.843,00	98,68	343.181.000,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	123.401.600,00	122.450.000,00	99,23	209.800.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.040.264.688,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	20.169.771.607,00	19.565.646.107,00	97,00	9.376.901.360,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	1.925.000,00	4.070.000,00	211,43	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.237.848.207,00</b>	<b>20.622.500.950,00</b>	<b>97,10</b>	<b>12.970.147.048,00</b>

#### 5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Per 31 Desember 2025 Belanja Modal Aset Lainnya terdapat pada Aset Tidak Berwujud yang terealisasi sebesar Rp496.174.400,00 atau 73,77% dari anggaran sebesar Rp672.600.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 51**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.600.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	571.000.000,00	398.450.000,00	69,78
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000,00	97.724.400,00	97,72
<b>Jumlah</b>		<b>672.600.000,00</b>	<b>496.174.400,00</b>	<b>73,77</b>

#### 5.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang.

Realisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.498.559.326,00 atau 21,36% dari anggaran sebesar Rp11.695.194.400,00, terjadi peningkatan sebesar Rp2.101.471.686,00 atau 529,22%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp397.087.640,00. Rincian Belanja Tak Terduga TA 2025 adalah sebagai berikut

**Tabel 52**  
**Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025**

No	Uraian	Penerbitan SP2D	Pengembalian	Realisasi BTT
1	Restitusi PBB P2 dan BPHTB	29.983.088,00	0,00	29.983.088,00
2	Penyelesaian Utang PT LKM Ciomas	1.891.411.531,00	0,00	1.891.411.531,00
3	Tanggap Darurat Bencana Kontaminasi Radionuklida Cesium-137 di Cikande	324.937.936,00	39.520.992,00	285.416.944,00
4	Deposit untuk Pengiriman Sampah PD. Pandeglang Berkah Maju	2.160.000.000,00	1.868.252.237,00	291.747.763,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.406.332.555,00</b>	<b>1.907.773.229,00</b>	<b>2.498.559.326,00</b>

### 5.3. Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp522.627.840.228,00 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp554.682.259.400,00 terjadi peningkatan sebesar Rp27.571.234.637,00 atau 5,57%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp495.056.605.591,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 53**  
**Rincian Transfer Tahun 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>TRANSFER</b>	<b>554.682.259.400,00</b>	<b>522.627.840.228,00</b>	<b>94,22</b>	<b>495.056.605.591,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>77.164.700.400,00</b>	<b>76.871.952.400,00</b>	<b>99,62</b>	<b>37.417.907.591,00</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	72.517.440.000,00	72.517.440.000,00	100,00	30.953.122.353,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.647.260.400,00	4.354.512.400,00	93,70	6.464.785.238,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>477.517.559.000,00</b>	<b>445.755.887.828,00</b>	<b>93,35</b>	<b>457.638.698.000,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	477.517.559.000,00	445.755.887.828,00	93,35	457.638.698.000,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	477.517.559.000,00	445.755.887.828,00	93,35	457.638.698.000,00

Realisasi transfer tersebut terbagi atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp72.517.440.000,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp4.354.512.400,00, Transfer Bagi Hasil tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (BHPRD) Tahun 2025.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yaitu merupakan Bantuan keuangan khusus ke desa yang sebesar Rp445.755.887.828,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 54**  
**Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	347.159.261.000,00	322.559.644.612,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	130.358.298.000,00	123.196.243.216,00
<b>Jumlah</b>	<b>477.517.559.000,00</b>	<b>445.755.887.828,00</b>

Pada tahun 2025 ini seluruh bantuan keuangan ke desa dianggarkan pada bantuan keuangan khusus tidak lagi pada bantuan keuangan umum karena bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa peruntukannya sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

#### 5.4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah. Pembiayaan dipergunakan untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun yang lalu, Penerimaan Piutang Daerah, Pinjaman Daerah dan Penyertaan Modal/Investasi Daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah.

**Tabel 55**  
**Pembiayaan TA 2025 Dan 2024**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>65.877.491.772,00</b>	<b>65.849.910.544,00</b>	<b>99,96</b>	<b>32.866.807.668,00</b>
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	30.877.491.772,00	30.849.910.544,00	<b>99,91</b>	32.866.807.668,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.482.125.637,00</b>

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	2.482.125.637,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>27.877.491.772,00</b>	<b>27.849.910.544,00</b>	<b>99,90</b>	<b>25.384.682.031,00</b>

Pagu Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp65.877.491.772,00, direalisasikan sebesar Rp65.849.910.544,00 atau 99,96%. Realisasi penerimaan ini berasal dari SiLPA tahun 2024 sebesar Rp32.866.807.668,00.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.000.000.000,00 Realisasi tersebut merupakan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Al-Bantani sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp35.000.000.000,00.

Adapun Pembiayaan TA 2025 tertuang dalam PERDA No 13 Tahun 2020 yang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Al-Bantani, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat, Perseroan Terbatas Serang Berkah Mandiri, Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas.

#### 5.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA merupakan selisih antara Surplus/(Defisit) dan Pembiayaan Neto. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.077.464.775,00 terjadi peningkatan sebesar Rp94.199.973.003,00 atau 305,08%, jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2024 sebesar Rp30.877.491.772,00. SiLPA Tahun 2024 terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 56**  
**SiLPA TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
SURPLUS / DEFISIT	(27.877.491.772,00)	97.227.554.231,00	(348,77)	5.492.809.741,00
PEMBIAYAAN NETTO	27.877.491.772,00	27.849.910.544,00	99,90	25.384.682.031,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.077.464.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.877.491.772,00</b>

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

#### 5.6. Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 sebesar Rp30.877.491.772,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir TA 2024. SAL Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp30.849.821.961,00 terdapat selisih Rp27.581.228,00. Selanjutnya ditambah SiLPA dengan TA 2025 sebesar Rp125.077.464.775,00 sehingga menghasilkan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 125.077.464.775,00. Bila dibandingkan dengan saldo kas pada Neraca

sebesar Rp125.077.464.775,00 maka tidak terdapat selisih diantara keduanya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 57**  
**Saldo Akhir Kas 2025**

Uraian	Saldo
Kas di Kas Daerah	91.566.450.186,00
Kas di BLUD	31.369.511.553,00
Kas Dana BOS	0,00
Kas Dana BOSP	1.748.335.792,00
Kas Dana BOK Puskesmas	393.167.244,00
<b>Jumlah</b>	<b>125.077.464.775,00</b>

Dalam Kas di Kas Daerah sebesar Rp125.077.464.775,00, terdapat dana untuk kegiatan yang dianggarkan kembali di tahun 2026 sebesar Rp15.807.966.203,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 58**  
**Rincian Dana Kegiatan yang dianggarkan kembali per SKPD ditahun 2025**

No	SKPD	Hasil Verifikasi
1	DISDIK	195.306.862,00
2	DINKES	549.633.943,00
3	DPUPR	12.936.446.416,00
4	DPRKP	572.135.915,00
5	DKPP	27.887.200,00
6	DISHUB	359.906.400,00
7	DISKOMINFOSATIK	1.159.323.467,00
8	DPMPSTSP	7.326.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.807.966.203,00</b>

Rincian atas kegiatan yang dianggarkan kembali per SKPD terdapat pada lampiran catatan atas laporan keuangan.

## PENJELASAN POS-POS AKUN NERACA

### 5.7. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut adalah penjabaran aset Pemerintah Kabupaten Serang selama tahun 2025:

**Tabel 59**  
**Aset per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang	%
1	Aset Lancar	371.620.540.160,34	209.662.848.353,52	161.957.691.806,82	77,25
2	Investasi Jangka Panjang	201.350.170.232,53	193.271.561.951,21	8.078.608.281,32	4,18
3	Aset Tetap	4.148.733.824.913,67	4.201.664.442.044,33	(52.930.617.130,66)	(1,26)
4	Aset Lainnya	194.298.400.585,37	304.328.131.913,40	(110.029.731.328,03)	(36,15)
5	Properti Investasi	245.178.545.141,84	25.303.239.942,00	219.875.305.199,84	868,96
	<b>Jumlah</b>	<b>5.161.181.481.033,75</b>	<b>4.934.230.224.204,46</b>	<b>226.951.256.829,29</b>	<b>4,60</b>

Berdasarkan rincian Aset sebelumnya terlihat bahwa terjadi peningkatan aset sebesar Rp226.951.256.829,29 atau 4,60%, jika dibandingkan dengan aset sebelumnya yang mengalami peningkatan paling tinggi diantara yang lain adalah Aset Lancar sebesar 77,25% yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

### 5.7.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

**Tabel 60**  
**Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Kas Daerah	91.566.450.186,00	989.990.483,00	90.576.459.703,00
Kas di BLUD	31.369.511.553,00	28.760.698.178,00	2.608.813.375,00
Kas Lainnya (Dana BOS)	1.748.335.792,00	312.197.540,00	1.436.138.252,00
Kas Lainnya (Dana BOK)	393.167.244,00	835.519.877,00	(442.352.633,00)
Piutang Pajak Daerah	320.360.865.198,00	307.939.220.794,60	12.421.644.403,40
Piutang Retribusi Daerah	32.696.564.330,00	29.513.922.531,00	3.182.641.799,00
Piutang Pendapatan Lainnya	4.995.745.883,69	4.194.117.555,00	801.628.328,69
Piutang Lancar Lainnya	40.105.945.052,00	10.128.976.243,00	29.976.968.809,00
Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi	322.950.355,00	362.827.753,00	(39.877.398,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(246.317.478.294,52)	(236.782.624.768,66)	(9.534.853.525,86)
Beban Dibayar Dimuka	6.163.100.101,00	709.116.345,27	5.453.983.755,73
Persediaan	88.215.382.760,17	62.698.885.822,31	25.516.496.937,86
<b>Jumlah</b>	<b>371.620.540.160,34</b>	<b>209.662.848.353,52</b>	<b>161.957.691.806,82</b>

#### 1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp91.566.450.186,00 Apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp989.990.483,00 terjadi

peningkatan sebesar Rp90.576.459.703,00 Saldo tersebut berada pada rekening kas umum pada bank BJB Nomor 0070030042013.

Dalam saldo Kas di Kas Daerah terdapat sisa Kas DAK sebesar Rp7.784.117.395,00 yang terdiri dari Sisa Kas DAK Fisik sebesar Rp2.414.424.372,00 dan Sisa Kas DAK Non Fisik sebesar Rp5.369.693.023,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 61**  
**Rincian Sisa DAK**

No	SKPD	Jenis DAK	Sisa Dana
1	DKBPPPA	BOKB	414.182.459,00
2	DINKES	BOK	765.149.541,00
		BOKPOM	47.485.523,00
		Insentif Nakes	279.081.982,00
3	DKBPPPA	PPPA	58.824.993,00
4	DISKOPERINDAG	PK2UMK	118.717.500,00
5	DPMPTSP	FPM	101.412.800,00
6	DISDIK	TAMSIL	393.855.825,00
		TPG	3.131.206.800,00
7	DKPP	KPP	26.387.600,00
		KPP-BOPP	33.388.000,00
		<b>Jumlah DAK Non Fisik</b>	<b>5.369.693.023,00</b>
1	DISDIK	PAUD	18.603.300,00
		SD	9.000.000,00
		SMP	9.097.350,00
		Perpustakaan	2.371.224.256,00
2	DKBP3A	Keluarga Berencana	50.000,00
3	DINKES & RSDP	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	6.449.461,00
4	DPUPR	Air Minum	5,00
		<b>Jumlah DAK Fisik</b>	<b>2.414.424.372,00</b>
		<b>Total</b>	<b>7.784.117.395,00</b>

## 2. Kas di BLUD

Saldo di BLUD Tahun 2025 senilai Rp31.369.511.553,00 terdiri dari saldo Kas pada BLUD RSUD sebesar Rp26.733.249.162,00 dan Saldo Kas pada BLUD Dinas Kesehatan senilai Rp4.636.262.391,00.

Kas Di BLUD RSUD tahun 2025 sebesar Rp26.733.249.162,00 terjadi peningkatan sebesar Rp919.576.925,00 jika dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD RSUD Tahun 2024 sebesar Rp25.813.672.237,00.

Kas di BLUD Puskesmas dan Labriskes Tahun 2025 sebesar Rp4.636.262.391,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.689.236.450,00 jika dibandingkan dengan saldo Kas Di BLUD Puskesmas dan Labriskes Tahun 2024 sebesar Rp2.947.025.941,00.

Kas BLUD Puskesmas dan Labriskes mencakup saldo akhir kas dari 31 BLUD Puskesmas dan 1 BLUD Labrikes. Rincian saldo masing-masing BLUD dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 62**  
**Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labrikes per 31 Desember 2025**

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
1	Puskesmas Anyar	78.347.812,00	2.551.448.432,00	2.483.375.097,00	146.421.147,00
2	Puskesmas Ban dung	155.010.243,00	1.833.181.747,00	1.775.617.912,00	212.574.078,00
3	Puskesmas Baros	22.772.299,00	2.828.962.210,00	2.841.964.302,00	9.770.207,00
4	Puskesmas Binuang	23.099.214,00	1.304.391.729,00	1.296.238.279,00	31.252.664,00
5	Puskesmas Bojonegara	185.750.359,00	2.369.309.390,00	2.323.421.841,00	231.637.908,00
6	Puskesmas Carenang	6.223.232,00	2.423.296.634,00	2.423.474.867,00	6.044.999,00
7	Puskesmas Cikande	203.899.775,00	3.230.038.691,00	3.302.782.256,00	131.156.210,00
8	Puskesmas Cikeusal	43.514.531,00	4.211.472.797,00	4.150.253.386,00	104.733.942,00
9	Puskesmas Cinangka	214.184.341,00	3.327.336.637,00	3.423.472.520,00	118.048.458,00
10	Puskesmas Ciomas	236.330.090,00	3.485.742.038,00	3.411.388.003,00	310.684.125,00
11	Puskesmas Ciruas	50.813.180,00	3.806.389.396,00	3.818.004.370,00	39.198.206,00
12	Puskesmas Gunung Sari	7.169.042,00	1.150.400.706,00	1.126.321.957,00	31.247.791,00
13	Puskesmas Jawilan	99.228.928,00	3.283.570.302,00	3.285.315.513,00	97.483.717,00
14	Puskesmas Kibin	89.273.730,00	1.384.151.515,00	1.288.092.225,00	185.333.020,00
15	Puskesmas Kopo	65.284.719,00	1.489.914.207,00	1.461.682.520,00	93.516.406,00
16	Puskesmas Kragilan	91.830.290,00	1.809.563.344,00	1.865.879.198,00	35.514.436,00
17	Puskesmas Kramatwatu	49.616.609,00	4.003.429.617,00	3.991.044.860,00	62.001.366,00
18	Puskesmas Lebak Wangi	153.310.031,00	1.690.453.740,00	1.733.070.345,00	110.693.426,00
19	Puskesmas Mancak	60.070.505,00	2.373.667.732,00	2.233.023.967,00	200.714.270,00
20	Puskesmas Nyompok	16.467.342,00	1.460.159.798,00	1.385.718.468,00	90.908.672,00
21	Puskesmas Pabuaran	84.188.875,00	2.044.226.443,00	1.905.119.274,00	223.296.044,00
22	Puskesmas Padarincang	168.540.214,00	3.521.443.957,00	3.336.289.280,00	353.694.891,00
23	Puskesmas Pamarayan	182.585.969,00	4.011.580.247,00	3.837.995.857,00	356.170.359,00
24	Puskesmas Pematang	23.365.704,00	963.898.973,00	957.470.365,00	29.794.312,00
25	Puskesmas Petir	75.303.872,00	3.366.669.422,00	3.336.449.231,00	105.524.063,00
26	Puskesmas Pontang	14.116.325,00	3.861.433.564,00	3.661.238.627,00	214.311.262,00
27	Puskesmas Puloampel	78.449.666,00	1.518.541.550,00	1.504.081.539,00	92.909.677,00
28	Puskesmas Tanara	55.153.579,00	2.397.163.352,00	2.380.833.865,00	71.483.066,00
29	Puskesmas Tunjungteja	108.215.340,00	2.469.031.520,00	2.309.396.077,00	267.850.783,00
30	Puskesmas Tirtayasa	187.406.110,00	2.828.748.162,00	2.779.777.228,00	236.377.044,00
31	Puskesmas Waringinkurung	103.828.145,00	2.478.659.425,00	2.456.528.374,00	125.959.196,00
32	Laboratorium Kesehatan	13.675.870,00	1.487.038.835,00	1.190.758.059,00	309.956.646,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.947.025.941,00</b>	<b>80.965.316.112,00</b>	<b>79.276.079.662,00</b>	<b>4.636.262.391,00</b>

### 3. Kas Lainnya – Dana BOSP

Kas Dana BOS merupakan Kas yang dikelola langsung oleh sekolah. Dana tersebut merupakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat langsung kepada pihak sekolah. Sisa nilai kas dana BOS per 31 Desember 2025 yang masih berada di sekolah senilai Rp1.748.335.792,00 Nilai Kas Dana BOS tahun 2025 naik sebesar Rp1.436.138.252,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp312.197.540,00. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 63**  
**Kas Dana BOSP**

No	Uraian	Jumlah
1	SD	1.186.441.174,00
2	SMP	561.894.618,00
<b>Total</b>		<b>1.748.335.792,00</b>

### 4. Kas Lainnya - Dana BOK

Saldo Dana BOK per 31 Desember 2025 sebesar Rp393.167.244,00 merupakan Dana BOK yang disalurkan langsung ke rekening operasional pengelolaan Dana BOK pada masing-masing Puskesmas. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 64**  
**Kas Dana BOK**

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
1	Puskesmas Anyar	154.832.001,00	950.210.999,00	993.949.611,00	111.093.389,00
2	Puskesmas Bandung	2.088.000,00	693.341.000,00	690.747.451,00	4.681.549,00
3	Puskesmas Baros	2.047.000,00	870.790.000,00	872.638.807,00	198.193,00
4	Puskesmas Binuang	12.063.874,00	513.918.126,00	524.801.910,00	1.180.090,00
5	Puskesmas Bojonegara	4.436.360,00	877.679.640,00	869.907.804,00	12.208.196,00
6	Puskesmas Carenang	3.834.000,00	573.883.000,00	576.989.620,00	727.380,00
7	Puskesmas Cikande	2.063.000,00	1.201.047.000,00	1.202.373.467,00	736.533,00
8	Puskesmas Cikeusal	21.573.785,00	871.179.215,00	892.615.754,00	137.246,00
9	Puskesmas Cinangka	6.456.060,00	842.275.940,00	844.693.573,00	4.038.427,00
10	Puskesmas Ciomas	5.602.143,00	718.630.857,00	722.819.931,00	1.413.069,00
11	Puskesmas Ciruas	7.284.000,00	1.218.223.000,00	1.225.331.452,00	175.548,00
12	Puskesmas Gunung Sari	2.060.000,00	643.797.000,00	644.409.000,00	1.448.000,00
13	Puskesmas Jawilan	2.352.719,00	720.562.281,00	721.405.987,00	1.509.013,00
14	Puskesmas Kibin	2.261.788,00	735.459.212,00	737.026.940,00	694.060,00
15	Puskesmas Kopo	2.585.000,00	582.976.000,00	585.327.259,00	233.741,00
16	Puskesmas Kragilan	17.348.000,00	586.423.000,00	585.050.579,00	18.720.421,00
17	Puskesmas Kramatwatu	190.173.391,00	855.232.609,00	995.968.545,00	49.437.455,00
18	Puskesmas Lebak Wangi	3.442.000,00	784.350.000,00	785.522.011,00	2.269.989,00
19	Puskesmas Mancak	115.191.000,00	791.890.000,00	898.518.870,00	8.562.130,00
20	Puskesmas Nyompok	2.096.724,00	470.931.276,00	472.267.567,00	760.433,00
21	Puskesmas Pabuaran	2.026.000,00	637.711.000,00	638.223.071,00	1.513.929,00

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
22	Puskesmas Padarincang	2.194.000,00	883.616.000,00	879.993.527,00	5.816.473,00
23	Puskesmas Pamarayan	2.735.001,00	738.519.999,00	739.011.073,00	2.243.927,00
24	Puskesmas Pematang	3.485.000,00	545.903.000,00	537.030.617,00	12.357.383,00
25	Puskesmas Petir	75.834.125,00	755.315.875,00	792.086.892,00	39.063.108,00
26	Puskesmas Pontang	2.986.000,00	787.828.000,00	730.855.683,00	59.958.317,00
27	Puskesmas Puloampel	34.947.000,00	614.191.000,00	630.622.681,00	18.515.319,00
28	Puskesmas Tanara	89.203.000,00	748.296.000,00	832.142.580,00	5.356.420,00
29	Puskesmas Tunjungteja	2.018.000,00	1.126.153.000,00	1.123.910.916,00	4.260.084,00
30	Puskesmas Tirtayasa	57.268.000,00	889.000.000,00	935.371.219,00	10.896.781,00
31	Puskesmas Waringinkurung	3.032.906,00	908.368.094,00	898.440.359,00	12.960.641,00
		835.519.877,00	24.137.702.123,00	24.580.054.756,00	393.167.244,00

## 5. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah untuk masa pajak daerah sampai dengan TA 2025. Pencatatan, penatausahaan dan pengelolaan Piutang Pajak Daerah merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Saldo Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp320.360.865.198,00 naik sebesar Rp12.421.644.403,40 atau 4,03%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp307.939.220.794,60.

Pada TA 2025 menyesuaikan dengan klasifikasi pada penganggaran dilakukan juga reklasifikasi pada piutang pajak sebagaimana telah dijelaskan pada bagian realisasi pajak sehingga rincian piutang pajak pada TA 2025 sebagai berikut:

**Tabel 65**  
**Daftar Piutang Pendapatan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)
<b>Piutang Pajak</b>			
Piutang Pajak Reklame	476.359.330,00	703.018.324,00	(226.658.994,00)
Piutang Pajak Air Tanah	803.462.394,00	596.132.732,60	207.329.661,40
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.763.447.594,00	3.740.924.909,80	(1.977.477.315,80)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	312.719.517.154,00	299.173.919.767,00	13.545.597.387,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.613.503.561,00	238.704.880,00	1.374.798.681,00
Piutang PBJT-Restoran	433.116.711,00	604.605.472,00	(171.488.761,00)
Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	132.989.394,00	179.887.488,00	(46.898.094,00)
Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri	0,00	144.121.381,20	(144.121.381,20)
Piutang PBJT-Hotel	2.085.818.223,00	2.099.161.138,00	(13.342.915,00)
Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	18.017.800,00	42.483.376,00	(24.465.576,00)

Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)
Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	314.633.037,00	416.261.326,00	(101.628.289,00)
<b>Jumlah</b>	<b>320.360.865.198,00</b>	<b>307.939.220.794,60</b>	<b>12.421.644.403,40</b>

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan langkah penghapusan piutang pajak PBB sebesar Rp5.644.350,00 sesuai dengan SK Bupati Serang Nomor 973/Kep.556-Huk.Bapenda/2025 tanggal 21 Oktober 2025.

## 6. Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.696.564.330,00 berupa Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di DPUPR dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)
<b>Piutang Retribusi</b>			
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.924.070.694,00	29.007.352.568,00	916.718.126,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.772.493.636,00	506.569.963,00	2.265.923.673,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.696.564.330,00</b>	<b>29.513.922.531,00</b>	<b>3.182.641.799,00</b>

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD merupakan reklasifikasi dari piutang lain-lain PAD yang Sah dari RSUD dikarenakan reklasifikasi pendapatan BLUD menjadi pendapatan retribusi sesuai Undang-Undang HKPD, dengan rincian piutang tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 66**  
**Piutang RSUD**

No	Nama Perusahaan	Tahun 2025
1	ABS Industri Indonesia, PT	351.550,00
2	Adhi Karya	580.676,00
3	Arbe Indonesia, PT	21.958.429,00
4	Asuransi Bumi Asih	82.316.609,00
5	Asuransi Bumida AKDHK	21.838.944,00
6	Asuransi Bumida DPRD	2.330.987,00
7	Bapelkes Krakatau Steel	4.262.907,00
8	BNI Life Insurance	188.300,00
9	BPJS Kesehatan	16.039.212.877,00
10	BPJS Ketenagakerjaan	2.087.817.448,00
11	Dinkes Kab. Pandeglang/Diferi	1.389.050,00



No	Nama Perusahaan	Tahun 2025
12	Dinkes Kab. Serang/Difteri	63.995.728,00
13	Dinkes Kota Serang/Difteri	5.443.600,00
14	Dinkes Provinsi Banten/Difteri	3.921.725,00
15	Gama Prima Karya, PT	1.058.416,00
16	Gema Jobker Infocom, PT	17.669.876,00
17	Indah Kiat Pulp & Paper	175.861.728,00
18	Inhealth, PT	1.781.316,00
19	Jasa Raharja	1.032.636.973,00
20	JMCC	77.487.698,00
21	Klinik Hasna Medika Serang	12.279.400,00
22	Nikomas Gemilang, PT	1.924.890.711,00
23	Nur Sahara Pratama	51.080.698,00
24	Obat Askes Sukarela	405.310,00
25	Parkland Word Indonesia, PT	18.442.346,00
26	Pasien Umum	7.832.095.792,00
27	Perawatan Askes Sukarela	18.372.110,00
28	Perawatan Askes Wajib	1.945.000,00
29	Polyprima	42.726.799,00
30	RS Bhayangkara Polda Banten	4.762.800,00
31	RS Budi Asih	6.475.000,00
32	RS Hermina	1.918.000,00
33	RS Janah Serang	45.707.200,00
34	RS Kencana	32.431.000,00
35	RS Otika Medika	4.594.000,00
36	RS Sari Asih	140.000,00
37	RS Ibunda Kota Serang	1.419.600,00
38	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara/ Pelkes Masyarakat	205.562.600,00
39	RSUD Kota Serang	6.630.400,00
40	Taspen, PT	70.087.091,00
		<b>29.924.070.694,00</b>

Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada DPUPR sebesar Rp2.772.493.636,00 merupakan piutang atas tagihan kepada wajib retribusi (pemilik bangunan) yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo atas layanan penerbitan izin bangunan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan secara resmi oleh DPUPR Kabupaten Serang pada bulan Desember 2025, namun penyetoran ke Kas Daerah oleh wajib retribusi baru terlaksana pada awal tahun anggaran

2026, hal tersebut dikarenakan adanya tenggang waktu pembayaran (masa jatuh tempo) yaitu 14 hari kerja yang diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga pemohon masih dapat melakukan pembayaran sampai batas waktu tersebut sebelum dikenakan denda sebesar 1%.

Adapun rincian Piutang PBG pada DPUPR pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 67**  
**Piutang DPUPR**

No	Nama Perusahaan	Tahun 2025
1	Abdullah	6.256.760,00
2	CV. Megah Agung Sejahtera	11.254.837,00
3	Denny Yohanes, SH	5.494.301,00
4	Ibrohim	6.763.964,00
5	PT Centratama Menara Indonesia Site Bojong Pandan	20.227.640,00
6	PT Centratama Menara Indonesia Site Sujung Tirtayasa	20.227.640,00
7	PT Eterna Persada Indonesia	274.443.650,00
8	PT. Centratama Menara Indonesia Mander Serang	20.232.040,00
9	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk	106.473.827,00
10	PT. Conch Cement Indonesia	11.311.711,00
11	PT. Garda Kusuma Wisnujaya	10.103.950,00
12	PT. Gema Grahasarana, Tbk	77.055.516,00
13	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.646.017.451,00
14	PT. Konstruksi Baja Cikande	79.884.581,00
15	PT. Mitra Persada CiPTa Cemerlang	21.097.450,00
16	PT. Palka Maju Bersama	5.013.168,00
17	PT. Prima Xinbang Alumindo	39.529.408,00
18	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Adagarut Serang	20.382.950,00
19	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Binong Asem Babakan	20.231.300,00
20	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Bojot Jawilan	20.463.350,00
21	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Jalan Silet	20.523.350,00
22	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Kampung Besi Sangiang	20.186.300,00
23	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Kubang Puji Pontang	20.274.350,00
24	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Mata Air Kartapura	20.349.350,00
25	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk Palka Eldarosah (Sukadana Ciomas)	15.223.350,00
26	PT. Trans Pacific Metal	238.534.947,00
27	Sunyoto	14.936.495,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.772.493.636,00</b>

Dari sejumlah piutang tersebut, dalam hal ini DPUPR telah melakukan langkah-langkah pengendalian, salah satunya dengan menerbitkan surat imbauan pembayaran secara intensif kepada para wajib retribusi sebagai bentuk edukasi dan penagihan persuasif. Adapun hasil dari langkah pengendalian tersebut menghasilkan capaian yang positif, sampai dengan Januari 2026 DPUPR berhasil merealisasikan penerimaan piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp2.449.681.570,00.

## 7. Piutang Pendapatan Lainnya

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.995.745.883,69 naik sebesar Rp801.628.328,69 atau 19,11%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.194.117.555,00. Penurunan saldo tersebut sebagian besar disebabkan oleh reklasifikasi pendapatan BLUD RSUD menjadi pendapatan retribusi sesuai dengan UU HKPD. Berikut rincian saldo Piutang Pendapatan Lainnya per SKPD :

**Tabel 68**  
**Daftar Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
DISDIK	9.801.653,77	0,00	9.801.653,77
DINKES	481.506.930,15	259.788.100,00	221.718.830,15
RSUD	1.410.630.028,00	1.335.935.517,00	74.694.511,00
DISKOPERINDAG UMKM	748.136.566,00	756.973.552,00	(8.836.986,00)
SETDA	386.000.000,00	386.000.000,00	0,00
BAPENDA	1.643.823.154,10	1.455.420.386,00	188.402.768,10
DPUPR	103.731.652,41	0,00	103.731.652,41
BPKAD	44.825.904,00	0,00	44.825.904,00
DPKD	108.933.762,00	0,00	108.933.762,00
DPRKP	56.177.250,00	0,00	56.177.250,00
DKBP3A	2.178.983,26	0,00	2.178.983,26
<b>Jumlah</b>	<b>4.995.745.883,69</b>	<b>4.194.117.555,00</b>	<b>801.628.328,69</b>

### 7.1 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo piutang Disdik per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.801.653,77 merupakan saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.

### 7.2 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Kesehatan

Saldo piutang Dinkes per 31 Desember 2025 sebesar Rp481.506.930,15 terdiri dari Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp30.113.330,15 dan piutang atas klaim BPJS Non-Kapitasi pada BLUD Puskesmas sebesar Rp451.393.600,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 69**  
**Piutang Dinas Kesehatan**

No	Puskesmas	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Puskesmas Anyar	24.273.000,00	17.421.000,00	6.852.000,00
2	Puskesmas Bandung	15.989.000,00	10.249.000,00	5.740.000,00
3	Puskesmas Baros	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
4	Puskesmas Binuang	0,00	7.567.000,00	(7.567.000,00)
5	Puskesmas Bojonegara	8.595.000,00	0,00	8.595.000,00
6	Puskesmas Carenang	63.006.000,00	0,00	63.006.000,00
7	Puskesmas Ciomas	61.475.000,00	0,00	61.475.000,00
8	Puskesmas Cikeusal	0,00	53.660.000,00	(53.660.000,00)
9	Puskesmas Cinangka	0,00	34.024.000,00	(34.024.000,00)
10	Puskesmas Ciruas	27.268.500,00	3.840.000,00	23.428.500,00
11	Puskesmas Gunung Sari	0,00	5.160.000,00	(5.160.000,00)
12	Puskesmas Jawilan	88.888.100,00	0,00	88.888.100,00
13	Puskesmas Kibin	0,00	9.889.000,00	(9.889.000,00)
14	Puskesmas Kopo	0,00	1.289.000,00	(1.289.000,00)
15	Puskesmas Kragilan	24.771.000,00	18.005.000,00	6.766.000,00
16	Puskesmas Kramatwatu	0,00	25.762.100,00	(25.762.100,00)
17	Puskesmas Lebak Wangi	15.189.000,00	0,00	15.189.000,00
18	Puskesmas Nyompok	0,00	24.921.500,00	(24.921.500,00)
19	Puskesmas Padarincang	19.402.000,00	21.429.500,00	(2.027.500,00)
20	Puskesmas Pematang	22.220.000,00	0,00	22.220.000,00
21	Puskesmas Pontang	3.658.000,00	0,00	3.658.000,00
22	Puskesmas Pulo Ampel	5.360.000,00	4.370.000,00	990.000,00
23	Puskesmas Tanara	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24	Puskesmas Tunjung Teja	15.835.000,00	0,00	15.835.000,00
25	Puskesmas Waringinkurung	33.995.000,00	0,00	33.995.000,00
26	Laboratorium Kesehatan	13.269.000,00	22.201.000,00	(8.932.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>451.393.600,00</b>	<b>259.788.100,00</b>	<b>191.605.500,00</b>

Piutang BLUD atas Klaim BPJS Non-Kapitasi tersebut diakui berdasarkan nilai klaim yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Dasar pengakuan piutang tersebut adalah Berita Acara (BA) verifikasi yang diterbitkan pada bulan Desember 2025, sehingga tidak diperlukan proses penagihan ulang. Seluruh saldo piutang tersebut dipastikan telah lunas atau terbayar pada awal tahun anggaran 2026 setelah dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Dinas Kesehatan.

### 7.3 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Rumah Sakit Umum Dradjat Prawiranegara

Piutang pendapatan RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.410.630.028,00 merupakan piutang dari kegiatan non operasional/piutang non jasa layanan yaitu yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 70**  
**Piutang RSUD**

No	Nama Perusahaan	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sewa Lahan	200.190.000,00	127.690.000,00	72.500.000,00
2	Parkir	1.044.350.000,00	1.044.350.000,00	0,00
3	Pengolahan Sampah	12.480.028,00	10.285.517,00	2.194.511,00
4	Denda Pengolahan Parkir	153.610.000,00	153.610.000,00	0,00
Jumlah		<b>1.410.630.028,00</b>	<b>1.335.935.517,00</b>	<b>74.694.511,00</b>

Terdapat kenaikan piutang pada sewa lahan sebesar Rp72.500.000,00 yang merupakan perjanjian/kontrak baru atas sewa lahan kios eks Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada perorangan sebanyak 6 kios dengan total Rp105.000.000,00 dikurangi dengan pembayaran piutang pada tahun 2025 sebesar Rp32.500.000,00.

### 7.4 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Piutang Diskoumperindag per 31 Desember 2025 sebesar Rp748.136.566,00 merupakan piutang hasil penjualan bangunan berupa pembayaran atas kios Pasar Anyar, berkurang sebesar Rp8.836.986,00 karena ada pembayaran piutang tersebut.

### 7.5 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Sekretariat Daerah

Piutang pada Setda per 31 Desember 2025 sebesar Rp386.000.000,00 terdiri dari piutang Baitul Maal Watamwil sebesar Rp186.000.000,00 dan piutang PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebesar Rp200.000.000,00. Piutang Baitul Maal Watamwil yang merupakan piutang yang disalurkan kepada 14 BMT di Kabupaten Serang sebelum tahun 2006 yang sampai saat ini tidak dapat ditagihkan dikarenakan BMT sudah tidak beroperasi atau tidak dapat ditelusuri kembali.

Piutang PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada Sekretariat Daerah merupakan pencatatan atas penyertaan modal pemerintah pada BMI yang tercatat dalam piutang lainnya sejak pembentukan Neraca awal tahun 2006.

### 7.6 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Badan Pendapatan Daerah

Piutang pada Bapenda per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.643.823.154,10 merupakan piutang denda pajak akibat

keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Berikut rincian piutang denda pajak tahun 2025:

**Tabel 71**  
**Rincian Piutang Denda Pajak**

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	246.012.574,16	(246.012.574,16)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	92.798.071,56	(92.798.071,56)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00	166.704.720,00	(166.704.720,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	68.858.187,00	74.508.413,00	(5.650.226,00)
Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	86.327.316,58	(86.327.316,58)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	10.713.944,00	(10.713.944,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	119.506.663,64	203.802.225,00	(84.295.561,36)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	444.194.438,00	562.146.711,00	(117.952.273,00)
Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	136.878.140,06	0,00	136.878.140,06
Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	104.565.041,40	(42.253.046,56)	146.818.087,96
Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	67.852.897,00	9.687,42	67.843.209,58
Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	603.621.070,00	52.889.917,84	550.731.152,16
Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	5.230.546,00	1.724.062,00	3.506.484,00
Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	93.116.171,00	35.790,00	93.080.381,00
	<b>1.643.823.154,10</b>	<b>1.455.420.386,00</b>	<b>188.402.768,10</b>

### 7.7 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Piutang DPUPR per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.731.652,41 merupakan Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2025 yang timbul akibat adanya keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

### 7.8 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Piutang BPKAD per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.825.904,00 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler.

### 7.9 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Piutang DPKD per 31 Desember 2025 sebesar Rp108.933.762,00 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

### 7.10 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Piutang DPRKP per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.177.250,00 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus.

### 7.11 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Piutang DKBP3A per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.178.983,26 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

## 8. Piutang Lancar Lainnya

Saldo Piutang Lancar Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.105.945.052,00 naik sebesar Rp29.976.968.809,00 atau 295,95%, jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp10.128.976.243,00, piutang ini terdapat pada Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Banten yang belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang sampai dengan akhir 2025 sebesar Rp40.105.945.052,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 72**  
**Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2025**

No	Uraian	Kurang Salur 2025	Pelampauan 2025	Jumlah
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.310.949.700,00	698.848.400,00	2.009.798.100,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	23.883.987.098,00	0,00	23.883.987.098,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.212.159.854,00	0,00	14.212.159.854,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.407.096.652,00</b>	<b>698.848.400,00</b>	<b>40.105.945.052,00</b>

## 9. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp322.950.355,00, turun jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp362.827.753,00. Berikut rincian mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2025 :

**Tabel 73**  
**Rincian Mutasi Bagian Lancar TGR**

Uraian	Jumlah
Saldo Awal	362.827.753,00
Penambahan	
Penetapan Piutang Tahun 2025	21.050.000,00
Jumlah	21.050.000,00
Pengurangan	
Pembayaran Tahun 2025	41.477.398,00
Koreksi Piutang 2025	19.450.000,00
Jumlah	60.927.398,00
Saldo Akhir	322.950.355,00

## 10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Per 31 Desember 2025 penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp246.317.478.294,52 dan per 31 Desember 2024 penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp236.782.624.768,66.

**Tabel 74**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025 dan 2024**

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	RSUD	(12.732.126.012,31)	(12.403.703.691,88)	(328.422.320,43)
2	DPUPR	(13.869.925,32)	(2.532.850,01)	(11.337.075,31)
3	SETDA	(386.000.000,00)	(386.000.000,00)	0,00
4	BAPENDA	(232.871.188.501,89)	(223.653.751.858,77)	(9.217.436.643,12)
5	BPKAD	(314.293.855,00)	(336.636.368,00)	22.342.513,00
		<b>(246.317.478.294,52)</b>	<b>(236.782.624.768,66)</b>	<b>(9.534.853.525,86)</b>

Penyisihan Piutang pada RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.732.126.012,31 dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut :

**Tabel 75**  
**Aging Schedule Piutang RSUD**

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(1 Bulan)	(1 - 3 Bulan)	(3-12 Bulan)	(Lebih dari 12 Bulan)	
Piutang Retribusi RSUD	17.417.073.161,00	1.022.711.107,00	508.310.278,00	10.975.976.148,00	29.924.070.694,00
Piutang Lainnya RSUD	5.848.360,00	5.086.290,00	175.190.000,00	1.224.505.378,00	1.410.630.028,00
<b>Total</b>	<b>17.422.921.521,00</b>	<b>1.027.797.397,00</b>	<b>683.500.278,00</b>	<b>12.200.481.526,00</b>	<b>31.334.700.722,00</b>
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
<b>Penyisihan Piutang 2025</b>	<b>87.114.607,61</b>	<b>102.779.739,70</b>	<b>341.750.139,00</b>	<b>12.200.481.526,00</b>	<b>12.732.126.012,31</b>

Penyisihan Piutang pada DPUPR senilai Rp13.869.925,32, dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut :

**Tabel 76**  
**Aging Schedule Piutang DPUPR**

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	( 1 Bulan)	(1 - 3 Bulan)	(3-12 Bulan)	(Lebih dari 12 Bulan)	
Piutang Retribusi DPUPR	0,00	0,00	0,00	13.862.468,18	13.862.468,18
Piutang Lainnya				7.457,14	7.457,14
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869.925,32</b>	<b>13.869.925,32</b>
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
<b>Penyisihan Piutang 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869.925,32</b>	<b>13.869.925,32</b>

Penyisihan piutang pada SETDA sebesar Rp386.000.000,00, dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut :

**Tabel 77**  
**Aging Schedule Piutang SETDA**

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(< 1 Tahun)	(1 - 2 Tahun)	(2-5 Tahun)	(> 5Tahun)	
Piutang Lainnya SETDA	0,00	0,00	0,00	386.000.000,00	386.000.000,00
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
<b>Penyisihan Piutang 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000.000,00</b>	<b>386.000.000,00</b>

Penyisihan Piutang pada BAPENDA senilai Rp232.882.513.619,00 merupakan penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp232.148.949.382,14 dan penyisihan piutang denda pajak sebesar Rp722.239.119,75 Dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut:

**Tabel 78**  
**Aging Schedule Piutang Pajak**

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(< 1 Tahun)	(1 - 2 Tahun)	(2-5 Tahun)	(> 5Tahun)	
PBB	27.052.734.032,00	35.518.408.079,00	49.021.746.567,00	201.126.628.476,00	312.719.517.154,00
BPHTB	11.641.300,00	957.935.435,00	643.926.826,00	0,00	1.613.503.561,00
Pajak Hotel	26.646.964,00	628.189.623,00	1.410.641.636,00	20.340.000,00	2.085.818.223,00
Pajak Restoran	37.423.673,00	201.909.949,00	175.822.089,00	17.961.000,00	433.116.711,00
Pajak Hiburan	4.731.984,00	8.310.103,00	301.590.950,00	0,00	314.633.037,00
Pajak Reklame	239.374.731,00	126.291.463,00	110.693.136,00	0,00	476.359.330,00
PPJ PLN	0,00	71.652.776,00	3.315.221,00	58.021.397,00	132.989.394,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	80.452.950,00	414.335.395,00	535.091.100,00	733.568.149,00	1.763.447.594,00
Pajak Parkir	0,00	13.233.900,00	3.055.900,00	1.728.000,00	18.017.800,00
Pajak Air Tanah	431.147.525,00	125.715.500,00	209.715.418,00	36.883.951,00	803.462.394,00
<b>Total Piutang</b>	<b>27.884.153.159,00</b>	<b>38.065.982.223,00</b>	<b>52.415.598.843,00</b>	<b>201.995.130.973,00</b>	<b>320.360.865.198,00</b>
<b>Persentase Penyisihan</b>	<b>0,50%</b>	<b>10,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Nilai Penyisihan Piutang</b>	<b>139.420.765,34</b>	<b>3.806.598.222,30</b>	<b>26.207.799.421,50</b>	<b>201.995.130.973,00</b>	<b>232.148.949.382,14</b>

**Tabel 79**  
**Aging Schedule Piutang Denda Pajak**

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(< 1 Tahun)	(1 - 2 Tahun)	(2-5 Tahun)	(> 5Tahun)	
Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.624.439,00	40.612.032,00	92.641.669,06	0,00	136.878.140,06
Piutang Denda Pajak Hotel	3.381.567,00	186.119.023,00	411.318.480,00	2.802.000,00	603.621.070,00
Piutang Denda Pajak Restoran	4.555.361,00	52.198.895,00	42.368.485,40	5.442.300,00	104.565.041,40
Piutang Denda Pajak Hiburan	735.969,00	2.335.069,00	90.045.133,00	0,00	93.116.171,00
Piutang Denda Pajak Reklame	12.114.532,00	23.535.708,00	33.207.947,00	0,00	68.858.187,00
Piutang Denda Pajak PJJU	0,00	39.551.746,00	463.982,00	27.837.169,00	67.852.897,00
Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.098.385,00	118.308.154,00	74.717.454,00	220.070.445,00	444.194.438,00
Piutang Denda Pajak Parkir	0,00	4.194.380,00	517.766,00	518.400,00	5.230.546,00
Piutang Denda Pajak Air Tanah	15.228.811,24	29.913.305,00	62.933.453,00	11.431.094,40	119.506.663,64
<b>Total Piutang</b>	<b>70.739.064,24</b>	<b>496.768.312,00</b>	<b>808.214.369,46</b>	<b>268.101.408,40</b>	<b>1.643.823.154,10</b>
<b>Persentase Penyisihan</b>	<b>0,50%</b>	<b>10,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Nilai Penyisihan Piutang</b>	<b>353.695,42</b>	<b>49.676.831,20</b>	<b>404.107.184,73</b>	<b>268.101.408,40</b>	<b>722.239.119,75</b>

Penyisihan Piutang pada BPKAD senilai Rp314.293.855,00 merupakan penyisihan piutang TP TGR dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut:

**Tabel 80**  
**Aging Schedule Piutang TP TGR**

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(< 1 Tahun)	(1 - 2 Tahun)	(2-5 Tahun)	(> 5Tahun)	
Piutang TP TGR	8.700.000,00	0,00	0,00	314.250.355,00	322.950.355,00
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Piutang 2025	43.500,00	0,00	0,00	314.250.355,00	314.293.855,00

### 11. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Per 31 Desember 2025 Beban dibayar dimuka sebesar Rp6.163.100.101,00 naik sebesar Rp5.453.983.755,73 atau 769,12%, jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp709.116.345,27, kenaikan ini disebabkan oleh adanya sewa kendaraan dinas bermotor pada BPKAD dan uang muka pengelolaan sampah di TPA Cilowong Kota Serang pada Dinas Lingkungan Hidup. Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 81**  
**Rincian Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	<b>DISNAKERTRAN</b>			
	Beban Jasa Asuransi Dibayar Dimuka	0,00	1.134.555,30	(1.134.555,30)
2	<b>DKBP3A</b>			
	Beban Jasa Sewa Dibayar Dimuka	78.023.287,67	72.804.644,81	5.218.642,86
3	<b>KESBANGPOL</b>			
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	10.561.274,51	(10.561.274,51)
4	<b>SETDA</b>			
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	97.657.100,45	114.495.056,99	(16.837.956,54)
5	<b>DISKOPERINDAG</b>			
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	35.382.513,66	(35.382.513,66)
6	<b>DLH</b>			
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.981.200.000,00	474.738.300,00	1.506.461.700,00
7	<b>BPKAD</b>			
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.006.219.712,88	0,00	4.006.219.712,88
	<b>Jumlah</b>	<b>6.163.100.101,00</b>	<b>709.116.345,27</b>	<b>5.453.983.755,73</b>

**Tabel 82**  
**Ringkasan Kontrak Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025**

No	Satker	Uraian Belanja	Jumlah Belanja	Jumlah Hari/Nilai (Rp) Yang Menjadi Beban Tahun 2025			Saldo Per 31 DES 2025	
1	2	3	4	7			8	
I	<b>Belanja Sewa Tempat</b>							
	<b>DKBP3A</b>	Gedung Operasional UPT PPA Kab. Serang	49.500.000,00	31/12/2025	19	Hari	2.576.712,33	46.923.287,67
		Sewa Rumah Aman	49.500.000,00	31/12/2025	168	Hari	22.783.561,64	26.716.438,36
		Balai Penyuluh KB Kec Cikande	25.000.000,00	31/12/2025	333	Hari	22.808.219,18	2.191.780,82
		Balai Penyuluh KB Kec Pamarayan	25.000.000,00	31/12/2025	333	hari	22.808.219,18	2.191.780,82
								<b>78.023.287,67</b>
II	<b>Belanja Premi Asuransi</b>							
	<b>SETDA</b>	Kendaraan setda	74.794.000,00	31/12/2025	91	hari	18.647.271,23	56.146.728,77
		Gedung setda	55.296.663,00	31/12/2025	91	hari	13.786.291,32	41.510.371,68
								<b>97.657.100,45</b>
III	<b>Belanja Jasa Pengelolaan Sampah</b>							
	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	Uang muka pengelolaan sampah di TPA Cilowong Kota Serang	1.981.200.000,00	-	-	-	-	<b>1.981.200.000,00</b>
IV	<b>Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Sewa kendaraan long term eselon 2	6.625.464.000,00	31/12/2025	159	Hari	2.886.161.030,14	3.739.302.969,86
	<b>Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>	sewa 4 kendaraan kabag SETWAN	275.990.400,00	31/12/2025	12	Hari	9.073.656,99	266.916.743,01
	<b>BPKAD</b>							<b>4.006.219.712,88</b>
								<b>6.163.100.101,00</b>

Beban dibayar dimuka pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.981.200.000,00 merupakan Uang muka pengelolaan sampah di TPA Cilowong Kota Serang. Saldo beban dibayar dimuka atau sisa deposit pembayaran tersebut akan digunakan Dinas Lingkungan Hidup pada pengiriman sampah di tahun 2026.

## 12. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Serang dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp88.215.382.760,17 naik sebesar Rp25.516.496.937,86 atau 40,70%, jika dibandingkan Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebanyak Rp62.698.885.822,31. Rincian Persediaan TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 83**  
**Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	10.678.200,00	(10.678.200,00)
2	Bahan Kimia	6.279.833.842,36	2.778.121.408,00	3.501.712.434,36
3	Bahan Baku	0,00	180.070.048,00	(180.070.048,00)
4	Bahan/Bibit Tanaman	92.124.360,00	80.127.400,00	11.996.960,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.298.750,00	71.691.000,00	(15.392.250,00)
6	Bahan Lainnya	5.809.566.243,80	5.755.579.422,00	53.986.821,80
7	Bahan Makanan	0,00	358.879.734,00	(358.879.734,00)
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	165.088.606,00	72.984.145,00	92.104.461,00
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	10.321.557,00	30.613.248,00	(20.291.691,00)
10	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	3.668.000,00	(3.668.000,00)
11	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	3.180.000,00	(3.180.000,00)
12	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	400.000,00	5.264.000,00	(4.864.000,00)
13	Suku Cadang Lainnya	0,00	6.532.405,00	(6.532.405,00)
14	Alat Tulis Kantor	1.434.793.228,20	1.308.037.774,33	126.755.453,87
15	Kertas dan Cover	138.592.827,00	119.602.659,00	18.990.168,00
16	Bahan Cetak	637.275.546,73	738.481.329,00	(101.205.782,27)
17	Benda Pos	7.820.000,00	6.680.200,00	1.139.800,00
18	Bahan Komputer	465.463.902,40	377.286.990,00	88.176.912,40
19	Perabot Kantor	17.677.728,10	63.078.438,00	(45.400.709,90)
20	Alat Listrik	4.585.913.003,34	180.744.466,00	4.405.168.537,34
21	Perlengkapan Dinas	797.535,00	333.000,00	464.535,00
22	Suvenir / Cendera Mata	274.000,00	8.570.000,00	375.410.614,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	383.980.614,00	428.363.004,00	(44.382.390,00)
24	Obat	29.699.490.692,59	14.162.027.390,85	15.537.463.301,74
25	Obat-obatan Lainnya	24.681.430,00	13.031.378.187,13	(13.006.696.757,13)
26	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	37.962.054.435,65	22.497.859.124,00	15.464.195.311,65
27	Natura	346.564.458,00	314.434.250,00	32.130.208,00
28	Persediaan Penelitian Biologi	96.370.000,00	104.620.000,00	(8.250.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>88.215.382.760,17</b>	<b>62.698.885.822,31</b>	<b>25.516.496.937,86</b>

**Tabel 84**  
**Rincian Persediaan Per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
1	DISDIK	41.590.455,00	67.369.500,00	(25.779.045,00)
2	DINKES	35.391.183.026,23	25.098.980.091,64	10.292.202.934,59
3	RSUD	11.803.622.475,81	12.600.198.751,57	(796.576.275,76)
4	DPUPR	24.462.772.026,65	18.364.780.867,00	6.097.991.159,65
5	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Kramatwatu DPUPR	0,00	4.585.000,00	(4.585.000,00)
6	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Anyar DPUPR	0,00	4.552.000,00	(4.552.000,00)
7	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Petir DPUPR	0,00	4.552.000,00	(4.552.000,00)
8	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Kibin DPUPR	0,00	4.519.500,00	(4.519.500,00)
9	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Ciruas DPUPR	0,00	4.479.815,00	(4.479.815,00)
10	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Cikande DPUPR	0,00	4.552.000,00	(4.552.000,00)
11	UPT Peralatan dan Perbengkelan DPUPR	0,00	97.190.000,00	(97.190.000,00)
12	UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi DPUPR	0,00	22.599.450,00	(22.599.450,00)
13	UPT Pengelolaan air limbah domestik	0,00	89.798.500,00	(89.798.500,00)
14	DPRKP	9.923.504.090,00	28.061.885,00	9.895.442.205,00
15	SATPOL PP	0,00	926.100,00	(926.100,00)
16	BPBD	120.718.280,00	110.154.600,00	10.563.680,00
17	DINSOS	76.080.051,71	281.003.250,78	(204.923.199,07)
18	DISNAKERTRANS	1.633.254,00	0,00	1.633.254,00
19	DKPP	4.218.245.509,10	4.311.474.350,00	(93.228.840,90)
20	DLH	0,00	78.248.498,00	(78.248.498,00)
21	DISDUKCAPIL	586.846.231,60	608.074.683,00	(21.228.451,40)
22	DPMD	2.677.915,00	2.223.000,00	454.915,00
23	DKBP3A	282.109.079,00	301.267.741,76	(19.158.662,76)
24	DISHUB	728.383.694,60	198.340.200,00	530.043.494,60
25	DISKOMINFO	4.713.619,80	607.000,00	4.106.619,80
26	DISKOPERINDAG UMKM	0,00	2.877.800,00	(2.877.800,00)
27	DISPORAPAR	3.454.990,00	11.274.800,00	(7.819.810,00)
28	DPKD	19.115.000,00	1.777.500,00	17.337.500,00
29	DISKAN	71.232.076,00	81.928.550,00	(10.696.474,00)
30	SETDA	181.382.865,16	(4.850.324.951,44)	5.031.707.816,60
31	Bagian fasilitas Pimpinan	0,00	1.968.577.600,00	(1.968.577.600,00)
32	Bagian Perekonomian	0,00	25.001.550,00	(25.001.550,00)
33	Bagian Organisasi	0,00	24.105.500,00	(24.105.500,00)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
34	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	48.118.650,00	(48.118.650,00)
35	Bagian Umum dan Perlengkapan	0,00	1.829.713.000,00	(1.829.713.000,00)
36	Bagian Hukum	0,00	140.078.100,00	(140.078.100,00)
37	Bagian Keuangan	0,00	192.099.000,00	(192.099.000,00)
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	287.795.200,00	(287.795.200,00)
39	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	240.841.550,00	(240.841.550,00)
40	Bagian Layanan Pengadaan	0,00	219.747.000,00	(219.747.000,00)
41	SETWAN	69.885.693,55	80.346.800,00	(10.461.106,45)
42	BAPPERIDA	2.808.300,00	5.559.600,00	(2.751.300,00)
43	BAPENDA	198.720.358,91	64.210.150,00	134.510.208,91
44	BPKAD	0,00	142.500,00	(142.500,00)
45	BKPSDM	4.238.847,00	13.606.300,00	(9.367.453,00)
46	Inspektorat	5.272.944,00	5.644.600,00	(371.656,00)
47	Kec. Kramatwatu	200.000,00	0,00	200.000,00
48	Kec. Lebak Wangi	240.000,00	0,00	240.000,00
49	Kec. Carenang	0,00	310.000,00	(310.000,00)
50	Kec. Mancak	4.280.752,05	7.812.000,00	(3.531.247,95)
51	Kec. Pontang	390.000,00	230.000,00	160.000,00
52	Kec. Pulo Ampel	0,00	0,00	0,00
53	Kec. Tanara	6.846.480,00	6.441.200,00	405.280,00
54	Kec. Tirtayasa	1.228.215,00	1.235.500,00	(7.285,00)
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.006.530,00	1.197.540,00	808.990,00
	<b>Jumlah</b>	<b>88.215.382.760,17</b>	<b>62.698.885.822,31</b>	<b>25.516.496.937,86</b>

Persediaan yang terdapat pada RSUD dan Dinkes PKM dinilai menggunakan metode penilaian persediaan harga pembelian terakhir.

Terdapat persediaan sebesar Rp1.367.542.549,00 pada SKPD RSUD, Dinas Kesehatan, dan DPUPR yang tidak disajikan/dicatat dalam Neraca. Nilai tersebut merupakan persediaan yang kondisinya sudah rusak/usang atau kedaluwarsa (*expired*). Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), persediaan rusak/usang atau yang telah kedaluwarsa (*expired*) harus dikeluarkan dari pencatatan persediaan. Adapun untuk rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 85**  
**Daftar Persediaan Kadaluausa (*Expired*) pada RSUD**

No	Uraian	Nilai
1	GUDANG FARMASI	44.885.184,00
2	DEPO APOTEK 1	1.161.059,00
3	DEPO APOTEK 2	5.965.349,00
4	DEPO APOTEK 3	167.975,00
5	DEPO APOTEK 4	5.605.546,00
6	DEPO HIV/AIDS	1.514.976,00
7	DEPO MDRTB	4.348.280,00
8	DEPO CATHLAB	2.330.444,00
Jumlah		<b>65.978.813,00</b>

**Tabel 86**  
**Daftar Persediaan Obat Kadaluausa (*Expired*) pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan**

No	Jumlah Persediaan	Tahun Expired	Nilai Persediaan
1	32.463	2023	207.840.987,00
2	889.628	2024	449.541.353,00
3	601.632	2025	635.687.863,00
Jumlah			<b>1.293.070.203,00</b>

**Tabel 87**  
**Daftar Persediaan Rusak pada DPUPR**

No	Nama Barang	Satuan	Rusak/Kadaluausa	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Buku Memo	Buku	25	10.000,00	250.000,00
2	Pita Mesin Tik Elektrik	Buah	3	42.500,00	127.500,00
3	Kartu Pengawasan Kontrak (LS)	Lembar	1.350	1.500,00	2.025.000,00
4	Blangko Tanda Bukti Pembayaran	Buku	10	57.000,00	570.000,00
5	Faktur Pajak	Buku	11	77.000,00	847.000,00
6	Surat Setoran Pajak (SSP)	Buku	6	76.500,00	459.000,00
7	Kartu Kendali Kegiatan	Lembar	850	1.500,00	1.275.000,00
8	Blangko BBM 10 Liter	Buku	6	5.000,00	30.000,00
9	Blangko BBM 15 Liter	Buku	16	5.000,00	80.000,00
10	Blangko BBM 20 Liter	Buku	28	20.000,00	560.000,00
11	Blangko BBM 30 Liter	Buku	28	20.000,00	560.000,00
12	Blangko BBM 35 Liter	Buku	10	5.000,00	50.000,00
13	Blangko BBM 40 Liter	Buku	2	20.000,00	40.000,00



No	Nama Barang	Satuan	Rusak/Kadaluarsa	Harga Satuan (Rp)	Nilai
14	Blangko BBM 50 Liter	Buku	6	5.073,83	30.443,00
15	Kertas Koran	Rim	5	18.000,00	90.000,00
16	Pita Pinter LQ 2180	Buah	3	63.113,33	189.340,00
17	Cartridge HP Laser Jet 36 A	Buah	1	968.000,00	968.000,00
18	Tinta HP Black	Buah	1	35.200,00	35.200,00
19	Tinta HP Colour	Buah	3	54.450,00	163.350,00
20	Tinta Data Print Canon DP 40	Buah	3	27.500,00	82.500,00
21	CD RW	Buah	12	5.100,00	61.200,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.379</b>		<b>8.493.533,00</b>

Pada TA 2025 terdapat penerimaan hibah berupa obat dari DINKES Provinsi, DINKES Kabupaten Serang dan Puskesmas ke RSUD dengan total yang tercatat sebesar Rp1.167.996.764,00 namun terdapat penerimaan tanpa nominal harga, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 88**  
**Penerimaan Hibah Obat Ke RSUD**

No	Tgl Transaksi	No. Faktur	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumah Harga	Nama Supplier
1	10/01/2025	008/UPT-GF/I/2025	ALUVIA 200 MG / 50 MG TAB (BP)	600	5.197	3.118.200	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET (BK)	300	4.440	1.332.000	
			EFAVIRENZ 600 MG TABLET (BP)	3.000	7.000	21.000.000	
			LAMIVUDINE 150 MG TABLET (BP)	1.200	1.385	1.662.000	
			TENOFOVIR 300 MG TABLET (BP)	150	2.235	335.250	
			TRIPLE FDC (TDF+3TC+EFV) GENERIK TAB(BK)	720	3.011	2.167.920	
2	22/01/2025	053/UPT-GF/I/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	20	163.406	3.268.120	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
3	11/02/2025	056/UPT-GF/III/2025	TRIPLE FDC (TDF+3TC+EFV) GENERIK TAB(BK)	8.280	3.621	29.981.880	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
4	18/02/2025	101/UPT-GF/III/2025	CYCLOSERINE 250 MG KAPSUL (BP)	1.500	4.184	6.276.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
5	07/03/2025	126/UPT-GF/III/2025	HYPERAB 300 IU/ML SERUM ANTI RABIES (BP)	3	1.668.429	5.005.287	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
6	17/03/2025	158/UPT-GF/III/2025	MOXIFLOXACIN HCl 400 MG TABLET (BP)	1.000	4.400	4.400.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
7	18/03/2025	26/P2PMTM/III/2025	PRETOMANID 200 MG TABLET (BK)	650	33.000	21.450.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
8	22/03/2025	800/071/PKM/III/2025	VAKSIN BCG (BK)	2	105.902	211.804	PUSKESMAS BAROS
			VAKSIN HB.U (BK)	220	34.942,80	7.687.416	
			VAKSIN MR (BK)	2	169.386	338.772	
			VAKSIN ROTAVIRUS (BK)	2	258.504,50	517.009	
			VAKSIN RABIVAX-S 2,5	10	147.211	1.472.110	



No	Tgl Transaksi	No. Faktur	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumah Harga	Nama Supplier
			IU INJEKSI (BP)				
9	10/04/2025	002/UPT-GF/IV/2025	ALUVIA 200 MG / 50 MG TAB (BP)	3.000	5.197	15.591.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET (BK)	1.500	4.440	6.660.000	
			DUVIRAL (ZDV+3TC) TABLET (BP)	7.800	3.848	30.014.400	
			EFAVIRENZ 600 MG TABLET (BP)	1.200	7.000	8.400.000	
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	16.200	3.366	54.529.200	
10	30/04/2025	113/P2PMTM/IV/2025	PRETOMANID 200 MG TABLET (BK)	520	33.000	17.160.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
11	30/04/2025	800/106/PKM/IV/2025	VAKSIN DPT-HB (BK)	2	229.625	459.250	PUSKESMAS BAROS
			VAKSIN HB.U (BK)	200	31.480	6.296.000	
			VAKSIN PREVENAR 13 (PCV) (BK)	2	190.657	381.314	
12	07/05/2025	044/PROG/UPT-GF/VI/20	DHP-FRIMAL TABLET (BK)	18	2.851	51.318	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
13	07/05/2025	443.2/109/V/P2PMTM/2	DASVIR 30 MG TABLET (BK)	4.200	5.570	23.394.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
14	14/05/2025	181/UPT-GF/VI/2025	VAKSIN BERIRAB P 2 ML (300 IU) INJ (BP)	8	793.663	6.349.304	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
15	16/05/2025	059/PROG/UPT-GF/VI/20	DUVIRAL (ZDV+3TC) TABLET (BP)	4.500	3.848	17.316.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	1	149.522	149.522	
			VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	9	147.211	1.324.899	
			LINEZOLIDE 600 MG TABLET (BP)	700	3.442	2.409.400	
			LINEZOLIDE 600 MG TABLET (BP)	1.300	2.861	3.719.300	
			MOXIFLOXACIN HCI 400 MG TABLET (BP)	300	4.400	1.320.000	
			OAT ANAK (BK)	50	346.000	17.300.000	
			PYRAZINAMIDE 500 MG TABLET (BP)	600	334	200.400	
			SIRTURO 100 MG TABLET (BP)	188	11.035	2.074.580	
			SIRTURO 100 MG TABLET (BP)	3.572	1.304	4.657.888	
			STOP TB KIT (DOSIS HARIAN) (BK)	50	575.429	28.771.450	
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	10.020	3.366	33.727.320	
			PRIMAQUINE 15 MG TABLET (BK)	200	235	47.000	
			SOFGEN 400 MG TABLET (BK)	2.100	15.500	32.550.000	
16	04/06/2025	//PKM/VI/2025	VAKSIN HB.U (BK)	200	34.628	6.925.600	PUSKESMAS BAROS
17	05/06/2025	//PKM/VI/2025	VAKSIN POLIO (BOPV) (BK)	2	28.571	57.142	PUSKESMAS BAROS
18	20/06/2025	155/PROG/UPT-GF/VI/2	POT DAHAK SPUTUM (BK)	1.000	1.995	1.995.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
19	24/06/2025	241/UPT-GF/VI/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	8	149.522	1.196.176	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
20	26/06/2025	153/PROG/UPT-GF/VI/2	TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	3.000	3.366	10.098.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			VAKSIN MR (BK)	2	152.600	305.200	
21	07/07/2025	192/PROG/UPT-GF/VI/II	ANTI HIV TRI LINE TEST INTEC (BK)	75	7.273	545.475	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG



No	Tgl Transaksi	No. Faktur	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumah Harga	Nama Supplier
22	09/07/2025	800/224/PKM/VII/2025	VAKSIN DPT-HB (BK)	2	229.625	459.250	PUSKESMAS BAROS
23	10/07/2025	213/PROG/UPT-GF/VII/	TENOFOVIR 300 MG TABLET (BP)	150	2.235	335.250	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
24	11/07/2025	256/UPT-GF/VII/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	9	149.522	1.345.698	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
25	15/07/2025	222/PROG/UPT-GF/VII/	DHP-FRIMAL TABLET (BK)	45	2.851	128.295	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	900	3.366	3.029.400	
			TRIPLE FDC (TDF+3TC+EFV) GENERIK TAB(BK)	450	6.900	3.105.000	
			PRIMAQUINE 15 MG TABLET (BK)	200	235	47.000	
			HIV 1/2/0 TRI LINE TEST (BK)	50	7.454	372.700	
			MASKER N95 3M (BK)	400	1.800	720.000	
			TREPOCHECK SYPHILIS TEST (BK)	375	4.385	1.644.375	
			VAKSIN HB.U (BK)	200	34.943	6.988.600	
26	14/08/2025	289/PROG/UPT-GF/VIII	XPERT MTB/RIF ULTRA GENEXPERT (BK)	100	142.500	14.250.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
27	15/08/2025	258/PROG/UPT-GF/VIII	DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET (BK)	750	4.712	3.534.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			LAMIVUDINE 150 MG TABLET (BP)	300	1.385	415.500	
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	12.000	3.366	40.392.000	
			TRIPLE FDC (TDF+3TC+EFV) GENERIK TAB(BK)	1.200	6.900	8.280.000	
28	15/08/2025	341/UPT-GF/VIII/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	1	149.522	149.522	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	9	163.405	1.470.645	
29	19/08/2025	BON/345/UPT-GF/VIII/	HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN (BK)	10	2.483.070	24.830.700	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
30	20/08/2025	137/P2PMTM/VIII/2025	PRETOMANID 200 MG TABLET (BK)	910	33.000	30.030.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
31	27/08/2025	443.2/34/VIII/2025	SOFOSBUVIR AND DACLATASVIR TABLET (BK)	2.100	28.305	59.440.500	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
32	02/09/2025	BON/367/UPT-GF/IX/20	VITAMIN A 100.000 IU KAPSUL (BK)	100	550	55.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
33	03/09/2025	293/PROG/UPT-GF/VIII	MOXIFLOXACIN HCI 400 MG TABLET (BP)	850	4.000	3.400.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
34	03/09/2025	381/UPT-GF/IX/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	6	163.405	980.430	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
35	16/09/2025	354/PROG/UPT-GF/IX/2	DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET (BK)	300	4.712	1.413.600	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
36	23/09/2025	800/291.1/PKM/IX/202	VAKSIN BCG (BK)	2	108.289	216.578	PUSKESMAS BAROS
37	29/09/2025	-	ALKOHOL SWAB HEXACARE (BK)	929	79	73.391	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			HBSAG TEST VIROCHECK (BK)	500	3.900	1.950.000	
			HCV ANTIBODY RAPID TEST (BK)	400	7.923	3.169.200	
			TENOFOVIR 300 MG TABLET (BP)	150	2.235	335.250	
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	15.000	3.366	50.490.000	
			XPERT HCV VIRAL LOAD GENEXPERT (BK)	250	408	102.000	



No	Tgl Transaksi	No. Faktur	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumah Harga	Nama Supplier
			VITAMIN A 200.000 IU KAPSUL (BK)	100	1.050	105.000	
			VAKSIN HB.U (BK)	200	43.863	8.772.600	
			VAKSIN POLIO (BOPV) (BK)	4	28.571	114.284	
			DISP. SYRINGE 3 ML ONEJECT (BK)	992	673	667.616	
			EDTA K3 3 ML 13 X 75 MM SB MED	1.000	-	-	
			OAT ANAK (BK)	20	346.000	6.920.000	
			STOP TB KIT (DOSIS HARIAN) (BK)	100	566.100	56.610.000	
38	02/10/2025	421/UPT-GF/X/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	10	165.969	1.659.690	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
39	20/10/2025	424/PROG/UPT-GF/X/20	ALUVIA 200 MG / 50 MG TAB (BP)	240	5.197	1.247.280	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET (BK)	1.500	5.188	7.782.000	
			MOXIFLOXACIN HCI 400 MG TABLET (BP)	1.500	4.000	6.000.000	
40	20/10/2025	145/P2PMTM/X/2025	PRETOMANID 200 MG TABLET (BK)	520	33.000	17.160.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
41	20/10/2025	424/PROG/UPT-GF/X/20	PYRAZINAMIDE 500 MG TABLET (BP)	500	334	167.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	24.000	3.600	86.400.000	
42	23/10/2025	443.2/110/P2PMTM/X/2	DASVIR 30 MG TABLET (BK)	2.520	5.570	14.036.400	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			SOFGEN 400 MG TABLET (BK)	1.260	15.500	19.530.000	
43	27/10/2025	//P2PMTM/X/2	ALKOHOL SWAB HEXACARE (BK)	1.500	79	118.500	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			DISP. SYRINGE 3 ML ONEJECT (BK)	1.500	673	1.009.500	
			EDTA K3 3 ML 13 X 75 MM SB MED	1.500	-	-	
44	28/10/2025	-	NEURO POLYVALENT SNAKE ANTIVEN	4	2.483.070	9.932.280	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
45	12/11/2025	800/383/PKM/XI/2025	VAKSIN DPT-HB (BK)	2	219.760	439.520	PUSKESMAS BAROS
			VAKSIN HB.U (BK)	200	43.863	8.772.600	
			VAKSIN MR (BK)	2	255.000	510.000	
			VAKSIN POLIO (IPV) (BK)	2	158.116	316.232	
			VAKSIN PREVENAR 13 (PCV) (BK)	2	201.560	403.120	
			VAKSIN ROTAVIRUS (BK)	10	143.500	1.435.000	
46	14/11/2025	-	HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVE	4	2.483.070	9.932.280	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
47	01/12/2025	528/UPT-GF/XII/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI (BP)	10	165.969	1.659.690	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
48	01/12/2025	//PKM/XI/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKSI	2	163.406	326.812	PUSKESMAS KRAMATWATU
49	02/12/2025	518/PROG/UPT-GF/XII/	DUVIRAL (ZDV+3TC) TABLET (BP)	3.300	4.146	13.681.800	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			EFAVIRENZ 600 MG TABLET (BP)	1.740	7.000	12.180.000	
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	3.000	3.600	10.800.000	
			ZIDOVUDINE 100 MG KAPSUL (BP)	600	1.994	1.196.400	
50	03/12/2025	-	APRON ONE ONEMED (BK)	100	-	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG



No	Tgl Transaksi	No. Faktur	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumah Harga	Nama Supplier
			APRON PLASTIK LENGAN PANJANG O	50	-	-	
			EDTA K3 3 ML 13 X 75 MM SB MED	1.600	-	-	
			HAND SOAP ANTISEPTIC 500 ML ME	10	-	-	
			MASKER KN95 ONEMED (BK)	100	-	-	
			MASKER N95 ONEMED (BK)	100	-	-	
			SARUNG TANGAN S ABADA (BK)	250	-	-	
			TOPI OPERASI NURSE ONEMED (BK)	200	-	-	
51	03/12/2025	BON/462/UPT-GF/XI/20	HALOPERIDOL 5 MG / ML INJEKSI (BK)	24	1.965	47.160	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			HALOPERIDOL 5 MG TABLET (BK)	1.000	54	54.000	
52	05/12/2025	530/PROG/UPT-GF/XII/	ABACAVIR 300 MG TABLET (BP)	300	4.940	1.482.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			ALUVIA 200 MG / 50 MG TAB (BP)	1.800	6.897	12.414.600	
			TENOFOVIR+LAMIV+DTG (BK)	32.400	3.599,97	116.639.028	
53	08/12/2025	BON/532/UPT-GF/XII/2	HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN (BK)	4	2.483.070	9.932.280	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG
			NEURO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN (BP)	4	2.483.070	9.932.280	
			VITAMIN A 100.000 IU KAPSUL (BK)	300	550	165.000	
			VITAMIN A 200.000 IU KAPSUL (BK)	300	1.050	315.000	
54	23/12/2025	//PKM/XII/2025	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKS	2	163.406	326.812	PUSKESMAS CIRUAS
55	28/12/2025	-	HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVE	3	2.483.070	7.449.210	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
<b>Total</b>						<b>1.167.996.764</b>	

Pada TA 2025 terdapat Persediaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat pada DPUPR, BPBD, DINSOS, DKPP dengan total yang tercatat sebesar Rp37.962.054.435,65 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 89**  
**Rincian Persediaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat**

No	OPD	Uraian	Nilai	Sumber Dana	Pihak yang Akan Menerima
1	DPUPR	Drainase Pendukung Wilayah Puspemkab	2.250.007.879,00	APBD	Desa di wilayah Kabupaten Serang dan daerah sekitar wilayah Puspemkab
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Desa	769.840.652,34		
		Pembangunan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Evakuasi Jalan	167.015.000,00		
		Pembangunan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Evakuasi Jembatan	198.671.867,00		
		Pembangunan Perkuatan Tebing Saluran/Sungai	1.839.459.206,00		
		TPT Jalan Desa	149.917.000,00		
		Rekonstruksi Jalan Desa	19.077.164.717,31		
<b>Subtotal DPUPR</b>			<b>24.452.076.321,65</b>		

No	OPD	Uraian	Nilai	Sumber Dana	Pihak yang Akan Menerima
2	DPRKP	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	2.792.090.000,00	APBD	Desa di wilayah Kabupaten Serang
		Pembangunan/Rehabilitasi Fasos Fasum PSU	7.105.279.300,00		
<b>Subtotal DPRKP</b>			<b>9.897.369.300,00</b>		
3	BPBD	Bantuan Pangan (mie instan dan sarden)	31.115.964,00	APBD	Korban bencana alam dan bencana nonalam
<b>Subtotal BPBD</b>			<b>31.115.964,00</b>		
4	DINSOS	Bantuan Sandang (pakaian dan perlengkapan ibadah)	3.022.000,00	APBD	Korban bencana alam dan bencana nonalam
<b>Subtotal DINSOS</b>			<b>3.022.000,00</b>		
5	DKPP	Bibit Tanaman	15.373.850,00	APBD	Kelompok tani dan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Serang
		Beras	3.563.097.000,00		
<b>Subtotal DKPP</b>			<b>3.578.470.850,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>37.962.054.435,65</b>		

Khusus untuk persediaan beras pada DKPP yang dititipkan pada Perum BULOG Kantor Cabang Serang akan dilakukan rekalkulasi volume beras pada tahun 2026 sesuai dengan Perjanjian Jual Beli antara DKPP Kabupaten Serang dengan Perum Bulog Kantor Cabang Serang perihal Penitipan Beras, bahwa apabila terjadi perubahan harga dan masih terdapat beras yang dititipkan lebih dari 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli, maka terhadap sisa beras yang masih dititipkan akan dikenakan penyesuaian harga sesuai dengan harga jual beli yang berlaku pada tahun tersebut, dengan menyesuaikan kuantum beras yang masih dititipkan dengan harga jual beli baru yang ditetapkan pada tahun berjalan dan dituangkan dalam bentuk adendum.

### 5.7.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi Jangka Panjang adalah akun untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2025 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp201.350.170.232,53 naik sebesar Rp8.078.608.281,32 atau 4,18% jika dibandingkan Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebanyak Rp193.271.561.951,21.

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Perhitungan Investasi Jangka Panjang/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menurut SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang adalah:

- Kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

- Kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Serang pada BUMD PDAM, PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas, PD. BPR Serang (Bank Serang) dan PT Serang Berkah Mandiri (SBM) lebih dari 50%, sehingga perhitungan nilai investasi jangka panjangnya menggunakan metode ekuitas sedangkan kepemilikan saham pada PT. Bank Jabar – Banten dibawah 50% menggunakan metode biaya. Penjelasan mutasi Investasi Jangka Panjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 90**  
**Nilai Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitas**  
**per 31 Desember 2025 dan 2024**

BUMD	Saham Aktual 2025	2024	Penyertaan Modal	Dividen	Laba/	Koreksi	2025
					(Rugi) 2025		
<b>METODE EKUITAS</b>							
PDAM "Tirta Al-Bantani"	100,00%	71.962.397.751,00	3.000.000.000,00	(1.374.046.656,00)	4.030.618.709,00	2.236.685.155,00	79.855.654.959,00
PD/BPR Bank Serang	56,96%	58.211.723.542,51	0,00	(3.769.606.023,00)	3.694.359.912,59	0,00	58.136.477.432,10
PD. PK. Ciomas	94,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Serang Berkah Mandiri	99,55%	135.627.642,70	0,00	0,00	0,00	260.597.183,73	396.224.826,43
<b>Jumlah Investasi dengan metode Ekuitas</b>		<b>130.309.748.936,21</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(5.143.652.679,00)</b>	<b>7.724.978.621,59</b>	<b>2.497.282.338,73</b>	<b>138.388.357.217,53</b>
<b>METODE BIAYA</b>							
Bank Jabar-Banten	1,54%	62.961.813.015,00	0,00	(13.761.430.697,00)	0,00	0,00	62.961.813.015,00
<b>Jumlah Investasi dengan metode biaya dan metode ekuitas</b>		<b>193.271.561.951,21</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(18.905.083.376,00)</b>	<b>7.724.978.621,59</b>	<b>2.497.282.338,73</b>	<b>201.350.170.232,53</b>

Perhitungan laba pada PDAM sebagaimana pada tabel 90 dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2024 yang sudah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga dengan perhitungan laba BPR berdasarkan Laporan Keuangan BPR tahun 2024 yang sudah diaudit oleh KAP Roni Pupung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perhitungan laba/rugi pada SBM tahun 2024 belum dapat dilakukan dikarenakan sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan SBM belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2024. SBM baru melakukan perikatan dengan KAP Roni Pupung untuk melakukan audit Laporan

Keuangan SBM tahun 2022, 2023, dan 2024 pada 28 April 2025 berdasarkan Nomor Surat Perikatan Kerja (SPK) Nomor: 180/RP/SBMP/SP/RB/IV/2025. Jangka waktu pelaksanaan audit ini maksimal 60 hari kalender dimulai sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan 27 Juni 2025.

Terkait dengan investasi pada PT. LKM Ciomas pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat Nomor S-3/NB123/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Ijin Usaha Bersyarat Batal dan tidak berlaku di mana dalam surat tersebut PT.LKM Ciomas dinyatakan belum melengkapi dokumen persyaratan Izin Usaha LKM secara lengkap dan benar sehingga OJK melarang PT.LKM Ciomas menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha sebagai LKM dan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPUS-LB) PT. LKM Ciomas Nomor 584.3/066/IV-21/PT. LKM.CMS. Pada tanggal 12 April 2021, telah diadakan RUPS-LB yang dihadiri para pemegang saham dengan hasil :

- a. Membubarkan PT. LKM CIOMAS
- b. Susunan tim Likuidasi :
  1. Direksi PT. LKM Ciomas 2 orang
  2. Bag. Perekonomian SETDA 1 orang
  3. Bag. Hukum SETDA 1 orang
  4. Unsur PT. Bank BJB 1 orang
- c. Membentuk Tim Likudasi, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
  1. Menyelesaikan Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan dan Deposito masyarakat.
  2. Melaksanakan tagihan kepada Debitur PT LKM Ciomas.
  3. Memohon kepada Pemda untuk bekerja sama dengan Bank BJB dalam menanggulangi pembayaran kepada nasabah, selanjutnya Pemda akan membayar kepada Bank BJB melalui APBD.
  4. Melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, mengingat pembayaran melalui beban APBD.
  5. Tim likuidasi agar mengajukan permohonan ke Kejaksaan Serang untuk melakukan penyitaan aset para terpidana dan menjual aset dimaksud yang hasilnya disetorkan ke kas daerah.
- d. Biaya operasional tim likuidasi dibebankan pada PT. LKM Ciomas yang kemudian dihitung menjadi kewajiban pemegang saham.
- e. Per tanggal 12 April 2021 seluruh karyawan LKM Ciomas dinonaktifkan.
- f. Tim likuidasi menyelesaikan seluruh kewajiban PT LKM Ciomas.

Pada tanggal 25 Mei 2021, telah ada Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang No.100/Pdt.P/2021/PM.Srg tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan oleh Akhmad Syarifudin (Dirut. PT. LKM Ciomas) pada tanggal 3 Mei 2021, dengan ketetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin dan kewenangan kepada Tim Likuidasi untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Tim Likuidator sesuai dengan Keputusan BA RUPS-LB.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon selaku Ketua tim likuidasi untuk berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Serang agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Negara berupa pajak, tunggakan BPJS kesehatan, tunggakan BPJS ketenagakerjaan, dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito masyarakat, hak para karyawan PT LKM Ciomas, serta pinjaman kepada Bank lainnya diantaranya pinjaman kepada BPR Serang dan PT Bank BJB Cabang khusus Banten, yang sumber pembayarannya dibiayakan dari APBD Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pengesahan BA RUPS-LB LKM Ciomas.

SK tim likuidasi dibentuk tanggal 26 Mei 2021 oleh Keputusan Bupati Serang Nomor: 900/Kep.286-Huk/2021 untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Serang dan tindak lanjut atas RUPS-LB PT LKM Ciomas.

Dan selanjutnya tim likuidasi melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajiban PT LKM Ciomas dengan hasil sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Juli 2021, diadakan Rapat Tim Likuidasi yang menyimpulkan tentang besaran kewajiban PT. LKM Ciomas sebagai berikut:

- a. Total seluruh Kewajiban PT.LKM Ciomas (Hasil Pemutahiran data) Rp.11.443.082.990,00
- b. Honorarium Tim Likuidasi (selama 2 tahun) Rp.509.000.000,00
- c. Biaya operasional (selama 2 tahun) Rp.466.932.052,00
- d. Total Biaya sebesar Rp. 12.419.015.042,00

Pada tanggal 12 Agustus 2021, Penerbitan surat permohonan penganggaran untuk kewajiban PT. LKM Ciomas, Nomor : 580/2145/Pe-Setda/2021.

Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Serang telah membayarkan kewajiban PT.LKM Ciomas sebesar Rp8.548.947.571,00 yang terdiri dari pembayaran tahun 2024 sebesar Rp2.482.125.637,00, pembayaran tahun 2023 sebesar Rp3.066.821.934,00 dan pembayaran tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00. Pembayaran ini dilakukan melalui anggaran pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman.

Kewajiban kepada Penabung dan Deposan PT.LKM Ciomas sudah dibayarkan sepenuhnya kepada deposan dan penabung sebesar Rp9.035.594.365,00 dengan sumber dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sebesar Rp8.548.947.571,00 dan sumber dana melalui hasil penagihan kredit sebesar Rp486.646.794,00. Sejak pembubaran PT.LKM Ciomas bulan April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2024 Tim Likuidasi Ciomas melakukan Penagihan

Kredit dan memperoleh hasil sebesar Rp848.468.795,00 dari penagihan kredit tersebut Tim Likuidasi membayarkan kepada nasabah penabung dan depositan sebesar Rp486.646.794,00 dan pengeluaran biaya operasional sebesar Rp361.822.001,00.

Tim Likuidasi melakukan Verifikasi data Kewajiban sebesar Rp1.891.411.509,00 pada tanggal per 31 Desember 2024 terdiri dari kewajiban kepada bank BJB sebesar Rp809.912.131,00 dan kewajiban kepada PT. BPR(Bank Serang) sebesar Rp1.081.499.378,00. Kewajiban ini sudah dibayarkan pada tahun ini melalui belanja tidak terduga.

### 5.7.3. Aset Tetap

Nilai bersih Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.148.733.824.913,67 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.201.664.442.044,33 turun sebesar Rp52.930.617.130,66. Posisi aset tetap per KIB disajikan sebagai berikut:

**Tabel 91**  
**Saldo Aset Tetap tiap KIB per 31 Desember 2025 dan 2024**

KIB	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
A	Tanah	1.229.227.298.289,18	1.216.523.986.082,18	12.703.312.207,00
B	Peralatan dan Mesin	1.115.495.872.751,60	1.350.752.570.253,95	(235.256.697.502,35)
C	Gedung dan Bangunan	1.965.820.941.513,08	1.936.962.277.538,26	28.858.663.974,82
D	Jalan, Irigasi & Jaringan	2.882.755.902.699,66	2.837.404.473.513,33	45.351.429.186,33
E	Aset Tetap Lainnya	41.335.221.284,10	40.861.374.672,10	473.846.612,00
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.736.006.265,00	990.000.000,00	6.746.006.265,00
G	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.093.637.417.888,95)	(3.181.830.240.015,49)	88.192.822.126,54
	<b>Jumlah</b>	<b>4.148.733.824.913,67</b>	<b>4.201.664.442.044,33</b>	<b>(52.930.617.130,66)</b>

Adapun rincian dari mutasi Aset Tetap pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 92**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025**

Uraian	Nominal
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>	<b>4.201.664.442.044,33</b>
<b>Mutasi Debet:</b>	
Belanja Modal	238.815.451.143,00
Kapitalisasi	10.875.485.279,00
Hibah	35.285.925.506,87
Pindah Antar SKPD	374.453.590.069,15
Koreksi Pembukuan	421.911.369.233,53
Utang	3.045.065.699,71
Reklas	404.322.490.482,76
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>1.488.709.377.414,02</b>

Uraian	Nominal	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Ekstra Komptabel	27.198.572.533,68	
Penghapusan	115.681.000,00	
Hibah	411.937.500,00	
Pindah Antar SKPD	374.453.590.069,15	
Beban Penyusutan	311.645.161.846,36	
Koreksi Pembukuan	184.748.513.894,81	
Utang	353.891.150,00	
Reklas	642.712.646.550,68	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>1.541.639.994.544,68</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>(52.930.617.130,66)</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>4.148.733.824.913,67</b>

### 1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.229.227.298.289,18 naik sebesar Rp12.703.312.207,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.216.523.986.082,18. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 93**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah 2025**

Uraian	Nominal	
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>		<b>1.216.523.986.082,18</b>
<b>Mutasi Debet:</b>		
Belanja Modal	2.438.830.876,00	
Kapitalisasi	340.037.780,00	
Hibah	11.428.279.549,00	
Pindah Antar SKPD	369.103.405.522,00	
Koreksi Pembukuan	150.497.042.108,00	
Utang	15.250.000,00	
Reklas	1.202.712.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>535.025.557.835,00</b>	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Penghapusan	115.681.000,00	
Pindah Antar SKPD	369.103.405.522,00	
Reklas	153.103.159.106,00	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>522.322.245.628,00</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>12.703.312.207,00</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>1.229.227.298.289,18</b>

Mutasi debit pada aset tetap Tanah tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi debit berupa Belanja Modal sebesar Rp2.438.830.876,00 terdapat pada BPKAD sebesar Rp2.203.729.584,00 dan DPUPR sebesar Rp235.101.292,00.

Mutasi debit berupa Kapitalisasi sebesar Rp340.037.780,00 terdapat pada DISDIKBUD berasal dari Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.

Mutasi debit berupa Hibah sebesar Rp11.428.279.549,00 merupakan penerimaan hibah tanah dari pihak ketiga, dimana nilai terbesar terdapat pada Disdikbud sebesar Rp5.606.856.000,00 peruntukkan SMPN 2 Cijeruk Kibin dari PT Nikomas Gemilang berdasarkan Akta Hibah Nomor 19 Tahun 2025 tanggal 12 Maret 2025. Selain itu terdapat penerimaan hibah pada DPRKP berupa lahan/tanah PSU Perumahan Griya Junti Asri sebesar Rp1.806.705.000,00 dari PT Bumi Cahaya Mandiri berdasarkan BAST Nomor 648/10/BAST-PSU/DPRKP/2025 tanggal 28 Juli 2025, sebesar Rp1.960.524.000,00 dari PT Bina Rencana Agung berdasarkan BAST Nomor 648/09/BAST-PSU/DPRKP/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan sebesar Rp1.497.688.000,00 dari PT Cahaya Unggul Mitra Sejati.

Mutasi debit berupa Pindah antar SKPD sebesar Rp369.103.405.522,00 merupakan mutasi aset tanah dari BPKAD ke DPRKP sebesar Rp368.752.405.522,00 berupa aset Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan berdasarkan BAST Nomor 032/4941/BPKAD-ASET/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 serta mutasi aset pada BPKAD sebesar Rp351.000.000,00 berupa Tanah Hutan wisata tempat Rekreasi pemandian Air panas yang berlokasi di Kecamatan padarincang, Kabupaten Serang dari DISPORA berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/2Disporapar/2025 tanggal 10 April 2025.

Mutasi debit berupa Koreksi pembukuan sebesar Rp150.497.042.108,00 merupakan pencatatan koreksi atas penyerahan aset dari PT. Waskita Beton Precast. Tbk berupa tanah yang terletak di Kecamatan Bojonegara yang belum tercatat di tahun 2025 pada BPKAD, berdasarkan putusan pengadilan nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal tanggal 17 Januari 2025.

Mutasi debit berupa Utang sebesar Rp15.250.000,00 merupakan utang pada DPUPR berupa belanja modal tanah *long storage*.

Mutasi debit berupa Reklas sebesar Rp1.202.712.000,00 merupakan reklas pada BPKAD dari Properti Investasi ke aset tetap tanah berupa lahan fasos fasum pendidikan yang selanjutnya disewakan ke Yayasan Pandu Pertiwi dan PT. Pemandian Air Panas Batu Kuwung (PT. PAPBK) Padarincang.

Mutasi Kredit pada aset tetap tanah tahun 2025 terdiri dari:

Mutasi kredit berupa Penghapusan sebesar Rp115.681.000,00 merupakan penghapusan barang milik daerah berupa tanah yang telah diserahkan kepada Kepolisian Resor Serang Kota yaitu tanah untuk pembangunan Polsek Baros sesuai dengan SK Bupati Serang Nomor 030/Kep.200-Huk.BPKAD/2025 tanggal 25 Maret 2025.

Mutasi kredit Pindah antar SKPD sebesar Rp369.103.405.522,00 merupakan mutasi aset tanah dari BPKAD ke DPRKP sebesar Rp368.752.405.522,00 berupa aset Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan berdasarkan BAST Nomor 032/4941/BPKAD-ASET/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 serta mutasi aset dari Dispora ke BPKAD Kabupaten Serang sebesar Rp351.000.000,00 berupa Tanah Hutan wisata tempat Rekreasi pemandian Air panas yang berlokasi di Kecamatan padarincang, Kabupaten Serang berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/2Disporapar/2025 tanggal 10 April 2025.

Mutasi kredit Reklas sebesar Rp153.103.159.106,00 merupakan reklas tanah ke aset lain-lain, yang terdapat pada 4 SKPD yaitu RSDP, Setda, BPKAD dan Kecamatan Mancak. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	RSDP	295.474.998,00
2	SETDA	756.840.000,00
3	BPKAD	152.050.754.108,00
4	Mancak	90.000,00
Jumlah		153.103.159.106,00

Mutasi reklas pada SETDA Kabupaten Serang sebesar Rp756.840.000,00 diantaranya sebesar Rp600.210.000,00 merupakan reklas berupa tanah untuk Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Serang yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cimuncang Kota Serang yang kemudian diserahkan ke Pemerintah Kota Serang. Selain itu, terdapat reklas tanah ke aset lain-lain (sewa) pada BPKAD sebesar Rp425.856.000,00 berupa Lahan Fasos Fasum Pendidikan yang disewakan ke Yayasan Pandu Pertiwi serta Tanah Hutan wisata sebesar Rp351.000.000,00 yang disewakan ke PT. Pemandian Air Panas Batu Kuwung (PT. PAPBK) Padarincang yang selanjutnya direklas ke Properti Investasi, serta perolehan aset Tanah dari PT. Waskita Beton Precast Tbk yang direklas ke Properti Investasi sebesar Rp 151.273.898.108,00.

## 2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.115.495.872.751,60 turun sebesar Rp235.256.697.502,35 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.350.752.570.253,95. Dengan rincian tabel sebagai berikut:

**Tabel 94**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2025**

Uraian	Nominal	
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>		<b>1.350.752.570.253,95</b>
<b>Mutasi Debet:</b>		
Belanja Modal	154.131.047.995,00	
Kapitalisasi	261.702.460,00	
Hibah	282.614.999,87	
Pindah Antar SKPD	3.595.948.970,00	
Koreksi Pembukuan	1.425.109.957,00	
Utang	335.052.967,00	
Reklas	2.434.068.212,00	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>162.465.545.560,87</b>	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Ekstra Komptabel	7.401.176.162,68	
Hibah	411.937.500,00	
Pindah Antar SKPD	3.595.948.970,00	
Koreksi Pembukuan	2.690.692.153,00	
Utang	353.891.150,00	
Reklas	383.268.597.127,54	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>397.722.243.063,22</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>(235.256.697.502,35)</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>1.115.495.872.751,60</b>

Mutasi debit pada aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 terdiri dari:

Mutasi debit berupa Belanja Modal sebesar Rp154.131.047.995,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	70.403.946.752,00
2	DINKES	7.749.289.694,00
3	RSDP	45.049.196.698,00
4	DPUPR	8.673.048.007,00
5	DPRKP	387.512.100,00
6	BPBD	496.601.140,00
7	DINSOS	117.900.000,00
8	DISNAKERTRANS	132.274.770,00



NO	SKPD	Nilai
9	DKPP	1.206.805.128,00
10	DLH	3.193.516.050,00
11	DISDUKCAPIL	974.521.448,00
12	DPMD	135.857.750,00
13	DKBP3A	112.595.070,00
14	DISHUB	597.389.280,00
15	DISKOMINFO	1.495.816.220,00
16	DISKOPERINDAG	967.777.452,00
17	DPMPTSP	338.436.780,00
18	DISPORAPAR	138.128.400,00
19	DPKD	3.338.735.799,00
20	DISKAN	205.091.065,00
21	SETDA	1.857.541.049,00
22	SETWAN	769.218.900,00
23	BAPERIDA	392.299.999,00
24	BAPENDA	3.051.951.717,00
25	BPKAD	1.271.423.697,00
26	BKPSDM	181.427.280,00
27	INSPEKTORAT	163.647.500,00
28	Anyar	87.813.210,00
29	Bandung	18.315.000,00
30	Binuang	26.129.400,00
31	Cinangka	68.373.200,00
32	Ciomas	52.558.500,00
33	Ciruas	15.705.390,00
34	Gunungsari	52.170.000,00
35	Kibin	16.095.000,00
36	Kopo	36.924.150,00
37	Kragilan	3.196.800,00
38	Kramatwatu	22.557.420,00
39	Mancak	38.119.620,00
40	Pabuaran	34.594.000,00
41	Pamarayan	14.500.000,00
42	Pulo Ampel	19.036.500,00
43	Tanara	16.650.000,00
44	Tirtayasa	30.682.000,00

NO	SKPD	Nilai
45	Wariginkurung	13.848.360,00
46	KESBANGPOL	161.829.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>154.131.047.995,00</b>

Nilai belanja modal terbesar terdapat pada Disdikbud sebesar Rp70.403.946.752,00, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari dana APBD dan BOS.

Mutasi debit berupa Kapitalisasi sebesar Rp261.702.460,00 diantaranya terdapat pada Disdikbud sebesar Rp98.715.100,00 berasal dari belanja barang dan jasa BOS, DKPP sebesar Rp144.701.960,00 berasal dari belanja pemeliharaan peralatan kantor, Disnakertrans sebesar Rp14.800.000,00 berasal dari belanja barang perabot kantor dan Diskan sebesar Rp3.485.400,00 berasal dari belanja barang untuk kegiatan kantor lainnya.

Mutasi debit berupa Hibah sebesar Rp282.614.999,87 terdapat pada BPKAD sebesar Rp258.000.000,00 merupakan hibah Aset Peralatan dan mesin dari keluarga besar H. M. Edy Firdaus Lutfie, ST, MM berupa sarana dan prasarana masjid KH. Moh Almisri (alat rumah tangga (*home use*)) yang berlokasi di Jalan Serang – Jakarta Km.15 Kampung Baru Pasar Desa Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, berdasarkan BAST Nomor 032/527.1/Aset-BPKAD/2024 tanggal 12 November 2024. Selain itu terdapat hibah pada DPKD berupa motor perpustakaan keliling dari Perpusnas sebesar Rp24.614.999,87 berdasarkan BAST Nomor 53031/4.2/PPM.07/XI.2025 tanggal 25 November 2025.

Mutasi debit berupa Pindah antar SKPD sebesar Rp3.595.948.970,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	SATPOL PP	55.600.000,00
2	DLH	1.127.843.750,00
3	DISKOPERINDAG	28.435.000,00
4	DISPORAPAR	7.326.250,00
5	DISKAN	15.956.250,00
6	SETDA	1.071.262.000,00
7	SETWAN	383.034.105,00
8	BPKAD	386.429.815,00
9	BKPSDM	269.000.000,00
10	INSPEKTORAT	35.063.050,00
11	KESBANGPOL	215.998.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.595.948.970,00</b>

Nilai mutasi Pindah antar SKPD terbesar terdapat pada DLH sebesar Rp1.127.843.750,00 merupakan mutasi aset berupa Excavator dari DISKAN Kabupaten Serang dengan Berita Acara Nomor 032/201/PB/DISKAN/2025 dan 032/2190/PB/DLH/2025 tanggal 1 September 2025.

Mutasi debit berupa Koreksi Pembukuan sebesar Rp1.425.109.957,00 terdapat pada Disdikbud sebesar Rp297.266.207,00 merupakan koreksi atas belanja modal BOS karena ketidaksesuaian belanja modal antara peralatan mesin dengan aset tetap lainnya. Selain itu terdapat juga pada Diskan sebesar Rp 1.127.843.750,00 merupakan koreksi atas pengadaan aset yang belum tercatat tahun 2012 berupa excavator dari hasil temuan BPK di tahun 2025.

Mutasi debit berupa Utang sebesar Rp335.052.967,00 merupakan utang pada Diskominfo, DPUPR dan DPMPTSP, nilai terbesar sebesar Rp323.026.650,00 terdapat pada DPUPR Kabupaten Serang.

Mutasi debit berupa Reklas sebesar Rp2.434.068.212,00 merupakan reklas aset peralatan dan mesin dari aset lainnya Diantaranya terdapat pada BPKAD sebesar Rp1.423.286.453,00 berupa reklas kendaraan dari kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain yang telah habis masa berlakunya selain itu reklas aset peralatan dan mesin dari aset gedung dan bangunan pada DPKD sebesar Rp149.457.760,00 berupa AC.

Mutasi Kredit pada aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 terdiri dari:

Mutasi kredit berupa Ekstrakomptabel sebesar Rp7.401.176.162,68 merupakan belanja modal dengan perolehan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	5.982.617.785,00
2	DINKES	436.086.163,68
3	RSDP	249.200.000,00
4	DPUPR	3.032.000,00
5	DPRKP	9.479.400,00
6	BPBD	18.812.800,00
7	DISNAKERTRANS	10.204.170,00
8	DKPP	104.427.686,00
9	DLH	11.083.350,00
10	DISDUKCAPIL	1.587.300,00
11	DISKOMINFO	14.760.000,00
12	DISKOPERINDAG	209.017.283,00
13	DISPORAPAR	35.897.400,00

NO	SKPD	Nilai
14	DPKD	7.936.500,00
15	DISKAN	13.479.285,00
16	SETDA	46.172.670,00
17	SETWAN	71.595.000,00
18	BAPENDA	25.252.500,00
19	BPKAD	17.094.000,00
20	Anyar	41.625.000,00
21	Bandung	7.215.000,00
22	Binuang	3.885.000,00
23	Ciomas	18.037.500,00
24	Gunungsari	39.960.000,00
25	Kramatwatu	3.774.000,00
26	Mancak	8.288.370,00
27	KESBANGPOL	10.656.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.401.176.162,68</b>

Nilai mutasi Ekstrakomptabel terbesar terdapat pada Disdikbud yaitu sebesar Rp5.982.617.785,00.

Mutasi kredit berupa Hibah sebesar Rp411.937.500,00 pada BPKAD merupakan hibah berupa kendaraan roda empat merk/type Toyota New Kijang Innova 2.0 A/T Venturer VIN 2018 dengan Nomor Polisi A1522E tahun perolehan 2018 dengan nomor rangka MHFAWBEM7J0211277 dan nomor mesin 1TRA536586 milik Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan kepada Yayasan Atsila Kamala Kramatwatu dengan SK Bupati nomor : 027/Kep.197-Huk.BPKAD/2025 tanggal 25 Maret 2025.

Mutasi kredit berupa Pindah antar SKPD sebesar Rp3.595.948.970,00, dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DINSOS	69.500.000,00
2	DISKAN	1.156.278.750,00
3	SETDA	678.334.105,00
4	SETWAN	456.512.000,00
5	BAPENDA	60.669.300,00
6	BPKAD	605.100.000,00
7	BKPSDM	542.192.850,00
8	INSPEKTORAT	27.361.965,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.595.948.970,00</b>

Nilai mutasi Pindah antar SKPD terbesar terdapat pada Diskan yaitu sebesar Rp1.156.278.750,00 yang salah satunya merupakan mutasi aset berupa Excavator ke DLH Kabupaten Serang sebesar Rp1.127.843.750,00 dengan Berita Acara Nomor 032/201/PB/DISKAN/2025 dan 032/2190/PB/DLH/2025 tanggal 1 September 2025.

Mutasi kredit berupa Koreksi Pembukuan sebesar Rp2.690.692.153,00 merupakan eliminir pencatatan utang belanja modal tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025, dengan nilai terbesar pada Dinkes sebesar Rp1.066.177.457,00.

Mutasi kredit berupa Utang sebesar Rp353.891.150,00 merupakan eliminir pencatatan utang belanja modal tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 pada Disdukcapil.

Mutasi kredit berupa Reklas sebesar Rp383.268.597.127,54 merupakan pencatatan reklas peralatan dan mesin ke aset lainnya yang sebagian besar merupakan reklas ke aset lain-lain hasil inventarisasi mandiri dikarenakan aset tersebut sudah rusak. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	243.762.762.563,08
2	DINKES	34.886.569.665,08
3	RSDP	24.977.520.156,47
4	DPUPR	2.824.477.489,14
5	DPRKP	997.648.775,67
6	SATPOL PP	196.849.299,00
7	BPBD	2.798.629.876,00
8	DINSOS	875.237.028,00
9	DISNAKERTRANS	1.487.403.524,39
10	DKPP	5.643.676.921,00
11	DLH	2.498.609.031,00
12	DISDUKCAPIL	1.648.312.475,00
13	DPMD	630.636.525,00
14	DKBP3A	2.130.868.839,00
15	DISHUB	9.159.285.293,00
16	DISKOMINFO	8.720.030,00
17	DISKOPERINDAG	3.619.754.169,00
18	DPMPTSP	1.232.122.479,00
19	DISPORAPAR	143.520.000,00
20	DPKD	778.012.760,00
21	DISKAN	7.963.930.577,18
22	SETDA	13.365.129.990,00
23	SETWAN	5.146.471.156,00



NO	SKPD	Nilai
24	BAPERIDA	722.317.203,40
25	BAPENDA	2.826.615.564,87
26	BPKAD	2.197.223.946,00
27	BKPSDM	478.300.140,95
28	INSPEKTORAT	1.094.761.137,00
29	Anyar	218.974.050,00
30	Bandung	351.989.076,00
31	Baros	214.216.318,03
32	Binuang	887.351.458,33
33	Bojonegara	560.753.217,00
34	Carenang	226.321.800,00
35	Cikande	718.381.916,00
36	Cikeusal	51.373.023,00
37	Cinangka	100.942.025,00
38	Ciomas	144.458.780,00
39	Ciruas	214.326.997,00
40	Gunung Sari	319.668.366,00
41	Jawilan	167.883.961,95
42	Kibin	25.144.025,00
43	Kopo	325.666.500,00
44	Kragilan	825.091.476,00
45	Kramatwatu	325.317.364,00
46	Lebak Wangi	115.699.700,00
47	Mancak	207.109.300,00
48	Pabuaran	369.582.000,00
49	Pandarincang	441.175.540,00
50	Pamarayan	419.762.039,00
51	Petir	190.577.547,00
52	Pontang	204.456.235,00
53	Pulo Ampel	423.273.350,00
54	Tanara	189.095.662,00
55	Tirtayasa	157.599.825,00
56	Tujung Teja	167.197.750,00
57	Wariginkurung	357.676.250,00
58	KESBANGPOL	252.164.962,00
<b>Jumlah</b>		<b>383.268.597.127,54</b>

### 3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.965.820.941.513,08 naik sebesar Rp28.858.663.974,82 jika

dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.936.962.277.538,26 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**Tabel 95**  
**Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 2025**

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		1.936.962.277.538,26
<b>Mutasi Debet:</b>		
Belanja Modal	39.666.670.093,00	
Kapitalisasi	3.820.809.089,00	
Hibah	2.721.039.028,00	
Koreksi Pembukuan	88.594.181.785,00	
Reklas	11.253.447.711,00	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>146.056.147.706,00</b>	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Ekstra Komptabel	2.326.840,00	
Koreksi Pembukuan	9.975.709.962,18	
Reklas	107.219.446.929,00	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>117.197.483.731,18</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>28.858.663.974,82</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>1.965.820.941.513,08</b>

Mutasi debet pada aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi debet berupa Belanja Modal sebesar Rp39.666.670.093,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	3.849.176.993,00
2	DINKES	7.610.350.942,00
3	RSDP	8.858.022.490,00
4	DPUPR	6.789.043.374,00
5	DPRKP	1.568.260.480,00
6	DKBP3A	2.420.480.035,00
7	DPKD	8.571.335.779,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.666.670.093,00</b>

Nilai belanja modal terbesar terdapat pada RSDP sebesar Rp8.858.022.490,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Kesehatan.

Mutasi debit berupa Kapitalisasi sebesar Rp3.820.809.089,00 merupakan nilai kapitalisasi yang menjadi aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 yang sebagian besar berasal dari Belanja Pemeliharaan, adapun untuk rincian per SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	1.623.502.669,00
2	DINKES	390.866.520,00
3	RSDP	444.549.450,00
4	DPUPR	730.643.590,00
5	DPRKP	99.731.550,00
6	DKBP3A	130.997.760
7	SETWAN	400.517.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.820.809.089,00</b>

Mutasi debit berupa Hibah sebesar Rp2.721.039.028,00 merupakan hibah Aset Gedung dan Bangunan dari keluarga besar H. M. Edy Firdaus Lutfie, ST, MM berupa Gedung dan Bangunan masjid KH. Moh Almisri yang berlokasi di Jalan Serang – Jakarta Km.15 Kampung Baru Pasar Desa Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, berdasarkan BAST Nomor 032/527.1/Aset-BPKAD/2024 tanggal 12 November 2024.

Mutasi debit berupa Koreksi Pembukuan sebesar Rp88.594.181.785,00 merupakan koreksi pembukuan pada SKPD Disdikbud, Dinkes, DPUPR, DPRKP dan BPKAD dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	195.306.862,00
2	DINKES	490.770.643,00
3	DPUPR	1.576.612.516,00
4	DPRKP	9.973.155,00
5	BPKAD	86.321.518.609,00
<b>Jumlah</b>		<b>88.594.181.785,00</b>

Mutasi atas koreksi pembukuan pada DPUPR sebesar Rp1.576.612.516,00 antara lain merupakan nilai retensi yang diluncurkan di tahun 2026 sebesar Rp64.602.958,00 adanya koreksi harga akibat kurang catat di tahun sebelumnya sebesar Rp50.000,00 serta koreksi akibat adanya penggabungan register aset sebesar Rp1.511.959.558,00. Mutasi atas koreksi pembukuan pada BPKAD sebesar Rp86.321.518.609,00 merupakan koreksi pembukuan atas penyerahan aset dari PT. Waskita Beton Precast. Tbk berupa Bangunan Gedung yang belum tercatat di tahun 2025 berdasarkan hasil putusan pengadilan dengan Nomor putusan 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2025.

Mutasi debit berupa Reklas sebesar Rp11.253.447.711,00 merupakan pencatatan reklas pada DPUPR yang semula dari aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp990.000.000,00 atas pekerjaan Pematangan Lahan Kawasan Puspemkab. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan diserahkan berdasarkan BAST tanggal 14 Januari 2025 Nomor 641/24.EKTLG.PK.HS.53057536/BASTPP/PMTNGN.LHN.SGNE.PSMP KB-1/KPA-PB/DPUPR/2025. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung kantor pada 4 SKPD (Diskominfo, Diskoperindag, Disdukcapil, dan DKBP3A). Selain itu reklas sebesar Rp58.713.450,00 pada DKBP3A merupakan reklas dari aset tak berwujud berupa jasa konsultasi pengawasan yang digunakan untuk pembangunan balai gedung penyuluh KB di beberapa kecamatan yang direklas ke aset Gedung dan Bangunan, dan reklas sebesar Rp10.204.734.261,00 terdapat pada BPKAD yang merupakan pencatatan aset dari PT. Waskita Beton Precast. Tbk berupa Bangunan Gedung yang semula dicatat di aset tanah menjadi aset Gedung dan Bangunan.

Mutasi Kredit pada aset Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Mutasi kredit berupa Ekstrakomptabel sebesar Rp2.326.840,00 merupakan belanja modal dengan perolehan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi pada DKBP3A Kabupaten Serang.

Mutasi kredit berupa Koreksi pembukuan sebesar Rp9.975.709.962,18 merupakan koreksi pembukuan pada SKPD Disdikbud, Dinkes, DPUPR, dan DPRKP dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DISDIKBUD	148.148.262,77
2	DINKES	2.416.129.953,15
3	DPUPR	7.280.394.051,00
4	DPRKP	22.103.933,26
5	DPKD	108.933.762,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.975.709.962,18</b>

Mutasi atas koreksi pembukuan pada Dinkes sebesar Rp2.386.016.623,00 merupakan pencatatan utang belanja modal tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 dan sebesar Rp30.113.330,15 merupakan pencatatan atas kelebihan pembayaran belanja modal pada kegiatan Rehabilitasi Berat Gedung Pustu Waringin Kec. Mancak, Pustu Lebak Kec. Ciomas, Gedung Puskesmas Paket 2 (Puskesmas Tanara), dan Pembangunan Rumah Dinas dan Sarana Pelengkap Puskesmas Kibin. Mutasi atas koreksi pembukuan pada DPUPR sebesar Rp7.280.394.051,00 antara lain merupakan pencatatan utang retensi yang dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp5.556.299.774,00 adanya koreksi harga akibat kelebihan pencatatan di

tahun sebelumnya sebesar Rp212.134.719,00 serta koreksi akibat adanya penggabungan register aset sebesar Rp1.511.959.558,00.

Mutasi kredit berupa Reklas sebesar Rp107.219.446.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Nilai
1	DPUPR	6.999.850.299,00
2	DPRKP	1.460.017.035,00
3	DKBP3A	213.790.999,00
4	SETDA	1.105.508.000,00
5	Pontang	28.414.000,00
6	DINKES	736.155.966,00
7	DPKD	149.457.760,00
8	BPKAD	96.526.252.870,00
<b>Jumlah</b>		<b>107.219.446.929,00</b>

Mutasi reklas pada BPKAD sebesar Rp96.526.252.870,00 merupakan reklas dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Properti Investasi Bangunan Gedung.

#### 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.882.755.902.699,66 naik sebesar Rp45.351.429.186,33 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.837.404.473.513,33, dengan rincian tabel sebagai berikut:

**Tabel 96**  
**Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025**

Uraian	Nominal	
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>		<b>2.837.404.473.513,33</b>
<b>Mutasi Debet:</b>		
Belanja Modal	21.956.401.229,00	
Kapitalisasi	6.431.435.950,00	
Hibah	20.853.991.930,00	
Koreksi Pembukuan	33.273.106.220,03	
Utang	2.694.762.732,71	
Reklas	1.460.017.035,00	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>86.669.715.096,74</b>	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Koreksi Pembukuan	40.968.302.910,41	
Reklas	349.983.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>41.318.285.910,41</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>45.351.429.186,33</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>2.882.755.902.699,66</b>

Mutasi debit pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi debit berupa Belanja Modal sebesar Rp21.956.401.229,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 yang terdapat di 3 SKPD yaitu RSDP, DPUPR dan Dishub dimana yang terbesar berada pada SKPD DPUPR sebesar Rp9.569.233.994,00.

Mutasi debit berupa Kapitalisasi sebesar Rp6.431.435.950,00 terdapat pada DPUPR sebesar Rp5.959.102.070,00 berasal dari belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, dan DKPP sebesar Rp472.333.880,00 berasal dari belanja Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi Lainnya.

Mutasi debit berupa hibah sebesar Rp20.853.991.930,00 merupakan penerimaan hibah pada DPRKP berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Griya Junti Asri yang berlokasi di Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari PT. Bina Rencana Agung sebesar Rp987.809.400,00 dengan BAST nomor 648/09/BAST-PSU/DPRKP/2025 tanggal 28 Juli 2025, hibah dari PT. Bumi Cahaya Mandiri sebesar Rp1.319.716.450,00 berdasarkan BAST Nomor 648/10/BAST-PSU/DPRKP/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan hibah dari PT. Pradipta Griya Waringin Indah. Selain itu, penerimaan hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Sava yang berlokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sebesar Rp5.936.863.200,00 dari PT. Cahaya Unggul Mitra Sejati berdasarkan BAST Nomor 648/13/BAST-PSU/DPRKP/2025 tanggal 17 September 2025 dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Griya Waringin Indah yang berlokasi di Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang dari PT. Pradipta Ratnapratalla sebesar Rp12.609.602.880,00 berdasarkan BAST Nomor 648/23/BAST-PSU/DPRKP/2025 tanggal 19 Desember 2025.

Mutasi debit berupa Koreksi Pembukuan sebesar Rp33.273.106.220,03 merupakan nilai retensi yang diluncurkan di tahun 2026 yang terdapat pada 3 SKPD yaitu Dishub sebesar Rp359.906.400,00, DPRKP sebesar Rp71.877.130,00 dan DPUPR sebesar Rp89.807.795,69 serta adanya koreksi pembukuan pada DPUPR akibat koreksi harga dikarenakan kurang catat di tahun sebelumnya sebesar Rp592.600,00 dan koreksi akibat adanya penggabungan register aset sebesar Rp32.750.922.294,34.

Mutasi debit berupa Utang sebesar Rp2.694.762.732,71 merupakan utang belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pembayarannya diluncurkan di tahun 2026 pada DPUPR. Adapun rincian mengenai nomor kontrak atas pencatatan utang tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 114.

Mutasi debet berupa reklas sebesar Rp1.460.017.035,00 merupakan reklas dari aset Gedung dan Bangunan pada DPRKP Kabupaten Serang.

Mutasi Kredit pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

Mutasi kredit berupa koreksi pembukan sebesar Rp40.968.302.910,41 terdapat pada DPUPR Kabupaten Serang, koreksi tersebut antara lain merupakan pencatatan utang retensi yang dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp7.862.885.913,00 adanya koreksi harga akibat kelebihan pencatatan di tahun sebelumnya sebesar Rp196.077.227,76, koreksi akibat adanya penggabungan register aset sebesar Rp32.750.922.294,34, koreksi nilai atas pekerjaan Rekonstruksi Jalan Cikoneng Rp49.609.185,31 dan Rekonstruksi Bantarwangi Rp52.631.040,00 serta koreksi atas pekerjaan Rehabilitasi Fasos Fasum PSU sebesar Rp56.177.250,00.

Mutasi kredit berupa reklas sebesar Rp349.983.000,00 merupakan reklas dari aset Jalan, Irigasi dan jaringan ke aset Peralatan dan Mesin pada RSDP Kabupaten Serang.

## 5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.335.221.284,10 naik sebesar Rp473.846.612,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp40.861.374.672,10, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 97**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2025**

Uraian	Nominal	
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>		<b>40.861.374.672,10</b>
<b>Mutasi Debet:</b>		
Belanja Modal	20.622.500.950,00	
Kapitalisasi	21.500.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>20.644.000.950,00</b>	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Ekstra Komptabel	19.795.069.531,00	
Koreksi Pembukuan	335.088.807,00	
Reklas	39.996.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>20.170.154.338,00</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>473.846.612,00</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>41.335.221.284,10</b>

Mutasi debit pada aset tetap lainnya tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi debit berupa Belanja modal sebesar Rp20.622.500.950,00, terdapat pada Disdikbud sebesar Rp20.265.200.950,00 dan DPKD sebesar Rp357.300.000,00, secara umum belanja modal tersebut berupa pengadaan aset buku.

Mutasi debit berupa Kapitalisasi sebesar Rp21.500.000,00 terdapat pada DPKD sebesar Rp18.000.000,00 merupakan kapitalisasi belanja buku yang bukan dianggarkan dari belanja modal melainkan dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan Disdikbud sebesar Rp3.500.000,00 merupakan kapitalisasi belanja barang dan jasa BOS berupa alat musik.

Mutasi Kredit pada aset tetap lainnya tahun 2025 terdiri dari:

Mutasi kredit berupa Ekstrakomptabel sebesar Rp19.795.069.531,00 terdapat pada Disdikbud sebesar Rp19.610.988.031,00 dan DPKD sebesar Rp184.081.500,00.

Mutasi kredit berupa Koreksi Pembukuan sebesar Rp335.088.807,00 yang terdiri dari koreksi pada Disdikbud sebesar Rp297.266.207,00 merupakan koreksi atas belanja modal BOS karena ketidaksesuaian belanja modal antara peralatan mesin dengan aset tetap lainnya. Serta koreksi pembukuan pada DPUPR sebesar Rp592.600,00 merupakan koreksi harga disebabkan adanya kelebihan pencatatan di tahun sebelumnya.

Mutasi kredit berupa Reklas sebesar Rp39.996.000,00 merupakan reklas aset tetap lainnya ke aset lain-lain (aset rusak) pada Bapperida Kabupaten Serang.

## 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.736.006.265,00 naik sebesar Rp6.746.006.265,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp990.000.000,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**Tabel 98**  
**Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 2025**

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		990.000.000,00
<b>Mutasi Debet:</b>		
Reklas	7.736.006.265,00	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>7.736.006.265,00</b>	

Uraian	Nominal	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Reklas	990.000.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>990.000.000,00</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>6.746.006.265,00</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>7.736.006.265,00</b>

Adapun penjelasan terkait mutasi debit dan kredit pada aset Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Mutasi reklas sebesar Rp7.736.006.265,00 terdapat pada DPUPR sebesar Rp6.999.850.299,00 merupakan reklas dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Konstruksi dalam Pengerjaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung DKBP3A yang belum selesai pengerjaannya dan Dinkes sebesar Rp736.155.966,00 merupakan koreksi atas Rehabilitasi Berat Gedung Puskesmas Paket 1 (Puskesmas Cinangka) yang masih belum selesai.

Mutasi kredit berupa reklas aset dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp990.000.000,00 atas pekerjaan Pematangan Lahan Kawasan Puspemkab. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan berdasarkan BAST Nomor 641/24.EKTLG.PK.HS.53057536/BASTPP/PMTNGN.LHN.SG NE.PSMPKB-1/KPA-PB/DPUPR/2025 tanggal 14 Januari 2025. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung kantor pada 4 SKPD (Diskominfo, Diskoperindag, Disdukcapil, dan DKBP3A).

## 7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.093.637.417.888,95 turun sebesar Rp88.192.822.126,54 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.181.830.240.015,49 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**Tabel 99**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan 2025**

Uraian	Nominal	
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>		<b>(3.181.830.240.015,49)</b>
<b>Mutasi Debet:</b>		
Pindah Antar SKPD	1.754.235.577,15	
Koreksi Pembukuan	148.121.929.163,50	
Reklas	380.236.239.259,76	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>530.112.404.000,41</b>	

Uraian	Nominal	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Pindah Antar SKPD	1.754.235.577,15	
Beban Penyusutan	311.645.161.846,36	
Koreksi Pembukuan	127.980.090.186,22	
Reklas	540.094.264,14	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>441.919.581.873,87</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>88.192.822.126,54</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>(3.093.637.417.888,95)</b>

Sementara untuk daftar akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 100**  
**Daftar Akumulasi Penyusutan Per SKPD 2025**

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	(689.256.310.329,80)	(869.692.956.054,63)	180.436.645.724,83
2	DINKES	(153.582.637.990,44)	(175.434.716.539,34)	21.852.078.548,90
3	RSUD	(252.187.839.314,43)	(252.322.050.669,76)	134.211.355,33
4	DPUPR	(1.542.457.971.599,25)	(1.389.895.876.843,70)	(152.562.094.755,55)
5	DPRKP	(44.479.560.179,93)	(39.069.206.196,49)	(5.410.353.983,44)
6	SATPOL PP	(3.747.398.718,24)	(3.768.615.741,32)	21.217.023,08
7	BPBD	(19.710.414.640,59)	(22.247.162.662,02)	2.536.748.021,43
8	DINSOS	(9.275.963.676,84)	(9.656.144.570,36)	380.180.893,52
9	DISNAKERTRANS	(6.893.253.454,01)	(7.523.779.241,41)	630.525.787,40
10	DKPP	(28.917.494.934,63)	(32.871.166.603,31)	3.953.671.668,68
11	DLH	(33.397.319.385,09)	(29.043.465.608,45)	(4.353.853.776,64)
12	DISDUKCAPIL	(11.197.764.568,49)	(12.193.230.174,30)	995.465.605,81
13	DPMD	(2.814.247.292,95)	(3.353.246.296,75)	538.999.003,80
14	DKBP3A	(10.564.993.796,12)	(11.976.514.888,10)	1.411.521.091,98
15	DISHUB	(57.343.269.242,63)	(63.177.369.986,41)	5.834.100.743,78
16	DISKOMINFO	(6.692.686.136,97)	(5.457.108.840,11)	(1.235.577.296,86)
17	DISKOPERINDAG	(20.723.145.825,29)	(22.799.754.364,92)	2.076.608.539,63
18	DPMPTSP	(8.420.778.803,02)	(8.814.259.884,68)	393.481.081,66
19	DISPORAPAR	(4.596.974.623,75)	(4.462.547.074,44)	(134.427.549,31)
20	DPKD	(5.805.084.743,37)	(5.285.360.956,15)	(519.723.787,22)
21	DISKAN	(19.960.443.804,73)	(26.979.494.847,11)	7.019.051.042,38
22	SEKDA	(46.539.704.411,79)	(58.097.034.632,76)	11.557.330.220,97
23	SETWAN	(11.252.037.880,72)	(15.860.089.493,52)	4.608.051.612,80
24	BAPPERIDA	(4.178.234.357,14)	(4.646.366.428,00)	468.132.070,86
25	BAPENDA	(15.443.952.820,66)	(17.264.030.484,51)	1.820.077.663,85

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
26	BPKAD	(8.983.512.863,18)	(8.985.585.549,23)	2.072.686,05
27	BKPSDM	(7.525.548.882,65)	(7.156.126.873,20)	(369.422.009,45)
28	Inspektorat daerah	(6.657.526.693,93)	(7.516.999.214,17)	859.472.520,24
29	Kec. Anyar	(3.321.442.680,58)	(3.295.784.890,14)	(25.657.790,44)
30	Kec. Bandung	(1.368.540.009,48)	(1.469.837.708,84)	101.297.699,36
31	Kec. Baros	(1.567.838.917,92)	(1.724.219.709,92)	156.380.792,00
32	Kec. Binuang	(954.705.777,15)	(1.786.399.900,36)	831.694.123,21
33	Kec. Bojonegara	(1.019.751.413,73)	(1.511.342.072,80)	491.590.659,07
34	Kec. Carenang	(1.306.425.016,64)	(1.464.551.135,34)	158.126.118,70
35	Kec. Cikande	(3.978.194.328,63)	(4.525.229.442,36)	547.035.113,73
36	Kec. Cikeusal	(2.224.135.588,40)	(2.138.111.582,06)	(86.024.006,34)
37	Kec. Cinangka	(2.256.169.750,75)	(2.236.664.408,73)	(19.505.342,02)
38	Kec. Ciomas	(1.980.669.648,16)	(1.907.235.514,48)	(73.434.133,68)
39	Kec. Ciruas	(2.959.016.598,97)	(3.124.531.128,50)	165.514.529,53
40	Kec. Gunungsari	(1.770.102.507,54)	(2.013.898.867,47)	243.796.359,93
41	Kec. Jawilan	(1.714.150.351,49)	(1.825.698.975,57)	111.548.624,08
42	Kec. Kibin	(3.214.862.630,13)	(3.199.784.371,07)	(15.078.259,06)
43	Kec. Kopo	(1.349.225.924,74)	(1.604.903.240,74)	255.677.316,00
44	Kec. Kragilan	(2.714.961.996,98)	(3.346.576.237,92)	631.614.240,94
45	Kec. Kramatwatu	(4.198.545.860,06)	(4.381.665.362,33)	183.119.502,27
46	Kec. Lebak Wangi	(1.403.405.032,86)	(1.456.639.337,71)	53.234.304,85
47	Kec. Mancak	(1.177.805.832,90)	(1.293.870.862,80)	116.065.029,90
48	Kec. Pabuaran	(2.332.084.040,00)	(2.454.291.398,44)	122.207.358,44
49	Kec. Padarincang	(1.910.345.594,81)	(2.113.226.044,87)	202.880.450,06
50	Kec. Pamarayan	(1.608.638.875,26)	(1.967.821.018,16)	359.182.142,90
51	Kec. Petir	(1.264.344.390,15)	(1.424.779.689,29)	160.435.299,14
52	Kec. Pontang	(3.329.594.330,15)	(3.409.882.920,25)	80.288.590,10
53	Kec. Pulo ampel	(1.518.571.259,56)	(1.902.793.678,36)	384.222.418,80
54	Kec. Tanara	(1.828.040.620,87)	(1.827.873.252,00)	(167.368,87)
55	Kec. Tirtayasa	(1.785.391.267,78)	(1.747.121.252,41)	(38.270.015,37)
56	Kec. Tunjung Teja	(1.836.935.889,96)	(1.911.044.355,11)	74.108.465,15
57	Kec. Waringinkurung	(1.999.657.903,99)	(2.133.883.842,64)	134.225.938,65
58	KESBANGPOL	(1.137.792.878,67)	(1.080.317.095,67)	(57.475.783,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.093.637.417.888,95)</b>	<b>(3.181.830.240.015,49)</b>	<b>88.192.822.126,54</b>

## 8. Penjelasan Tambahan Terkait Aset Tetap

Penjelasan terkait aset tetap tanah yang telah dilakukan sertifikasi tahun 2025 dapat terlihat pada daftar berikut:

**Tabel 101**  
**Objek Tanah yang Tersertifikasi pada Tahun 2025**

No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
1	Kota Baru	Serang	ABE100665	600,00	Lahan Parkir RSUD	95.999.999,00
2	Kota Baru	Serang	B 2770801	315,00	Lahan Parkir RSUD (Samping SMPN 2)	50.399.999,00
3	Sayar	Taktakan	ABE100663	5.171,00	TPU Sayar (RSUD)	35.000.000,00
4	Kota Baru	Serang	B 7836288	11.040,00	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	7.500.803.000,00
5	Lontar Baru	Serang	AM 325403	985,00	Kantor UPT Lab. Lingkungan	101.970.000,00
6	Kota Baru	Serang	AJ 423915	1.245,00	Kantor DPKPTB, DPMPSTP dan DKPP Kab. Serang	296.717.175,00
7	Citerep	Ciruas	B 8698915	4.600,00	Puskesmas Ciruas	473.800.000,00
8	Mancak	Mancak	A7026578	343,00	Rumah Dinas Paramedis & Bidan Puskesmas Mancak	10.530.000,00
9	Batu Kuda	Mancak	A3067114	143,00	Polindes Batukuda	240.000,00
10	Sindang Mandi	Anyar	B0504257	100,00	Rumah Dinas Paramedis	2.000.000,00
11	Anyar	Anyar	AE 321951	3.825,00	Puskesmas Anyer	40.000.000,00
12	Karang Suraga	Cinangka	AF 146110	1.985,00	Puskesmas Cinangka	256.000.000,00
13	Sukabares	Ciomas	ABE006702	655,00	Puskesmas Ciomas	200.000.000,00
14	Mekar Baru	Petir	AK 320815	3.896,00	Puskesmas Petir	21.000.000,00
15	Padasuka	Petir	ABF412161	435,00	Pustu Padasuka	2.000.000,00
16	Sukaratu	Cikeusal	ABF412152	1.389,00	Puskesmas Cikeusal	34.400.000,00
17	Sukaratu	Cikeusal	ABF413453	2.397,00	Puskesmas Cikeusal (Perluasan)	127.000.000,00
18	Malanggah	Tunjung Teja	ABF403068	889,00	Puskesmas Tunjung Teja	149.592.000,00
19	Sukamaju	Kibin	B0504263	100,00	Pustu Sukamaju	1.400.000,00
20	Binuang	Binuang	ABF409628	1.880,00	Puskesmas Binuang	30.000.000,00
21	Jawilan	Jawilan	ABF409591	1.605,00	Puskesmas Jawilan	56.628.000,00
22	Kopo	Kopo	B0504371	126,00	Poskesdes Mekar Baru	15.400.000,00
23	Singarajan	Pontang	AB0390045	936,00	Aula (Eks Puskesmas Lama/Eks Pustu Pontang)	9.295.000,00
24	Singarajan	Pontang	AD118110	5.600,00	Puskesmas Pontang	410.368.000,00
25	Tirtayasa	Tirtayasa	A3066886	1.741,00	Puskesmas Tirtayasa	9.967.100,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
26	Sindangsari	Pabuaran	BI 652452	2.000,00	Kantor UPTD Labkes	394.820.000,00
27	Baros	Baros	B 2770809	4.135,00	Pasar Baros	425.905.000,00
28	Mekar Baru	Petir	AD 280844	1.984,00	Pasar Petir	99.200.000,00
29	Nyompok	Kopo	ABF413456	9.071,00	Pasar Kopo	407.150.000,00
30	Anyar	Anyar	AE 321954	4.815,00	Kantor Camat Anyar	33.202.500,00
31	Malabar	Bandung	AD 127588	3.240,00	Kantor Camat Bandung	81.000.000,00
32	Baros	Baros	B 2770803	1.555,00	Kantor Camat Baros	74.640.000,00
33	Bojonegara	Bojonegara	AD 280835	1.225,00	Kantor Camat Bojonegara	147.000.000,00
34	Panenjoan	Carenang	ABF409590	12.150,00	Kantor Camat Carenang	132.026.000,00
35	Cikande	Cikande	AD 118109	1.720,00	Kantor Camat Cikande	33.667.240,00
36	Ciagel	Kibin	AF 309614	2.040,00	Kantor Camat Kibin	147.600.000,00
37	Kopo	Kopo	AD 280839	6.250,00	Kantor Camat Kopo	521.500.000,00
38	Kragilan	Kragilan	B 8698981	2.830,00	Kantor Camat Kragilan	566.000.000,00
39	Kramatwatu	Kramatwatu	AM 325400	4.543,00	Kantor Camat Kramatwatu	5.671.821.000,00
40	Kramatwatu	Kramatwatu	B 8698916	6.870,00	Alun-Alun Kec. Kramat Watu	583.950.000,00
41	Labuan	Mancak	AD 280848	1.254,00	Kantor Camat Mancak	18.900.000,00
42	Pasanggrahan	Pabuaran	AD 280840	1.775,00	Kantor Camat Pabuaran	60.000.000,00
43	Padarincang	Padarincang	AD 280841	1.470,00	Kantor Camat Padarincang	16.705.080,00
44	Pamarayan	Pamarayan	AF 139218	1.410,00	Kantor Camat Pamarayan	8.319.000,00
45	Pulo Ampel	Pulo Ampel	AF 309613	2.574,00	Kantor Camat Pulo Ampel	33.202.500,00
46	Cerukcuk	Tanara	AM 325405	2.661,00	Kantor Camat Tanara	39.000.000,00
47	Tirtayasa	Tirtayasa	AD 118108	1.265,00	Kantor Camat Tirtayasa	75.000.000,00
48	Waringinkurung	Waringinkurung	AD 280843	2.110,00	Kantor Camat Waringin Kurung	3.587.000,00
49	Kota Baru	Serang	B 2283554	506,00	Lahan Parkir Umum RSUD	227.892.896,00
50	Serang	Serang	ABE1000664	418,00	Ex. Gudang RSUD (BAZNAZ KAB. SERANG)	149.075.000,00
51	Cimuncang	Serang	B 2770823	5.040,00	Kantor Satpol PP dan BPBD	1.436.400.000,00
52	Kramatwatu	Kramatwatu	BJ 844393	1.844,00	Lahan Kosong Eks Pasar Kramatwatu	461.000.000,00
53	Kota Baru	Serang	B 2770855	31.547,00	Kantor Bupati Serang	22.162.140.000,00
54	Cipare	Serang	B 2770810	3.050,00	Kantor DPMD	1.415.200.000,00
55	Pulo Ampel	Pulo Ampel	BZ 925466	50.000,00	PT. GUNUNG PATSEAN SUMBER REJEKI	5.000.000.000,00
56	Argawana	Pulo Ampel	AE 349563	9.575,00	HGB PT. HTS di atas HPL	2.500.000.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
57	Salira	Pulo Ampel	AAX527615	10.248,00	PLTU Banten dan Jetty	1.544.000.000,00
58	Anyar	Anyar	AE321955	6.680,00	Alun-Alun Kec. Anyar	2.237.800.000,00
59		Anyar	AF 362920	308,00	Eks Rumah Dinas SDLB	216.215.999,00
60	Panancangan	Cipocok Jaya	AF 362919	2.435,00	Kantor Disdikbud Gedung A	284.999.999,00
61	Argawana	Pulo Ampel	AB0390048	1.130,00	SDN Cikubang	32.860.000,00
62	Argawana	Pulo Ampel	ABF409599	1.666,00	SDN Buah Gede 1	69.333.485,00
63	Banyuwangi	Pulo Ampel	AAT507245	1.393,00	SDN Banyuwangi 1	37.611.000,00
64	Banyuwangi	Pulo Ampel	AAT515377	1.343,00	SDN Banyuwangi 2	1.200.000,00
65	Margasari	Pulo Ampel	ABF412561	1.162,00	SDN Sumurwuluh	1.960.000,00
66	Pulo Ampel	Pulo Ampel	AAX527985	852,00	SDN Pulo Ampel	3.300.000,00
67	Sumuranja	Pulo Ampel	A0971327	1.044,00	SDN Sumuranja 1	9.632.000,00
68	Sumuranja	Pulo Ampel	A7028406	689,00	SDN Sumuranja 2	9.630.250,00
69	Mangunreja	Pulo Ampel	AB0390046	640,00	SDN Cibaga 2	2.740.000,00
70	Kedung Soka	Pulo Ampel	AAT515379	1.148,00	SDN Kedungsoka 1	11.440.000,00
71	Kedung Soka	Pulo Ampel	B0 504449	1.668,00	SDN Kedungsoka 2	12.800.000,00
72	Mangunreja	Pulo Ampel	AAT509556	1.661,00	SDN Mangunreja	160.650.000,00
73	Argawana	Pulo Ampel	AAX531277	1.766,00	SDN Argawana	69.300.000,00
74	Salira	Pulo Ampel	AAT509552	1.914,00	SDN Salira	255.852.000,00
75	Kedung Soka	Pulo Ampel	ABF079857	961,00	SDN Kalikeranjang	22.000.000,00
76	Pulo Panjang	Pulo Ampel	A3067331	6.570,00	SDN Pulo Panjang 1	12.250.000,00
77	Pulo Panjang	Pulo Ampel	AAT507246	2.185,00	SDN Kebalen	70.140.000,00
78	Citerep	Ciruas	B117093	1.045,00	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Ciruas	14.630.000,00
79	Pamong	Ciruas	AR 603544	1.250,00	SDN Curug	13.120.000,00
80	Cigelam	Ciruas	A7028410	1.261,00	SDN Cigelam 1	14.550.250,00
81	Gosara	Ciruas	AB0390062	1.335,00	SDN Gosara	7.030.000,00
82	Pulo	Ciruas	AR 603536	1.717,00	SDN Pulo 2	6.220.000,00
83	Kadikaran	Ciruas	A0973039	1.222,00	SDN Kadikaran	22.680.000,00
84	Kepandean	Ciruas	A3066893	2.190,00	SDN Kepandean	19.662.500,00
85	Beberan	Ciruas	AB0390079	1.521,00	SDN Beberan 2	45.420.000,00
86	Beberan	Ciruas	B0504352	1.631,00	SDN Cimiung 2	43.440.000,00
87	Ranjeng	Ciruas	A3066883	3.147,00	SDN Ciruas 4	12.584.000,00
88	Bumijaya	Ciruas	BQ 876000	2.046,00	SDN Bumi Jaya	18.140.000,00
89	Kepandean	Ciruas	A3067110	1.694,00	SDN Pacet	8.900.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
90	Cigelam	Ciruas	A3066894	1.480,00	SDN Kesampangan	13.813.800,00
91	Penggalang	Ciruas	B0504137	2.259,00	SDN Penggalang2	15.730.000,00
92	Pulo	Ciruas	AR 603545	1.724,00	SDN Pulo 1	9.890.000,00
93	Ciruas	Ciruas	A3062288	1.562,00	SDN Cembeh	8.750.000,00
94	Bumijaya	Ciruas	BQ 875999	920,00	SDN Jambu Alas	12.460.000,00
95	Singamerta	Ciruas	B0504377	1.965,00	SDN Periuk	14.049.750,00
96	Pelawad	Ciruas	ABF412159	1.981,00	SDN Ciruas 3	18.704.000,00
97	Kaserangan	Ciruas	BS 244467	536,00	SDN Beberan 1	76.200.000,00
98	Pamong	Ciruas	AR 603543	1.543,00	SDN Pamong	15.810.000,00
99	Serdang	Kramatwatu	A3066890	2.113,00	SDN Serdang 1	160.474.000,00
100	Margasana	Kramatwatu	ABF409595	1.664,00	SDN Margasana	547.442.878,00
101	Teluk Terate	Kramatwatu	ABF078002	2.641,00	SDN Kebarosan	26.200.000,00
102	Toyomerto	Kramatwatu	A0969799	1.036,00	SDN Toyomerto 1	21.000.000,00
103	Serdang	Kramatwatu	A3066888	1.830,00	SDN Serdang 2	105.600.000,00
104	Pejaten	Kramatwatu	AAT507248	2.243,00	SDN Pejaten 2	387.000.000,00
105	Kramatwatu	Kramatwatu	-	3.869,00	SDN Kramatwatu2	77.380.000,00
106	Margasana	Kramatwatu	AAT507247	3.431,00	SDN Kamasan	35.750.000,00
107	Toyomerto	Kramatwatu	A3067113	1.693,00	SDN Krapyak	14.300.000,00
108	Lebakwana	Kramatwatu	AAT524921	1.911,00	SDN Pancuran	23.550.000,00
109	Pegadingan	Kramatwatu	B0504375	2.944,00	SDN Pegadingan1	64.800.000,00
110	Terate	Kramatwatu	AAT524923	1.707,00	SDN Terate	65.340.000,00
111	Tonjong	Kramatwatu	AB0390030	1.608,00	SDN Tonjong	17.875.000,00
112	Pejaten	Kramatwatu	A0969892	1.909,00	SDN Giripada	72.000.000,00
113	Wanayasa	Kramatwatu	B0504264	1.674,00	SDN Toyomerto 2	83.700.000,00
114	Harjatani	Kramatwatu	B0504141	1.671,00	SDN Larangan	25.000.000,00
115	Pelamunan	Kramatwatu	AAT507249	1.933,00	SDN Pelamunan	40.000.000,00
116	Sambilawang	Waringinkurung	AAT 507244	687,00	SDN Legokmenteng	32.480.000,00
117	Melati	Waringinkurung	A0973041	1.095,00	SDN Melati 1	12.640.000,00
118	Sampir	Waringinkurung	AAT524080	1.043,00	SDN Melati 2	19.225.000,00
119	Binangun	Waringinkurung	A7027287	832,00	SDN Binangun	14.300.000,00
120	Suka Dalem	Waringinkurung	AB0390033	1.946,00	SDN Sukadalem 1	77.640.000,00
121	Kemuning	Waringinkurung	AAT507243	1.527,00	SDN Kemuning	27.180.000,00
122	Sasahan	Waringinkurung	AAT509554	129,00	SDN Sasahan 1	10.200.000,00
123	Sasahan	Waringinkurung	A3066889	1.570,00	SDN Sasahan 2	41.100.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
124	Binangun	Waringinkurung	AAT509553	1.858,00	SDN Gudangbatu	22.500.000,00
125	Talaga Luhur	Waringinkurung	AAT509557	1.366,00	SDN Bobul	36.150.000,00
126	Suka Dalem	Waringinkurung	A7026584	2.019,00	SDN Bojong	48.450.000,00
127	Melati	Waringinkurung	A7026585	1.680,00	SDN Melati 4	69.750.000,00
128	Sukabares	Waringinkurung	A3067104	1.659,00	SDN Sukabares	28.500.000,00
129	Suka Dalem	Waringinkurung	A3067101	1.674,00	SDN Gegeneng	27.075.000,00
130	Binangun	Waringinkurung	AAT507401	1.090,00	SDN Perkebunan Saga	18.750.000,00
131	Bojonegara	Bojonegara	A7026403	1.596,00	SDN Bojonegara 1	29.760.000,00
132	Bojonegara	Bojonegara	A7026395	1.422,00	SDN Bojonegara 3	12.100.000,00
133	Karang Kepuh	Bojonegara	AAT515583	1.417,00	SDN Wadasari	21.168.000,00
134	Mangkunegara	Bojonegara	AAT515582	1.196,00	SDN Sempu	5.405.000,00
135	Mangkunegara	Bojonegara	ABE100666	1.262,00	SDN Mangkunegara	28.000.000,00
136	Kertasana	Bojonegara	B 2770802	1.343,00	SDN Kertasana	7.300.000,00
137	Kertasana	Bojonegara	ABE100664	2.046,00	SDN Tunggak	12.937.500,00
138	Lambang Sari	Bojonegara	B 7836289	1.487,00	SDN Lambangsari	7.030.000,00
139	Wanakarta	Bojonegara	AM 325404	822,00	SDN Wanakarta 1	9.140.000,00
140	Wanakarta	Bojonegara	AJ 423916	1.500,00	SDN Wanakarta 2	15.000.000,00
141	Margagiri	Bojonegara	B 8698916	1.506,00	SDN Baketor	16.040.000,00
142	Magragiri	Bojonegara	A892350	1.269,00	SDN Solor	24.000.000,00
143	Ukirsari	Bojonegara	A4851814	1.786,00	SDN Ukirsari	15.000.000,00
144	Ukirsari	Bojonegara	B0504258	917,00	SDN Dukuhmalang	19.080.000,00
145	Pakuncen	Bojonegara	AE 321952	1.287,00	SDN Kalilantang 1	6.670.000,00
146	Pengarengan	Bojonegara	AF 146111	1.321,00	SDN Pangarengan	3.675.000,00
147	Kragilan	Kragilan	ABE006703	3.126,00	SDN Kragilan 1	630.400.000,00
148	Kragilan	Kragilan	AK 320816	1.206,00	SDN Kragilan 2	60.000.000,00
149	Kendayakan	Kragilan	ABF412161	1.587,00	SDN Kragilan 3	23.674.000,00
150	Sukajadi	Kragilan	ABF412152	992,00	SDN Silebu 1	15.300.000,00
151	Cisait	Kragilan	ABF413453	10.404,00	SDN Sentul 2	1.499.401,00
152	Jeruk Tipis	Kragilan	ABF403068	1.240,00	SDN Jeruk Tipis 2	7.891.098,00
153	Kramatjati	Kragilan	B0504264	934,00	SDN Pematang 1	20.000.000,00
154	Undar Andir	Kragilan	ABF409554	1.359,00	SDN Undar Andir2	45.520.000,00
155	Silebu	Kragilan	ABF409517	1.653,00	SDN Silebu 3	28.000.000,00
156	Silebu	Kragilan	B0504372	2.683,00	SDN Silebu 4	10.500.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
157	Kendayakan	Kragilan	AB0390046	3.127,00	SDN Kendayakan	21.450.000,00
158	Sentul	Kragilan	AD118111	2.019,00	SDN Sentul 4	22.022.000,00
159	Pematang	Kragilan	A3066887	2.385,00	SDN Pematang 3	6.000.000,00
160	Cisait	Kragilan	BI 652453	3.004,00	SDN Graha Cisait	168.000.000,00
161	Pontang	Pontang	B 2770810	444,00	SDN Pontang 2	59.520.000,00
162	Pontang	Pontang	AD 280845	1.140,00	SDN Serandakan	49.320.000,00
163	Singarajan	Pontang	ABF413457	2.224,00	SDN Pontang 1	36.069.397,59
164	Singarajan	Pontang	AE 321955	2.835,00	SDN Singarajan	102.060.000,00
165	Domas	Pontang	AD 127589	1.493,00	SDN Cerocoh	7.500.000,00
166	Wanayasa	Pontang	B 2770804	1.188,00	SDN Sampang Kulon	92.456.000,00
167	Kelapian	Pontang	AD 280836	790,00	SDN Kalapian 2	1.200.000,00
168	Kaserangan	Pontang	ABF409591	1.108,00	SDN Kalapian 1	11.440.000,00
169	Kaserangan	Pontang	AD 118110	1.314,00	SDN Pecakur	40.500.000,00
170	Linduk	Pontang	AF 309615	3.465,00	SDN Bayongbong	51.100.000,00
171	Kubang Puji	Pontang	AD 280840	1.719,00	SDN Kubang Puji2	79.416.000,00
172	Kubang Puji	Pontang	B 8698982	667,00	SDN Kubangbahad	6.256.250,00
173	Pulokencana	Pontang	AM 325401	756,00	SDN Tembakang1	11.040.000,00
174	Pulokencana	Pontang	B 8698917	2.968,00	SDN Tembakang2	53.816.000,00
175	Sukanegara	Pontang	AD 280848	1.680,00	SDN Tambakbaya	89.568.000,00
176	Suka Jaya	Pontang	AD 280840	1.190,00	SDN Sukanegara2	4.500.000,00
177	Suka Jaya	Pontang	AD 280841	3.780,00	SDN Sukanegara3	15.000.000,00
178	Lontar	Tirtayasa	AF 480008	543,00	SDN Lontar 1	5.960.000,00
179	Sujung	Tirtayasa	AF 650403	794,00	SDN Sujung 1	2.324.000,00
180	Tengkurak	Tirtayasa	AM 325406	1.622,00	SDN Tenjoayu 2	6.375.000,00
181	Kebuyutan	Tirtayasa	AD 443578	1.171,00	SDN Kemanisan	5.875.000,00
182	Alang-alang	Tirtayasa	AD 606313	918,00	SDN Kebon	3.374.800,00
183	Lontar	Tirtayasa	B 2283555	1.198,00	SDN Lontar 2	4.860.000,00
184	Laban	Tirtayasa	ABE1000665	1.659,00	SDN Tirtayasa 2	8.475.000,00
185	Kebon	Tirtayasa	B 2770824	1.140,00	SDN Sidayu	54.720.000,00
186	Kamanisan	Tirtayasa	BJ 844394	1.919,00	SDN Ciwulung	6.737.500,00
187	Pontang Legon	Pontang	B 2770765	1.196,00	SDN Pontang Legon 2	4.186.000,00
188	Susukan	Tirtayasa	B 2770720	1.831,00	SDN Sampang	115.929.450,00
189	Laban	Tirtayasa	BZ 925467	994,00	SDN Laban Tengah	3.300.000,00
190	Alang-alang	Tirtayasa	AE 349564	692,00	SDN Alang-Alang	13.227.500,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
191	Samparwadi	Tirtayasa	AAX527616	764,00	SDN Kedawang	3.050.000,00
192	Tirtayasa	Tirtayasa	AE321956	1.557,00	SDN Tirtayasa 3	7.150.000,00
193	Susukan	Tirtayasa	AF 362918	2.225,00	SDN Eretan	88.200.000,00
194	Pedaleman	Tanara	AF 362917	825,00	SDN Tanara 1	1.545.000,00
195	Lempuyang	Tanara	AB0390049	2.213,00	SDN Lempuyang1	4.000.000,00
196	Cibodas	Tanara	ABF409600	1.114,00	SDN Siremen	13.438.000,00
197	Tenjoayu	Tanara	AAT523509	2.802,00	SDN Tenjoayu 1	1.500.000,00
198	Sukamanah	Tanara	AAT531641	1.128,00	SDN Sukamaneh1	8.250.000,00
199	Cerukcuk	Tanara	ABF412562	902,00	SDN Cerukcuk 1	2.775.000,00
200	Cerukcuk	Tanara	AAX527986	313,00	SDN Cerukcuk 2	1.250.000,00
201	Bendung	Tanara	A13085485	1.445,00	SDN Karangkobong	8.000.000,00
202	Lempuyang	Tanara	A19142564	1.026,00	SDN Bendung 1	4.200.000,00
203	Tanara	Tanara	AB0390047	926,00	SDN Sukamaju	3.700.000,00
204	Tenjoayu	Tanara	AAT515380	2.877,00	SDN Tenjoayu 3	9.840.000,00
205	Siremen	Tanara	B0 504450	1.564,00	SDN Bayak	2.000.000,00
206	Bendung	Tanara	AAT509557	375,00	SDN Bendung 2	19.446.000,00
207	Cerukcuk	Tanara	AAX531278	617,00	SDN Cikeli	6.900.000,00
208	Cerukcuk	Tanara	AAT509553	613,00	SDN Cikeli (Bidang 2)	5.000.000,00
209	Pedaleman	Tanara	ABF079858	1.557,00	SDN Pesisir	2.000.000,00
210	Cibodas	Tanara	A3067332	1.375,00	SDN Cibodas	7.260.000,00
211	Tenjoayu	Tanara	AAT507247	1.402,00	SDN Sipanjang	12.145.000,00
212	Sukamanah	Tanara	B117094	1.643,00	SDN Sukamaneh2	10.000.000,00
213	Lempuyang	Tanara	AR 603545	1.033,00	SDN Gusguntur	3.000.000,00
214	Leuwi Limus	Cikande	A7028411	966,00	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Cikande	194.560.000,00
215	Parigi	Cikande	AB0390063	1.281,00	SDN Parigi (x)	29.999.700,00
216	Parigi	Cikande	AR 603537	1.818,00	SDN Kukun	31.666.350,00
217	Koper	Cikande	A5160747	1.693,00	SDN Koper 1	15.399.997,00
218	Koper	Cikande	A7254601	1.867,00	SDN Koper 2	45.900.000,00
219	Leuwi Limus	Cikande	AB0390080	2.050,00	SDN Sumurhejo	13.350.000,00
220	Situterate	Cikande	B0504353	1.242,00	SDN Situterate	8.844.550,00
221	Nambo Udik	Cikande	A3066884	1.149,00	SDN Namboudik 1	7.545.450,00
222	Nambo Udik	Cikande	BQ 876001	942,00	SDN Namboudik 2	2.100.000,00
223	Nambo Udik	Cikande	A3066678	2.477,00	SDN Baluk	17.600.000,00
224	Songgomjaya	Cikande	A3066462	1.293,00	SDN Songgom Jaya	1.250.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
225	Koper	Cikande	B0504138	2.042,00	SDN Keramatjati	19.517.020,00
226	Gembor Udik	Cikande	AR 603546	1.155,00	SDN Kibabang	4.151.781,00
227	Julang	Cikande	A3062289	1.962,00	SDN Maja	40.230.000,00
228	Cikande	Cikande	BQ 876000	2.354,00	SDN Cibureum	167.040.000,00
229	Sukatani	Cikande	B0504378	1.597,00	SDN Kalutuk	45.000.000,00
230	Parigi	Cikande	ABF412160	901,00	SDN Kayuareng	27.777.500,00
231	Kamurang	Cikande	BS 244468	1.780,00	SDN Rancailat	5.248.036,00
232	Kamurang	Cikande	AR 603544	1.897,00	SDN Bakung Turus	20.000.000,00
233	Kibin	Kibin	A3066891	1.695,00	SDN Kadingding	393.600.000,00
234	Sukamaju	Kibin	ABF253591	2.104,00	SDN Sukamaju	2.400.000,00
235	Barengkok	Kibin	ABF585184	1.065,00	SDN Nambo Ilir	11.500.000,00
236	Nambo Ilir	Kibin	A5163977	1.286,00	SDN Bangunjaya	65.568.000,00
237	Nagara	Kibin	A7261066	2.223,00	SDN Patapan	1.800.000,00
238	Ciagel	Kibin	AAT507249	1.451,00	SDN Taman	102.500.000,00
239	Sukamaju	Kibin	-	1.106,00	SDN Kedaleman	488.300.000,00
240	Cijeruk	Kibin	AAT507248	2.337,00	SDN Garung	86.688.000,00
241	Nambo Ilir	Kibin	A3067114	1.645,00	SDN Panebong	13.500.000,00
242	Nambo Ilir	Kibin	AAT524922	1.785,00	SDN Gambar	14.500.000,00
243	Ketos	Kibin	B0504376	1.717,00	SDN Paya	96.000.000,00
244	Mekarsari	Carenang	AAT524924	2.163,00	SDN Carenang 2	5.880.000,00
245	Pamanuk	Carenang	AB0390031	1.314,00	SDN Pamanuk 1	4.518.500,00
246	Mandaya	Carenang	A0969893	1.800,00	SDN Mendaya 1	9.840.000,00
247	Mandaya	Carenang	B0504018	1.719,00	SDN Mendaya 3	123.000.000,00
248	Teras	Carenang	B0503895	2.149,00	SDN Teras 1	12.407.500,00
249	Ragasmasigit	Carenang	AAT507239	1.490,00	SDN Ragas 1	3.780.000,00
250	Ragasmasigit	Carenang	AAT507234	1.227,00	SDN Ragas 2	3.657.500,00
251	Ragasmasigit	Carenang	A0973042	1.340,00	SDN Ragas 3	43.200.000,00
252	Panenjoan	Carenang	AAT524081	1.568,00	SDN Panenjoan	4.650.100,00
253	Cakung	Binuang	A7027288	1.805,00	SDN Cakung	6.200.180,00
254	Gembor	Binuang	AB0390034	1.194,00	SDN Gembor 1	3.496.150,00
255	Gembor	Binuang	AAT511865	1.943,00	SDN Gembor 2	32.238.000,00
256	Warakas	Binuang	AAT514176	1.975,00	SDN Warakas 2	20.776.000,00
257	Sukamampir	Binuang	A3066890	2.113,00	SDN Sukamampir	2.628.850,00
258	Renged	Binuang	AAT509561	980,00	SDN Renged 2	2.401.000,00
259	Petir	Petir	AAT509565	1.205,00	SDN Petir 2	8.615.750,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
260	Mekar Baru	Petir	A7026584	1.452,00	SDN Petir 3	3.840.000,00
261	Bojong Nangka	Petir	A7026585	2.619,00	SDN Sanding 1	13.000.000,00
262	Padasuka	Petir	A3067104	955,00	SDN Padasuka	3.675.000,00
263	Petir	Petir	A3067101	1.093,00	SDN Petir 4	119.252.850,00
264	Cirangkong	Petir	AAT507402	2.213,00	SDN Cirangkong 2	3.724.000,00
265	Sanding	Petir	A7026387	1.183,00	SDN Sanding 2	4.123.000,00
266	Sindangsari	Petir	A7026379	2.494,00	SDN Sindangsari	5.250.000,00
267	Cireunde	Petir	AAT515581	1.406,00	SDN Tambilik 2	8.375.000,00
268	Cirangkong	Petir	AAT515580	1.608,00	SDN Panyairan	4.669.700,00
269	Sindangsari	Petir	ABE100667	1.442,00	SDN Wadas Kubang	5.950.000,00
270	Tambiluk	Petir	B 2770803	1.544,00	SDN Pajarakan	10.538.250,00
271	Petir	Petir	ABE100665	2.315,00	SDN Umbul	8.610.000,00
272	Cirangkong	Petir	B 7836290	1.022,00	SDN Cirangkong 1	2.503.900,00
273	Tunjung Teja	Tunjung Teja	AM 325405	407,00	Rumah Dinas SDN Tunjung 1	1.872.000,00
274	Panunggulan	Tunjung Teja	AJ 423917	925,00	SDN Panunggulan1	5.145.000,00
275	Sukasari	Tunjung Teja	B 8698917	1.644,00	SDN Sukamanah	63.840.000,00
276	Bojong Menteng	Tunjung Teja	A8811278	2.045,00	SDN Bojongkondang	2.940.000,00
277	Kemuning	Tunjung Teja	A12770742	779,00	SDN Caringin	4.370.000,00
278	Malanggah	Tunjung Teja	B0504259	2.100,00	SDN Haruyan	3.001.250,00
279	Bojong Catang	Tunjung Teja	AE 321953	790,00	SDN Catang 1	3.150.000,00
280	Bojong Pandan	Tunjung Teja	AF 146112	1.580,00	SDN Bojong Pandan	241.476.959,00
281	Sukasari	Tunjung Teja	ABE006704	1.509,00	SDN Panunggulan3	6.000.000,00
282	Malanggah	Tunjung Teja	AK 320817	669,00	SDN Malanggah 2	1.225.000,00
283	Bojong Menteng	Tunjung Teja	ABF412161	1.062,00	SDN Cilandak	9.702.000,00
284	Panunggulan	Tunjung Teja	ABF412152	1.450,00	SDN Pabuaran	3.185.000,00
285	Kemuning	Tunjung Teja	ABF413453	2.089,00	SDN Kamuning	12.500.000,00
286	Bojong Pandan	Tunjung Teja	ABF403068	1.638,00	SDN Kemang	4.410.000,00
287	Sukacai	Baros	B0504265	1.073,00	SDN Sukacai 2	3.160.500,00
288	Tejamari	Baros	ABF409480	1.091,00	SDN Tejamari 1	95.746.000,00
289	Sindangmandi	Baros	ABF409443	785,00	SDN Rampones	1.810.500,00
290	Panyirapan	Baros	B0504373	978,00	SDN Warung	96.422.500,00
291	Sukacai	Baros	AB0390047	1.352,00	SDN Sukacai 3	3.920.000,00
292	Cisalam	Baros	AD118112	1.548,00	SDN Daragem	5.880.000,00
293	Sinarmukti	Baros	A3066888	1.694,00	SDN Parung Sentul	7.175.000,00



No	Letak Tanah		Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa						
294	Cisalam	Baros	Baros	BI 652454	1.099,00	SDN Cisalam	7.251.500,00
295	Baros	Baros	Baros	B 2770811	1.734,00	SDN Sidamukti 2	4.410.000,00
296	Sukamanah	Baros	Baros	AD 280846	1.114,00	SDN Pagedongan	28.700.000,00
297	Sukaratu	Cikeusal	Cikeusal	ABF413458	3.521,00	SDN Cikeusal 1	77.880.000,00
298	Sukaratu	Cikeusal	Cikeusal	AE 321956	2.330,00	SDN Cikeusal 3	85.540.000,00
299	Mongpok	Cikeusal	Cikeusal	AD 127590	3.330,00	SDN Mongpok 1	18.750.000,00
300	Gandayasa	Cikeusal	Cikeusal	B 2770805	1.697,00	SDN Mongpok 2	5.200.000,00
301	Gandayasa	Cikeusal	Cikeusal	AD 280837	879,00	SDN Pasir Gadung	6.900.000,00
302	Panosogan	Cikeusal	Cikeusal	ABF409592	1.612,00	SDN Panosogan 1	3.117.750,00
303	Harundang	Cikeusal	Cikeusal	AD 118111	950,00	SDN Panosogan 2	6.792.500,00
304	Panyabrangan	Cikeusal	Cikeusal	AF 309616	1.875,00	SDN Panyabrangan	22.450.000,00
305	Dahu	Cikeusal	Cikeusal	AD 280841	654,00	SDN Sukamaju	43.530.000,00
306	Bantar Panjang	Cikeusal	Cikeusal	B 8698983	1.302,00	SDN Pasir Kadusirung	26.040.000,00
307	Sukarame	Cikeusal	Cikeusal	AM 325402	1.414,00	SDN Cimaung 4	3.150.000,00
308	Sukamenak	Cikeusal	Cikeusal	B 8698918	906,00	SDN Tancang	7.980.000,00
309	Cilayang	Cikeusal	Cikeusal	AD 280848	1.997,00	SDN Cibogo	7.472.500,00
310	Dahu	Cikeusal	Cikeusal	AD 280840	1.101,00	SDN Dahu	37.125.000,00
311	Cimaung	Cikeusal	Cikeusal	AD 280841	1.490,00	SDN Pabuaran	600.000,00
312	Sukaratu	Cikeusal	Cikeusal	AF 820798	1.335,00	SDN Sukaratu	109.470.000,00
313	Gandayasa	Cikeusal	Cikeusal	AF 991193	2.335,00	SDN Gandayasa	15.140.000,00
314	Sukamaju	Cikeusal	Cikeusal	AM 325407	1.851,00	SDN Pasir	26.740.000,00
315	Harundang	Cikeusal	Cikeusal	AD 769048	1.618,00	SDN Harundang	22.400.000,00
316	Cikeusal	Cikeusal	Cikeusal	AD 931783	2.275,00	SDN Seba	23.952.500,00
317	Dahu	Cikeusal	Cikeusal	B 2283556	2.968,00	SDN Rancadadap	35.750.000,00
318	Panosogan	Cikeusal	Cikeusal	ABE1000666	2.094,00	SDN Bojong Neros	35.700.000,00
319	Gandayasa	Cikeusal	Cikeusal	B 2770825	1.368,00	SDN Bagoang	6.250.000,00
320	Panyabrangan	Cikeusal	Cikeusal	BJ 844395	1.680,00	SDN Pasir Malang	3.400.000,00
321	Pamarayan	Pamarayan	Pamarayan	B 2770675	285,00	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Pamarayan	36.702.300,00
322	Pamarayan	Pamarayan	Pamarayan	B 2770630	1.616,00	SDN Pamarayan 1	7.003.500,00
323	Pasir Kembang	Pamarayan	Pamarayan	BZ 925468	1.678,00	SDN Binong	15.080.000,00
324	Keboncau	Pamarayan	Pamarayan	AE 349565	815,00	SDN Keboncau 1	20.720.000,00
325	Pasirlimus	Pamarayan	Pamarayan	AAX527617	1.262,00	SDN Pasir Limus	7.875.000,00
326	Pudar	Pamarayan	Pamarayan	AE321957	1.037,00	SDN Pudar	3.629.500,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
327	Wirana	Pamarayan	AF 362916	2.300,00	SDN Pasir Wirana	8.050.000,00
328	Damping	Pamarayan	AF 362915	2.139,00	SDN Jelajat	51.051.500,00
329	Binong	Pamarayan	AB0390050	1.450,00	SDN Pabuaran	4.980.500,00
330	Pasirlimus	Pamarayan	ABF409601	3.144,00	SDN Cipinang	84.888.000,00
331	Sangiang	Pamarayan	AAT539773	1.540,00	SDN Berani	25.949.000,00
332	Pamarayan	Pamarayan	AAT547905	1.192,00	SDN Parungpung	4.900.000,00
333	Pudar	Pamarayan	ABF412563	2.774,00	SDN Lameta	2.100.000,00
334	Pasir Kembang	Pamarayan	AAX527987	1.963,00	SDN Babakan Mesjid	16.000.000,00
335	Damping	Pamarayan	A25199643	4.185,00	SDN Pasir Peundeuy	1.500.000,00
336	Wirana	Pamarayan	A31256722	2.979,00	SDN Wirana Pasir	4.554.000,00
337	Kampung Baru	Pamarayan	AB0390048	1.169,00	SDN Pasir Padukuhan	5.600.000,00
338	Pamarayan	Pamarayan	AAT515381	2.144,00	SDN Bugel	10.535.000,00
339	Wirana	Pamarayan	B0 504451	2.491,00	SDN Sasak Maja	13.750.000,00
340	Nyompok	Kopo	AAT509558	1.231,00	SDN Nyompok 1	6.000.000,00
341	Nyompok	Kopo	AAX531279	953,00	SDN Nyompok 2	4.705.000,00
342	Carenang Udik	Kopo	AAT509554	1.560,00	SDN Bojongneros	8.400.000,00
343	Gabus	Kopo	ABF079859	1.369,00	SDN Gabus 1	28.080.000,00
344	Garut	Kopo	A3067333	908,00	SDN Garut 1	5.130.000,00
345	Mekarbaru	Kopo	AAT507248	1.846,00	SDN Panunggulan	1.251.250,00
346	Rancasumur	Kopo	B117095	1.590,00	SDN Garut 2	5.292.000,00
347	Cidahu	Kopo	AR 603546	1.812,00	SDN Cidahu 2	14.314.300,00
348	Babakan Jaya	Kopo	A7028412	1.492,00	SDN Gabus 2	11.511.500,00
349	Nanggung	Kopo	AB0390064	2.963,00	SDN Nanggung 2	12.800.000,00
350	Gabus	Kopo	AR 603538	1.764,00	SDN Gabus 3	16.100.000,00
351	Carenang Udik	Kopo	A9348455	2.760,00	SDN Carenangudik	13.800.000,00
352	Kopo	Kopo	A11442309	1.437,00	SDN Rancondo	10.000.000,00
353	Rancasumur	Kopo	AB0390081	2.255,00	SDN Rukem	250.000,00
354	Garut	Kopo	B0504354	1.365,00	SDN Rancagoong	8.589.400,00
355	Parakan	Jawilan	A3066885	1.258,00	SDN Parakan 1	9.080.500,00
356	Pasirbuyut	Jawilan	BQ 876002	1.301,00	SDN Pasirbuyut 1	8.580.000,00
357	Majasari	Jawilan	A3066246	3.063,00	SDN Parakan 2	7.500.000,00
358	Pasirbuyut	Jawilan	A3066030	1.708,00	SDN Pasirbuyut 2	59.780.000,00
359	Jawilan	Jawilan	B0504139	2.279,00	SDN Cicalung	50.000.000,00
360	Parakan	Jawilan	AR 603547	2.248,00	SDN Parodot	19.166.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
361	Sukabares	Ciomas	A3062290	1.107,00	SDN Ciomas 1	984.000,00
362	Pondok Kaharu	Ciomas	BQ 876001	623,00	SDN Cilongkrang	6.485.500,00
363	Cemplang	Ciomas	B0504379	682,00	SDN Sukarena	1.400.000,00
364	Siketug	Ciomas	ABF412161	480,00	SDN Siketug 1	15.000.000,00
365	Lebak	Ciomas	BS 244469	1.485,00	SDN Lebak 1	5.106.500,00
366	Ujungtebu	Ciomas	AR 603545	908,00	SDN Ujung Tebu 1	1.980.000,00
367	Sukarena	Ciomas	A3066892	766,00	SDN Kubang	6.250.000,00
368	Sukadana	Ciomas	ABF916777	800,00	SDN Ciomas 2	4.000.000,00
369	Pondok Kaharu	Ciomas	ABF1248370	791,00	SDN Pancur	4.795.000,00
370	Ujungtebu	Ciomas	A9358155	1.057,00	SDN Ujung Tebu 2	3.960.000,00
371	Citaman	Ciomas	A11455244	982,00	SDN Gunung Sumbul	4.576.000,00
372	Siketug	Ciomas	AAT507250	862,00	SDN Kuluk Leugeut	43.800.000,00
373	Panyaungan Jaya	Ciomas	-	1.062,00	SDN Sukabares	17.150.000,00
374	Sukadana	Ciomas	AAT507249	644,00	SDN Cibangbara	15.000.000,00
375	Sukadana	Ciomas	A3067115	1.486,00	SDN Pasar	17.600.000,00
376	Siketug	Ciomas	AAT524923	1.703,00	SDN Siketug 2	7.000.000,00
377	Citaman	Ciomas	B0504377	1.832,00	SDN Pondok Kahuru	6.545.000,00
378	Sukarena	Ciomas	AAT524925	1.647,00	SDN Manunggal	1.176.000,00
379	Cemplang	Ciomas	AB0390032	1.185,00	SDN Mekarjaya	1.400.000,00
380	Sukadana	Ciomas	A0969894	2.225,00	SDN Sukadana	3.000.000,00
381	Lebak	Ciomas	B0503772	1.459,00	SDN Lebak 2	19.725.000,00
382	Cisitu	Ciomas	B0503649	1.703,00	SDN Cisitu	5.250.000,00
383	Citaman	Ciomas	AAT507229	747,00	SDN Citaman	1.946.000,00
384	Kadubeureum	Pabuaran	AAT507224	1.639,00	SDN Kadubeureum 2	12.097.800,00
385	Tanjungsari	Pabuaran	A0973043	1.665,00	SDN Tanjungsari	9.250.000,00
386	Kadubeureum	Pabuaran	AAT524082	732,00	SDN Ciceblok	6.334.900,00
387	Sindangsari	Pabuaran	A7027289	1.615,00	SDN Rancalutung	14.786.200,00
388	Pasanggrahan	Pabuaran	AB0390035	1.606,00	SDN Pasanggrahan	4.200.000,00
389	Pabuaran	Pabuaran	AAT516487	2.502,00	SDN Pabuaran 4	12.250.000,00
390	Tanjungsari	Pabuaran	AAT518798	1.379,00	SDN Kadukacapi	7.875.000,00
391	Sindangsari	Pabuaran	A3066891	1.532,00	SDN Paleuh	11.797.500,00
392	Tanjungsari	Pabuaran	AAT509569	1.424,00	SDN Tanjung Kulon	9.500.000,00
393	Kadubeureum	Pabuaran	AAT509573	2.785,00	SDN Sirempayak	7.500.000,00
394	Pancanegara	Pabuaran	A7026584	1.420,00	SDN Pancanegara	9.645.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
395	Kadubeureum	Padarincang	A7026585	2.013,00	SDN Cibojong 1	8.500.000,00
396	Kramatlaban	Padarincang	A3067104	582,00	SDN Barengkok 1	34.560.000,00
397	Bugel	Padarincang	A3067101	674,00	SDN Tambakan	11.560.000,00
398	Kelumpang	Padarincang	AAT507403	1.014,00	SDN Kalumpang 1	5.400.000,00
399	Citasuk	Padarincang	A7026371	1.774,00	SDN Citasuk 1	20.000.000,00
400	Citasuk	Padarincang	A7026363	755,00	SDN Sukamaju	2.026.500,00
401		Padarincang	AAT515579	1.180,00	SDN Kubangingas	4.186.000,00
402	Cibojong	Padarincang	AAT515578	1.205,00	SDN Cibojong 2	2.952.250,00
403	Padarincang	Padarincang	ABE100668	1.166,00	SDN Padarincang2	5.400.000,00
404	Kadu Kempong	Padarincang	B 2770804	1.308,00	SDN Kadukempong	20.300.000,00
405	Batu Kuwung	Padarincang	ABE100666	2.175,00	SDN Citasuk 2	5.180.000,00
406	Kramatlaban	Padarincang	B 7836291	1.621,00	SDN Rancaranji	1.000.000,00
407	Citasuk	Padarincang	AM 325406	1.559,00	SDN Cilengo	12.297.600,00
408	Cipayung	Padarincang	AJ 423918	1.564,00	SDN Cipayung	6.653.500,00
409	Kelumpang	Padarincang	B 8698918	1.528,00	SDN Kalumpang 2	11.520.000,00
410	Batu Kuwung	Padarincang	A16730206	1.274,00	SDN Suarna	33.040.000,00
411	Curug Goong	Padarincang	A20689670	1.775,00	SDN Curuggoong	16.050.000,00
412	Citasuk	Padarincang	B0504260	2.188,00	SDN Citiis	96.832.000,00
413	Cipayung	Padarincang	AE 321954	1.101,00	SDN Anyar	27.540.000,00
414	Kadubeureum	Padarincang	AF 146113	2.432,00	SDN Kadubeureum	3.510.000,00
415	Kadu Kempong	Padarincang	ABE006705	1.150,00	SDN Gosali	15.000.000,00
416	Cibojong	Padarincang	AK 320818	1.599,00	SDN Cibawang	6.300.000,00
417	Bugel	Padarincang	ABF412161	1.519,00	SDN Kepuh 2	15.300.000,00
418	Kadubeureum	Padarincang	ABF412152	1.750,00	SDN Curug Dahu	40.500.000,00
419	Batu Kuwung	Padarincang	ABF413453	1.372,00	SDN Batukuwung	15.000.000,00
420	Cisaat	Padarincang	ABF403068	1.073,00	SDN Cisaat Tengah	3.600.000,00
421	Mekarsari	Anyar	B0504266	400,00	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Anyar	13.176.000,00
422	Anyar	Anyar	ABF409406	1.604,00	SDN Anyar 1	247.050.000,00
423	Anyar	Anyar	ABF409369	1.448,00	SDN Anyar 2	202.000.000,00
424	Grogol Indah	Anyar	B0504374	1.155,00	SDN Kosambironyok	45.000.000,00
425	Bunihara	Anyar	AB0390048	1.835,00	SDN Banjarsari	29.750.000,00
426	Banjarsari	Anyar	AD118113	2.188,00	SDN Kadukancas	70.875.000,00
427	Banjarsari	Anyar	A3066889	1.376,00	SDN Gintung	46.305.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
428	Cikoneng	Anyar	BI 652455	2.100,00	SDN Tegal	15.435.000,00
429	Bandulu	Anyar	B 2770812	1.017,00	SDN Cirunten	46.095.000,00
430	Sindangkarya	Anyar	AD 280847	799,00	SDN Siring	27.860.000,00
431	Sindang Mandi	Anyar	ABF413459	571,00	SDN Jaha	14.840.000,00
432	Sindangkarya	Anyar	AE 321957	1.064,00	SDN Kareo	38.360.000,00
433	Cikoneng	Anyar	AD 127591	1.986,00	SDN Cisiram	52.500.000,00
434	Tanjung Manis	Anyar	B 2770806	1.273,00	SDN Pematang Waringin	6.510.000,00
435	Tanjung Manis	Anyar	AD 280838	316,00	Rumah Dinas SDN Pematangwaringin	10.125.000,00
436	Bunihara	Anyar	ABF409593	1.072,00	SDN Cimanggu	52.500.000,00
437	Kosambironyok	Anyar	AD 118112	3.381,00	SDN Kampung Baru	169.750.000,00
438	Anyar	Anyar	AF 309617	1.464,00	SDN Anyar 5	81.000.000,00
439	Bandulu	Anyar	AD 280842	613,00	SDN Sirihlor	35.000.000,00
440	Sindang Mandi	Anyar	B 8698984	2.560,00	SDN Garung	70.000.000,00
441	Kosambironyok	Anyar	AM 325403	2.459,00	SDN Pasarsore	87.500.000,00
442	Cikoneng	Anyar	B 8698919	1.632,00	SDN Salatuhur	70.000.000,00
443	Banjarsari	Anyar	AD 280848	1.270,00	SDN Kaduodeng	40.250.000,00
444	Sindang Mandi	Anyar	AD 280840	3.261,00	SDN Bengras	60.274.500,00
445	Batukuda	Mancak	AD 280841	1.525,00	SDN Pamekser	3.736.250,00
446	Winong	Mancak	AF 1161588	538,00	SDN Winong	752.150,00
447	Labuan	Mancak	AF 1331983	2.758,00	SDN Mancak 1	15.820.000,00
448	Bale Kencana	Mancak	AM 325408	904,00	SDN Teritih	2.500.000,00
449		Mancak	AD 1094518	479,00	SDN Sigidong	2.500.000,00
450	Angsana	Mancak	AD 1257253	2.182,00	SDN Sirongge	2.000.000,00
451	Batukuda	Mancak	B 2283557	1.684,00	SDN Kadureges	9.400.000,00
452	Sangiang	Mancak	ABE1000667	1.652,00	SDN Sangiang	4.410.000,00
453	Angsana	Mancak	B 2770826	1.325,00	SDN Kemang	3.246.250,00
454	Talaga	Mancak	BJ 844396	1.349,00	SDN Talaga	4.095.000,00
455	Sigidong	Mancak	B 2770585	876,00	SDN Pasir	13.420.845,00
456	Bale Kambang	Mancak	B 2770540	944,00	SDN Talun 1	8.165.250,00
457	Mancak	Mancak	BZ 925469	2.372,00	SDN Saraga	7.350.000,00
458	Waringin	Mancak	AE 349566	961,00	SDN Nagreg	6.650.000,00
459	Talaga	Mancak	AAX527618	1.105,00	SDN Talun 2	1.960.000,00
460	Batukuda	Mancak	AE321958	1.122,00	SDN Batu Kuda	660.000,00
461	Labuan	Mancak	AF 362914	1.497,00	SDN Mancak 2	2.408.000,00



No	Letak Tanah		Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa						
462	Ciwarna	Mancak	AF 362913	1.197,00	SDN Sibuyung	1.898.750,00	
463	Waringin	Mancak	AB0390051	1.137,00	SDN Cingeunah	2.834.650,00	
464	Pasirwaru	Mancak	ABF409602	1.092,00	SDN Sukajaya	8.310.000,00	
465	Batukuda	Mancak	AAT556037	1.240,00	SDN Keracak	2.914.500,00	
466	Labuan	Mancak	AAT564169	1.945,00	SDN Curugbarang	19.450.000,00	
467	Pasirwaru	Mancak	ABF412564	689,00	SDN Bojong	350.000,00	
468	Sangiang	Mancak	AAX527988	248,00	SDN Pasirgadung	4.000.000,00	
469	Ranca Sanggal	Cinangka	A37313801	986,00	SDN Kubang Baros	2.415.700,00	
470	Sindang Laya	Cinangka	A43370880	2.871,00	SDN Ciparay	11.500.000,00	
471	Kamasan	Cinangka	AB0390049	1.263,00	SDN Pematang Warung	6.950.000,00	
472	Karang Suraga	Cinangka	AAT515382	2.610,00	SDN Cipacung	18.661.500,00	
473	Bulakan	Cinangka	B0 504452	1.053,00	SDN Bulakan	7.000.000,00	
474	Umbul Tanjung	Cinangka	AAT509559	1.223,00	SDN Cikokol	2.790.550,00	
475	Bantar Wangi	Cinangka	AAX531280	1.051,00	SDN Bantarwaru	6.050.000,00	
476	Kubang Baros	Cinangka	AAT509555	1.412,00	SDN Cibawang	1.387.200,00	
477	Mekarsari	Cinangka	ABF079860	1.495,00	SDN Kamboja	5.282.400,00	
478	Baros Jaya	Cinangka	A3067334	890,00	SDN Mendong	1.397.088,00	
479	Kubang Baros	Cinangka	AAT507249	932,00	SDN Kadupeureup	26.000.000,00	
480	Karang Suraga	Cinangka	B117096	635,00	SDN Tapos	5.720.000,00	
481	Karang Suraga	Cinangka	AR 603547	1.686,00	SDN Karang Bolong	319.550.000,00	
482	Cinangka	Cinangka	A7028413	1.546,00	SDN Cinangka 2	7.500.000,00	
483	Cinangka	Cinangka	AB0390065	1.009,00	SDN Cinangka 3	4.500.000,00	
484	Kubang Baros	Cinangka	AR 603539	1.795,00	SDN Kadumonyong	141.149.899,00	
485	Cikolelet	Cinangka	A13536163	1.740,00	SDN Kampung Baru	25.000.000,00	
486	Mekarsari	Cinangka	A15630017	1.311,00	SDN Neglasari	4.867.852,00	
487	Pasauran	Cinangka	AB0390082	1.406,00	SDN Cipanas	4.410.000,00	
488	Bantar Wangi	Cinangka	B0504355	531,00	SDN Calung	1.858.500,00	
489	Karang Suraga	Cinangka	A3066886	1.961,00	SDN Kosambi	36.316.000,00	
490	Bulakan	Cinangka	BQ 876003	1.901,00	SDN Cikondang	10.755.000,00	
491	Cikolelet	Cinangka	A3065814	1.357,00	SDN Cisirih	4.851.000,00	
492	Kamasan	Cinangka	A3065598	1.191,00	SDN Muncang	1.000.000,00	
493	Cinangka	Cinangka	B0504140	1.451,00	SDN Kukupu	7.050.000,00	
494	Bantar Waru	Cinangka	AR 603548	2.135,00	SDN Dangdeur	7.500.000,00	
495	Umbul Tanjung	Cinangka	A3062291	2.094,00	SDN Pasimenteng	5.463.500,00	



No	Letak Tanah		Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa						
496	Pasauran		Cinangka	BQ 876002	1.749,00	SDN Pasauran 2	10.150.000,00
497	Mander		Bandung	B0504380	348,00	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Bandung	12.650.000,00
498	Bandung		Bandung	ABF412162	1.399,00	SDN Bandung 2	3.832.500,00
499	Bandung		Bandung	BS 244470	1.478,00	SDN Batucina	9.650.000,00
500	Blokang		Bandung	AR 603546	1.407,00	SDN Blokang	7.210.000,00
501	Blokang		Bandung	A3066893	2.832,00	SDN Serdang	17.875.000,00
502	Pangawinan		Bandung	ABF1579963	3.197,00	SDN Gembor	15.204.000,00
503	Mander		Bandung	ABF1911556	1.681,00	SDN Mander 1	8.750.000,00
504	Mander		Bandung	A13552333	3.724,00	SDN Yudha	19.695.000,00
505	Mander		Bandung	A15649422	2.047,00	SDN Kidalang	8.750.000,00
506	Penamping		Bandung	AAT507251	2.070,00	SDN Mander 2	4.272.000,00
507	Penamping		Bandung	-	1.638,00	SDN Kandang sapi	5.600.000,00
508	Babakan		Bandung	AAT507250	2.839,00	SDN Palamakan 2	15.329.600,00
509	Babakan		Bandung	A3067116	2.559,00	SDN Banter	18.518.500,00
510	Pringwulung		Bandung	AAT524924	621,00	SDN Palamakan 1	2.625.000,00
511	Pringwulung		Bandung	B0504378	1.739,00	SDN Pakishaji	26.975.000,00
512	Gunung Sari		Gunung Sari	AAT524926	1.922,00	SDN Gunungsari 1	19.140.000,00
513	Ciherang		Gunung Sari	AB0390033	775,00	SDN Gunungsari 3	2.299.500,00
514	Curug Sulanjana		Gunung Sari	A0969895	718,00	SDN Sukalaba 1	8.580.000,00
515	Tamiang		Gunung Sari	B0503526	1.058,00	SDN Sukalaba 2	7.500.000,00
516	Ciherang		Gunung Sari	B0503403	1.599,00	SDN Ciherang	19.400.000,00
517	Sukalaba		Gunung Sari	AAT507219	1.130,00	SDN Sukamaju	1.500.000,00
518	Luwuk		Gunung Sari	AAT507214	1.710,00	SDN Luwuk	2.500.000,00
519	Curug Sulanjana		Gunung Sari	A0973044	1.234,00	SDN Kakabu	13.250.000,00
520	Waringinkurung		Waringinkurung	AAT524083	19.286,00	SMPN 1 Waringin Kurung	34.671.500,00
521	Sasahan		Waringinkurung	A7027290	3.372,00	SMPN 2 Waringin Kurung	153.900.000,00
522	Kramatwatu		Kramatwatu	AB0390036	21.395,00	SMPN 1 Kramat Watu	770.220.000,00
523	Tonjong		Kramatwatu	AAT521109	4.718,00	SMPN 2 Kramat Watu	15.000.000,00
524	Harjatani		Kramatwatu	AAT523420	6.415,00	SMPN 3 Kramat Watu	300.000.000,00
525	Tirem		Lebak Wangi	A3066892	14.506,00	SMPN 1 Lebak Wangi	150.000.000,00
526	Kragilan		Kragilan	AAT509577	16.800,00	SMPN 1 Kragilan	2.688.000.000,00
527	Kendayakan		Kragilan	AAT509581	8.266,00	SMPN 3 Kragilan	310.000.000,00
528	Kubang Puji		Pontang	A7026584	18.154,00	SMPN 1 Pontang	90.770.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
529	Kubang Puji	Pontang	A7026585	8.399,00	SMPN 2 Pontang	50.000.000,00
530	Tirtayasa	Tirtayasa	A3067104	8.065,00	SMPN 1 Tirtayasa	287.560.000,00
531	Mandaya	Carenang	A3067101	17.930,00	SMPN 1 Carenang	8.965.000,00
532	Pamarayan	Pamarayan	AAT507404	13.340,00	SMPN 1 Pamarayan	66.700.000,00
533	Damping	Pamarayan	A7026355	9.270,00	SMPN 2 Pamarayan	22.711.500,00
534	Mander	Bandung	A7026347	8.712,00	SMPN 1 Bandung	50.000.000,00
535	Sukaratu	Cikeusal	AAT515577	6.149,00	SMPN 1 Cikeusal	28.500.000,00
536	Petir	Petir	AAT515576	10.100,00	SMPN 1 Petir	252.500.000,00
537	Bojonegara	Bojonegara	ABE100669	16.881,00	SMPN 1 Bojonegara	15.000.000,00
538	Wanakarta	Bojonegara	B 2770805	6.761,00	SMPN 2 Bojonegara	120.250.000,00
539	Anyar	Anyar	ABE100667	7.300,00	SMPN 1 Anyar	1.825.000.000,00
540	Kosambironyok	Anyar	B 7836292	5.663,00	SMPN 2 Anyar	25.240.000,00
541	Sindang Laya	Cinangka	AM 325407	7.947,00	SMPN 1 Cinangka	158.940.000,00
542		Mancak	AJ 423919	7.048,00	SMPN 2 Mancak	39.600.000,00
543	Sukabares	Ciomas	B 8698919	9.250,00	SMPN 1 Ciomas	27.750.000,00
544	Tamiang	Gunung Sari	A24649134	6.220,00	SMPN 1 Gunung Sari	16.000.000,00
545	Panyirapan	Baros	A28608598	11.612,00	SMPN 1 Baros	80.935.640,00
546	Kibin	Kibin	B0504261	12.971,00	SMPN 1 Kibin	21.657.600,00
547	Jawilan	Jawilan	AE 321955	19.845,00	SMPN 1 Jawilan	9.922.500,00
548	Garut	Kopo	AF 146114	5.862,00	SMPN 1 Kopo	21.000.000,00
549	Binuang	Binuang	ABE006706	6.051,00	SMPN 1 Binuang	150.000.000,00
550	Sindangheula	Pabuaran	AK 320819	8.411,00	SMPN 2 Pabuaran	360.000.000,00
551	Bakung	Cikande	ABF412161	6.785,00	SMPN 3 Cikande	204.000.000,00
552	Kampung Baru	Petir	ABF412152	8.337,00	SMPN 2 Petir	41.685.000,00
553	Siketug	Ciomas	ABF413453	6.140,00	SMPN 2 Ciomas	282.800.000,00
554	Malabar	Bandung	ABF403068	9.486,00	SMPN 2 Bandung	550.000.000,00
555	Lebak Kepuh	Lebak Wangi	B0504267	7.000,00	SMPN 2 Lebakwangi	315.000.000,00
556	Kadu Agung	Gunung Sari	ABF409332	8.550,00	SMPN 2 Gunung Sari	495.715.000,00
557	Lebak Wangi	Lebak Wangi	ABF409295	2.023,00	SDN Lebak Kepuh 2	37.800.000,00
558	Kencana Harapan	Lebak Wangi	B0504375	1.760,00	SDN Cidahu	12.584.000,00
559	Tirem	Lebak Wangi	AB0390049	1.436,00	SDN Tirem 1	73.193.000,00
560	Tirem	Lebak Wangi	AD118114	1.934,00	SDN Tirem 2	27.902.000,00
561	Kebonratu	Lebak Wangi	A3066890	1.292,00	SDN Kriyan	25.200.000,00



No	Letak Tanah		Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa						
562	Tirem	Lebak Wangi	Lebak Wangi	BI 652456	1.715,00	SDN Karang Anyar	12.262.250,00
563	Kebonratu	Lebak Wangi	Lebak Wangi	B 2770813	930,00	SDN Kebon Ratu	15.193.750,00
564	Teras Bendung	Lebak Wangi	Lebak Wangi	AD 280848	1.159,00	SDN Teras Bendung 1	11.500.000,00
565	Kamaruton	Lebak Wangi	Lebak Wangi	ABF413460	582,00	SDN Teras Bendung 2	19.320.000,00
566	Teras Bendung	Lebak Wangi	Lebak Wangi	AE 321958	1.692,00	SDN Teras Bendung 4	17.950.000,00
567	Bolang	Lebak Wangi	Lebak Wangi	AD 127592	830,00	SDN Bolang 2	8.750.000,00
568	Purwadadi	Lebak Wangi	Lebak Wangi	B 2770807	970,00	SDN Purwadadi 1	2.695.000,00
569	Teras Bendung	Lebak Wangi	Lebak Wangi	AD 280839	1.449,00	SDN Teras Bendung 3	10.000.000,00
570	Mekar Baru	Petir	Petir	ABF409594	11.910,00	Kantor Camat Petir	428.760.000,00
571	Cikeusal	Cikeusal	Cikeusal	AD 118113	1.720,00	Kantor Camat Cikeusal	3.440.000,00
572	Jawilan	Jawilan	Jawilan	AF 309618	4.428,00	Kantor Camat Jawilan	111.998.000,00
573	Panyaungan Jaya	Ciomas	Ciomas	AD 280843	2.074,00	Kantor Camat Ciomas	9.000.000,00
574	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	B 8698985	3.470,00	PSU - Masjid Perumahan Citra Garden BMW	444.160.000,00
575	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AM 325404	263,00	PSU - Taman Blok D Citra Garden BMW	33.664.000,00
576	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	B 8698920	183,00	PSU - Taman Utama Blok E Citra Garden BMW	23.424.000,00
577	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AD 280848	610,00	PSU - Taman Blok D Citra Garden BMW	78.080.000,00
578	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AD 280840	359,00	PSU - Taman Utama Depan Blok A, B Citra Garden BMW	45.952.000,00
579	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AD 280841	283,00	PSU - Taman Blok K Citra Garden BMW	36.224.000,00
580	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AF 1502378	152,00	PSU - Taman Utama Depan Blok E Citra Garden BMW	19.456.000,00
581	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AF 1672773	338,00	PSU - Taman Utama Depan Blok E Citra Garden BMW	43.264.000,00
582	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AM 325409	245,00	PSU - Taman Bundaran Citra Garden BMW	31.360.000,00
583	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AD 1419988	232,00	PSU - Taman Blok K Citra Garden BMW	29.696.000,00
584	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	AD 1582723	1.592,00	PSU - Taman Blok E Citra Garden BMW	203.776.000,00
585	Wanayasa	Kramatwatu	Kramatwatu	B 2283558	40,00	PSU - Taman Blok F Citra Garden BMW	5.120.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
586	Wanayasa	Kramatwatu	ABE1000668	837,00	PSU - Taman Blok C Citra Garden BMW	107.136.000,00
587	Wanayasa	Kramatwatu	B 2770827	422,00	PSU - Taman Blok K Citra Garden BMW	54.016.000,00
588	Wanayasa	Kramatwatu	BJ 844397	261,00	PSU - Taman Blok E Citra Garden BMW	33.408.000,00
589	Cokopsulanjana	Waringinkurung	B 2770495	7.105,00	PSU - TPU Citra Garden BMW	24.500.000,00
590	Wanayasa	Kramatwatu	B 2770450	1.160,00	PSU - Taman Blok C Citra Garden BMW	148.480.000,00
591	Suka Dalem	Waringinkurung	BZ 925470	8.151,00	PSU - TPU Citra Garden BMW	58.973.200,00
592	Wanayasa	Kramatwatu	AE 349567	110,00	PSU - Taman Blok D Citra Garden BMW	14.080.000,00
593	Wanayasa	Kramatwatu	AAX527619	34.349,00	PSU - Jalan Komplek Citra Garden BMW	8.358.554.358,00
594	Lebak Wangi	Lebak Wangi	AE321959	11.920,00	Kantor Camat Lebak Wangi	1.577.601.455,00
595	Serang	Serang	AF 362912	1.178,00	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	687.360.000,00
596	Nyompok	Kopo	AF 362911	4.423,00	Puskesmas Nyompok	245.697.650,00
597	Kibin	Kibin	AB0390052	3.686,00	Puskesmas Kibin	1.161.150.000,00
598	Bandung	Bandung	ABF409603	380,00	Mess Pegawai PemKab Serang Bandung	269.830.000,00
599	Kubang Baros	Cinangka	AAT572301	6.021,00	SMPN 2 Cinangka	18.000.000,00
600	Barugbug	Padarincang	AAT580433	2.000,00	SDN Barugbug 2	1.550.000,00
601	Kadubeureum	Pabuaran	ABF412565	10.234,00	SMPN 1 Pabuaran	3.785.250,00
602	Tunjung Teja	Tunjung Teja	AAX527989	14.390,00	Kantor Camat Tunjung Teja	375.000.000,00
603	Pontang	Pontang	A49427959	19.340,00	Kantor Camat Pontang	2.863.421.000,00
604	Bandung	Bandung	A55485038	20.036,00	Fasos Fasum Kec. Bandung	1.999.624.000,00
605	Sukamanah	Baros	AB0390050	8.457,00	Fasos Fasum Kec. Baros	1.275.079.000,00
606	Undar Andir	Kragilan	AAT515383	30.000,00	Fasos Fasum Kec. Kragilan	3.000.000.000,00
607	Kadubeureum	Pabuaran	B0 504453	7.236,00	Fasos Fasum Kec. Pabuaran	1.270.418.060,00
608	Cimuncang	Serang	AAT509560	855,00	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	600.210.000,00
609	Singarajan	Pontang	AAX531281	682,00	Rumah Dinas Camat Pontang	38.000.000,00
610	Bojong Menteng	Tunjung Teja	AAT509556	13.210,00	Lahan Kosong Eks Peruntukan SMAN	594.450.000,00
611	Pamanuk	Carenang	ABF079861	1.085,00	Puskesmas Carenang	29.975.550,00
612	Tanara	Tanara	A3067335	13.085,00	Terminal Tanara	606.000.000,00
613	Tunjung Teja	Tunjung Teja	AAT507250	2.933,00	Terminal Tunjung Teja	1.274.790.500,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
614	Luwuk	Gunung Sari	B117097	4.589,00	Sentra Hasil Bumi dan UMKM	606.991.750,00
615	Anyar	Anyar	AR 603548	1.870,00	Pusat Informasi Pariwisata Anyar	374.000.000,00
616	Kopo	Kopo	A7028414	14.430,00	Fasos Fasum Kec. Kopo	1.183.260.000,00
617	Tunjung Teja	Tunjung Teja	AB0390066	12.380,00	Fasos Fasum Kec. Tunjung Teja	1.128.147.521,00
618	Padarincang	Padarincang	AR 603540	680,00	Lahan Kosong Peruntukan Rumah Dinas Camat Padarincang	1.000.000,00
619	Citerep	Ciruas	A17723871	2.950,00	Kantor Camat Ciruas	3.827.320.000,00
620	Julang	Cikande	A19817725	3.650,00	Eks Kewedanaan Cikande	730.000.000,00
621	Tembong	Cipocok Jaya	AB0390083	939,00	Gudang Farmasi Dinkes	1.000.000,00
622	Serang	Serang	B0504356	3.550,00	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	1.897.768.500,00
623	Tejamari	Baros	A3066887	1.202,00	SDN Pasir	3.206.115,00
624	Mekarsari	Carenang	BQ 876004	393,00	SDN Carenang 1	2.475.000,00
625	Teras	Carenang	A3065382	1.390,00	SDN Teras 3	21.000.000,00
626	Mander	Bandung	A3065166	668,00	Pustu Mander	3.000.000,00
627	Penamping	Bandung	B0504141	250,00	Poskesdes Penamping	16.380.000,00
628	Sindangmandi	Baros	AR 603549	437,00	Pustu Sindang Mandi	2.145.000,00
629	Sidamukti	Baros	A3062292	657,00	Poskesdes Sidamukti	1.960.000,00
630	Lamaran	Binuang	BQ 876003	200,00	Poskesdes Lamaran	13.000.000,00
631	Cikande Permai	Cikande	B0504381	1.798,00	Pustu Cikande Permai (PSU - Kesehatan)	664.600.000,00
632	Dahu	Cikeusal	ABF412163	434,00	Pustu Dahu	1.500.000,00
633	Kamasan	Cinangka	BS 244471	486,00	Pustu Sirih	5.260.000,00
634	Cikolelet	Cinangka	AR 603547	247,00	Pustu Cikolelet	9.880.000,00
635	Pasauran	Cinangka	A3066894	361,00	Pustu Pasauran	56.000.000,00
636	Cinangka	Cinangka	ABF2243149	163,00	Poskesdes Cinangka	8.250.000,00
637	Sindangheula	Pabuaran	ABF2574742	344,00	Pustu Sindang Heula	1.250.000,00
638	Lebak	Ciomas	A17746511	127,00	Pustu Lebak	1.000.000,00
639	Lebak	Ciomas	A19843600	117,00	Pustu Lebak	12.000.000,00
640	Talaga	Mancak	AAT507252	337,00	Pustu Talaga	1.500.000,00
641	Waringin	Mancak	-	342,00	Pustu Waringin	177.187.500,00
642	Wirana	Pamarayan	AAT507251	291,00	Pustu Wirana	1.500.000,00
643	Pasir Kembang	Pamarayan	A3067117	143,00	Poskesdes	5.000.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
					Binong / Pasir Kembang	
644	Tambiluk	Pabuaran	AAT524925	124,00	Poskesdes Tambiluk	16.988.000,00
645	Pegadingan	Lebak Wangi	B0504379	637,00	Pustu Pegandikan	8.918.000,00
646	Kecana Harapan	Lebak Wangi	AAT524927	500,00	Pustu Kecana Harapan	2.145.000,00
647	Argawana	Pulo Ampel	AB0390034	182,00	Pustu Argawana	7.000.000,00
648	Cerukcuk	Tanara	A0969896	160,00	Pustu Cerukcuk	25.000.000,00
649	Tenjoayu	Tanara	B0503280	164,00	Poskesdes Tenjo Ayu	4.000.000,00
650	Sasahan	Waringinkurung	B0503157	169,00	Pustu Sasahan	1.470.000,00
651	Melati	Waringinkurung	AAT507209	276,00	Pustu Melati	1.500.000,00
652	Ujungtebu	Ciomas	AAT507204	383,00	Polindes Ujung Tebu	1.250.000,00
653	Walikukun	Carenang	A0973045	1.292,00	SDN Walikukun	16.198.000,00
654	Julang	Cikande	AAT524084	2.028,00	Lahan Kosong Eks Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	308.160.000,00
655	Kadubeureum	Pabuaran	A7027291	10.340,00	Lahan Kosong Eks BBI Kadubeureum	12.500.000,00
656	Kramatwatu	Kramatwatu	AB0390037	8.700,00	Eks. Kewedanaan Kramatwatu	1.113.600.000,00
657	Walikukun	Carenang	AAT525731	699,00	Gedung Kosong Eks SDN Walikukun	2.940.000,00
658	Wanayasa	Kramatwatu	AAT528042	3.327,00	PSU - Sarana Pendidikan Citra Garden BMW	425.856.000,00
659	Suka Jaya	Pontang	A3066893	105.500,00	Tanah Pertanian Kabupaten Serang	10.029.150.000,00
660	Kadubeureum	Padarincang	AAT509585	2.490,00	Lahan Kosong Eks Pasar Padarincang	256.200.000,00
661	Tanara	Tanara	AAT509589	4.108,00	Puskesmas Tanara	197.854.500,00
662	Pamarayan	Pamarayan	A7026584	8.040,00	Fasos Fasum Kec. Pamarayan	964.398.826,00
663	Binuang	Binuang	A7026585	16.408,00	Fasos Fasum Kec. Binuang	2.190.904.573,00
664	Cerukcuk	Tanara	A3067104	8.602,00	Fasos Fasum Kec. Tanara	1.607.597.430,00
665	Gunungsari	Gunung Sari	A3067101	14.060,00	Fasos Fasum Kec. Gunung Sari	2.960.382.000,00
666	Sukadana	Ciomas	AAT507405	2.340,00	Lahan Kosong Eks Rumah Dinas Camat Ciomas	50.000.000,00
667	Sukadana	Ciomas	A7026339	640,00	Lahan Kosong Eks Rumah Dinas Camat Ciomas	50.000.000,00
668	Kramatwatu	Kramatwatu	A7026331	1.848,00	SDN Kramatwatu1	68.357.779,00



No	Letak Tanah		Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa						
669	Kramatwatu		Kramatwatu	AAT515575	79,00	Rumah Dinas SDN Kramatwatu1	2.922.221,00
670	Dukuh		Kragilan	AAT515574	690,00	SDN Dukuh 1 (Bidang 1)	1.580.858,00
671	Lontar		Tirtayasa	ABE100670	653,00	SDN Lontar 3 (Bidang 2)	3.186.473,00
672	Lontar		Tirtayasa	B 2770806	443,00	SDN Lontar 3 (Bidang 1)	2.161.727,00
673	Kramatwatu		Kramatwatu	ABE100668	1.613,00	SDN Gempol	58.617.000,00
674	Kramatwatu		Kramatwatu	B 7836293	129,00	Rumah Dinas SDN Gempol	3.483.000,00
675	Kubang Jaya		Petir	AM 325408	676,00	SDN Ciburuy (Bidang 1)	6.714.238,00
676	Kubang Jaya		Petir	AJ 423920	686,00	SDN Ciburuy (Bidang 2)	6.813.562,00
677	Citasuk		Padarincang	B 8698920	71.175,00	Sawah Garapan Pertanian	372.900.000,00
678	Cipare		Serang	A32568062	2.730,00	Kantor Dinas Pertanian	1.196.640.000,00
679	Tengkurak		Tirtayasa	A36527526	162,00	TPI Tengkurak	2.000.000,00
680	Margagiri		Bojonegara	B0504262	115,00	TPI Kepuh	4.400.000,00
681	Wanayasa		Pontang	AE 321956	292,00	TPI Pontang	7.200.000,00
682	Panyirapan		Baros	AF 146115	4.232,00	Penampungan Air BBI	456.373.730,00
683	Panyirapan		Baros	ABE006707	5.900,00	BBI Panyirapan Baros	88.500.000,00
684	Panyirapan		Baros	AK 320820	663,00	BBI Panyirapan Baros	9.945.000,00
685	Panyirapan		Baros	ABF412161	450,00	BBI Panyirapan Baros	7.650.000,00
686	Mekarsari		Anyar	ABF412152	2.765,00	Kantor BPP Kec. Anyar	93.637.500,00
687	Baros		Baros	ABF413453	12.960,00	Kantor BPP Kec. Baros	1.334.880.000,00
688	Parigi		Cikande	ABF403068	2.151,00	Kantor BPP Kec. Cikande	182.304.000,00
689	Kramatwatu		Kramatwatu	B0504268	1.080,00	Kantor BPP Kec. Kramatwatu	48.000.000,00
690	Sangiang		Pamarayan	ABF409258	900,00	Kantor BPP Kec. Pamarayan	63.900.000,00
691	Mangunreja		Pulo Ampel	ABF409221	897,00	Kantor BPP Kec. Pulo Ampel	276.600.000,00
692	Alang-alang		Tirtayasa	B0504376	2.435,00	Kantor BPP Kec. Tirtayasa	2.220.000,00
693	Linduk		Pontang	AB0390050	56.500,00	Tambak Ikan Linduk	226.000.000,00
694	Kubang Puji		Pontang	AD118115	4.788,00	Kantor BPP Kec. Pontang (Bidang1)	235.537.700,00
695	Kubang Puji		Pontang	A3066891	4.834,00	Kantor BPP Kec. Pontang (Bidang2)	142.462.300,00
696	Sindangsari		Pabuaran	BI 652457	3.943,00	Lahan Kosong (Sebagian Peruntukan PERPUSDA)	390.000.000,00
697	Kedung Soka		Pulo Ampel	B 2770814	1.667,00	SDN Sumurlubang	15.876.000,00
698	Salira		Pulo Ampel	AD 280849	264,00	SDN Sumurlubang (Bidang 2)	2.514.000,00



No	Letak Tanah		Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa						
699	Cikolelet		Cinangka	ABF413461	431,00	SDN Cikolelet (Bidang 1)	14.965.278,00
700	Cikolelet		Cinangka	AE 321959	289,00	SDN Cikolelet (Bidang 2)	10.034.722,00
701	Pagintungan		Jawilan	AD 127593	546,00	SDN Pagintungan (Bidang 1)	7.350.000,00
702	Undar Andir		Kragilan	B 2770808	504,00	SDN Undar Andir 1 (Bidang 1)	11.000.000,00
703	Undar Andir		Kragilan	AD 280840	596,00	SDN Undar Andir 1 (Bidang 2)	11.000.000,00
704	Kubang Puji		Pontang	ABF409595	407,00	SDN Kubangpuji 1 (Bidang 1)	2.768.100,00
705	Kubang Puji		Pontang	AD 118114	75,00	SDN Kubangpuji 1 (Bidang 2)	1.050.000,00
706	Tanara		Tanara	AF 309619	1.599,00	SDN Tanara 2	3.700.000,00
707	Tanara		Tanara	AD 280844	1.098,00	SDN Tanara 2 (Bidang 2)	2.540.000,00
708	Cigelam		Ciruas	B 8698986	395.600,00	Sawah Garapan Pertanian	2.430.883.000,00
709	Cigelam		Ciruas	AM 325405	17.980,00	Sawah Garapan Pertanian	110.484.400,00
710	Kebonratu		Lebak Wangi	B 8698921	905,00	SDN Warakas	7.345.000,00
711	Kebonratu		Lebak Wangi	AD 280848	491,00	Rumah Dinas SDN Warakas	3.985.000,00
712	Lebak		Ciomas	AD 280840	501,00	SDN Peundeuy (Bidang 2)	1.500.000,00
713	Julang		Cikande	AD 280841	3.511,00	SDN Julang (Bidang 1)	210.420.000,00
714	Julang		Cikande	AF 1843168	1.721,00	SDN Julang (Bidang 2)	103.140.000,00
715	Cilayang		Cikeusal	AF 2013563	114,00	Rumah Dinas SDN Cilayang 2	1.034.500,00
716	Mongpok		Cikeusal	AM 325410	1.400,00	SDN Mongpok 3	14.957.500,00
717	Mongpok		Cikeusal	AD 1745458	239,00	Rumah Dinas SDN Mongpok 3	2.560.000,00
718	Lambang Sari		Bojonegara	AD 1908193	617,00	SDN Kubanglaban (Bidang 1)	8.600.000,00
719	Lambang Sari		Bojonegara	B 2283559	75,00	SDN Kubanglaban (Bidang 2)	1.102.000,00
720	Sindangheula		Pabuaran	ABE1000669	1.869,00	SDN Bena (Bidang 1)	4.000.000,00
721	Sindangheula		Pabuaran	B 2770828	128,00	SDN Bena (Bidang 2)	1.250.000,00
722	Sindangsari		Pabuaran	BJ 844398	806,00	SDN Sindangsari 1 (Bidang 1)	38.750.000,00
723	Sindangheula		Pabuaran	B 2770405	139,00	SDN Sindangsari 1 (Bidang 2)	6.700.000,00
724	Margasari		Pulo Ampel	B 2770360	1.780,00	SDN Margasari (Bidang 1)	30.700.000,00
725	Margasari		Pulo Ampel	BZ 925471	642,00	SDN Margasari (Bidang 2)	11.100.000,00
726	Pematang		Kragilan	AE 349568	5.240,00	SMPN 2 Kragilan	27.660.000,00
727	Kadu Agung		Gunung Sari	AAX527620	1.353,00	SDN Talaga	6.600.000,00



No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
728	Kadu Agung	Gunung Sari	AE321960	471,00	SMPN 3 SATAP Gunung Sari	2.300.000,00
729	Pamarayan	Pamarayan	AF 362910	810,00	SDN Damping (Bidang 1)	31.813.155,00
730	Sangiang	Pamarayan	AF 362909	239,00	SDN Damping (Bidang 2)	9.386.845,00
731	Tunjung Teja	Tunjung Teja	AB0390053	213,00	Rumah Dinas SDN Tunjung 2	1.200.000,00
732	Dukuh	Kragilan	ABF409604	388,00	Rumah Dinas SDN Dukuh 2	9.287.339,00
733	Panyaungan Jaya	Ciomas	AAT588565	328,00	SDN Ciomas 3 (Bidang 2)	650.000,00
734	Ciwarna	Mancak	AAT596697	187,00	SDN Kambangan (Bidang 2)	1.792.588,00
735	Sindangsari	Pabuaran	ABF412566	1.317,00	SDN Sindangsari 2 (Bidang 1)	3.023.185,00
736	Sindangsari	Pabuaran	AAX527990	364,00	SDN Sindangsari 2 (Bidang 2)	835.565,00
737	Kaserangan	Ciruas	A61542117	13.361,00	PUSPEMKAB	2.003.301.000,00
738	Kaserangan	Ciruas	A67599196	11.013,00	PUSPEMKAB	1.569.112.000,00
739	Kaserangan	Ciruas	AB0390051	50.500,00	PUSPEMKAB	7.591.309.649,00
740	Kaserangan	Ciruas	AAT515384	37.027,00	PUSPEMKAB	6.779.821.951,00
741	Kaserangan	Ciruas	B0 504454	8.698,00	PUSPEMKAB	1.565.476.303,00
742	Kaserangan	Ciruas	AAT509561	2.662,00	PUSPEMKAB	1.594.555.920,00
743	Sukamenak	Baros	AAX531282	1.007,00	SDN Tejamari 2 (Bidang 1)	2.000.000,00
744	Sukamenak	Baros	AAT509557	134,00	SDN Tejamari 2 (Bidang 3)	1.000.000,00
745	Sukamenak	Baros	ABF079862	255,00	SDN Tejamari 2 (Bidang 4)	1.150.000,00
746	Padasuka	Baros	A3067336	1.396,00	SDN Padasuka (Bidang 1)	1.400.000,00
747	Padasuka	Baros	AAT507251	495,00	SDN Padasuka (Bidang 2)	600.000,00
748	Pegadingan	Kramatwatu	B117098	897,00	SDN Pegadingan 2 (Bidang 1)	11.600.000,00
749	Karang Kepuh	Bojonegara	AR 603549	1.089,00	SDN Buahgede 2 (Bidang 1)	25.000.000,00
750	Karang Kepuh	Bojonegara	A7028415	73,00	SDN Buahgede 2 (Bidang 2)	2.540.000,00
751	Melati	Waringinkurung	AB0390067	332,00	SDN Nagreg (Bidang 2)	8.500.000,00
752	Katulisan	Cikeusal	AR 603541	8.534,00	SMPN 2 Cikeusal (Bidang 1)	29.500.000,00
753	Katulisan	Cikeusal	A21911579	2.889,00	SMPN 2 Cikeusal (Bidang 2)	10.025.743,00
754	Teras	Carenang	A24005433	615,00	SDN Teras 2 (Bidang 1)	602.941,00
755	Teras	Carenang	AB0390084	507,00	SDN Teras 2 (Bidang 2)	497.059,00
756	Kota Baru	Serang	B0504357	25.955,00	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	23.150.386.000,00
757	Petir	Petir	A3066888	692,00	SDN Kadumanggu	1.247.150,00

No	Letak Tanah	Kecamatan	Nomor Seri Blangko	Luas (M2)	Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
	Desa					
					(bidang 2)	
758	Pontang Legon	Pontang	BQ 876005	622,00	SDN Pontang Legon 1	1.700.000,00
759	Pontang Legon	Pontang	A3064950	131,00	SDN Pontang Legon 1 (bidang2)	1.072.000,00
760	Citerep	Ciruas	A3064734	430,00	SDN Ciruas 2 (bidang 2)	6.760.200,00
761	Panenjoan	Tanara	B0504142	216,00	Rumah Dinas UPT Puskesmas Kecamatan Carenang	5.033.000,00
762	Sindang Laya	Cinangka	AR 603550	1.595,00	SDN Curugcina	3.141.000,00
763	Sindang Laya	Cinangka	A3062293	271,00	Rumdin SDN Curugcina	534.000,00
764	Sukanegara	Pontang	BQ 876004	985,00	SDN Sukanegara 1	5.955.493,00
765	Renged	Binuang	B0504382	337,00	SDN Renged 1	654.800,00
766	Renged	Binuang	ABF412164	291,00	SDN Renged 1 (bidang 2)	565.300,00
767	Ranca Sanggal	Cinangka	BS 244472	49,00	SDN Pabuaran ( Rumdin Guru )	100.000,00
768	Batu Kuwung	Padarincang	AR 603548	5.400,00	Tempat Rekreasi Pemandian Air Panas	351.000.000,00
769	Pasauran	Cinangka	A3066895	5.460,00	Pesanggrahan Pasauran (I)	822.000.000,00
770	Kendayakan	Kragilan	ABF2906335	6.280,00	Lahan Kosong Peruntukan BLK (Balai Latihan Kerja)	1.615.487.261,20
771	Kendayakan	Kragilan	ABF3237928	8.227,00	Lahan Kosong Peruntukan BLK (Balai Latihan Kerja)	2.116.339.760,80
772	Cijeruk	Kibin	A21940689	5.433,00	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang	5.606.856.000,00

Secara keseluruhan dari total tanah sebanyak 2.662 bidang yang telah tersertifikasi sampai dengan tahun 2025, sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 295 bidang. Upaya Pemerintah Kabupaten Serang percepatan proses sertifikasi ini dengan menjalin kesepakatan dengan Nomor 02/SKB/V/2019 dan Nomor 170/MOU.07-HUK/2019 antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pertanahan di Kabupaten Serang. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 024/35/BPKAD/2019 dan Nomor 253/SKB-36.04/V/2019 antara BPKAD dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tentang Percepatan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di atas dibentuk tim Percepatan Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang tahun

2024 dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 590/Kep.110-Huk.BPKAD/2024.

**Tabel 102**  
**Rincian Kendaraan Bermotor Pinjam Pakai Aktif**

No	Spesifikasi Barang	Merk/Type	Uraian	Tgl. Akhir Pemanfaatan
1	Mobil Ambulance	Daihatsu Gran Max MB 1.3 FF FH	Pinjam Pakai Ambulance ke Desa Kamuning Kec. Tunjung Teja	04/06/2027
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Jl. Yumaga No. 6 Serang Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Ex Rumah Singgah RSUD dr. Dradjat Prawiranegara ke BAZNAZ Kab. Serang	14-10-2025
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / AVANZA 1300 G Manual	Pinjam Pakai ke KODIM 0602 Serang	30-06-2029
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / AVANZA 1300 G Manual	Pinjam Pakai Kendaraan	21-05-2030
5	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Avanza 1300 G Manual	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke BINDA Banten	27-07-2026
6	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu / Xenia	Pinjam Pakai KE PMI	12/03/2023
7	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke BINDA Banten	27-07-2026
8	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Avanza	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke BINDA Banten	27-07-2026
9	Jeep	Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T	Pinjam Pakai KDO TA. 2024	19-11-2029
10	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai ke Kodim 0622 Serang	30-06-2029
11	Sport Utility Vehicle (SUV)	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai KODIM 0623 Cilegon	21-05-2030
12	Sport Utility Vehicle (SUV)	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR -H (4X2) 8 A/T VIN 2018	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke KEJARI Serang	27-12-2028
13	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Toyota / Kijang Inova 10 E	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke Kemenag Kab Serang	03/11/2029
14	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ (4X2) M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Ke BAWASLU Kab. Serang	17-04-2025
15	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	New Kijang Inova 2.0 G A/T Vin 2020	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke Kemenag Kab Serang	03/11/2029
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Ki Tapa No. 33 Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Ki Tapa No. 33 Cimuncang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026
18	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	JL. Sama&#39;un Bakri Lopang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026
19	Gedung Pos Jaga Permanen	JL. Ki Tapa No. 33 Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026

**Tabel 103**  
**Kendaraan Pinjam Pakai Masa Habis/Dalam Proses Perpanjangan**

Reg.	Spesifikasi Barang	Merk/Type	Uraian	Tgl. Akhir Pemanfaatan
1	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Innova E M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke KEMENAG	01/02/2023
2	Mini Bus ( Penumpang 14	Toyota / Kijang Inova E	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas	12/03/2023

	Orang Kebawah )	M/T	Operasional	
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	New Kijang Innova G MT	Pinjam Pakai Ke PMI	12/03/2023
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA / Kijang LGX Grand Long KF 83	Pinjam Pakai Ke Kejaksaan Negeri Serang	12/04/2023
5	Station Wagon	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai Ke Kapolres Serang Kota	14-11-2023

Pinjam pakai kendaraan habis masa tersebut dalam proses perpanjangan kontrak dengan pihak terkait.

#### 5.7.4. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan jenis aset selain aset lancar dan aset tetap, yang termasuk dalam aset ini antara lain tuntutan perbendaharaan, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain, angka tahun 2025 sebesar Rp194.298.400.585,37 turun sebesar Rp110.029.731.328,03 jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp304.328.131.913,40.

**Tabel 104**  
**Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.892.226.610,00	6.034.936.771,00	(142.710.161,00)
2	Aset Tak Berwujud	89.038.784.925,00	88.588.985.825,00	449.799.100,00
3	Akumulasi Amortisasi ATB	(80.627.784.019,00)	(68.587.324.483,00)	(12.040.459.536,00)
4	<b>Jumlah ATB (3+4)</b>	<b>8.411.000.906,00</b>	<b>20.001.661.342,00</b>	<b>(11.590.660.436,00)</b>
5	Aset Lain-lain	656.698.184.308,06	468.888.377.143,58	187.809.807.164,48
6	Akumulasi Penyusutan (Reklas)	(476.703.011.238,69)	(192.115.378.343,18)	(284.587.632.895,51)
7	<b>Jumlah Aset Lain-lain (6+7)</b>	<b>179.995.173.069,37</b>	<b>276.772.998.800,40</b>	<b>(96.777.825.731,03)</b>
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.518.535.000,00	(1.518.535.000,00)
	<b>Jumlah(2+5+8)</b>	<b>194.298.400.585,37</b>	<b>304.328.131.913,40</b>	<b>(110.029.731.328,03)</b>

Adapun rincian dari mutasi bersih aset lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 105**  
**Mutasi Aset Lainnya**

Uraian	Nominal	
<b>Saldo Awal Nilai Bersih</b>		<b>304.328.131.913,40</b>
<b>Mutasi Debet:</b>		
Belanja Modal	496.174.400,00	
Kapitalisasi	58.713.450,00	
Penghapusan	19.784.550.230,00	
Hibah	75.467.337.170,11	
Pindah Antar SKPD	411.815.000,00	
Koreksi Pembukuan	2.798.869.001,00	

Uraian	Nominal	
Reklas	384.395.991.112,68	
<b>Jumlah Mutasi Debet</b>	<b>483.413.450.363,79</b>	
<b>Mutasi Kredit:</b>		
Penghapusan	19.818.441.955,00	
Hibah	176.432.159.139,06	
Pindah Antar SKPD	411.815.000,00	
Beban Penyusutan	12.159.584.836,00	
Koreksi Pembukuan	4.337.415.025,30	
Reklas	380.380.765.736,46	
<b>Jumlah Mutasi Kredit</b>	<b>593.540.181.691,82</b>	
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		<b>(110.029.731.328,03)</b>
<b>Saldo Akhir Nilai Bersih</b>		<b>194.298.400.585,37</b>

### 1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah nihil.

### 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.892.226.610,00 naik sebesar Rp449.799.100,00 jika dibandingkan dengan nilai pada 31 Desember 2024 sebesar Rp6.034.936.771,00, nilai kenaikan tersebut disebabkan adanya reklasifikasi kemitraan ke Properti Investasi. Adapun rincian dari kemitraan dengan pihak ketiga per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 106**  
**Kemitraan dengan Pihak Ketiga per SKPD 2025**

No	Instansi	Spesifikasi Barang	Merk/ Tipe	Bentuk Pemanfaatan/Mitra	Surat Perjanjian / Kontrak		Nilai Perolehan (Rp.)
		Nama Barang			Nomor	Tanggal	
1	DINKES	Mobil Ambulance	Daihatsu Gran Max MB 1.3 FF FH	Pinjam Pakain Ambulance ke Desa Kamuning Kec. Tunjung Teja	870/1412/Dinkes/2022	04/06/2022	199.460.000
2	RSUD	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Jl. Yumaga No. 6 Serang Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Ex Rumah Singgah RSUD dr. Dradjat Prawiranegara ke BAZNAZ Kab. Serang	032/PPP.23.TAPEM-BPKAD/IX/2023	14-10-2023	149.075.000
3	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Innova E M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke KEMENAG		12/03/2020	162.597.715
4	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / AVANZA 1300 G Manual	Pinjam Pakai ke KODIM 0602 Serang	032/PPP/06/Tapem-BPKAD/VI/2025	30-06-2025	136.621.680
5	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14	Toyota / AVANZA 1300 G Manual	Pinjam Pakai Kendaraan	032/PPP/04/Tapem-BPKAD/VI/2025	21-05-2025	136.621.680



No	Instansi	Spesifikasi Barang	Merk/ Tipe	Bentuk Pemanfaatan/Mitra	Surat Perjanjian / Kontrak		Nilai Perolehan (Rp.)
		Nama Barang			Nomor	Tanggal	
		Orang Kebawah )					
6	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Avanza 1300 G Manual	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke BINDA Banten	032/PPP/03/TAPEM-BPKAD//2025, 003/NPHD/BINDABANTE	05/05/2025	136.621.680
7	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Kijang Innova E M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional		12/03/2020	218.690.430
8	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu / Xenia	Pinjam Pakai KE PMI		12/03/2020	131.307.100
9	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke BINDA Banten	032/PPP/02/TAPEM-BPKAD//2025, 02/NPHD/BINDABANTE	05/05/2025	129.340.000
10	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Avanza	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke BINDA Banten	032/PPP/01/TAPEM-BPKAD//2025, 001/NPHD/BINDABANTE	05/05/2025	168.210.000
11	SETDA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	New Kijang Innova G MT	Pinjam Pakai Ke PMI		12/03/2020	256.449.580
12	BPKAD	Jeep	Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T	Pinjam Pakai KDO TA. 2024	024/137/Aset-BPKAD/2024	19-11-2024	617.100.000
13	BPKAD	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA / Kijang LGX Grand Long KF 83	Pinjam Pakai Ke Kejaksaan Negeri Serang	024/Perj.1008-Huk/2018	12/04/2018	150.600.000
14	BPKAD	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai ke Kodim 0622 Serang	032/PPP/07/Tapem-BPKAD//2025	30-06-2025	468.022.500
15	BPKAD	Station Wagon	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai Ke Kapolres Serang Kota	024/Perj.1002-Huk/2018 - Mou/01/XI/2018	14-11-2018	468.022.500
16	BPKAD	Sport Utility Vehicle (SUV)	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai KODIM 0623 Cilegon	032/PPP/05/TAPEM-BPKAD//2025	21-05-2025	468.022.500
17	BPKAD	Sport Utility Vehicle (SUV)	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR -H (4X2) 8 A/T VIN 2018	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke KEJARI Serang	032/PPP.37/TAPEM-BPKAD/2023	27-12-2023	515.069.500
18	BPKAD	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Toyota / Kijang Inova 10 E	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke Kemenag Kab Serang	024/196/BPKAD/2025, 0647/KK.28.04.01/KS.01 .5/03/20	03/11/2025	191.830.833
19	BPKAD	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ (4X2) M/T	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Ke BAWASLU Kab. Serang	032/PPP.03/TAPEM-BPKAD/2023	17-04-2023	131.307.100
20	BPKAD	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	New Kijang Innova 2.0 G A/T Vin 2020	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional ke Kemenag Kab Serang	024/197/BPKAD/2025, 0644/KK.28.04.01/KS.01 .5/03/20	03/11/2025	328.000.000
21	BPKAD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Ki Tapa No. 33 Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24-09-2021	82.044.100
22	BPKAD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Ki Tapa No. 33 Cimuncang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24-09-2021	133.842.917
23	BPKAD	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	JL. Sama&#39;un Bakri Lopang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24-09-2021	77.250.500

No	Instansi	Spesifikasi Barang		Merk/ Tipe	Bentuk Pemanfaatan/Mitra	Surat Perjanjian / Kontrak		Nilai Perolehan (Rp.)
		Nama Barang				Nomor	Tanggal	
24	BPKAD	Gedung Pos Jaga Permanen		JL. Ki Tapa No. 33 Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24-09-2021	1.106.400
25	RSUD	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Beton		Benggala, Serang Kota Baru KOTA SERANG	Pengelolaan Lahan Parkir	14/PKS KSO-RSDP//2024	17-01-2024	50.399.999,00
26	RSUD	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Beton		Jl. Rumah Sakit No. 01 Kota Baru KOTA SERANG	Pengelolaan Lahan Parkir	14/PKS KSO-RSDP//2024	17-01-2024	227.892.896,00
27	SETDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan		Jl. Veteran No. 1 Kota Baru KOTA SERANG	Pemanfaatan Sebagian/Baik/ Aset Tetap	030/Perj.33-Huk.umum/2023 dan 007/KBN-PKS-VII/OPS/	25-08-2025	156.630.000,00
28	Kecamatan Ciomas	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka		Blok gunung sumbul persil 41 Citaman KAB. SERANG	Pemanfaatan Sebagian/Baik/ Aset Tetap	031/PPP.19.TAPEM-BPKAD/IX/2023	45147	0
29	Kecamatan Mancak	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan		Kp. Tangsi Labuan KAB. SERANG	Pemanfaatan Sebagian/Baik/ Aset Tetap	032/PKS.Sewa.26.TAPE M-BPKAD/X/2023	23-10-2023	90.000,00
<b>Total</b>								<b>5.892.226.610,00</b>

### 3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang nilainya tidak diukur dari wujud fisiknya. Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.038.784.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 107**  
**Aset Tak Berwujud per SKPD 2025 dan 2024**

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
<b>1</b>	<b>DISDIK</b>	<b>6.477.568.604,00</b>	<b>6.477.568.604,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	629.012.865,00	629.012.865,00	0,00
	Kajian	217.813.000,00	217.813.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.630.742.739,00	5.630.742.739,00	0,00
<b>2</b>	<b>DINKES</b>	<b>1.251.338.300,00</b>	<b>1.251.338.300,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	403.180.000,00	403.180.000,00	0,00
	Kajian	238.540.000,00	238.540.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	609.618.300,00	609.618.300,00	0,00
<b>3</b>	<b>RSUD</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
<b>4</b>	<b>DPUPR</b>	<b>43.371.026.701,00</b>	<b>43.371.026.701,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	91.696.000,00	91.696.000,00	0,00
	Kajian	43.279.330.701,00	43.279.330.701,00	0,00
<b>5</b>	<b>DPRKP</b>	<b>11.546.804.000,00</b>	<b>11.546.804.000,00</b>	<b>0,00</b>



No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
	Kajian	11.546.804.000,00	11.546.804.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>SATPOL PP</b>	<b>250.205.000,00</b>	<b>250.205.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	198.810.000,00	198.810.000,00	0,00
	Kajian	51.395.000,00	51.395.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>BPBD</b>	<b>869.000.000,00</b>	<b>869.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
	Kajian	819.500.000,00	819.500.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>DINSOS</b>	<b>29.782.000,00</b>	<b>29.782.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	29.782.000,00	29.782.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>46.264.500,00</b>	<b>46.264.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Kajian	31.264.500,00	31.264.500,00	0,00
<b>10</b>	<b>DKPP</b>	<b>359.427.090,00</b>	<b>359.427.090,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	21.192.600,00	21.192.600,00	0,00
	Kajian	338.234.490,00	338.234.490,00	0,00
<b>11</b>	<b>DLH</b>	<b>539.652.700,00</b>	<b>539.652.700,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	Kajian	348.194.000,00	348.194.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	174.458.700,00	174.458.700,00	0,00
<b>12</b>	<b>DISDUKCAPIL</b>	<b>842.400.989,00</b>	<b>842.400.989,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	842.400.989,00	842.400.989,00	0,00
<b>13</b>	<b>DPMD</b>	<b>99.440.000,00</b>	<b>99.440.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	99.440.000,00	99.440.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>DKBP3A</b>	<b>442.184.600,00</b>	<b>442.184.600,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	200.207.600,00	200.207.600,00	0,00
	Kajian	241.977.000,00	241.977.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>DISHUB</b>	<b>1.711.207.000,00</b>	<b>1.711.207.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	1.264.585.000,00	1.264.585.000,00	0,00
	Kajian	446.622.000,00	446.622.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>DISKOMINFO</b>	<b>228.483.667,00</b>	<b>228.483.667,00</b>	<b>0,00</b>
	Lisensi Dan Frenchise	214.240.043,00	214.240.043,00	0,00
	Hak Cipta	14.243.624,00	14.243.624,00	0,00
<b>17</b>	<b>DISKOPERINDAG</b>	<b>702.882.500,00</b>	<b>702.882.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	49.922.500,00	49.922.500,00	0,00
	Kajian	652.960.000,00	652.960.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>212.173.000,00</b>	<b>212.173.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Kajian	212.173.000,00	212.173.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>DISPORAPAR</b>	<b>162.547.500,00</b>	<b>162.547.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Kajian	162.547.500,00	162.547.500,00	0,00

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
<b>20</b>	<b>DPKD</b>	<b>59.851.944,00</b>	<b>59.851.944,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	59.851.944,00	59.851.944,00	0,00
<b>21</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Kajian	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
<b>22</b>	<b>SETDA</b>	<b>1.425.102.950,00</b>	<b>1.327.378.550,00</b>	<b>97.724.400,00</b>
	Software	882.023.550,00	882.023.550,00	0,00
	Kajian	445.355.000,00	445.355.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	97.724.400,00	0,00	97.724.400,00
<b>23</b>	<b>SETWAN</b>	<b>1.709.872.500,00</b>	<b>1.709.872.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Goodwill	180.000.000,00	324.972.500,00	(144.972.500,00)
	Software	324.972.500,00	1.105.000.000,00	(780.027.500,00)
	Kajian	1.105.000.000,00	99.900.000,00	1.005.100.000,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	99.900.000,00	180.000.000,00	(80.100.000,00)
<b>24</b>	<b>BAPPERIDA</b>	<b>8.209.453.690,00</b>	<b>8.209.453.690,00</b>	<b>0,00</b>
	Software	196.909.000,00	196.909.000,00	0,00
	Kajian	7.937.544.690,00	7.937.544.690,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>BPKAD</b>	<b>2.841.190.000,00</b>	<b>2.492.690.000,00</b>	<b>348.500.000,00</b>
	Software	2.792.240.000,00	2.443.740.000,00	348.500.000,00
	Kajian	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>109.890.000,00</b>	<b>59.940.000,00</b>	<b>49.950.000,00</b>
	Software	109.890.000,00	59.940.000,00	49.950.000,00
<b>27</b>	<b>BAPENDA</b>	<b>4.676.735.690,00</b>	<b>4.579.735.690,00</b>	<b>97.000.000,00</b>
	Software	3.902.027.530,00	3.805.027.530,00	97.000.000,00
	Kajian	774.708.160,00	774.708.160,00	0,00
<b>28</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>143.375.300,00</b>	<b>(143.375.300,00)</b>
	Software	0,00	143.375.300,00	(143.375.300,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>89.038.784.925,00</b>	<b>88.588.985.825,00</b>	<b>449.799.100,00</b>

#### 4. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp80.627.784.019,00 naik sebesar Rp12.040.459.536,00 jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp68.587.324.483,00. Rincian tiap SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 108**  
**Amortisasi Aset Tak Berwujud Per SKPD 2025 dan 2024**

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
<b>1</b>	<b>DISDIK</b>	<b>(845.575.865,00)</b>	<b>(844.325.865,00)</b>	(1.250.000,00)
	Software	(243.213.150,00)	(241.963.150,00)	(1.250.000,00)
	Kajian	(602.362.715,00)	(602.362.715,00)	0,00
<b>2</b>	<b>DINKES</b>	<b>(641.720.000,00)</b>	<b>(638.595.000,00)</b>	(3.125.000,00)
	Software	(403.180.000,00)	(400.055.000,00)	(3.125.000,00)
	Kajian	(238.540.000,00)	(238.540.000,00)	0,00
<b>3</b>	<b>RSUD</b>	<b>(14.300.000,00)</b>	<b>(14.300.000,00)</b>	0,00
	Software	(14.300.000,00)	(14.300.000,00)	0,00
<b>4</b>	<b>DPUPR</b>	<b>(43.371.026.701,00)</b>	<b>(31.847.421.710,00)</b>	(11.523.604.991,00)
	Software	(91.696.000,00)	(91.696.000,00)	0,00
	Kajian	(43.279.330.701,00)	(31.755.725.710,00)	(11.523.604.991,00)
<b>5</b>	<b>DPRKP</b>	<b>(11.546.804.000,00)</b>	<b>(11.507.502.500,00)</b>	(39.301.500,00)
	Kajian	(11.546.804.000,00)	(11.507.502.500,00)	(39.301.500,00)
<b>6</b>	<b>SATPOL PP</b>	<b>(250.205.000,00)</b>	<b>(250.205.000,00)</b>	0,00
	Software	(198.810.000,00)	(198.810.000,00)	0,00
	Kajian	(51.395.000,00)	(51.395.000,00)	0,00
<b>7</b>	<b>BPBD</b>	<b>(869.000.000,00)</b>	<b>(869.000.000,00)</b>	0,00
	Software	(49.500.000,00)	(49.500.000,00)	0,00
	Kajian	(819.500.000,00)	(819.500.000,00)	0,00
<b>8</b>	<b>DINSOS</b>	<b>(29.782.000,00)</b>	<b>(29.782.000,00)</b>	0,00
	Software	(29.782.000,00)	(29.782.000,00)	0,00
<b>9</b>	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>(46.264.500,00)</b>	<b>(46.264.500,00)</b>	0,00
	Software	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	0,00
	Kajian	(31.264.500,00)	(31.264.500,00)	0,00
<b>10</b>	<b>DKPP</b>	<b>(359.427.090,00)</b>	<b>(190.309.845,00)</b>	(169.117.245,00)
	Software	(21.192.600,00)	(21.192.600,00)	0,00
	Kajian	(338.234.490,00)	(169.117.245,00)	(169.117.245,00)
<b>11</b>	<b>DLH</b>	<b>(365.194.000,00)</b>	<b>(365.194.000,00)</b>	0,00
	Software	(17.000.000,00)	(17.000.000,00)	0,00
	Kajian	(348.194.000,00)	(348.194.000,00)	0,00
<b>12</b>	<b>DISDUKCAPIL</b>	<b>(842.400.989,00)</b>	<b>(842.400.989,00)</b>	0,00
	Software	(842.400.989,00)	(842.400.989,00)	0,00
<b>13</b>	<b>DPMD</b>	<b>(99.440.000,00)</b>	<b>(99.440.000,00)</b>	0,00



No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
	Software	(99.440.000,00)	(99.440.000,00)	0,00
<b>14</b>	<b>DKBP3A</b>	<b>(442.184.600,00)</b>	<b>(442.184.600,00)</b>	0,00
	Software	(200.207.600,00)	(200.207.600,00)	0,00
	Kajian	(241.977.000,00)	(241.977.000,00)	0,00
<b>15</b>	<b>DISHUB</b>	<b>(1.711.207.000,00)</b>	<b>(1.711.207.000,00)</b>	0,00
	Software	(1.264.585.000,00)	(1.264.585.000,00)	0,00
	Kajian	(446.622.000,00)	(446.622.000,00)	0,00
<b>16</b>	<b>DISKOPERINDAG</b>	<b>(702.882.500,00)</b>	<b>(702.882.500,00)</b>	0,00
	Software	(49.922.500,00)	(49.922.500,00)	0,00
	Kajian	(652.960.000,00)	(652.960.000,00)	0,00
<b>17</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>(212.173.000,00)</b>	<b>(212.173.000,00)</b>	0,00
	Kajian	(212.173.000,00)	(212.173.000,00)	0,00
<b>18</b>	<b>DISPORAPAR</b>	<b>(162.547.500,00)</b>	<b>(162.547.500,00)</b>	0,00
	Kajian	(162.547.500,00)	(162.547.500,00)	0,00
<b>19</b>	<b>DPKD</b>	<b>(59.851.944,00)</b>	<b>(59.851.944,00)</b>	0,00
	Software	(59.851.944,00)	(59.851.944,00)	0,00
<b>20</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>(850.000.000,00)</b>	<b>(750.000.000,00)</b>	(100.000.000,00)
	Kajian	(850.000.000,00)	(750.000.000,00)	(100.000.000,00)
<b>21</b>	<b>SETDA</b>	<b>(1.351.809.650,00)</b>	<b>(1.327.378.550,00)</b>	(24.431.100,00)
	Software	(906.454.650,00)	(882.023.550,00)	(24.431.100,00)
	Kajian	(445.355.000,00)	(445.355.000,00)	0,00
<b>22</b>	<b>SETWAN</b>	<b>(1.609.972.500,00)</b>	<b>(1.591.972.500,00)</b>	(18.000.000,00)
	Lisensi Dan Frenchise	(180.000.000,00)	(162.000.000,00)	(18.000.000,00)
	Software	(324.972.500,00)	(324.972.500,00)	0,00
	Kajian	(1.105.000.000,00)	(1.105.000.000,00)	0,00
<b>23</b>	<b>BAPPERIDA</b>	<b>(8.134.453.690,00)</b>	<b>(8.134.453.690,00)</b>	0,00
	Software	(196.909.000,00)	(196.909.000,00)	0,00
	Kajian	(7.937.544.690,00)	(7.937.544.690,00)	0,00
<b>24</b>	<b>BPKAD</b>	<b>(1.878.575.000,00)</b>	<b>(1.717.700.000,00)</b>	(160.875.000,00)
	Software	(1.829.625.000,00)	(1.668.750.000,00)	(160.875.000,00)
	Kajian	(48.950.000,00)	(48.950.000,00)	0,00
<b>25</b>	<b>BAPENDA</b>	<b>(4.178.538.990,00)</b>	<b>(4.061.881.490,00)</b>	(116.657.500,00)
	Software	(3.403.830.830,00)	(3.287.173.330,00)	(116.657.500,00)
	Kajian	(774.708.160,00)	(774.708.160,00)	0,00
<b>26</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>(52.447.500,00)</b>	<b>(24.975.000,00)</b>	(27.472.500,00)

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
	Software	(52.447.500,00)	(24.975.000,00)	(27.472.500,00)
<b>27</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.375.300,00)</b>	143.375.300,00
	Software	143.375.300,00	0,00	143.375.300,00
	Kajian	(143.375.300,00)	(143.375.300,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(80.627.784.019,00)</b>	<b>(68.587.324.483,00)</b>	<b>(12.040.459.536,00)</b>

## 5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp656.698.184.308,06 naik sebesar Rp187.809.807.164,48 jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp468.888.377.143,58. Rincian tiap SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 109**  
**Aset Lain-Lain Per SKPD 2025 dan 2024**

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	264.991.107.122,08	21.228.344.559,00	243.762.762.563,08
2	DINKES	36.585.325.089,08	5.169.174.205,00	31.416.150.884,08
3	RSUD	16.249.152.425,47	2.349.889.650,00	13.899.262.775,47
4	DPUPR	120.855.744.068,66	294.514.013.318,58	(173.658.269.249,92)
5	DPKTB	102.406.266.394,67	101.408.617.619,00	997.648.775,67
6	SATPOL PP	209.758.974,00	12.909.675,00	196.849.299,00
7	BPBD	3.215.911.618,00	417.281.742,00	2.798.629.876,00
8	DINSOS	895.204.028,00	218.861.500,00	676.342.528,00
9	DISNAKERTRANS	1.639.157.524,39	151.754.000,00	1.487.403.524,39
10	DKPP	6.581.772.032,00	938.095.111,00	5.643.676.921,00
11	DLH	3.044.895.006,00	748.250.000,00	2.296.645.006,00
12	DISDUKCAPIL	1.694.138.155,00	16.637.610,00	1.677.500.545,00
13	DPMD	630.636.525,00	0,00	630.636.525,00
14	DKBP3A	1.748.767.993,00	31.975.000,00	1.716.792.993,00
15	DISHUB	8.614.261.693,00	262.536.400,00	8.351.725.293,00
16	DISKOMINFO	513.163.343,00	504.443.313,00	8.720.030,00
17	DISKOPERINDAG	2.676.758.252,00	43.000.000,00	2.633.758.252,00
18	DPMPSTP	1.232.122.479,00	0,00	1.232.122.479,00
19	DISPORAPAR	822.520.001,00	679.000.001,00	143.520.000,00
20	DPKD	909.952.760,00	131.940.000,00	778.012.760,00
21	DISKAN	7.963.930.577,18	0,00	7.963.930.577,18
22	SETDA	28.499.791.144,00	15.822.252.914,00	12.677.538.230,00
23	SETWAN	6.823.523.301,00	1.677.052.145,00	5.146.471.156,00



No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
24	BAPPERIDA	641.544.603,40	5.100.000,00	636.444.603,40
25	BAPENDA	2.826.615.564,87	0,00	2.826.615.564,87
26	BPKAD	23.512.500.609,00	22.116.989.596,00	1.395.511.013,00
27	BKPSDM	357.889.431,95	0,00	357.889.431,95
28	Inspektorat	1.238.136.437,00	0,00	1.238.136.437,00
29	Kec. Anyar	238.279.050,00	19.305.000,00	218.974.050,00
30	Kec. Bandung	224.149.076,00	1.500.000,00	222.649.076,00
31	Kec. Baros	214.216.318,03	0,00	214.216.318,03
32	Kec. Binuang	901.966.458,33	14.615.000,00	887.351.458,33
33	Kec. Bojonegara	592.642.217,00	31.889.000,00	560.753.217,00
34	Kec. Carenang	252.207.800,00	25.886.000,00	226.321.800,00
35	Kec. Cikande	583.781.916,00	0,00	583.781.916,00
36	Kec. Cikeusal	60.927.023,00	9.554.000,00	51.373.023,00
37	Kec. Cinangka	114.312.000,00	38.514.000,00	75.798.000,00
38	Kec. Ciomas	144.458.780,00	0,00	144.458.780,00
39	Kec. Ciruas	223.880.997,00	9.554.000,00	214.326.997,00
40	Kec. Gunungsari	329.318.366,00	9.650.000,00	319.668.366,00
41	Kec. Jawilan	177.538.961,95	9.655.000,00	167.883.961,95
42	Kec. Kopo	422.214.285,00	3.486.785,00	418.727.500,00
43	Kec. Kragilan	825.091.476,00	0,00	825.091.476,00
44	Kec. Kramatwatu	344.617.364,00	19.300.000,00	325.317.364,00
45	Kec. Lebak Wangi	62.039.700,00	17.950.000,00	44.089.700,00
46	Kec. Mancak	235.963.300,00	28.854.000,00	207.109.300,00
47	Kec. Pabuaran	379.136.000,00	9.554.000,00	369.582.000,00
48	Kec. Padarincang	453.860.540,00	12.685.000,00	441.175.540,00
49	Kec. Pamarayan	465.390.039,00	45.628.000,00	419.762.039,00
50	Kec. Petir	200.227.547,00	9.650.000,00	190.577.547,00
51	Kec. Pontang	268.055.235,00	35.185.000,00	232.870.235,00
52	Kec. Pulo Ampel	455.298.350,00	32.025.000,00	423.273.350,00
53	Kec. Tanara	189.095.662,00	0,00	189.095.662,00
54	Kec. Tirtayasa	194.453.825,00	36.854.000,00	157.599.825,00
55	Kec. Tunjung Teja	186.162.750,00	18.965.000,00	167.197.750,00
56	Kec. Waringinkurung	357.676.250,00	0,00	357.676.250,00
57	Badan KESBANGPOL	220.675.870,00	0,00	220.675.870,00
<b>Jumlah</b>		<b>656.698.184.308,06</b>	<b>468.888.377.143,58</b>	<b>187.809.807.164,48</b>

Sebagian Aset lain-lain pada BPKAD sebesar Rp23.512.500.609,00 timbul dari pembayaran atas pengadaan tanah yang dikonsinyasikan

kepada Pengadilan Negeri Serang dan sudah ada penetapan konsinyasinya namun sampai dengan akhir tahun 2025 belum ada surat pelepasan hak atas kepemilikan tanah dari BPN Kabupaten Serang sehingga aset tanah tersebut belum dapat diakui oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

**Tabel 110**  
**Daftar Konsinyasi Tanah Tahun 2025**

No	Tahun Konsinyasi	Bidang	Luas	Hasil Penilaian KJPP Tahun 2018	Harga Per Meter	Dibayar PN	Dibayar Pemda	Jumlah	Harga Per Meter Putusan PN	Keterangan
1	2020	2	2.961	722.086.237	243.866	722.086.237	610.363.763	1.332.450.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
2	2020	4	1.721	446.959.248	259.709	446.959.248	327.490.752	774.450.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
3	2020	7	831	197.061.260	237.137	197.061.260	176.888.740	373.950.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
4	2020	9	8.859	2.249.573.596	253.931	2.249.573.596	1.736.976.404	3.986.550.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
5	2020	10	412	91.718.421	222.618	91.718.421	93.681.579	185.400.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
6	2020	11	8.643	2.877.647.203	332.945	2.877.647.203	1.011.702.797	3.889.350.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
7	2020	15	1.240	318.245.339	256.649	318.245.339	239.754.661	558.000.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
8	2020	19	1.373	353.401.469	257.394	353.401.469	264.448.531	617.850.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
9	2020	26	4.661	1.377.990.119	295.643	1.377.990.119	719.459.881	2.097.450.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
10	2020	48	4.864	1.239.718.249	254.876	1.239.718.249	949.081.751	2.188.800.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
11	2020	49	3.371	862.091.119	255.738	862.091.119	654.858.881	1.516.950.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
12	2020	50	3.729	926.301.028	248.405	926.301.028	751.748.972	1.678.050.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
13	2020	51	1.420	343.682.402	242.030	343.682.402	295.317.598	639.000.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
14	2020	55	1.761	444.511.459	252.420	444.511.459	347.938.541	792.450.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
15	2020	70	1.829	538.867.326	294.624	538.867.326	284.182.674	823.050.000	450.000	sudah putusan PN./Realisasi 2020
16	2020	1	478	103.711.028	216.969	103.711.028				sudah putusan PN./belum realisasi
17	2020	3	3.421	809.281.569	236.563	809.281.569				belum berproses sidang
18	2020	6	1.339	323.286.614	241.439	323.286.614				belum berproses sidang
19	2020	8	2.773	673.361.401	242.828	673.361.401				belum berproses sidang
20	2020	13	2.747	750.744.338	273.296	750.744.338				belum berproses



No	Tahun Konsinyasi	Bidang	Luas	Hasil Penilaian KJPP Tahun 2018	Harga Per Meter	Dibayar PN	Dibayar Pemda	Jumlah	Harga Per Meter Putusan PN	Keterangan
										sidang
21	2020	16	1.357	349.130.480	257.281	349.130.480				belum berproses sidang
22	2020	17	3.022	785.311.883	259.865	785.311.883	574.588.117	1.359.900.000	450.000	sudah putusan PN/realisasi 2025, gugat harga
23	2020	18	2.399	614.730.267	256.244	614.730.267	-	614.730.267	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
24	2020	23	4.492	1.391.801.277	309.840	1.391.801.277				belum berproses sidang
25	2020	24	1.722	516.446.091	299.911	516.446.091	-	516.446.091	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
26	2020	25	9.259	2.757.205.330	297.787	2.757.205.330				belum berproses sidang
27	2020	27	2.869	837.264.887	291.832	837.264.887				Sedang berproses Sidang
28	2020	28	2.504	643.197.004	256.868	643.197.004				belum berproses sidang
29	2020	29	2.594	584.442.932	225.306	584.442.932				belum berproses sidang
30	2020	30	4.253	1.103.216.841	259.397	1.103.216.841				belum berproses sidang
31	2020	31	1.018	259.276.823	254.692	259.276.823	198.823.177	458.100.000	450.000	sudah putusan PN/realisasi 2025, gugat harga
32	2020	63	2.122	506.478.076	238.680	506.478.076				sudah putusan PN/belum realisasi
33	2022	20	1.977	516.584.489	261.297	516.584.489	-	516.584.489	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
34	2022	21	678	159.618.123	235.425	159.618.123				belum berproses sidang
35	2022	22	907	215.759.426	237.882	215.759.426				belum berproses sidang
36	2022	33	13.158	4.521.786.039	343.653	4.521.786.039				belum berproses sidang
37	2022	35	1.846	583.642.266	316.166	583.642.266				belum berproses sidang
38	2022	36	2.428	757.363.348	311.929	757.363.348				belum berproses sidang
39	2022	37	937	252.227.014	269.186	252.227.014				belum berproses sidang
40	2022	39	2.825	803.625.533	284.469	803.625.533				belum berproses sidang
41	2022	43	1.918	563.306.478	293.695	563.306.478				belum berproses sidang
42	2022	45	2.718	810.898.310	298.344	810.898.310	-	810.898.310	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
43	2022	46	1.183	284.214.048	240.249	284.214.048				belum berproses sidang
44	2022	47	5.062	1.295.843.351	255.994	1.295.843.351	-	1.295.843.351	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
45	2022	52	4.085	1.054.882.206	258.233	1.054.882.206	783.367.794	1.838.250.000	450.000	sudah putusan PN/realisasi 2025, gugat harga
46	2022	53	1.841	450.874.698	244.907	450.874.698	-	450.874.698	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
47	2022	54	877	201.231.767	229.455	201.231.767				Sedang berproses Sidang



No	Tahun Konsinyasi	Bidang	Luas	Hasil Penilaian KJPP Tahun 2018	Harga Per Meter	Dibayar PN	Dibayar Pemda	Jumlah	Harga Per Meter Putusan PN	Keterangan
48	2022	56	920	218.964.366	238.005	218.964.366				belum berproses sidang
49	2022	57	2.333	677.257.747	290.295	677.257.747				Sedang berproses Sidang
50	2022	59	1.063	287.225.488	270.203	287.225.488				belum berproses sidang
51	2022	61	2.598	585.409.440	225.331	585.409.440				belum berproses sidang
52	2022	62	1.589	411.323.015	258.857	411.323.015				belum berproses sidang
53	2022	65	2.701	830.136.536	307.344	830.136.536	-	830.136.536	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
54	2022	66	772	232.924.444	301.716	232.924.444				belum berproses sidang
55	2022	67	2.811	865.753.020	307.988	865.753.020				belum berproses sidang
56	2022	68	1.572	508.333.059	323.367	508.333.059				belum berproses sidang
57	2022	69	1.343	365.541.653	272.183	365.541.653				belum berproses sidang
58	2022	71	2.890	847.934.225	293.403	847.934.225	-	847.934.225	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
59	2022	72	452	112.071.155	247.945	112.071.155				belum berproses sidang
60	2022	73	3.288	834.661.104	253.851	834.661.104	644.938.896	1.479.600.000	450.000	sudah putusan PN/realisasi 2025, gugat harga
61	2022	74	910	262.256.036	288.193	262.256.036				Sedang berproses Sidang
62	2022	75	647	194.275.037	300.271	194.275.037	-	194.275.037	-	sudah putusan PN/realisasi 2025, tanpa gugat harga
63	2022	76	1.055	300.369.626	284.711	300.369.626				Sedang berproses Sidang
64	2022	77	461	117.848.923	255.638	117.848.923				Sedang berproses Sidang
65	2022	79	3.428	898.612.637	262.139	898.612.637				belum berproses sidang
66	2022	81	1.782	460.796.425	258.584	460.796.425				belum berproses sidang
67	2022	5	184	45.734.444	248.557	45.734.444	37.065.556	82.800.000	450.000	Sudah Putusan PN/Realisasi 2024, gugat harga
68	2022	12	440	130.642.904	296.916	130.642.904	67.357.096	198.000.000	450.000	Sudah Putusan PN/Realisasi 2024, gugat harga
69	2022	82	615	154.062.340	250.508	154.062.340	122.687.660	276.750.000	450.000	Sudah Putusan PN/Realisasi 2024, gugat harga
<b>Jumlah</b>			<b>172.338</b>	<b>47.812.732.036</b>		<b>47.812.732.036</b>	<b>10.892.723.821</b>	<b>33.224.873.004</b>		

## 6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp476.703.011.238,69 naik sebesar Rp284.587.632.895,51 jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp192.115.378.343,18. Rincian tiap SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 111**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD**

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	(248.120.392.559,21)	(6.875.890.975,77)	(241.244.501.583,44)
2	DINKES	(34.875.620.784,40)	(3.737.603.407,72)	(31.138.017.376,68)
3	RSUD	(16.126.425.308,47)	(2.349.889.650,00)	(13.776.535.658,47)
4	DPUPR	(99.201.358.925,97)	(171.926.543.426,94)	72.725.184.500,97
5	DPKTB	(1.753.517.736,17)	(764.815.699,98)	(988.702.036,19)
6	SATPOL PP	(202.761.632,00)	(12.909.675,00)	(189.851.957,00)
7	BPBD	(3.203.911.767,30)	(409.281.742,00)	(2.794.630.025,30)
8	DINSOS	(866.064.028,00)	(169.221.500,00)	(696.842.528,00)
9	DISNAKERTRANS	(1.484.103.524,39)	0,00	(1.484.103.524,39)
10	DKPP	(6.581.772.032,00)	(938.095.111,00)	(5.643.676.921,00)
11	DLH	(2.296.645.006,00)	0,00	(2.296.645.006,00)
12	DISDUKCAPIL	(1.692.928.155,00)	(16.637.610,00)	(1.676.290.545,00)
13	DPMD	(629.136.525,00)	0,00	(629.136.525,00)
14	DKBP3A	(1.714.350.924,58)	0,00	(1.714.350.924,58)
15	DISHUB	(8.501.612.793,00)	(155.464.500,00)	(8.346.148.293,00)
16	DISKOMINFO	(501.523.703,25)	(492.803.673,25)	(8.720.030,00)
17	DISKOPERINDAG	(2.612.501.109,15)	0,00	(2.612.501.109,15)
18	DPMPTSP	(1.232.122.479,00)	0,00	(1.232.122.479,00)
19	DISPORAPAR	(139.245.000,00)	0,00	(139.245.000,00)
20	DPKD	(761.507.760,00)	0,00	(761.507.760,00)
21	DISKAN	(7.932.362.577,18)	0,00	(7.932.362.577,18)
22	SETDA	(12.911.626.683,38)	(1.244.780.974,58)	(11.666.845.708,80)
23	SETWAN	(6.821.963.301,00)	(1.677.052.145,00)	(5.144.911.156,00)
24	BAPPERIDA	(596.073.603,40)	0,00	(596.073.603,40)
25	BAPENDA	(2.805.367.398,22)	0,00	(2.805.367.398,22)
26	BPKAD	(2.349.639.977,37)	(936.284.466,94)	(1.413.355.510,43)
27	BKPSDM	(353.943.231,95)	0,00	(353.943.231,95)
28	Inspektorat	(1.236.696.437,00)	0,00	(1.236.696.437,00)
29	Kec. Anyar	(231.550.478,58)	(19.305.000,00)	(212.245.478,58)
30	Kec. Bandung	(207.201.576,00)	(1.500.000,00)	(205.701.576,00)
31	Kec. Baros	(214.216.318,03)	0,00	(214.216.318,03)
32	Kec. Binuang	(897.404.315,48)	(14.615.000,00)	(882.789.315,48)
33	Kec. Bojonegara	(592.037.217,00)	(31.889.000,00)	(560.148.217,00)
34	Kec. Carenang	(252.207.800,00)	(25.886.000,00)	(226.321.800,00)
35	Kec. Cikande	(583.176.916,00)	0,00	(583.176.916,00)
36	Kec. Cikeusal	(60.927.023,00)	(9.554.000,00)	(51.373.023,00)
37	Kec. Cinangka	(114.312.000,00)	(38.514.000,00)	(75.798.000,00)
38	Kec. Ciomas	(143.346.140,00)	0,00	(143.346.140,00)

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
39	Kec. Ciruas	(223.880.997,00)	(9.554.000,00)	(214.326.997,00)
40	Kec. Gunungsari	(328.713.366,00)	(9.650.000,00)	(319.063.366,00)
41	Kec. Jawilan	(167.883.961,95)	0,00	(167.883.961,95)
42	Kec. Kopo	(422.214.285,00)	(3.486.785,00)	(418.727.500,00)
43	Kec. Kragilan	(825.091.476,00)	0,00	(825.091.476,00)
44	Kec. Kramatwatu	(342.012.364,00)	(19.300.000,00)	(322.712.364,00)
45	Kec. Lebak Wangi	(62.039.700,00)	(17.950.000,00)	(44.089.700,00)
46	Kec. Mancak	(235.358.300,00)	(28.854.000,00)	(206.504.300,00)
47	Kec. Pabuaran	(378.031.000,00)	(9.554.000,00)	(368.477.000,00)
48	Kec. Padarincang	(446.450.540,00)	(12.685.000,00)	(433.765.540,00)
49	Kec. Pamarayan	(464.785.039,00)	(45.628.000,00)	(419.157.039,00)
50	Kec. Petir	(197.908.261,26)	(9.650.000,00)	(188.258.261,26)
51	Kec. Pontang	(225.000.595,00)	(12.685.000,00)	(212.315.595,00)
52	Kec. Pulo Ampel	(455.298.350,00)	(32.025.000,00)	(423.273.350,00)
53	Kec. Tanara	(179.658.412,00)	0,00	(179.658.412,00)
54	Kec. Tirtayasa	(194.453.825,00)	(36.854.000,00)	(157.599.825,00)
55	Kec. Tunjung Teja	(186.162.750,00)	(18.965.000,00)	(167.197.750,00)
56	Kec. Waringinkurung	(353.105.000,00)	0,00	(353.105.000,00)
57	Badan KESBANGPOL	(213.408.270,00)	0,00	(213.408.270,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(476.703.011.238,69)</b>	<b>(192.115.378.343,18)</b>	<b>(284.587.632.895,51)</b>

## 7. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2025 adalah nihil.

### 5.7.5. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan aset berwujud yang dikelompokkan dalam akun investasi. Properti investasi disajikan sebagai aset tidak lancar karena akan digunakan lebih dari satu tahun setelah akhir periode pelaporan. Properti yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Properti investasi dapat berupa tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan.

Pada TA 2025 nilai Properti Investasi sebesar Rp245.178.545.141,84 terdiri dari properti investasi tanah sebesar Rp165.793.032.269,00, properti investasi bangunan gedung sebesar Rp 96.686.164.870,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp17.300.651.997,16 terjadi kenaikan sebesar Rp219.875.305.199,84 jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp25.303.239.942,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	OPD	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Properti Investasi Tanah	DISDIK	594.450.000,00	594.450.000,00	0,00
		RSUD	1.046.954.000,00	1.046.954.000,00	0,00
		DPUPR	115.804.000,00	115.804.000,00	0,00
		DPRKP	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
		BPBD	404.650.000,00	404.650.000,00	0,00
		DISNAKERTRANS	0,00	3.731.827.022,00	(3.731.827.022,00)
		DKPP	3.344.697.400,00	3.344.697.400,00	0,00
		DISPORAPAR	0,00	1.539.040.000,00	(1.539.040.000,00)
		DINAS PERIKANAN	492.240.000,00	492.240.000,00	0,00
		SETDA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
		BPKAD	157.794.236.869,00	11.880.062.000,00	145.914.174.869,00
<b>Total Properti Investasi Tanah</b>			<b>165.793.032.269,00</b>	<b>25.149.724.422,00</b>	<b>140.643.307.847,00</b>
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	RSUD	159.912.000,00	159.912.000,00	0,00
		BPKAD	96.526.252.870,00	0,00	96.526.252.870,00
<b>Total Properti Investasi Gedung dan Bangunan</b>			<b>96.686.164.870,00</b>	<b>159.912.000,00</b>	<b>96.526.252.870,00</b>
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	RSUD	(9.594.720,00)	(6.396.480,00)	(3.198.240,00)
		BPKAD	(17.291.057.277,16)	0,00	(17.291.057.277,16)
<b>Total Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</b>			<b>(17.300.651.997,16)</b>	<b>(6.396.480,00)</b>	<b>(17.294.255.517,16)</b>
<b>Jumlah</b>			<b>245.178.545.141,84</b>	<b>25.303.239.942,00</b>	<b>219.875.305.199,84</b>

Kenaikan nilai Properti Investasi pada Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh adanya pencatatan objek aset baru yang memenuhi kriteria properti investasi. Diantaranya berupa aset yang disewakan kepada pihak ketiga, yaitu Tanah Hutan Wisata di wilayah Batu Kuwung, Kabupaten Serang, senilai Rp351.000.000,00 yang disewakan kepada PT Pemandian Air Panas Batu Kuwung (Surat Perjanjian Nomor 032/PerjanjianSewa.04-TAPEM-BPKAD/IV/2025, 01/PAKB), serta Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan senilai Rp425.856.000,00 yang disewakan kepada Yayasan Pandu Pertiwi (Surat Perjanjian Nomor 032/PKS.14.TAPEM-BPKAD/VIII/2023). Selain itu, terdapat reklasifikasi atau pencatatan baru yang berasal dari pengalihan aset PT. Waskita Beton Precast. Tbk yang terletak di wilayah Kecamatan Bojonegara yang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2025, yang terdiri atas aset tanah sebesar Rp165.793.032.271,00 dan aset bangunan gedung sebesar Rp96.366.340.870,00. Adapun untuk rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 112**  
**Rincian Properti Investasi**

No	OPD	Nama Aset	Nominal
1	BPBD	Lahan Kosong u/ Pos Jaga DAMKAR	404.650.000,00
2	BPKAD	Tanah Kosong Eks Pasar Padarincang (bid. 1 & 2)	394.200.000,00
3	BPKAD	Tanah Kosong eks BBI Pabuaran	12.500.000,00
4	BPKAD	Sawah Sukajaya	10.029.150.000,00
5	BPKAD	Lapangan Sentul SDN 5 Kragilan + Sawah	324.810.000,00
6	BPKAD	Tanah Kosong Eks u/ SMA Wr. Kurung	693.546.000,00
7	BPKAD	Lahan Fasos Fasum Pendidikan yang disewakan ke Yayasan Pandu Pertiwi	425.856.000,00
8	BPKAD	Tanah Hutan Wisata yang disewakan ke PT Batukuwung	351.000.000,00
9	BPKAD	Tanah Bangunan Industri dari PT Waskita	140.292.307.847,00
10	BPKAD	Bangunan Gedung dari PT Waskita	96.526.252.870,00
11	BPKAD	Pesanggrahan Pasauran (bid. 1, 2 & 3)	1.539.040.000,00
12	DKPP	Tanah sawah BPP Citasuk	372.900.000,00
13	DKPP	Tanah sawah Cigelam (bid. 1)	2.430.883.000,00
14	DKPP	Tanah sawah Cigelam (bid. 2)	110.484.400,00
15	DKPP	Tanah sawah BPP Singamerta	430.430.000,00
16	DPUPR	Lahan Cold Storage	45.804.000,00
17	DPUPR	Sawah Kampung Baru	70.000.000,00
18	DISKAN	Tambak Ikan Linduk	492.240.000,00
19	SETDA	Tanah Kosong Eks Peruntukan Madrasah	250.000.000,00
20	DISDIK	Lahan Kosong Eks u/ SMAN Tj. Teja	594.450.000,00
21	BPKAD	Tanah Kosong eks u/ BLK	3.731.827.022,00
22	DPRKP	PSU Cikande Permai	1.750.000.000,00
23	RSUD	Tanah Rumah Sakit yang disewakan sebagai lahan parkir ke PT. Haris Banten Makmur	359.594.000,00
24	RSUD	Eks Gudang Perlengkapan Dinkes (Existing Gd. MCU)	687.360.000,00
25	RSUD	Bangunan Kantin 6 Kios Ex.Koperasi Dinkes Kab.Serang	159.912.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>262.479.197.139,00</b>

### 5.8. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang mempunyai Kewajiban Jangka Pendek yang akan dibayar dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp118.834.816.484,87 turun sebesar Rp29.522.888.602,80 jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp148.357.705.087,67. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 113**  
**Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	20.914.306,00	(20.914.306,00)
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima di Muka	11.308.327.658,99	9.712.249.528,69	1.596.078.130,30
4	Utang Belanja	107.524.384.971,88	136.731.025.889,98	(29.206.640.918,10)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.103.854,00	1.893.515.363,00	(1.891.411.509,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>118.834.816.484,87</b>	<b>148.357.705.087,67</b>	<b>(29.522.888.602,80)</b>

#### 5.8.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 adalah nihil

#### 5.8.2. Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2025 adalah nihil

#### 5.8.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.308.327.658,99 naik sebesar Rp1.596.078.130,30 atau 16,43% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp9.712.249.528,69. Pendapatan diterima dimuka merupakan Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp8.921.692.616,99 dan Pendapatan Pajak Daerah pada Bapenda sebesar Rp2.386.635.042,00. rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut:

**Tabel 114**  
**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

No	SKPD	SKPD	2025	2024
1	BANK BJB - Sewa Lahan Jangka Waktu 64 Bulan	RSUD	180.000.000,00	270.000.000,00
2	Yayasan Pandu Pertiwi	BPKAD	48.247.771,51	48.115.946,99
3	Kantor Kas Bank BJB	BPKAD	0,00	68.983.150,68
4	BANK BJB - Sewa Lahan ATM	BPKAD	0,00	85.929.863,01
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	BPKAD	278.640.000,00	0,00
6	Tanah Persil	BPKAD	105.878.005,48	0,00
7	Pendapatan Retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	DPMPSTP	8.308.926.840,00	7.479.861.632,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	BAPENDA	2.386.635.042,00	1.759.358.936,00
	<b>Jumlah</b>		<b>11.308.327.658,99</b>	<b>9.712.249.528,69</b>

#### 5.8.4. Utang Belanja

Utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp107.524.384.971,88 turun sebesar Rp29.206.640.918,10 atau 21,36% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp136.731.025.889,98. Utang Belanja merupakan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, utang

belanja hibah, belanja bansos dan belanja transfer. Rincian utang belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 115**  
**Rincian Utang Belanja Tahun 2025 per SKPD**

SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Hibah	Utang Transfer	Jumlah Utang
DISDIK	0	17.434.403,00	327.296.462,00	0	0	344.730.865,00
DINKES	0	261.077.756,00	490.770.643,00	0	0	751.848.399,00
RSUD	142.468.144,00	14.656.050.560,00	0	0	0	14.798.518.704,00
DPUPR	0	9.732.518.900,14	3.187.450.136,40	53.742.543,34	0	12.973.711.579,88
DPRKP	0	490.285.630,00	81.850.285,00	0	0	572.135.915,00
SATPOL PP	0	3.207.820,00	0	0	0	3.207.820,00
BPBD	0	19.059.828,00	0	0	0	19.059.828,00
DINSOS	0	7.943.477,00	0	0	0	7.943.477,00
DISNAKERTRANS	0	13.261.776,00	0	0	0	13.261.776,00
DKPP	0	41.911.401,00	0	0	0	41.911.401,00
DLH	0	1.371.845.931,00	0	0	0	1.371.845.931,00
DISDUKCAPIL	0	19.585.531,00	0	0	0	19.585.531,00
DPMD	0	6.402.501,00	0	0	0	6.402.501,00
DKBP3A	0	5.784.077,00	0	0	0	5.784.077,00
DISHUB	0	326.018.068,00	359.906.400,00	0	0	685.924.468,00
DISKOMINFOSATIK	0	1.170.283.996,00	4.700.317,00	0	0	1.174.984.313,00
DISKOPERINDAG	0	24.122.282,00	0	0	0	24.122.282,00
DPMPSTP	0	32.068.322,00	7.326.000,00	0	0	39.394.322,00
DISPORAPAR	0	7.259.246,00	0	0	0	7.259.246,00
DPKD	0	6.198.449,00	0	0	0	6.198.449,00
DINAS PERIKANAN	0	1.150.312,00	0	0	0	1.150.312,00
SETDA	0	81.060.256,00	0	0	0	81.060.256,00
SETWAN	0	19.353.799,00	0	0	0	19.353.799,00
BAPPEDA LITBANG	0	38.357,00	0	0	0	38.357,00
BAPENDA	0	42.071.091,00	0	0	0	42.071.091,00
BPKAD	0	10.180.003,00	0	0	74.471.587.265,00	74.481.767.268,00
BKPSDM	0	12.293.151,00	0	0	0	12.293.151,00
Inspektorat	0	11.134.205,00	0	0	0	11.134.205,00
Kec. Anyar	0	2.340.834,00	0	0	0	2.340.834,00
Kec. Bandung	0	0	0	0	0	0
Kec Baros	0	0	0	0	0	0
Kec. Binuang	0	0	0	0	0	0
Kec. Bojonegoro	0	0	0	0	0	0
Kec. Carenang	0	0	0	0	0	0
Kec. Cikande	0	0	0	0	0	0



SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Hibah	Utang Transfer	Jumlah Utang
Kec. Cikeusul	0	0	0	0	0	0
Kec. Cinangka	0	0	0	0	0	0
Kec. Ciomas	0	0	0	0	0	0
Kec. Ciruas	0	0	0	0	0	0
Kec. Gunungsari	0	0	0	0	0	674.492,00
Kec. Jawilan	0	0	0	0	0	0
Kec. Lebak Wangi	0	0	0	0	0	0
Kec. Mancak	0	0	0	0	0	0
Kec. Kibin	0	0	0	0	0	0
Kec. Kopo	0	2.642.201,00	0	0	0	2.642.201,00
Kec. Kragilan	0	0	0	0	0	0
Kec. Kramatwatu	0	0	0	0	0	0
Kec. Pabuaran	0	0	0	0	0	0
Kec. Pamarayan	0	0	0	0	0	0
Kec. Padarincang	0	0	0	0	0	0
Kec. Pulo Ampel	0	0	0	0	0	0
Kec. Petir	0	0	0	0	0	0
Kec. Pontang	0	1.350.652,00	0	0	0	1.350.652,00
Kec. Tirtayasa	0	0	0	0	0	0
Kec. Tanara	0	0	0	0	0	0
Kec. Tunjung Teja	0	0	0	0	0	0
Kec. Waringin Kurung	0	677.469,00	0	0	0	677.469,00
Kesbangpol	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>142.468.144,00</b>	<b>28.396.612.284,14</b>	<b>4.459.300.243,40</b>	<b>53.742.543,34</b>	<b>74.471.587.265,00</b>	<b>107.524.384.971,88</b>

**Tabel 116**  
**Rincian Utang dan Dasar Pengakuan/Nomor Kontrak**

Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>142.468.144,00</b>		
Utang Belanja Pegawai BLUD	142.468.144,00	Daftar Hutang Belanja Pegawai RSDP tahun 2025	RSDP
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>28.397.286.776,14</b>		
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.421.130	EP-01KCN4ZJTBJDDARM0WT8MARMA1	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.482.027	EP-01KCTSYQ0FS5SG9RJMFB5742MK	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	639.983.933	EP-01K8WNCYMZC2P1FVRV34V0WDFT	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.838.868	EP-01KBQDPQ53JQA1TXCR3ESHNWF Tanggal 09 Desember 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	180.110.780	EP-01KA82VXRCG0BQ50W8MRRM5PN4 Tanggal 20 November 2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	167.555.055		RSDP
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	275.520.001,00		RSDP
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.569.400,00		DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.250.855,00	01KCQQS7EGJVTDWSRHDN4X5G8A	Diskominfoatik
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.389.588	EP-01KBC1G24QEPZP0NB0B7TCVK3G	Diskominfoatik
Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.999.991	EP-01KAWE83WKY8S9DZ9A21HEYWSX	Diskominfoatik
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.991.350,00	600.2/PK.58586279/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.992.400,00	600.2/PK.58362686/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.964.650,00	600.2/PK.58362767/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.991.100,00	600.2/PK.58362852/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.992.100,00	600.2/PK.58362929/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.990.700,00	600.2/PK.58362980/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.968.400,00	600.2/PK.58363018/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.989.250,00	600.2/PK.58363065/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.988.800,00	600.2/PK.58363083/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.970.700,00	600.2/PK.58363116/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.968.900,00	600.2/PK.58363139/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.963.800,00	600.2/PK.58363173/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.979.100,00	600.2/PK.60996711/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.980.450,00	600.2/PK.60996841/SPK/PPK-KP/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.976.890,00	602/12-PK.10148218000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.984.320,00	602/12-PK.10272015000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.977.340,00	602/12-PK.10235185000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.983.830,00	602/12-PK.10279714000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.985.210,00	602/12-PK.10246512000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.985.840,00	602/12-PK.10246554000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.981.945,00	602/12-PK.10246563000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.988.635,00	602/12-PK.10246566000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.984.940,00	602/12-PK.10246573000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.988.100,00	602/12-PK.10246603000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Masyarakat			Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.985.105,00	602/12-PK.10246608000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.983.210,00	602/12-PK.10246617000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.988.560,00	602/12-PK.10246622000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.988.855,00	602/12-PK.10246627000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.993.685,00	602/12-PK.10273613000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.996.120,00	602/12-PK.10273625000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.996.390,00	602/12-PK.10273636000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.997.150,00	602/12-PK.10273640000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.995.285,00	602/12-PK.10273645000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.993.975,00	602/12-PK.10273675000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.984.915,00	602/12-PK.10273678000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.984.860,00	602/12-PK.10273682000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.985.175,00	602/12-PK.10273686000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai	7.990.605,00	602/12-PK.10273692000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.993.250,00	602/12-PK. 10273716000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.995.000,00	602/12-PK.10273719000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.991.925,00	602/12-PK.10273726000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.996.280,00	602/12-PK.10273727000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.995.155,00	602/12-PK.10273731000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.996.650,00	602/12-PK.10273741000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.995.215,00	602/12-PK.10273747000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.996.180,00	602/12-PK.10273751000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.996.695,00	602/12-PK.10273754000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.994.960,00	602/12-PK.10275638000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.992.230,00	602/12-PK.10280780000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.983.955,00	602/12-PK.10280782000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.990.345,00	602/12-PK. 10280783000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
			Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.989.500,00	602/12-PK.10280786000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.995.000,00	602/12-PK.10280798000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.990.455,00	602/12-PK.10280799000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.995.000,00	602/12-PK.10280800000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.987.710,00	602/12-PK.10280802000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.990.850,00	602/12-PK.10280804000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.952.600,00	500.1/1041/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	226.815.550	620/06-PK.HS.10290902000/SPK/RKN.JL.DS.CRNG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.450.950,00	620/06-PK.HS.10290902000/SPK/RKN.JL.DS.CRNG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.387.900,00	620/06-PK.HS.10299825000/SPK/RKN.JL.DS.GMBR(KP-WDS)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	226.833.600,00	620/06-PK.HS.10291528000/SPK/RKN.JL.DS.TNJ-AY/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.459.400,00	620/06-PK.HS.10291528000/SPK/RKN.JL.DS.TNJ-AY/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.982.289,26	620/06-PK.HS.10290918000/SPK/RKN.JL.DS.JLG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.432.300,00	620/06-PK.HS.10287540000/SPK/RKN.JL.DS.BJG.PNDN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.610.300,48	620/06-PK.HS.10287548000/SPK/RKN.JL.DS.PYBRGN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai	17.451.150,00	620/06-PK.HS.10287546000/SPK/RKN.JL.DS.KTSLN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.450.878,40	620/06-PK.HS.10290896000/SPK/RKN.JL.DS.BRGBG_(KP.KBG.INGS)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.422.050,00	620/06-PK.HS.10287557000/SPK/RKN.JL.DS.SKTG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.452.050,00	620/06-PK.HS.10299852000/SPK/RKN.JL.DS.MGN-RJ/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	332.157.050,00	620/06-PK.HS.10290914000/SPK/RKN.JL.DS.CKD/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.481.950,00	620/06-PK.HS.10290914000/SPK/RKN.JL.DS.CKD/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.398.050,00	620/06-PK.HS.10287542000/SPK/RKN.JL.DS.CRND/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	331.466.400,00	620/06-PK.HS.10299843000/SPK/RKN.JL.DS.LBK-KPH/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.445.600,00	620/06-PK.HS.10299843000/SPK/RKN.JL.DS.LBK-KPH/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.900.550,00	620/06-PK.HS.10299848000/SPK/RKN.JL.DS.PSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.467.600,00	620/06-PK.HS.10290856000/SPK/RKN.JL.DS.KPO(KP-CLCG)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.434.850,00	620/06-PK.HS.10290877000/SPK/RKN.JL.DS.BNDG_(KP.CGTL.RT.019)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.457.500,00	620/06-PK.HS.10287227000/SPK/RKN.JL.DS.BJNGR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	226.812.950,00	620/06-PK.HS.10291513000/SPK/RKN.JL.DS.SRMN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.448.050,00	620/06-PK.HS.10291513000/SPK/RKN.JL.DS.SRMN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	224.156.482,00	620/06-PK.HS.10394262000/SPK/RKN.JL.DS.PLO-AMPL/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.314.900,00	620/06-PK.HS.10394262000/SPK/RKN.JL.DS.PLO-AMPL/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai	222.135.150,00	620/06-PK.HS.10291542000/SPK/RKN.JL.DS.RNJK (BCP.1)/KPA-	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		BM/DPUPR/2025	
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.201.850,00	620/06-PK.HS.10291542000/SPK/RKN.JL.DS.RNKG_(BCP.1)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	321.991.100,00	620/06-PK.HS.10299854000/SPK/RKN.JL.DS.GMBR(KP-LWCB)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.946.900,00	620/06-PK.HS.10299854000/SPK/RKN.JL.DS.GMBR(KP-LWCB)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.412.192,00	620/06-PK.HS.10299857000/SPK/RKN.JL.DS.KP_(KP.RCND)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.461.500,00	620/06-PK.HS.10278837000/SPK/RKN.JL.DS.ANYR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.487.500,00	620/06-PK.HS.10296473000/SPK/RKN.JL.DS.WRNG-KRG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	224.561.150,00	620/06-PK.HS.10291257000/SPK/RKN.JL.DS.MKRJY/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.335.850,00	620/06-PK.HS.10291257000/SPK/RKN.JL.DS.MKRJY/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	188.499.900,00	620/06-PK.HS.10291555000/SPK/RKN.JL.DS.WNYS/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.437.100,00	620/06-PK.HS.10291555000/SPK/RKN.JL.DS.WNYS/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.459.450,00	620/06-PK.HS.10330283000/SPK/RKN.JL.DS.BNDG_(KP.CGTL.RT.020)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.486.000,00	620/06-PK.HS.10290934000/SPK/RKN.JL.DS.WNYS/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.412.600,00	620/06-PK.HS.10330275000/SPK/RKN.JL.DS.BNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.488.050,00	620/06-PK.HS.10299855000/SPK/RKN.JL.DS.GMBR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	216.081.258,35	620/06-PK.HS.10296620000/SPK/RKN.JL.DS.SNTL/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.881.478,12	620/06-PK.HS.10296620000/SPK/RKN.JL.DS.SNTL/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai	225.906.155,47	620/06-PK.HS.10291507000/SPK/RKN.JL.DS.PMGKNG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.399.057,02	620/06-PK.HS.10291507000/SPK/RKN.JL.DS.PMGKNG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.456.400,00	620/06-PK.HS.10299828000/SPK/RKN.JL.DS.PLWD/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.485.000,00	620/06-PK.HS.10299829000/SPK/RKN.JL.DS.PLO/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.323.950,00	620/06-PK.HS.10290908000/SPK/RKN.JL.DS.CKD.PRM/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.463.600,00	620/06-PK.HS.10300278000/SPK/RKN.JL.DS.BRGBG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.345.461,03	620/06-PK.HS.10312990000/SPK/RKN.JL.DS.SLR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.393.150,00	620/06-PK.HS.10287537000/SPK/RKN.JL.DS.BJG.MNTG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.477.500,00	620/06-PK.HS.10300536000/SPK/RKN.JL.DS.SGMRT/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	331.411.300,00	620/06-PK.HS.10297018000/SPK/RKN.JL.DS.SLBU/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.442.700,00	620/06-PK.HS.10297018000/SPK/RKN.JL.DS.SLBU/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.438.880,53	620/06-PK.HS.10288691000/SPK/RKN.JL.DS.TMNSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	332.139.950,00	620/06-PK.HS.10297158000/SPK/RKN.JL.DS.TLGA/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.481.050,00	620/06-PK.HS.10297158000/SPK/RKN.JL.DS.TLGA/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	331.681.100,00	620/06-PK.HS.10291534000/SPK/RKN.JL.DS.UNDR-ANDR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.456.900,00	620/06-PK.HS.10291534000/SPK/RKN.JL.DS.UNDR-ANDR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	226.299.100,00	620/06-PK.HS.10287560000/SPK/RKN.JL.DS.SKSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai	17.428.900,00	620/06-PK.HS.10287560000/SPK/RKN.JL.DS.SKSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	216.208.200,00	620/06-PK.HS.10287324000/SPK/RKN.JL.DS.LBKWN_(KOMP.LGA)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.897.800,00	620/06-PK.HS.10287324000/SPK/RKN.JL.DS.LBKWN_(KOMP.LGA)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	223.384.220,00	620/06-PK.HS.10290925000/SPK/RKN.JL.DS.LBKWN_(KP.JDL)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.274.100,00	620/06-PK.HS.10290925000/SPK/RKN.JL.DS.LBKWN_(KP.JDL)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.419.500,00	620/06-PK.HS.10291523000/SPK/RKN.JL.DS.SKNGR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.489.407,27	620/06-PK.HS.10299861000/SPK/RKN.JL.DS.CDH/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	226.979.900,00	620/06-PK.HS.10287554000/SPK/RKN.JL.DS.SNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.467.100,00	620/06-PK.HS.10287554000/SPK/RKN.JL.DS.SNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	226.678.350,00	620/06-PK.HS.10446020000/SPK/RKN.JL.DS.BNDLU/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.449.650,00	620/06-PK.HS.10446020000/SPK/RKN.JL.DS.BNDLU/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	331.151.000,00	620/06-PK.HS.10446469000/SPK/RKN.JL.DS.KNDYKN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.429.000,00	620/06-PK.HS.10446469000/SPK/RKN.JL.DS.KNDYKN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.468.450,00	620/06-PK.HS.10446071000/SPK/RKN.JL.DS.UNDR-ANDR(KP.UNDR-ANDR)/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.457.500,00	620/06-PK.HS.10446467000/SPK/RKN.JL.DS.RGS-MSGT/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	142.421.150,00	620/06-PK.HS.10445992000/SPK/TPT.JLN.DS.KDBRM/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.495.850,00	620/06-PK.HS.10445992000/SPK/TPT.JLN.DS.KDBRM/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai	189.837.550,00	620/06-PK.HS.10447172000/SPK/RKN.JL.DS.CTSK/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.991.450,00	620/06-PK.HS.10447172000/SPK/RKN.JL.DS.CTSK/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.475.000,00	620/06-PK.HS.10514847000/SPK/RKN.JL.DS.RNCSGL/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	189.770.945,86	620/06-PK.HS.10446468000/SPK/RKN.JL.DS.MRGSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.987.944,52	620/06-PK.HS.10446468000/SPK/RKN.JL.DS.MRGSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	188.925.337,00	690/06-PK.HS.10333568000/SPK/DRNS.MANGUNREJA/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.547.250,00	690/06-PK.HS.10333584000/SPK.ADD/DRNS.KPSITONG/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 28 November 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.959.964,00	690/06-PK.HS.10333611000/SPK/DRNS.GRIYACST/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.943.438,00	690/06-PK.HS.10333592000/SPK/DRNS.KPBENDUNG/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.954.727,00	690/06-PK.HS.10333607000/SPK/DRNS.KRJETAK/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.950.480,00	690/06-PK.HS.10333596000/SPK/DRNS.KPKERJANI/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.952.057,00	690/06-PK.HS.10333614000/SPK/DRNS.KTREMABEL/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.943.438,83	690/06-PK.HS.10333568000/SPK/DRNS.MANGUNREJA/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal: 1 Oktober 2025	DPUPR
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	11.390.000	- SP : EP-01KAX2KZ7F3A3KEFDDZ2XX2XYT tanggal 27 November 2025 - Adendum SP :EP-01KAX2KZ7F3A3KEFDDZ2XX2XYT-AD01 tanggal 03 Desember 2025 - Adendum SP ke Dua : EP-01KAX2KZ7F3A3KEFDDZ2XX2XYT-AD02 tanggal 24 Desember 2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	8.983.013.546	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.148.000,00	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	95.384.000,00		DPUPR
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	692.722.000	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.458.777.247	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2026	RSDP



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	99.333.900	610/07-JK.LS.10493950000/SPK/MDL.MPB/KPA-SDA/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	129.957.692	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	83.300.000	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak	4.950.000	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	280.799.361	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2026	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	897.148.650	NO. SKRD:SKRD/SRG0001/DLH/2023	Dians Lingkuagn Hidup
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	441.235.000	NO. SKRDSKRDISRG0002/DLH/2024	Dians Lingkuagn Hidup
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.995.000,00	EP-01KBC4RN5Z57YHYFGK2CV997WD	DPUPR
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	62.160.000,00	EP-01K96AXPKKXGTTSBPKP9C0GPHN	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	EP-01K8W5PS6G46M5KQR3JCAJS7RA	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.000.000,00	EP-01K8W56X31QT69YSXJHH7EKR8	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	EP-01KBY9V6GGVKEG1SHAM8QES0NE	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.499.998,00	EP-01K9V4V68V8BWRENT0X7N8RPG5	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.449.999,00	EP-01KAG6728KA2TG8BMCD95ZPH5M	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.999.999,00	EP-01KAWDZ3HHFNAPP8XZD4M9W9QE	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.999.999,00	EP-01KADHPBH3D0Y88QEEWSPNMKZ5	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.768.000,00	EP-01K8SPZA9K3CRFTA361389A0YZ	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.499.999,00	EP-01KAG6Y4N7TFC9GWG7AZNFGCZ	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.492.500,00	EP-01KA7S9P699VSGYFGQ92PVTTK7	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.326.000,00	EP-01K9C23TFNWXX1DPN00FZT8RRH	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01K9BFW4ND89KYN7P3NWX8N8H8	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01KA7SNXKQHF3ZKXSWNKEP5NKN	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01KAW7H4XT50AX8ZS7PJQPYF4D	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01KAW7SOTEF21N38BJXOZE10WK	Diskominfoatik



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.884.000,00	EP-01K8W2X9DKPXPQEWZ7AVNXZ7XN	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.662.000,00	EP-01KAW7ANW32KFAQ6F1WAAR4F71	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	EP-01KBBRFZ9QNMJQTHNGNTACEWZ7	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.442.000,00	EP-01KBC16HNNHYJ79BHBN49GAWA6G	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	74.999.370,00	EP-01KC1BBQWBH1H9149NSQYOECW8	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	74.999.370,00	EP-01KC1CAHNAP5Q19GB3NWGEY8J5	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.655.000,00	EP-01K9BFF2NX9XTJ7M9NWF3TDFWH	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.109.000,00	EP-01KCOZ7NNW2GZD92N9SBK8KG8Q	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.109.000,00	EP-01KBY9P9MY1KQ9JARCYNPH5T3V	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	40.000.000,00	EP-01KJCNB7V38310YWXDF5QAVD1D	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.999.999,00	EP-01KJCPDE9YCSE4KKWCD091XMBF	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	29.999.999,00	EP-01KCJNQ7YTCZEFKYBOM6VAH9MH	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.999.999,00	EP-01KCJPTTAGOHSAQ3YK6PM5RANE	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.497.500,00	EP-01K7ZRAGGX6XVY3CKC4GTR4BN4	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	EP-01KBY9FD94FWSHP2PVZBGKVPRA	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	19.999.998,00	EP-01KBY8P7KXZWXK8HZZQVSYKFRM	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01KA7SSQG7G8ESNKVPPQSP38EN	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.499.999,00	EP-01KBKXHTJK67G6RJVDX3TDNWAN	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	44.999.998,00	EP-01KBH18C3HDPT9ZHAQNP5H2	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.993.000,00	EP-01KB1FNPWT3QWEJNCPGBCAYZJD	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.975.000,00	EP-01K9XKNBBXBRXCX4ZM0C17DPJ	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01KBP57RST5PC07ZZVJCY5MEPT	Diskominfoatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa	49.999.999,00	EP-0K98W9DN1P2KT8DB2WSS15WGJ	Diskominfoatik



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.999.999,00	EP-01K9XK3ZNRMCGEYF7XZZP46FC	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.999.999,00	EP-01K8W1TQAQ2Q10W3CP0K6E7PQ	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.999.999,00	EP-01KBP52BJMTYWKPVAB1Y7EY4NF	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.420.000,00	EP-01K9XKD3H0959YBZF6TRXC184M	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.331.000,00	EP-01KBBSY9RSX0TXKPWP6YVW0FMS	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	268.900,00	Tagihan nomor telepon 0254-224470	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	289.821,00	064/KU-01/KOPRG//2026	Dinas Perhubungan
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	53.391,00	Tagihan Telepon Januari	Satuan Polisi Pamong Praja
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	273.171,00	Tagihan Telepon Januari	Badan Pendapatan Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	38.357,00	Tagihan Telepon Januari	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.378.303,00	Tagihan Telepon Januari	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.135.543,00	Rekap Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	650.000,00	070500100412-202512-2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.084.500,00	Tagihan Air 2025 Balai Penyuluh KB Kec. Bojonegara,Kopo,Pontang, Kr. Watu dan Pulo Ampel	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	963.500,00	Tagihan Air Januari	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	878.000,00	070500100912-202512-2025	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	659.500,00	Tagihan Air Januari	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.248.500,00	Tagihan Air Januari	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.459.000,00	Tagihan Air Januari	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Kantor-	631.000,00	Tagihan Air Januari	Diskominfosatik



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Tagihan Air			
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	12.611.776,00	0307/AGA.01.02/ULP.CKD/2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.934.600,00	500.1/1191/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	14.024.201,00	0124/AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	18.296.273,00	0117 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Lingkungan Hidup
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	1.670.688,00	0160 IAGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Lingkungan Hidup
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	13.495.320,00	0307/AGA.01.02/ULP.CKD/2026	Dinas Lingkungan Hidup
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	7.943.477,00	0116/AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Sosial
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	11.182.471,00	0131 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	8.403.060,00	0307/AGA.01.02/ULP.CKD/2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	4.680.936,00	0113 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	18.641,00	Tagihan Listrik Balai Penyuluh KB Kec. Pamarayan Desember 2025	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	11.134.205,00	0112 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	INSPEKTORAT
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	81.060.256,00	0125/AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Sekretariat Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	11.329.651,00	Tagihan Listrik januari	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	5.929.549,00	0121/aga.01.02/ulp.srg/2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	24.293.533,00	064/KU-01/KOPRG/II/2026	Dinas Perhubungan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	301.434.714,00	0021/AGA.04.02/F30030000/2026	Dinas Perhubungan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	23.004.062,00	0307/AGA.01.02/ULP.CKD/2026	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	240.220,00	005 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
			dan Perdagangan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	17.434.403,00	023AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	284.230.168,00	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	37.265.162,00	Tagihan Listrik januari	DPUPR
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	3.154.429,00	Tagihan Listrik Januari	Satuan Polisi Pamong Praja
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	6.402.501,00	Tagihan Listrik Januari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	19.353.799,00	Tagihan Listrik Januari	Sekretariat DPRD
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	31.408.822,00	Tagihan Listrik Januari	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	19.059.828,00	Tagihan Listrik Januari	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	7.259.246,00	Tagihan Listrik Januari	Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	1.150.312,00	Tagihan Listrik Januari	Dinas Perikanan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	22.362.920,00	Tagihan Listrik Januari	Badan Pendapatan Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	677.469,00	Tagihan Listrik januari	Kecamatan Waringinkurung
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	2.642.201,00	0144 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Kecamatan Kramatwatu
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	674.492,00	041 /AGA.01.02/ULP.SRG/2026	Kecamatan Gunungsari
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	1.350.652,00	Tagihan Listrik januari	Kecamatan Pulo ampel
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	2.340.834,00	0001 /AGA.04.02/F30030100/2026	Kecamatan Anyar
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	30.605.528,00	Tagihan Listrik januari	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	140.334.943,00	Tagihan Listrik januari	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	15.029.846,00	Tagihan Listrik Januari	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	10.180.003,00	Tagihan Listrik Januari	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.435.000,00	Tagihan Internet Januari	Badan Pendapatan Daerah
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	165.000.000,00	0003.3/001/SP/e-Katalog/Diskominfo/Aptika/2025, 0003.3/007/ADD/SP/e- Katalog/Diskominfo/Aptika/2025	Diskominfosatik
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.188.182,00	Tagihan Internet januari	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Kantor- Lembur	100.060.000,00	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu	114.600.840	680/06.PJL.LS.10702856000/SPK/SEWA-ALAT/KPA-SAM/DPUPR/2025 Tanggal 19 Desember 2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Lainnya			
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	58.863.300,00	641/06/E-KTLG.JKK.10249948000/SPK/PNGWSN.PKM.CNGKA/KPA.SDK/DINKES/2025	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	81.651.600,00	PT. KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.894.500,00	CV. GIRI ELOK CONSULINDO	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.850.100,00	PT. KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.850.100,00	CV. GIRI ELOK CONSULINDO	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	81.912.450,00	PT KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.750.200,00	PT KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	153.346.500,00	CV. RAJAWALI ARSITEKTUR	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	99.733.500,00	PT. ARCHE JUVARA ARCHITECT	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	99.678.000,00	PT. ARCHE JUVARA ARCHITECT	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	59.061.768,00	660/006-JKK.WP.10277189000/SPK/PGWS.MCK/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal 26 September 2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.504.175	620/06-JKK.WP.10266216000/SPK/SPV.JL.DS.PKT-1/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.504.175	620/06-JKK.WP.10266221000/SPK/SPV.JL.DS.PKT-2/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.468.100	620/06-JKK.WP.10266233000/SPK/SPV.JL.DS.PKT-7/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	69.175.200	620/06-JKK.WP.10447203000/SPK/SPV.JL.DS.PKT-19/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	69.175.200	620/06-JKK.WP.10447204000/SPK/SPV.JL.DS.PKT-20/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	99.678.000	660/06-JK.LS.10538335000/SPK/PENG.DATA.SANITASI/KPA-SAM/DPUPR/2025 tanggal 19 November 2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.155.237.350	Daftar Hutang Barang dan Jasa RSDP tahun 2025	RSDP
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	165.000.000,00	0003.3/002/SP/e-Katalog/Diskominfo/Aptika/2025, 0003.3/008/ADD/SP/e-Katalog/Diskominfo/Aptika/2025	Diskominfo
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Audio	8.710.000	000.3/0750/SP/Diskominfo/2025	Diskominfo
Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum	4.986.635	602/12-PK.10509808000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.644.597	Rekap Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	RSDP
<b>Utang Belanja Hibah</b>	<b>53.742.543,34</b>		
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.279.750,05	690/07.E-KTLG.PK.HS.47675088/SPK/SPAM-LBK/KPA-SAM/DPUPR/2024 Tanggal 02 Oktober 2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.989.830,09	690/06-PK.HS.10116432000/SPK/TMMD.LKS.1/KPA-SAM/DPUPR/2025 Tanggal 04 Agustus 2025	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.989.830,09	690/06-PK.HS.10104857000/SPK/TMMD.LKS.2/KPA-SAM/DPUPR/2025 Tanggal 04 Agustus 2025	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.989.830,09	690/06-PK.HS.10104864000/SPK/TMMD.LKS.3/KPA-SAM/DPUPR/2025 Tanggal 04 Agustus 2025	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.235.090,16	- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/06-PK.HS.10272478000/SPK/MCK.SKMNH/KPA-SAM/ DPUPR/2025 Tanggal: 26-September-2025 - Adendum Surat Perintah Kerja (Adendum SPK) Nomor: 660/14-PK.HS.10272478000/SPK.ADD/MCK.SKMNH/KPA-SAM/DPUPR/2025 Tanggal: 02-Oktober-2025	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.258.212,86	- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/06-PK.HS.10269328000/SPK/TMMD.SILEBU/KPA-SAM/ DPUPR/2025 Tanggal: 26-September-2025 - Adendum Surat Perintah Kerja (Adendum SPK) Nomor: 660/14-PK.HS.10269328000 /SPK.ADD/ TMMD.SILEBU/KPA-SAM/DPUPR/2025 Tanggal: 02-Oktober-2025	DPUPR
<b>Utang Belanja Modal Tanah</b>	<b>15.250.000</b>		
Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15.250.000,00	Bukan pekerjaan kontraktuil	DPUPR
<b>Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>335.052.967</b>		
Utang Belanja Modal Alat	89.910.000	EP-01K9RKVCSWWR20K89B3D46R5RK tanggal 12 November 2025	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	7.326.000,00	EP-01KCNN7KJQAQ5GAMHJ97XKKCR56, Tanggal 18 Desember 2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	147.535.650,00	EP-01KAB131T037XKCV3VGRX9FFKH	DPUPR
Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone	4.700.317	EP-01KBC1T7AC3ERMBXR4MXP70S5	Diskominfosatik
Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	85.581.000	EP-01KCN58QTF405CAAQH7821WZ2X	DPUPR
<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>964.520.348</b>		
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	131.989.600		Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.602.958	641/07.E-KTLG.PK.HS.55181290/SPK/PMTNGN.LHN.PERPUSDA/KPA-PB/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	490.770.643	641/06/E-KTLG.PK.HS.11988075/SPK/RHB.PKM.CINANGKA/KPA.SDK/DINKES/2025	Dinas Kesehatan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.649.332	SPK/01-PK.10459483000/SARPRAS.2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.651.886	SPK/01-PK.10459475000/SARPRAS.2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.788.951	SPK/01-PK.10462101000/SARPRAS.2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.791.541	SPK/01-PK.10462088000/SARPRAS.2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.888.009	642/EP-01K93RWJNJHM98YBWYBRWE3TMZ/SARPRAS.2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.565.591	EP-01K94X8KBH3HEZ045QH187PVGM	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	51.071.760	EP-01K94X437A8X2VAB8BTPQCKHES	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.282.092	EP-01K94F0F07DBKYXE8RQPX0HCP9	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.814.400	642/02-PK.10448964000/SPK/SARPRAS/2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.803.300	642/02-PK.10448954000/SPK/SARPRAS/2025	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-	9.973.155	602/12-PK.10152849000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Bangunan Fasilitas Umum			Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.980.450	602/12-PK.10235035000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.990.645	602/12-PK.10279679000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.980.930	602/12-PK.10272083000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.991.235	602/12-PK.10272020000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.977.480	602/12-PK.10235179000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.977.355	602/12-PK.10235182000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.991.170	602/12-PK.10271439000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.996.960	602/12-PK.10273739000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.990.905	602/12-PK.10493794000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>3.144.476.928,40</b>		
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	17.481.500,00	620/06-PK.HS.10445994000/SPK/TPT.JL.NMB-TRS.BDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	330.807.796,07	620/06-PK.HS.10447083000/SPK/RKN.JL.PLH-SNDGSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	17.410.936,63	620/06-PK.HS.10447083000/SPK/RKN.JL.PLH-SNDGSR/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	331.905.300,00	620/06-PK.HS.10447076000/SPK/RKN.JL.CLYG-HRNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	17.468.700,00	620/06-PK.HS.10447076000/SPK/RKN.JL.CLYG-HRNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	17.403.150,00	620/06-PK.HS.10447173000/SPK/RKN.JL.PTR-KPJT/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	17.477.150,00	620/06-PK.HS.10446084000/SPK/RKN.JL.CKNG-TJ.MNS/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	495.025.000,00	620/004-E-MIKOM.PK.HS.61405131/KONTRAK/RKN.JL.BTRWG-UMBL.TJG/PPK-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	720.871.400,00	620/004-E-MIKOM.PK.HS.61404976/KONTRAK/TPT.JL.PGRGN-PKNCN-TMNSR/PPK-BM/DPUPR/2025	DPUPR

Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	37.940.600,00	620/004-E-MIKOM.PK.HS.61404976/KONTRAK/TPT.JL.PGRGN-PKNCN-TMNSR/PPK-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.983.637,26	620/06-PK.HS.10430554000/SPK/TPT.JLN.KMYNGN.BNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.973.224,05	620/06-PK.HS.10430549000/SPK/TPT.JLN.TRTYS-TNGKTK/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	189.827.100,00	620/06-PK.HS.10430544000/SPK/TPT.JLN.SNTL.TRSBNDG.TRTYS/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.990.900,00	620/06-PK.HS.10430544000/SPK/TPT.JLN.SNTL.TRSBNDG.TRTYS/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	184.124.250,00	620/06-PK.HS.10430539000/SPK/TPT.JLN.DKH.TRSBNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.690.750,00	620/06-PK.HS.10430539000/SPK/TPT.JLN.DKH.TRSBNDG/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.996.550,00	620/06-PK.HS.10430817000/SPK/TPT.JLN.CMNG-PNSGN/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	7.492.584,38	620/06-PK.HS.10430812000/SPK/TPT.JLN.KMNING-MLNGGH/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	332.215.000,01	620/06-PK.HS.10446489000/SPK/RHB.JL.RB-SGMJY/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	17.485.000,00	620/06-PK.HS.10446489000/SPK/RHB.JL.RB-SGMJY/KPA-BM/DPUPR/2025	DPUPR
Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	359.906.400	EP-01JY0YGQPN0A61ZMJ8RG2TVD3V Tanggal 01 Juli 2025	Dinas Perhubungan
<b>Utang Belanja Bagi Hasil</b>	<b>74.471.587.265</b>		
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	73.036.799.705	SK. Bupati No 973/Kep.379-Huk.BPKAD/2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.434.787.560	SK. Bupati No 973/Kep.379-Huk.BPKAD/2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Total</b>	<b>107.524.384.971,88</b>		

### 5.8.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.103.854,00 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

### 5.9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di neraca merupakan saldo akhir ekuitas pada perubahan saldo ekuitas.

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 sebesar Rp5.042.346.664.548,88 dari saldo awal sebesar Rp4.785.872.519.116,79.

Penjelasan lebih rinci mengenai mutasi ekuitas tersebut dapat dilihat pada Catatan 5.16 mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.10. Pendapatan

Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Serang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama tahun 2025 sebesar Rp3.337.488.019.262,54 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.124.546.802.482,89 Pendapatan Transfer sebesar Rp2.119.907.216.059,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp93.034.000.720,65 Seperti tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 117**  
**Pendapatan LO Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	747.979.859.596,40	589.235.012.053,79	158.744.847.542,61	26,94
Pendapatan Retribusi Daerah	272.975.634.213,00	332.903.789.921,00	(59.928.155.708,00)	(18,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	21.486.409.318,59	25.400.790.422,35	(3.914.381.103,76)	(15,41)
Lain-lain PAD yang sah	82.104.899.354,90	14.524.685.093,75	67.580.214.261,15	465,28
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.124.546.802.482,89</b>	<b>962.064.277.490,89</b>	<b>162.482.524.992,00</b>	<b>16,89</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	114.285.074.300,00	86.474.428.000,00	27.810.646.300,00	32,16
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.586.353.600,00	3.782.987.000,00	(1.196.633.400,00)	(31,63)
Dana Alokasi Umum	1.160.146.105.100,00	1.125.696.401.999,00	34.449.703.101,00	3,06
Dana Alokasi Khusus	611.101.497.986,00	604.744.295.130,00	6.357.202.856,00	1,05
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.888.119.030.986,00</b>	<b>1.820.698.112.129,00</b>	<b>67.420.918.857,00</b>	<b>3,70</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
Dana Penyesuaian	13.931.487.000,00	360.851.091.000,00	(346.919.604.000,00)	(96,14)
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>13.931.487.000,00</b>	<b>360.851.091.000,00</b>	<b>(346.919.604.000,00)</b>	<b>(96,14)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.599.078.073,00	266.413.513.945,00	(73.814.435.872,00)	(27,71)
Pendapatan Bantuan Keuangan	25.257.620.000,00	24.922.517.298,00	335.102.702,00	1,34
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI</b>	<b>217.856.698.073,00</b>	<b>291.336.031.243,00</b>	<b>(73.479.333.170,00)</b>	<b>(25,22)</b>

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.119.907.216.059,00</b>	<b>2.472.885.234.372,00</b>	<b>(352.978.018.313,00)</b>	<b>(14,27)</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	90.420.005.599,65	107.478.647.046,40	(17.058.641.446,75)	(15,87)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2.613.995.121,00	0,00	2.613.995.121,00	0,00
<b>JUMLAH LAIN - LAIN YANG SAH</b>	<b>93.034.000.720,65</b>	<b>107.478.647.046,40</b>	<b>(14.444.646.325,75)</b>	<b>(13,44)</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.337.488.019.262,54</b>	<b>3.542.428.158.909,29</b>	<b>(204.940.139.646,75)</b>	<b>(5,79)</b>

### 5.10.1. Pendapatan PAD

Pendapatan PAD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.124.546.802.482,89.

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp747.979.859.596,40 berasal dari pendapatan tahun 2025 yang berhak diterima atas transaksi 2024 dan hak tagih atau piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan sepanjang tahun 2025. Sebagaimana penjelasan pada pendapatan pajak LRA, pendapatan pajak LO juga dilakukan reklasifikasi sesuai dengan peraturan pajak daerah terbaru. Dengan rincian berikut:

**Tabel 118**  
**Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>747.979.859.596,40</b>	<b>589.235.012.053,79</b>
Pajak Parkir	0,00	3.165.913,00
Pajak Reklame	5.006.417.561,00	4.058.434.342,00
Pajak Air Tanah	7.297.833.399,40	2.627.429.132,80
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.822.404.488,20	46.362.864.037,99
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	152.761.325.605,00	142.787.258.209,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	135.472.342.596,00	119.969.032.098,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.469.587.727,00	16.544.084.325,00
PBJT-Tenaga Listrik	247.589.387.100,80	229.038.067.359,00
PBJT-Jasa Perhotelan	22.123.343.273,00	25.112.986.465,00
PBJT-Jasa Parkir	632.717.832,00	618.924.014,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.908.164.014,00	2.112.766.158,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	81.248.169.000,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	60.648.167.000,00	0,00

Bahwa dari jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang penetapannya melalui *Official Assesment* adalah Pajak

Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu jenis pajak ditetapkan melalui *Self-Assesment*.

**Tabel 119**  
**Rincian Perbandingan Pendapatan Pajak LO**  
**dengan Pendapatan Pajak LRA**

Uraian	Jumlah
Pendapatan Pajak LO	747.979.859.596,40
Pendapatan Pajak LRA	736.179.846.949,00
<b>Selisih</b>	<b>11.800.012.647,40</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Mutasi Piutang	12.421.644.403,40
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	(627.276.106,00)
<b>Jumlah</b>	<b>11.800.012.647,40</b>

## 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp272.975.175.063,00 berasal dari pendapatan tahun 2025 yang berhak diterima atas transaksi 2024 dan hak tagih atau piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan sepanjang tahun 2025. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 120**  
**Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>272.975.634.213,00</b>	<b>332.903.789.921,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	227.393.639.031,00	290.705.194.588,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.323.769.200,00	637.164.600,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	116.080.000,00	115.565.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	816.255.000,00	872.275.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.150.000,00	298.229.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	98.389.665,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	574.604.000,00	570.106.920,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.226.690,00	5.752.960,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	47.940.000,00	51.414.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.500.000,00	34.000.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	99.197.480,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	26.439.476.913,00

Uraian	2025	2024
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	6.359.383.907,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	15.306.466.292,00	6.716.836.868,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	27.231.806.520,00	0,00

**Tabel 121**  
**Rincian Perbandingan Pendapatan Retribusi LO**  
**dengan Pendapatan Retribusi LRA**

Uraian	Jumlah
Pendapatan Retribusi LO	272.975.634.213,00
Pendapatan Retribusi LRA	270.387.639.630,00
<b>Selisih</b>	<b>2.587.994.583,00</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Mutasi Piutang Retribusi	3.182.641.799,00
Mutasi Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	(829.065.208,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi	234.417.992,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.587.994.583,00</b>

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp21.486.409.318,59 berasal dari pendapatan tahun 2025 yang berhak diterima atas transaksi 2025 yang merupakan dividen atas penyertaan modal pada BUMD dan pengakuan laba dan penyesuaian atas Investasi dengan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 122**  
**Rincian Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**  
**yang Dipisahkan 2025**

Uraian	Jumlah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	21.486.409.318,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	18.905.083.376,00
<b>Selisih</b>	<b>2.581.325.942,59</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Penyesuaian akibat adanya penggunaan metode ekuitas	2.581.325.942,59
<b>Jumlah</b>	<b>2.581.325.942,59</b>

#### 4. Lain-lain PAD Yang Sah

Per 31 Desember sebesar Rp82.104.899.354,90 merupakan pendapatan yang berhak diterima atas transaksi 2025, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 123**  
**Rincian Lain-lain PAD yang SAH 2025**

Uraian	2025	2024
<b>Lain-lain PAD Yang Sah</b>	<b>82.104.899.354,90</b>	<b>14.524.685.093,75</b>
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.068.800,00	1.183.840.300,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	305.673.008,70	73.303.704,31
Penerimaan Jasa Giro	3.568.139.223,00	3.562.583.997,00
Pendapatan Bunga	307.739.727,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.803.938.351,00	3.846.133.518,00
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	562.984.208,00	28.380.310,00
Pendapatan Denda Pajak	3.662.938.070,10	1.661.545.671,44
Pendapatan Denda Retribusi	12.763.703,10	37.527.216,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.106.831.412,00	309.667.840,00
Pendapatan BLUD	68.765.822.852,00	3.821.702.537,00

**Tabel 124**  
**Rincian Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LO dengan Lain-lain PAD yang Sah LRA**

Uraian	Jumlah
Lain-lain Pendapatan yang Sah LO	82.104.899.354,90
Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA	81.792.330.445,00
<b>Selisih</b>	<b>312.568.909,90</b>
<b>Penjelasan Selisih :</b>	
Mutasi Piutang	801.628.328,69
Mutasi Lain-lain yg Sah diterima dimuka	(139.736.816,30)
Mutasi tgr yang masuk dalam piutang bagian lancar TGR	(39.877.398,00)
piutang lain2 pad yang sah dari kekurangan volume	(309.445.204,49)
<b>Jumlah</b>	<b>312.568.909,90</b>

Mutasi Lain-lain yg Sah diterima dimuka sebesar Rp139.736.816,30 merupakan penghapusan atas Pendapatan lain lain yang Sah diterima di Muka Tahun 2024 sebesar Rp473.028.960,69 dikurangi pengakuan pendapatan lain lain yang Sah diterima di muka Tahun 2025 sebesar Rp612.765.776,99.

### 5.10.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.119.907.216.059,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.888.119.030.986,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp13.931.487.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp217.856.698.073,00.

#### 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.888.119.030.986,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Pusat sebesar Rp114.285.074.300,00, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp2.586.353.600,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.160.146.105.100,00, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp611.101.497.986,00 secara rinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 125**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	2025	2024
1	Dana Bagi Hasil Pajak PBB	4.327.081.900,00	3.106.366.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak PPh 21	106.857.175.300,00	81.470.181.000,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak PPh 25 dan 29/WPOPDN	3.100.817.100,00	1.895.484.000,00
4	Dana Bagi Hasil CHT-LO	0,00	2.397.000,00
	<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>114.285.074.300,00</b>	<b>86.474.428.000,00</b>
5	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Sumber Daya Hutan	96.360.000,00	142.696.000,00
6	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan	0,00	500.000.000,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Eksploitasi/ Royalti	84.229.000,00	55.926.000,00
8	Dana Bagi Hasil SDA Pungutan Hasil Perikanan	1.461.434.000,00	1.882.092.000,00
9	Dana Bagi Hasil SDA Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	444.330.600,00	702.273.000,00
10	Dana Bagi Hasil SDA Sawit	500.000.000,00	500.000.000,00
	<b>Jumlah Dana Bagi Hasil SDA</b>	<b>2.586.353.600,00</b>	<b>3.782.987.000,00</b>
11	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>1.160.146.105.100,00</b>	<b>1.125.696.401.999,00</b>
12	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>611.101.497.986,00</b>	<b>604.744.295.130,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.888.119.030.986,00</b>	<b>1.820.698.112.129,00</b>

#### 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.931.487.000,00 merupakan Insentif Fiskal dan Dana Desa, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 126**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**  
**Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	2025	2024
1	Insentif Fiskal	13.931.487.000,00	26.339.673.000,00
2	Dana Desa	0,00	334.511.418.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.931.487.000,00</b>	<b>360.851.091.000,00</b>

### 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp217.856.698.073,00 merupakan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi termasuk didalamnya piutang atas pelampauan target dana bagi hasil provinsi, terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 127**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo	
		2025	2024
1	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.599.078.073,00	266.413.513.945,00
2	Pendapatan Bantuan Keuangan	25.257.620.000,00	24.922.517.298,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>217.856.698.073,00</b>	<b>291.336.031.243,00</b>

**Tabel 128**  
**Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO**  
**dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA**

Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO	192.599.078.073,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA	162.547.782.544,00
<b>Selisih</b>	<b>30.051.295.529,00</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Mutasi Piutang Transfer	30.051.295.529,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.051.295.529,00</b>

#### 5.10.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp93.034.000.720,65 terdiri dari Pendapatan hibah sebesar Rp90.420.005.599,65 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.613.995.121,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 129**  
**Rincian Pendapatan Hibah LO Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	2.159.251.044,87	6.820.402.529,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	41.207.297.375,78	2.064.896.523,00
Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	3.525.545.577,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	43.527.911.602,00	98.593.347.994,40
<b>Jumlah</b>	<b>90.420.005.599,65</b>	<b>107.478.647.046,40</b>

**Tabel 130**  
**Rincian Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA**

Uraian	Jumlah
Lain-lain Pendapatan yang Sah LO	93.034.000.720,65
Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA	14.416.141.793,00
<b>Selisih</b>	<b>78.617.858.927,65</b>
<b>Penjelasan Selisih :</b>	
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap	35.275.925.506,87
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan	43.341.933.420,78
<b>Jumlah</b>	<b>78.617.858.927,65</b>

Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp35.275.925.506,87, diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Hibah Tanah, Peralatan dan mesin, dan Gedung dan bangunan BPKAD	3.405.545.577,00	032/527.1/Aset-BPKAD/2025
2	Hibah Tanah Disdik (untuk SMP 2 Cijeruk dari PT.Nicomas Gemilang)	5.606.856.000,00	Akta Hibah Nomor' 19/2025
3	Hibah Motor DPKD (perpustakaan keliling dari PERPUSNAS)	24.614.999,87	53031/4.2/PPM.07/XI.2025
4	Hibah PSU DPRKP	6.074.754.850,00	BAST Hibah
5	Hibah Tanah Kec Pamayaran dari perorangan untuk jalan alun-alun pamarayan	120.000.000,00	Akta hibah no 27/2024
6	Hibah aset tetap DPRKP (koreksi audit)	20.044.154.080,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>35.275.925.506,87</b>	

Hibah Tanah, Peralatan dan mesin, dan Gedung dan bangunan BPKAD sebesar Rp3.405.545.577,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Tanah bangunan tempat ibadah	426.506.549,00
2	Home use	258.000.000,00
3	bangunan masjid di Kragilan dari masyarakat (KH. M. Al Misry)	2.721.039.028,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.405.545.577,00</b>

Hibah berupa PSU pada DPRKP sebesar Rp6.074.754.850,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	PT. Bina Rencana Agung KIB A berupa tanah untuk Jalan komplek	3.767.229.000,00
2	PT. Bina Rencana Agung KIB D berupa saluran Drainase	2.307.525.850,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.074.754.850,00</b>

Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan sebesar Rp43.341.933.420,78, diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	DKBP3A - Hibah Alkon dari Provinsi	1.136.800.045,00	Laporan persediaan
2	Disdukcapil hibah blangko dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.048.746.000,00	BAST KEMENDAGRI dan BAST Pemprov
3	Dinkes persediaan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi	39.988.390.612,10	Rekap Penerimaan dari Provinsi
4	RSUD obat-obatan dari Pemerintah Provinsi	1.167.996.763,68	0008/Penerimaan Hibah Obat 2025
	<b>Jumlah</b>	<b>43.341.933.420,78</b>	

## 5.11. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.327.097.145.193,92 yang terdiri atas:

### 5.11.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.501.395.106.864,00 Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 131**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
Beban Gaji dan Tunjangan	740.056.981.814,00	728.223.618.955,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	630.082.750.429,00	324.338.359.637,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	209.062.977.863,00

Uraian	2025	2024
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.656.598.638,00	1.703.157.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD dan KDH/WKDH	46.138.080.763,00	44.067.312.849,00
Beban Pegawai BLUD	83.460.695.220,00	21.061.070.023,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.501.395.106.864,00</b>	<b>1.328.456.496.327,00</b>

**Tabel 132**  
**Rincian Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai**

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai	1.501.395.106.864,00
Belanja Pegawai	1.510.133.055.349,00
<b>Selisih</b>	<b>(8.737.948.485,00)</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Mutasi Utang Belanja Pegawai	(8.738.912.640,00)
Koreksi Utang Belanja Pegawai Disdik	964.155,00
<b>Jumlah</b>	<b>(8.737.948.485,00)</b>

#### 5.11.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.041.720.751.561,01 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 133**  
**Rincian Barang dan Jasa Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
Beban Bahan Pakai Habis	169.873.617.342,19	148.715.282.445,79
Beban Barang Tak Habis Pakai	120.645.900,00	63.748.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	28.079.075.005,68	42.311.188.746,00
Beban Jasa Kantor	212.256.607.997,00	197.149.877.832,00
Beban Premi Asuransi	93.944.405.082,84	57.759.333.790,34
Beban Sewa Tanah	646.200.000,00	1.619.950.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.495.653.487,63	9.929.532.568,49
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	15.033.681.697,80	14.571.417.403,01
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	579.166.865,00	664.168.500,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	27.769.689,00	25.582.755,00
Beban Jasa Konsultasi	21.652.990.183,00	5.631.295.937,00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	8.003.238.182,00	8.499.668.547,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	114.456.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	549.876.000,00	0,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.009.545.047,00	15.108.368.500,00

Uraian	2025	2024
PNS		
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	692.235.647,00	0,00
Beban Pemeliharaan	13.944.728.065,00	30.084.600.856,00
Beban Perjalanan Dinas	66.442.915.000,00	82.851.755.704,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.199.071.270,00	7.696.166.000,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	0,00	155.701.221.160,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	149.747.736.319,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.662.409.641,00	22.133.011.824,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	195.759.183.139,87	260.230.771.032,78
<b>Total</b>	<b>1.041.720.751.561,01</b>	<b>1.060.861.397.601,41</b>

**Tabel 134**  
**Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa**  
**dengan Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	Jumlah
Beban Barang dan Jasa	1.041.720.751.561,01
Belanja Barang dan Jasa	1.015.231.541.811,00
<b>Selisih</b>	<b>26.489.209.750,01</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Mutasi Utang Belanja Barang Dan Jasa	(3.307.691.218,86)
Mutasi Barang Dan Jasa Dibayar Dimuka	(5.453.983.755,73)
Mutasi Persediaan Barang	(25.516.496.937,86)
Koreksi Belanja Modal (Ekstrakomtabel)	27.198.572.533,68
Koreksi Utang	1.243.079.837,00
Kapitalisasi Aset	(11.031.198.729,00)
Hibah Persediaan	43.341.933.420,78
Utang bansos yang tercatat pada barjas dikarenakan tidak ada koring utang bansos - SKPD Dinsos	14.994.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.489.209.750,01</b>

### 5.11.3. Beban Bunga

Beban Bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp306.250.000,00 merupakan beban atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek.

### 5.11.4. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp237.780.278.921,29 Berikut rincian dari beban hibah:

**Tabel 135**  
**Rincian Beban Hibah Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	154.656.300,00	0,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	100.964.821.968,95	2.873.600.730,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	67.217.433.805,34	109.245.573.447,22
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	25.457.334.586,00	24.496.428.872,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.661.903.000,00	2.544.491.000,00
Beban Hibah Dana BOSP	41.324.129.261,00	40.095.922.000,00
<b>Total</b>	<b>237.780.278.921,29</b>	<b>179.256.016.049,22</b>

**Tabel 136**  
**Rincian Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah**

Uraian	Jumlah
Beban Hibah	237.780.278.921,29
Belanja Hibah	138.265.199.207,00
<b>Selisih</b>	<b>99.515.079.714,29</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Mutasi Utang Belanja Hibah	(1.882.697.083,88)
Hibah Aset Pemerintah Daerah Lainnya dan Pihak Ketiga	101.376.759.468,95
Koreksi Ekuitas - Hutang Belanja Hibah	21.017.329,22
<b>Jumlah</b>	<b>99.515.079.714,29</b>

#### 5.11.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial selama per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.067.678.760,00 merupakan Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

**Tabel 137**  
**Rincian Perbandingan Beban Bantuan Sosial**

Uraian	Jumlah
Beban Bantuan Sosial	10.067.678.760,00
Belanja Bantuan Sosial	10.082.673.360,00
<b>Selisih</b>	<b>(14.994.600,00)</b>
<b>Pejelasan Selisih :</b>	
Pencatatan Utang bansos pada utang barjas dikarenakan tidak ada koring utang bansos	14.994.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.994.600,00</b>

### 5.11.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi selama per 31 Desember 2025 sebesar Rp325.762.719.979,76 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 138**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025**

Uraian	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.323.456.167,69	84.156.071.388,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.678.373.540,31	38.358.770.016,11
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	178.527.612.740,38	179.420.971.888,26
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	115.719.397,98	45.038.847,98
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.183.834.836,00	12.073.915.986,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	1.933.723.297,40	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>325.762.719.979,76</b>	<b>314.054.768.126,68</b>

### 5.11.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang selama per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.540.215.696,86, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 139**  
**Beban Penyisihan Piutang Per SKPD**

Uraian	2025	2024
BAPENDA	9.222.798.814,12	(8.088.729.963,32)
RSUD	328.422.320,43	1.008.762.389,88
BPKAD	(22.342.513,00)	171.093,70
DPUPR	11.337.075,31	(6.287.319,99)
DISPORAPAR	0,00	(1.728.900,00)
<b>Jumlah</b>	<b>9.540.215.696,86</b>	<b>(7.087.812.699,73)</b>

### 5.11.8. Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama per 31 Desember 2025 sebesar Rp199.916.995.616,00 turun sebesar Rp319.664.761.207,00 atau 61,52% jika dibandingkan tahun 2024 beban Transfer sebesar Rp519.581.756.823,00. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 140**  
**Rincian Beban Transfer**

Uraian	2025	2024
<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>72.517.440.000,00</b>	<b>57.338.106.025,00</b>
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	72.517.440.000,00	57.338.106.025,00
<b>Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>4.354.512.400,00</b>	<b>4.453.752.798,00</b>
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.354.512.400,00	4.453.752.798,00
<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>123.045.043.216,00</b>	<b>457.789.898.000,00</b>
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	123.045.043.216,00	457.789.898.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>199.916.995.616,00</b>	<b>519.581.756.823,00</b>

### 5.11.9. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas dalam bentuk pengeluaran dari Belanja Tak Terduga. Per 31 Desember 2025 Beban Tidak Terduga sebesar Rp607.147.795,00 yang dikeluarkan untuk belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 141**  
**Rincian BTT Tahun 2025**

No	Uraian	Nilai
1	Restitusi Pajak	29.983.088,00
2	Dana Tanggap Darurat	285.416.944,00
3	Dana Pengiriman Sampah	291.747.763,00
<b>Jumlah</b>		<b>607.147.795,00</b>

### 5.12. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.572.725,00 merupakan penghapusan aset lain-lain, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.799.258.212,83, terjadi peningkatan sebesar Rp1.649.685.487,83 atau 91,69%.

### 5.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa tahun 2025 dan 2024 adalah nihil.

### 5.14. Surplus/Defisit LO

Per 31 Desember 2025 Kabupaten Serang mengalami Surplus LO sebesar Rp10.241.301.343,62 turun sebesar Rp128.261.208.885,26 atau 92,61% dari Surplus Tahun 2024 sebesar Rp138.502.510.228,88.

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

### 5.15. Laporan Arus Kas

#### 5.15.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Serang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp336.539.179.774,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan pengurangan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar

Rp3.535.684.299.055,00 dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3.199.145.119.281,00. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 142**  
**Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	2025	2024
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	736.179.846.949,00	573.381.060.252,00
Penerimaan Retribusi Daerah	270.387.639.630,00	336.443.197.168,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.905.083.376,00	19.600.932.217,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	81.792.330.445,00	13.705.912.688,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	115.750.753.300,00	129.122.606.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	2.639.209.600,00	5.669.171.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.160.146.105.100,00	1.125.696.401.999,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	611.170.654.706,00	604.748.554.009,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	336.491.131.612,00	360.851.091.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	162.547.782.544,00	284.569.527.143,00
Bantuan Keuangan	25.257.620.000,00	24.922.517.298,00
Penerimaan Hibah	11.802.146.672,00	10.893.241.588,00
Penerimaan Lainnya	2.613.995.121,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>3.535.684.299.055,00</b>	<b>3.489.604.212.362,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pegawai	1.510.133.055.349,00	1.325.832.224.608,00
Pembayaran Barang	1.015.231.541.811,00	1.050.074.683.873,00
Pembayaran Bunga	306.250.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	138.265.199.207,00	179.022.715.458,00
Pembayaran Bantuan Sosial	10.082.673.360,00	6.591.686.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	445.755.887.828,00	457.638.698.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.498.559.326,00	397.087.640,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	72.517.440.000,00	30.953.122.353,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	4.354.512.400,00	6.464.785.238,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>3.199.145.119.281,00</b>	<b>3.056.975.003.170,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>336.539.179.774,00</b>	<b>432.629.209.192,00</b>

#### 5.15.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan perbandingan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Serang di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp242.311.625.543,00 Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan pengurangan arus masuk kas dari aktivitas

investasi sebesar Rp0,00 dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp242.311.625.543,00. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 143**  
**Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Uraian	2025	2024
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	1.183.840.300,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.840.300,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Perolehan Tanah	2.438.830.876,00	1.161.432.715,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	154.131.047.995,00	132.027.958.530,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	39.666.670.093,00	93.613.564.317,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.956.401.229,00	188.198.027.641,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.622.500.950,00	12.970.147.048,00
Perolehan Aset Lainnya	496.174.400,00	349.109.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.482.125.637,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>242.311.625.543,00</b>	<b>435.802.365.388,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(242.311.625.543,00)</b>	<b>(434.618.525.088,00)</b>

#### 5.15.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan per 31 Desember 2025 adalah nihil. Yang bersumber dari Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan berupa Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp35.000.000.000,00 dikurangi Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp35.000.000.000,00.

#### 5.15.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran berupa potongan yang dipungut dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai, Tabungan Perumahan dan Perhitungan Pihak Ketiga lainnya serta Iuran Wajib Pemerintah Daerah atas Askes yang pembayarannya dianggarkan pada Belanja Pegawai. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.495.534,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris merupakan pengurangan arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp204.592.632.660,35 dengan arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp48.495.534,00. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 144**  
**Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	2025	2024
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	204.592.632.660,35	241.158.689.343,45
Koreksi Saldo Kas lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>204.592.632.660,35</b>	<b>241.158.689.343,45</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	204.613.546.966,35	241.157.331.003,45
Koreksi Saldo Awal Dana BOS	27.669.811,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>204.641.216.777,35</b>	<b>241.157.331.003,45</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>(48.495.534,00)</b>	<b>1.358.340,00</b>

#### 5.15.5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan kemudian dijumlahkan dengan saldo awal kas di BUD/kas daerah, sehingga diperoleh saldo akhir kas daerah. Per 31 Desember 2025 penurunan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar Rp94.179.058.697,00 sehingga saldo akhir kas sebesar Rp125.077.464.775,00. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD:

**Tabel 145**  
**Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD**

Uraian	2025	2024
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>94.179.058.697,00</b>	<b>(1.987.957.556,00)</b>
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	30.898.406.078,00	32.886.363.634,00
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	125.077.464.775,00	30.898.406.078,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>125.077.464.775,00</b>	<b>30.898.406.078,00</b>

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.16.Laporan Perubahan Ekuitas

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 146**  
**Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>4.785.872.519.116,79</b>	<b>4.678.828.762.677,73</b>
Surplus / Defisit LO	10.241.301.343,62	138.502.510.228,88
Dampak Perubahan Kumulatif atas Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	246.232.844.088,47	(31.458.753.789,82)
Lain-lain	246.232.844.088,47	(31.458.753.789,82)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>5.042.346.664.548,88</b>	<b>4.785.872.519.116,79</b>

Mutasi tambah kurang atas perubahan ekuitas tersebut berasal dari Surplus/Defisit LO sebesar Rp10.241.301.343,62 yang diperoleh dari Laporan Operasional dan dampak dari kesalahan mendasar yakni jurnal-jurnal penyesuaian akhir tahun yang mengurangi ekuitas sebesar Rp246.232.844.088,47. Berikut ini adalah rincian dari Dampak Perubahan Kumulatif lain-lain:

**Tabel 147**  
**Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain**

SKPD	Akun	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jurnal Eliminir Pembayaran iuran BPJS 4% TPG	964.155,00
	Jurnal Eliminir Utang Pemeliharaan peralatan dan Mesin	(149.000,00)
	Jurnal Eliminir utang Jasa Tenaga Pendidik	10.000.000,00
	Jurnal Penyesuaian Eliminir Utang Makanan dan minuman Rapat	693.000,00
	Jurnal eliminir utang jasa tenaga ahli	(9.450.000,00)
	Jurnal kapitalisasi aset atas beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun sebelumnya	733.142.069,00
	Jurnal kapitalisasi aset atas beban jasa konsultansi konstruksi pengawasan tahun lalu sebesar Rp125.776.260,00 dan tahun ini sebesar Rp177.288.200,00	125.776.260,00
	Jurnal pencatatan aset tanah yang belum tercatat di SMPN 4 Padarincang	10.000.000,00
Dinas Kesehatan	Jurnal Kapitalisasi debet aset dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	153.975.870,00
	Jurnal koreksi pembukuan akumulasi penyusutan karena koreksi BM luncturan Tahun 2024	124.299.020,30
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.318.958,25
	Jurnal koreksi karena reklas aset ekstrakomtabel ke aset lain-lain untuk dihapuskan	239.125,00
RSUD DR. Dradjat Prawiranegara	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(459.150,00)
	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.997,00
	Mengeliminasi Saldo Awal Piutang Tahun 2025 (Penolakan Klaim oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov Banten/TBMDR dan Jasa Raharja 256.893.667)	(256.893.667,00)
	Mengeliminasi Saldo Awal Piutang 2025 (Lebih Catat Pasien Umum 2.103.854 dan Kurang Catat Pasien Umum 25.038.679)	22.934.825,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	JURNAL KOREKSI PEMBUKUAN DEBET KARNA PENGGABUNGAN	34.262.881.852,34
	JURNAL KOREKSI DEBET KARNA KURANG CATAT DI TAHUN SEBELUMNYA	642.600,00
	Jurnal eliminir saldo awal utang belanja modal dan koreksi pembukuan kredit aset Bangunan Gedung tahun 2025	(212.134.719,00)
	Jurnal eliminir saldo awal utang belanja modal dan koreksi pembukuan kredit aset Bangunan Gedung tahun 2025	212.084.719,00

SKPD	Akun	Nilai
	JURNAL KOREKSI PEMBUKUAN KREDIT KARNA PENGGABUNGAN	(34.262.881.852,34)
	Jurnal koreksi kredit aset tetap lainnya karena kelebihan pencatatan di tahun sebelumnya	(580.748,00)
	Jurnal eliminir saldo awal utang belanja modal dan koreksi kredit aset JIJ Tahun 2025	(201.379.481,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	34.726.429,71
	Jurnal eliminir saldo awal utang belanja modal dan koreksi kredit aset JIJ Tahun 2025	201.379.481,00
	JURNAL ELIMINIR SALDO AWAL UTANG BELANJA BARANG PAKAI HABIS-BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025	3.542.172,00
	JURNAL ELIMINIR SALDO AWAL UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI TAHUN 2025	211.603.780,00
	Jurnal eliminir Utang Belanja Hibah luncuran tahun 2025	21.010.529,22
	Jurnal koreksi penyusutan Aset Tetap gedung dan Bangunan dan Aset tetap JIJ karena koreksi harga, kurang catat dan penggabungan	(115.022.965.222,41)
	Jurnal koreksi penyusutan Aset Tetap gedung dan Bangunan dan Aset tetap JIJ karena koreksi harga, kurang catat dan penggabungan	136.264.416.178,63
	Jurnal Reklas Aset Bangunan Gedung DKBPA yang belum selesai pengerjaannya	139.997.005,98
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jurnal Eliminir Saldo Utang Belanja Tahun 2025	(11,00)
	Jurnal Eliminir Saldo Utang Belanja Tahun 2025	6.800,00
	Jurnal mutasi pindah SKPD aset PSU dari BPKAD (Pengelola)	368.752.405.522,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jurnal koreksi akumulasi penyusutan mebel	187.442.785,60
Dinas Lingkungan Hidup	Jurnal mutasi aset pindah antar SKPD berupa escavator dari Dinas Perikan ke Dinas Lingkungan Hidup	1.127.843.750,00
	Jurnal koreksi penyusutan atas mutasi masuk Crawler Excavator dari Diskan	(1.127.843.750,00)
Disdukcapil	Jurnal mutasi aset dari Kec. Lebakwangi ke Disdukcapil	605.000,00
DKBP3A	Jurnal Utang beban (Koreksi Utang 2024)	(70.300,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Jurnal eliminir saldo awal utang belanja luncuran tahun 2025	10.000,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Jurnal Koreksi Utang	14.000.000,00
Disporapar	jurnal mutasi pindah antar SKPD berupa lahan Batu Kuwung dari Dispora ke BPKAD Tahun 2025	(351.000.000,00)
Dinas Perikanan	Jurnal Koreksi pembukuan atas pengadaan aset tahun 2012 dari hasil temuan BPK di tahun 2025	1.127.843.750,00
	Jurnal mutasi aset pindah antar SKPD berupa escavator dari Dinas Perikan ke Dinas Lingkungan Hidup	(1.127.843.750,00)
	Jurnal muatsi pindah antar SKPD berupa komputer dari Badan Pendapaatn Daerah ke Dinas Perikanan Tahun 2025	15.956.250,00
	Jurnal koreksi penyusutan berkurang atas penggabungan aset tahun 2025	12.938.975,54
Sekretariat Daerah	Jurnal mutasi pindah antar SKPD dari SETDA ke BKPSDM berupa Toyota All New Rush 1.5 S A/T TRD Tahun 2025	(76.857.142,85)
	Jurnal mutasi aset kendaraan mobil Wabup dari BPKAD ke Setda	605.100.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Jurnal muatsi pindah antar SKPD berupa komputer dari Badan Pendapaatn Daerah ke Dinas Perikanan Tahun 2025	(15.956.250,00)
	Jurnal muatsi pindah antar SKPD dari BAPENDA ke INSPEKTORAT berupa Tablet PC dan Laptop	(15.956.250,00)
	Jurnal penghapusan piutang pajak PBB Tahun 2025	(282.179,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan	Jurnal Eliminir saldo awal Piutang DAK Non Fisik-BOS Reguler tahun 2025	(5.170.000,00)
	jurnal mutasi pindah antar SKPD berupa lahan Batu Kuwung dari Dispora ke	(351.000.000,00)

SKPD	Akun	Nilai
Aset Daerah	BPKAD Tahun 2025	
	jurnal mutasi pindah antar SKPD berupa lahan Batu Kuwung dari Dispora ke BPKAD Tahun 2025	351.000.000,00
	jurnal mutasi pindah antar SKPD berupa lahan Batu Kuwung dari Dispora ke BPKAD Tahun 2025	351.000.000,00
	Jurnal koreksi saldo Penerimaan SILPA dana BOS SD dikarenakan kas tersebut sudah dibelanjakan dan di SPJkan di Tahun 2024	(27.669.811,00)
	Jurnal mutasi aset pindah antar SKPD berupa escavator dari Dinas Perikan ke Dinas Lingkungan Hidup	(1.127.843.750,00)
	Jurnal mutasi aset pindah antar SKPD berupa escavator dari Dinas Perikan ke Dinas Lingkungan Hidup	1.127.843.750,00
	Jurnal mutasi pindah antar SKPD dari SETDA ke BKPSDM berupa Toyota All New Rush 1.5 S A/T TRD Tahun 2025	(76.857.142,85)
	Jurnal mutasi pindah antar SKPD dari SETDA ke BKPSDM berupa Toyota All New Rush 1.5 S A/T TRD Tahun 2025	76.857.142,85
	Jurnal muatsi pindah antar SKPD berupa komputer dari Badan Pendapaatn Daerah ke Dinas Perikanan Tahun 2025	(15.956.250,00)
	Jurnal muatsi pindah antar SKPD berupa komputer dari Badan Pendapaatn Daerah ke Dinas Perikanan Tahun 2025	15.956.250,00
	Jurnal muatsi pindah antar SKPD dari BAPENDA ke INSPEKTORAT berupa Tablet PC dan Laptop	(15.956.250,00)
	Jurnal muatsi pindah antar SKPD dari BAPENDA ke INSPEKTORAT berupa Tablet PC dan Laptop	15.956.250,00
	Jurnal mutasi pindah SKPD aset PSU dari BPKAD (Pengelola) ke DPRKP	(368.752.405.522,00)
	Jurnal mutasi aset kendaraan mobil Wabup dari BPKAD ke Setda	(605.100.000,00)
	Jurnal mutasi aset kendaraan mobil Wabup dari BPKAD ke Setda	(605.100.000,00)
	Jurnal mutasi aset kendaraan mobil Wabup dari BPKAD ke Setda	605.100.000,00
	Jurnal pencatatan koreksi pembukuan atas hasil putusan pengadilan berupa tanah yang belum tercatat di tahun 2025	150.497.042.108,00
	Jurnal pencatatan koreksi pembukuan atas hasil putusan pengadilan berupa banunan gedung yang belum tercatat di tahun 2025	86.321.518.609,00
	Jurnal koreksi penyusutan bertambah diakrenakan kurang catat ditahun sebelumnya (BPKAD Pengelola)	(11.829.281.213,81)
	Jurnal Koreksi Nilai Investasi Tahun 2025 hasil perhitungan ulang dengan Laporan Anudited BUMD	260.597.183,73
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(15.360.532.219,76)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	11.345.204.915,82
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	2.236.685.155,00
Jurnal eliminir utang jangka pendek untuk Penyelesaian Kewajiban PT. LKM	(22,00)	
Kas Dana BOSP	88.583,00	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jurnal mutasi pindah antar SKPD dari SETDA ke BKPSDM berupa Toyota All New Rush 1.5 S A/T TRD Tahun 2025	76.857.142,85
INSPEKTORAT	Jurnal muatsi pindah antar SKPD dari BAPENDA ke INSPEKTORAT berupa Tablet PC dan Laptop	15.956.250,00
Kecamatan Lebak Wangi	Jurnal Mutasi Pindah Antar SKPD - Aset Lain-lain (Dari Lebakwangi ke DISDUKCAPIL)	(605.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jurnal koreksi penyusutan aset peralatan dan mesin	11.573.041,67
	Jurnal koreksi nilai utang luncauran belanja modal 2024	1.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>246.232.844.088,47</b>

Penjelasan atas rincian dampak kumulatif lain-lain berdasarkan rekening yang dikoreksi sebagai berikut:

**Tabel 148**  
**Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain berdasarkan**  
**rekening yang dikoreksi**

SKPD	Akun	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.000.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	858.918.329,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	964.155,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	693.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	10.000.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	(9.450.000,00)
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	(149.000,00)
Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan	153.975.870,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	124.299.020,30
	Aset Rusak Berat/Usang	239.125,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.318.958,25
RSUD DR. Dradjat Prawiranegara	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.997,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(234.417.992,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor	(573.065.719,00)
	Rumah Negara Golongan III	360.981.000,00
	Jalan Kabupaten	(392.064.401,26)
	Jembatan pada Jalan Kabupaten	324.150,00
	Bangunan Pembawa Irigasi	(15.759,00)
	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(2.403.345,50)
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	199.820.000,00
	Bangunan Penampung Sampah	(1.145.272,00)
	Aset Tetap Dalam Renovasi	(592.600,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	552.899.886,07
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	26.724.600,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	20.819.848.613,93
	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(6.483,00)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.336,75
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	240.459,65
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(18.378.000,40)
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	114.527,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	11.852,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.542.172,00
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	40.000,00
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.449.500,00	



SKPD	Akun	Nilai
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	161.114.280,00
	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.010.479,22
	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50,00
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	212.084.719,00
	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	(5.302.253,24)
	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.218.450,00
	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	15.759,00
	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	1.145.272,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	34.726.429,71
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.082.365.367,00
	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	5.951.363.700,00
	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	13.277.616.122,00
	Tanah Kering	26.596.916.170,00
	Tanah Lapangan Parkir	103.730.000,00
	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	447.705.795,00
	Tanah untuk Jalan	146.362.304.460,00
	Tanah untuk Bangunan Air	40.557.666.522,00
	Tanah untuk Makam	26.282.616.740,00
	Tanah untuk Taman	106.028.710.646,00
	Tanah Lapangan PBB	61.410.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	(11,00)
	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.800,00
DKPP	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	187.442.785,60
Dinas Lingkungan Hidup	Excavator	1.127.843.750,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	(1.127.843.750,00)
Disdukcapil	Aset Rusak Berat/Usang	605.000,00
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	(23.400,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	(46.900,00)
Diskominfosatik	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	10.000,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Personal Computer	28.435.000,00
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(28.435.000,00)
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	14.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga, dan	Tanah Hutan	(351.000.000,00)
	Personal Computer	7.326.250,00



SKPD	Akun	Nilai
Pariwisata	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(7.326.250,00)
Dinas Perikanan	Personal Computer	(12.478.750,00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	28.435.000,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	12.938.975,54
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.061.612.000,00
	Kendaraan Bermotor Penumpang	(638.134.105,00)
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.450.000,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(34.000.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(456.512.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	561.276.962,15
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(3.450.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00
	Piutang PBBP2	(282.179,00)
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(9.650.000,00)
	Personal Computer	(51.019.300,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.650.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	19.106.800,00
	Kas Dana BOSP	(27.669.811,00)
	Piutang DAK Non Fisik-BOS Reguler	(5.170.000,00)
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	260.597.183,73
	Tanah untuk Bangunan Industri	150.497.042.108,00
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(3.082.365.367,00)
	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	(5.951.363.700,00)
	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	(13.277.616.122,00)
	Tanah Kering	(26.596.916.170,00)
	Tanah Hutan	351.000.000,00
	Tanah Lapangan Parkir	(103.730.000,00)
	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	(447.705.795,00)
	Tanah untuk Jalan	(146.362.304.460,00)
	Tanah untuk Bangunan Air	(40.557.666.522,00)
	Tanah untuk Makam	(26.282.616.740,00)
	Tanah untuk Taman	(106.028.710.646,00)
	Tanah Lapangan PBB	(61.410.000,00)
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(272.705.900,00)
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.824.295,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00
Personal Computer	9.211.420,00	



SKPD	Akun	Nilai
	Bangunan Gedung Pabrik	86.321.518.609,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(332.394.100,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(334.909.113,43)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(53.970.699,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(34.000.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(51.600.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(9.211.420,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(54.420.780,56)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(11.345.204.915,82)
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(15.360.532.219,76)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	11.345.204.915,82
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	2.236.685.155,00
	Kas Dana BOSP	88.583,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(332.394.100,00)
	Kendaraan Bermotor Penumpang	59.201.250,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	332.394.100,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.655.892,85
INSPEKTORAT	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(10.824.295,00)
	Personal Computer	18.525.380,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.824.295,00
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.569.130,00)
Kec. Lebak Wangi	Aset Rusak Berat/Usang	(605.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kendaraan Bermotor Penumpang	209.798.750,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.200.000,00
	Personal Computer	(62.700,00)
	Komputer Unit Lainnya	(486.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(209.798.750,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(6.200.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	4.160.866,67
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	2.340.675,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.071.500,00
	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone	1.500,00
	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	62.700,00
Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	486.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>246.232.844.088,47</b>

## BAB VI PENGUNGKAPAN LAIN

### 6.1. Gambaran Umum Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan bagian dari Provinsi Banten yang mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dari catatan yang ada Pemerintah Kabupaten Serang telah mengalami 4 (empat) kali masa peralihan, yaitu:

- a. Pemerintah Kesultanan Banten yang berkuasa selama  $\pm$  290 tahun. Dimulai sejak Sultan Maulana Hasanudin yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816. Saat berdirinya Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan ditandai dengan penobatan Pangeran Sabakingking dengan Pangeran Hasanudin pada tanggal 1 Muharram 933 H / 8 Oktober 1526 M. yang kemudian dijadikan landasan penetapan sebagai hari jadi Kabupaten Serang.
- b. Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa selama  $\pm$  126 tahun yaitu pada tahun 1816 sampai dengan tahun 1942.
- c. Pemerintah Jepang yang berjalan selama 3.6 tahun yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945.
- d. Pemerintah Republik Indonesia dimulai dari Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dilingkup Propinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2000 tepatnya tanggal 30 Oktober 2000 dibentuklah Propinsi Banten dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten. Kabupaten Serang dan Kota yang ada di provinsi Banten hanya berjarak  $\pm$  70 Km dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, maka Kabupaten Serang berfungsi sebagai daerah Pemukiman, Industri, dan Pelabuhan. Luas wilayah secara administratif tercatat seluas 173.409 Ha. yang terbagi atas 29 wilayah Kec. dan 326 desa.

### 6.2. Aset Dalam Sengketa

#### 6.2.1. Bekas Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan

Bekas Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Jalan Tb. A. Khatib Kota Serang adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Serang yang status kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Tanggal 23 September 1986 dan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan Eks Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Serang. Bahwa Eks Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan dahulu dipergunakan oleh Saudara Tb. Rafe'i sebagai Kepala Jawatan Perikanan Darat berdasarkan Ijin Atasan namun setelah meninggal dunia. eks Rumah Dinas Tersebut sampai saat ini dipergunakan oleh Ahli Waris Alm .Tb. Rafe'i tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Serang telah mengirimkan surat Bupati Serang Nomor : 032/2919/BPKAD/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang penggunaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan maksud agar pihak ahli waris segera mengosongkan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang;
- Mengingat ahli waris tidak mengindahkan Surat Bupati tersebut, bahkan melalui kuasa hukumnya yaitu “ Adhikari Law Firm “ telah berkirim surat ke Bupati pada tanggal 5 Februari 2018 dengan isi tuntutan agar pemerintah daerah memberikan hak milik atas tanah dan bangunan tersebut, atau memberikan kompensasi sebagaimana yang sebelumnya pernah dituntut ahli waris kepada pemerintah daerah, maka atas dasar surat dari kuasa hukum ahli waris tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang kembali mengirimkan Surat Peringatan/Somasi Nomor :730/353/BPKAD/2018 tanggal 28 Maret 2018 kepada ahli waris Tb. Rafe’i yang menempati Eks. Rumah Dinas Perikanan tersebut untuk segera mengosongkan bangunan tersebut.
- Saat ini telah selesai proses pengadilan yang hasil keputusannya menguatkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Serang terhadap aset tersebut.

#### **6.2.2. Aset Tanah yang masih dalam Sengketa**

Aset Tanah pada Dinas Perhubungan yang diatas tanah tersebut berdiri stasiun repeater yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Status tanah diklaim oleh pihak lain yang memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Proses atas sengketa ini pemerintah kabupaten serang memohon untuk membatalkan sertifikat tanah tersebut pada BPN Pandeglang.

Aset tanah pada Dinas Pendidikan (SD dan SMP) yang terletak di Kec. Mancak, Cikande, Desa Kosambi Dalem, Kec. Petir, Kec. Anyar. Permasalahan Aset sekolah tersebut antara lain ada yang menggugat pihak lain, terploting pada sertifikat dan HGU pihak lain dan penyerobotan yang prosesnya masih tahap mediasi dengan pihak lain.

Terkait Tanah SDN Petir 1 tanah tersebut telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Nama/Kode Barang Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan/1.3.1.01.01.04.002/930, Register Nomor 0001, Luas 3.718 m2, Tahun perolehan 1902, Alamat Jalan Raya Serang – Petir KM 16 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang, cara perolehannya yaitu cara perolehan lainnya ( dari Tanah Negara).

Pada tahun 2024 tanah SDN Petir 1 digugat oleh SAYU Dkk yaitu para ahli waris dari Ny SAPIAH yang mengklaim bahwa tanah yang digunakan oleh SDN Petir 1 adalah milik Ny SAPIAH. Gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor perkara 102/Pdt.G/2024/PN SRG.

Sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 telah dilakukan Sidang sebanyak 18 kali, Sidang ke-1 pada tanggal 29 Juli 2024 dan Sidang ke-18 pada tanggal 04 Februari 2025.

Aset Tanah pada Dinas Koperasi dan Perdagangan berupa Aset Tanah alun-alun Anyar dengan Objek: Persil 5b/d/II, Kohir C No. 613 luas 8.810 m<sup>2</sup> (Sertifikat Hak Pakai No. 12 Desa Anyar, Kec. Anyar. Penggunaan: Alun-alun Anyar) yang permasalahannya digugat oleh pihak lain yang prosesnya sudah inkrah dengan adanya dua putusan pada objek yang sama. Pemerintah daerah memenangkan putusan sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) sedangkan pihak lain menang putusan sampai tingkat kasasi sehingga pemerintah daerah dan pihak lain tidak bisa mengeksekusi alun-alun Anyar. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah harus menguji kebenaran dan keabsahan girik yang ada pada penggugat ke mabes polri.

Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten yg mana berdasarkan putusan banding No. 60/PDT/2008/PT.BTN, Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding. Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan kasasi ke MA dan berdasarkan putusan kasasi No. 2855K/PDT/2008, permohonan kasasi ditolak. Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan Peninjauan Kembali ke MA dan dg putusan Peninjauan Kembali No. 799PK/Pdt/2012, permohonan Peninjauan Kembali ditolak. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan permohonan fatwa MA.

Aset Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup terletak di kampung tegal sapat desa nagara padang Kec. Petir seluas 2.561m<sup>2</sup> terdapat permasalahan dalam pengadaan dan pembayarannya, atas kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Polda Banten. Pengadaan aset tanah tersebut pada tahun 2021 sebesar Rp461.123.000,00 yang merupakan uang muka dan biaya umum selanjutnya pengadaan pada tahun 2022 sebesar Rp1.146.662.000,00 yang merupakan pembayaran lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) zona selatan.

Aset Tanah Eks Pasar Kramatwatu dengan Objek: Tanah seluas 1.844 m<sup>2</sup> dg Sertipikat Hak Pakai No. 10 a.n. Pemkab Serang asal SHM No. 560 a.n. A. Ridwan (tanah girik C.628 persil 21 Blok Bengkel Desa Kramatwatu luas 2.200 m<sup>2</sup> a.n Gendut bin Khalis).

Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan banding dan berdasarkan putusan banding No. 34/PDT/2014/PT.BTN, Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan PN Serang (Pemerintah Kabupaten Serang kalah) Kemudian Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan kasasi ke MA dan dengan putusan No. 2610 K/PDT/2014, MA membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten yg menguatkan putusan PN Serang, serta menolak eksepsi Tergugat (Ismail Djaenul), gugatan Penggugat (Pemerintah Kabupaten Serang) tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi (Ismail Djaenul) tidak dapat diterima.

### 6.3. Peningkatan Jalan Desa

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Serang melakukan peningkatan jalan pada sebelas ruas jalan desa dan telah ditetapkan menjadi jalan Kabupaten dengan Keputusan Bupati Serang Nomor : 620/Kep.301-Huk.DPUPR/2023, dan atas asset tersebut sudah tercatat dalam Neraca Per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 148**  
**Rincian Peningkatan Jalan Desa**

No	Nama paket pekerjaan	keterangan
1	Rekonstruksi Jalan Desa Taman Sari Kecamatan Baros	Jalan Kabupaten (Sukacai - Cigegeer)
2	Rekonstruksi Jalan Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang	Jalan Kabupaten (Kubang Puji - Kubang Bahad)
3	Rekonstruksi Jalan Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara	Jalan Kabupaten (Wadas - Lambang Sari)
4	Rekonstruksi Jalan Desa Leuwi Limus Kecamatan Cikande	Jalan Kabupaten (Raab - Situ Terate)
5	Rekonstruksi Jalan Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal	Jalan Kabupaten (Cilayang - Cadas Ngampar)
6	Rekonstruksi Jalan Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal	Jalan Kabupaten (Sukaratu - Bantar Panjang)
7	Rekonstruksi Jalan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka	Jalan Kabupaten (Pasir Sirih - Sindanglaya)
8	Rekonstruksi Jalan Desa Rancasanggal Kecamatan Cinangka	Jalan Kabupaten (Rancasanggal - Cikolelet)
9	Rekonstruksi Jalan Desa Citaman Kecamatan Ciomas	Jalan Kabupaten (Pondok Kahuru - Citaman)
10	Rekonstruksi Jalan Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan	Jalan Kabupaten (Cidahu - Pasir Buyut)
11	Rekonstruksi Jalan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa	Jalan Kabupaten (Kebon Lontar - Alang-alang)

### 6.4. Penggunaan Aplikasi Pada Tahun 2024

Berdasarkan amanat Kementerian Dalam Negeri seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tanpa terkecuali Kabupaten Serang. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Serang telah menggunakan SIPD khususnya untuk Penyusunan APBD 2024 dan Pelaksanaan APBD 2024.

Proses Penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD dilakukan dari mulai penyusunan RKA, Rancangan APBD sampai pengesahan APBD baik untuk APBD murni, pergeseran sampai dengan perubahan. Sedangkan untuk pelaksanaan APBD aplikasi SIPD digunakan untuk pelaksanaan pendapatan yang dimulai dari input penerimaan dan setoran pendapatan serta pelaksanaan belanja melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS.

Namun untuk pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dikarenakan masih terdapat berbagai kendala dalam aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Serang masih menggunakan Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan). Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SIMRAL dilakukan dengan memindahkan APBD 2024 dan Pelaksanaan

APBD 2024 dari aplikasi SIPD kepada aplikasi SIMRAL. Pemindahan data ini melalui proses migrasi maupun input ulang data-data yang terdapat pada SIPD.

Proses penyusunan jurnal penyesuaian pada seluruh entitas akuntansi seluruhnya dilakukan melalui aplikasi SIMRAL sampai dengan pengkonsolidasian Laporan Keuangan SKPD sampai menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 6.5. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Pemerintah Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2024 telah menerima Aset tetap berupa PSU dari 11 pengembang perubahan, 9 diantaranya telah tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2024, dan 2 penyerahan PSU belum teratat dalam neraca disebabkan belum terdapat nilai asetnya, adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 149**  
**Aset Tetap Berupa PSU Yang Belum Terdapat Nilai Asetnya Tahun 2024**

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Desa	Kecamatan	No. BAST	Tanggal	Aset Berupa	Keterangan
1.	PT. Esaputra Kharisma	Griya Serang Kharisma	Pelamunan	Kramatwatu	648/01/BAST-PSU/DPRKP/2023	13 Januari 2023	Tanah Jalan, Tanah Saluran dan Lahan Tempak Pemakaman Umum	Tercatat
2.	PT. Pondok Hijau	Pondok Dewata Cikande	Cikande	Cikande	648/02/BASTPSU/DPRKP/2023	25 Januari 2023	Lahan Tempak Pemakaman Umum	Belum Tercatat
3	PT. Fiqri Putra Pertama	Bumi Kendayakan Permai	Nagara	Kibin	648/03/BAST-PSU/DPRKP/2024	18 Januari 2024	Jalan Tanah, Tanah Saluran, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Olahraga dan Lahan Tempak Pemakaman Umum.	Tercatat
4	PT. Esaputra Kharisma	Griya Serang Kharisma	Pelamunan	Kramatwatu	648/BAST-PSU/DPRKP/2023	13 Januari 2023	Tanah Jalan, Tanah Saluran dan Lahan Tempak Pemakaman Umum	Tercatat
5	PT. Indo Graha Lestari	Bumi Nagara Lestari	Nagara	Kibin	648/01/BAST-PSU/DPRKP/2024	5 Januari 2024	Tanah Jalan, Masjid, Mushola dan Taman, Danau, Taman Bermain, RTH,	Tercatat



No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Desa	Kecamatan	No. BAST	Tanggal	Aset Berupa	Keterangan
							Parkiran Ruko	
6	PT. Rejeki Agung Sedaya Grup	Pesona Sindangheula	Sindangheula	Pabuaran	648/02/BAST-PSU/DPRKP/2024	18 Januari 2024	Tanah Jalan, Drainase, Ruang Terbuka Hijau	Tercatat
7	PT. Pradipta Ratnapratala	Citra Garden BMW	Wayanasa	Kramatwatu	648/06/BAST-PSU/DPRKP/2024	30 April 2024	Tanah Jalan, Drainase, Pertamanan/Ruang Terbuka Hijau	Tercatat
8	PT. Atapmas Potensa	Taman Krakatau	Waringinkurung	Waringinkurung	648/BAST-PSU/DPRKP/2024	30 April 2024	Tanah Jalan, Drainase, Masjid, Taman, Sarana Pendidikan	Tercatat
9	PT. Bumi Cipta Rahayu	Kampung Bahagia	Kendayakan	Kragilan	648/16/BAST-PSU/DPRKP/2024	6 November 2024	Tanah Jalan, Saluran, Ruang Terbuka Hijau, Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
10	PT. Surya Abadi Propertindo	Griya Sukadalem Indah	Sukadalem	Waringinkurung	648/17/BAST-PSU/DPRKP/2024	6 November 2024	Tanah Jalan, Drainase, Tempat Pembuangan Sampah, Mushola, Sarana Olahraga, Taman dan RTH, Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
11	PT. Jasasurya Tjandra	Cisait Puri Pratama	Cisait	Kragilan	648/18/BAST-PSU/DPRKP/2024	6 November 2024	Tanah Jalan, Saluran dan Gorong-Gorong, Fasilitas Sosial dan Sarana Olahraga, Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
12	-	Harjatani Heritage Estate	Margatani	Kramatwatu	-	-	Tanah Jalan, Saluran dan Gorong-Gorong, Sarana Peribadatan dan Pendopo, Sarana	Tercatat

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Desa	Kecamatan	No. BAST	Tanggal	Aset Berupa	Keterangan
							Pertamanan, RTH/ Fasilitas Sosial, Pos Jaga, Gardu Listrik	

#### 6.6. Tanah hasil sita tindak pidana korupsi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst atas tindak pidana korupsi tanggal 17 Januari 2023, pada salah satu amar putusannya, dinyatakan bahwa satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00112 seluas 120.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Serang. Satu bidang tanah tersebut merupakan tanah reklamasi atas HPL 00163 milik Pemerintah Kabupaten Serang dimana di atasnya telah dibangun bangunan Workshop 1, 4 dan 5, jalan beton dan pagar pembatas oleh PT WSBP.

Atas penyerahan tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Serang belum mencatat ke dalam laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan pengukuran dan penentuan batas wilayah tanah HPL 00163 seluas 120.000 m<sup>2</sup> bersama dengan BPN Kabupaten Serang. Pengukuran dan penentuan batas wilayah tanah dilakukan untuk menentukan bangunan yang berada di dalam area tanah HPL dan kemudian dilakukan pengukuran dimensi struktur bangunan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan ditentukan luas dan nilai bangunan yang berada di atas tanah HPL 00163 yang kemudian dicatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Serang.

#### 6.7. Pengungkapan aset LKM Ciomas

Berdasarkan laporan dari Tim Likuidasi PT. LKM Ciomas diketahui bahwa per 31 Desember 2024 PT. LKM Ciomas (dalam likuidasi) memiliki aset sebesar Rp10.491.873.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Lancar
    - a. Kredit Yang diberikan Per 31 Desember 2024 Rp 4.498.209.834,00
    - b. Kas di Bank BJB Rp 407.325,00
  2. Aset Tidak Lancar
    - a. Tanah (298 M2) Nilai Buku Rp 72.500.000,00
    - b. Gedung (Nilai Buku) Rp 211.081.376,00
    - c. Kendaraan Roda dua 3 Unit (Nilai Buku):
      - 1) Sepeda Motor Honda CB 150R SE 2018 Rp 7.491.250,00
      - 2) Sepeda Motor Honda Sonic 150R SE 2018 Rp 6.080.217,00
      - 3) Sepeda Motor Honda CB 150R SE 2018 Rp 9.929.065,00
- Jumlah Aset Lancar dan Tidak Lancar Rp 4.805.699.067,00

Aset Para Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan:

a. A. Tamami ( Sudah Bebas )	Rp	0,00
b. H. Tb. Boyke ( Sudah Inkraht PN)	Rp	333.620.000,00
c. Najarudin ( Sudah Inkraht PN)	Rp	495.167.000,00
d. Neneng Nurchasanah	Rp	4.857.387.636,00
Jumlah Aset Terdakwa	Rp	5.686.174.636,00
Jumlah Aset	Rp	10.491.873.703,00

Atas aset-aset tersebut Pemerintah Kabupaten Serang belum dapat mencatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang karena masih ditangani oleh Tim Likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Serang melakukan koordinasi dengan Tim Likuidasi dalam upaya pengalihan aset-aset tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Serang.

Mengenai sisa kewajiban atas likuidasi PT LKM Ciomas yang masih tercatat sebesar Rp1.891.411.509 terdiri dari kewajiban kepada bank BJB sebesar Rp809.912.131 dan kepada PT BPR (bank Serang) sebesar Rp1.081.499.378 telah dianggarkan pada tahun 2025 pada belanja tak terduga untuk penyelesaiannya.

#### 6.8. Pengungkapan PT Serang Berkah Mandiri

Perhitungan laba/rugi pada SBM tahun 2024 belum dapat dilakukan dikarenakan sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan SBM belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2024. SBM baru melakukan perikatan dengan KAP Roni Pupung untuk melakukan audit Laporan Keuangan SBM tahun 2022, 2023, dan 2024 pada 28 April 2025 berdasarkan Nomor Surat Perikatan Kerja (SPK) Nomor: 180/RP/SBMP/SP/RB/IV/2025. Jangka waktu pelaksanaan audit ini maksimal 60 hari kalender dimulai sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan 27 Juni 2025.



## BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup perlu dikemukakan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang TA 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang TA 2025 ini diharapkan dapat lebih membantu menjelaskan kondisi dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Serang TA 2025.

Serang, Mei 2026

**BUPATI SERANG**



*[Handwritten signature]*  
**Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.**